



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

Februari 2024





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

Februari 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

Visi

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju”

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :



Kejujuran dan integritas
(*trust and integrity*)



Profesionalisme
(*professionalism*)



Keunggulan
(*excellence*)



Mengutamakan
kepentingan umum
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim
(*coordination and teamwork*)
yang belandaskan keluhuran
nilai-nilai agama (religi).



Visi & Misi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi Februari 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, dimana pada edisi Februari 2024 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan IV 2023, keseluruhan tahun 2023, triwulan I 2024 serta prospek keseluruhan tahun 2024.

Pada triwulan IV 2023, perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh tinggi sebesar 4,85% (yoy), meskipun sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,93% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi bersumber dari peningkatan kinerja Konsumsi LNPRT dan Investasi. Adapun Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor tumbuh melambat masing-masing disebabkan oleh penurunan konsumsi untuk transportasi dan komunikasi serta penurunan kinerja ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Sedangkan, dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan yang tinggi bersumber dari LU Jasa Keuangan, LU Konstruksi, dan LU Industri Pengolahan. Adapun kinerja LU Perdagangan dan LU Infokom tumbuh melambat sejalan dengan perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian DKI Jakarta secara keseluruhan tahun 2023 tetap tumbuh tinggi sebesar 4,96%, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 5,25%. Tetap tumbuh tingginya ekonomi Jakarta juga disertai dengan laju inflasi yang semakin terkendali yaitu 2,28% (yoy) pada triwulan IV 2023, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional.

Ke depan, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh meningkat dalam kisaran 4,8%-5,6%, yang utamanya didukung oleh solidnya permintaan domestik. Adapun inflasi diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran yang lebih rendah $2,5 \pm 1\%$. Perkembangan tersebut seiring cuaca yang lebih kondusif dan sinergi pengendalian inflasi TPID, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, SKPD Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kalangan pelaku usaha, narasumber dalam berbagai Focus Group Discussion dan pihak-pihak lainnya, atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, Februari 2024
Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

ttd.

Arlyana Abubakar
Direktur Eksekutif



Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XIV
Tabel Indikator	XVIII
Tim Penyusun	103

Bab I	
Perekonomian Global & Nasional	1
A. Perekonomian Global	3
B. Perekonomian Nasional	3
C. Bauran Kebijakan Bank Indonesia	6

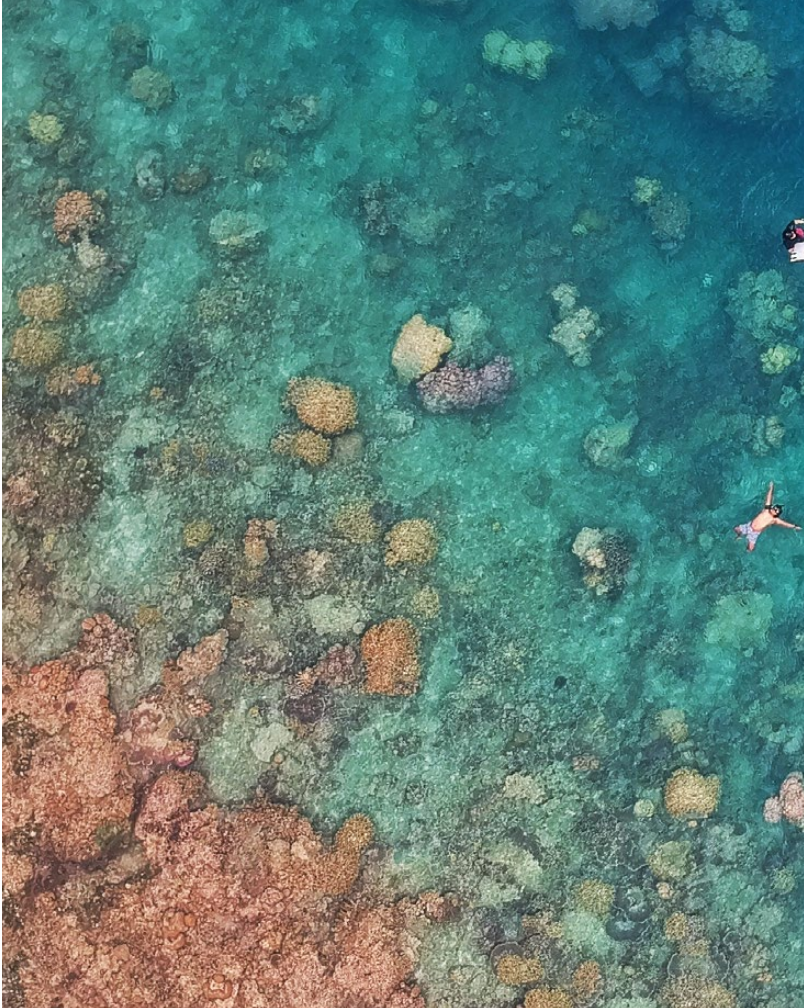
Bab II	
Ekonomi Makro Regional	7
A. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2023	9
B. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023	18
C. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024	22

BOKS 1	
Perkembangan Properti di DKI Jakarta	27

Bab III	
Keuangan Pemerintah	29
A. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi DKI Jakarta 2023	31
B. Realisasi Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	31
C. Belanja Daerah APBD	33
D. Pembiayaan Daerah APBD	34
E. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga di DKI Jakarta	34

Bab IV	
Inflasi	39
A. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan IV 2023	41
B. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan I 2024	44
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan IV 2023	47

BOKS 2	
Tantangan dan Strategi Pengendalian Inflasi 2024: Faktor Eksternal dan Pergeseran Komoditas Terkait SBH 2022	49





Bab V

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

	51
A. Perkembangan Kinerja Bank Umum	53
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi	58
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga	63
D. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	66
E. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Lainnya	68

Bab VI

Sistem Pembayaran

	69
A. Kondisi Umum	71
B. Perkembangan Sistem Pembayaran di Provinsi DKI Jakarta	71
C. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	74

BOKS 3

Strategi Digitalisasi Jakarta : *Lesson Learned* dan Penguatan Kedepan

79

Bab VII

Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

	81
A. Ketenagakerjaan	83
B. Kemiskinan	86
C. Indeks Ketimpangan Gender	89
D. Upah Tenaga Kerja	90

Bab VIII

Prospek Perekonomian

	91
A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional	93
B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	95

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha	4
Tabel 3.1	Perkembangan Pagu APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta	36
Tabel 3.2	Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2023	37
Tabel 3.3	Perkembangan Pagu Belanja APBN di Provinsi DKI Jakarta	38
Tabel 3.4	Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan IV 2023	38
Tabel 5.1	Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta	53
Tabel 5.2	Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan	60
Tabel 5.3	Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi	61
Tabel 6.1	Perkembangan Transaksi Uang Kartal	71
Tabel 6.2	Persebaran KUPVA BB	74
Tabel 6.3	Perkembangan Transaksi PJP LR	75
Tabel B.3.1	Detail Pilar Digital Competitiveness Index (DCI) Jakarta (skala 0-100)	78
Tabel B.3.2	Data QRIS Kepulauan Seribu 2023	79
Tabel 7.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	83
Tabel 7.2	Perkembangan Status Pekerjaan Utama	84
Tabel 8.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))	93
Tabel 8.2	Proyeksi PDB Nasional	95
Tabel 8.3	Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2024	99

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV 2023 (% , yoy)	4
Gambar 1.2	Peta Inflasi Daerah Bulan Januari 2024 (% yoy)	5
Gambar B2.1	Bobot Nilai Konsumsi Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan	49

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Inflasi Global	3	Grafik 2.26	Pertumbuhan Kredit Sektor Perdagangan DKI Jakarta	15
Grafik 1.2	Aliran Modal ke Negara Berkembang	3	Grafik 2.27	Perkembangan Nilai Impor Bahan Kimia Organik DKI Jakarta	15
Grafik 1.3	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.28	Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku DKI Jakarta	15
Grafik 1.4	<i>Purchasing Manager's Index</i> (PMI) Manufaktur	5	Grafik 2.29	Perkembangan SBT Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri	15
Grafik 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional	9	Grafik 2.30	Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan DKI Jakarta	15
Grafik 2.2	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Komponen Pengeluaran	9	Grafik 2.31	Perkembangan SBT LU Jasa Keuangan, Penyaluran Kredit, dan DPK DKI Jakarta	16
Grafik 2.3	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	10	Grafik 2.32	Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektoral DKI Jakarta	16
Grafik 2.4	Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE)	10	Grafik 2.33	Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di DKI Jakarta	16
Grafik 2.5	Perkembangan Penjualan Mobil di DKI Jakarta	10	Grafik 2.34	Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi	16
Grafik 2.6	Konsumsi Listrik Sosial DKI Jakarta	10	Grafik 2.35	Perkembangan Kunjungan Wisman di DKI Jakarta	17
Grafik 2.7	Pertumbuhan Belanja Utama Kementerian/Lembaga di Jakarta	11	Grafik 2.36	Perkembangan Penggunaan Transportasi Mobil <i>Online</i> di DKI Jakarta	17
Grafik 2.8	Realisasi Belanja APBD	11	Grafik 2.37	Perkembangan Penggunaan Transportasi Motor <i>Online</i> di DKI Jakarta	18
Grafik 2.9	Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha di DKI Jakarta	11	Grafik 2.38	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta	18
Grafik 2.10	Perkembangan Penyaluran Kredit Investasi di DKI Jakarta	11	Grafik 2.39	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Provinsi-provinsi di Jawa	18
Grafik 2.11	Perkembangan Volume Impor Barang Modal DKI Jakarta	12	Grafik 2.40	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	18
Grafik 2.12	Pertumbuhan Net Ekspor Total DKI Jakarta	12	Grafik 2.41	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Sisi Pengeluaran	18
Grafik 2.13	Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta	12	Grafik 2.42	Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini	19
Grafik 2.14	Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang	12	Grafik 2.43	Perkembangan Penjualan Eceran	19
Grafik 2.15	Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	13	Grafik 2.44	Perkembangan Penjualan E-commerce	19
Grafik 2.16	Perkembangan Impor berdasarkan Jenisnya	13	Grafik 2.45	Perkembangan Ekspor Mobil CBU	20
Grafik 2.17	Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama	13	Grafik 2.46	Perkembangan Wisman	20
Grafik 2.18	Pertumbuhan LU Akmamin dan Transgud	13	Grafik 2.47	Pertumbuhan Volume Impor Jakarta	20
Grafik 2.19	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan IV 2023	13	Grafik 2.48	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta 2023	21
Grafik 2.20	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha	14	Grafik 2.49	Pertumbuhan LU Utama DKI Jakarta 2023	21
Grafik 2.21	Pertumbuhan LU Perdagangan dan Ekspor DKI Jakarta Tw IV 2023	14	Grafik 2.50	Perkembangan Volume Impor Bahan Baku	21
Grafik 2.22	Perkembangan Nilai Ekspor Unggulan DKI Jakarta	14	Grafik 2.51	Perkembangan Produksi Mobil di DKI Jakarta	21
Grafik 2.23	Perkembangan Penjualan Mobil di DKI Jakarta	14	Grafik 2.52	Survei Konsumen (Perkembangan IKK, IEK, dan IKE)	22
Grafik 2.24	Perkembangan Survei Penjualan Eceran di DKI Jakarta	15	Grafik 2.53	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di Jakarta	22
Grafik 2.25	<i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik	15			

Grafik 2.54	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran	23
Grafik 2.55	Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta	23
Grafik 2.56	Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha (SKDU)	24
Grafik 2.57	Perkembangan Kredit Investasi Korporasi	24
Grafik 2.58	Perkembangan Ekspor Mobil CBU	24
Grafik 2.59	Perkembangan Ekspor Mobil CKD	24
Grafik 2.60	Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan	24
Grafik 2.61	Perkembangan Nilai Impor Mobil (Otomotif)	25
Grafik 2.62	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta	25
Grafik 2.63	Perkembangan IKK, IKE, dan IEK	25
Grafik 2.64	Perkembangan SBT Industri Pengolahan	25
Grafik 2.65	Perkembangan Produksi Mobil di DKI Jakarta	25
Grafik 2.66	Perkembangan Penyaluran Kredit Industri Pengolahan	26
Grafik 2.67	Realisasi Pengadaan Semen di DKI Jakarta	26
Grafik 2.68	Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi	26
Grafik B1.1	Perkembangan Harga Sewa dan Harga Jual Properti Komersial di DKI Jakarta	27
Grafik B1.2	Perkembangan Permintaan Properti Komersial di DKI Jakarta	27
Grafik B1.3	Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek	28
Grafik B1.4	Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta	28
Grafik 3.1	Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah	31
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw IV 2023	31
Grafik 3.3	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah	31
Grafik 3.4	Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer	32
Grafik 3.5	Pertumbuhan Komponen PAD	32
Grafik 3.6	Pangsa Realisasi Pendapatan Komponen Pajak Daerah Tw IV 2023	32
Grafik 3.7	Perkembangan PBB DKI Jakarta	32
Grafik 3.8	Perkembangan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan	32
Grafik 3.9	Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor	32
Grafik 3.10	Perkembangan BBN-KB, BBKB, LU Perdagangan, dan Penjualan Mobil	33
Grafik 3.11	Perkembangan BPHTB dan LU Real Estate DKI Jakarta	33

Grafik 3.12	Realisasi Kumulatif Belanja Daerah	33
Grafik 3.13	Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal	33
Grafik 3.14	Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya	34
Grafik 3.15	Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi	34
Grafik 3.16	Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta	35
Grafik 3.17	Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta	35
Grafik 3.18	Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)	35
Grafik 3.19	Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)	35
Grafik 4.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	41
Grafik 4.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	41
Grafik 4.3	Perkembangan Harga Beras	42
Grafik 4.4	Perkembangan Harga Cabai Merah	42
Grafik 4.5	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	42
Grafik 4.6	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	42
Grafik 4.7	Perkembangan Stok Telur Ayam Ras	43
Grafik 4.8	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	44
Grafik 4.9	Inflasi Kelompok Pengeluaran Januari 2024	44
Grafik 4.10	Perkembangan Inflasi Umum dan Bahan Makanan	45
Grafik 4.11	Perkembangan Harga Cabai Merah	45
Grafik 4.12	Perkembangan Harga Cabai Rawit	45
Grafik 4.13	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	45
Grafik 4.14	Perkembangan Harga Beras	45
Grafik 4.15	Perkembangan Stok Beras	45
Grafik 4.16	Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran	46
Grafik 4.17	Inflasi Jakarta dan Nasional	47
Grafik 5.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	53
Grafik 5.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	54
Grafik 5.3	Komposisi DPK Jakarta	54
Grafik 5.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	54
Grafik 5.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	54

Daftar Grafik

Grafik 5.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	55	Grafik 5.35	Indeks Harga Saham Gabungan BEI	63
Grafik 5.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	55	Grafik 5.36	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	63
Grafik 5.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	55	Grafik 5.37	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama	63
Grafik 5.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	55	Grafik 5.38	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	64
Grafik 5.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	56	Grafik 5.39	Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	64
Grafik 5.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	56	Grafik 5.40	Komposisi Kredit RT dan Non RT	64
Grafik 5.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	56	Grafik 5.41	Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	64
Grafik 5.13	Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta	56	Grafik 5.42	NPL Kredit Rumah Tangga	65
Grafik 5.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	57	Grafik 5.43	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65
Grafik 5.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	57	Grafik 5.44	Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65
Grafik 5.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	57	Grafik 5.45	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	65
Grafik 5.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	58	Grafik 5.46	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	65
Grafik 5.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	58	Grafik 5.47	Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan	65
Grafik 5.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	58	Grafik 5.48	Komposisi DPK	65
Grafik 5.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	58	Grafik 5.49	Komposisi DPK Rumah Tangga	66
Grafik 5.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	59	Grafik 5.50	Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta	66
Grafik 5.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	59	Grafik 5.51	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	66
Grafik 5.23	Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta	59	Grafik 5.52	UMKM Berdasarkan Skala Usaha	66
Grafik 5.24	Penjualan Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.54	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama	67
Grafik 5.25	Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.53	Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	67
Grafik 5.26	Likuiditas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.55	NPL Kredit UMKM	67
Grafik 5.27	Produktivitas Korporasi DKI Jakarta	60	Grafik 5.56	NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	67
Grafik 5.28	Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta	61	Grafik 6.1	Perkembangan Inflow, Outflow, dan Net Flow Uang Kartal	71
Grafik 5.29	Pertumbuhan kredit Korporasi	61	Grafik 6.2	Inflow, Outflow, dan Net Flow per Pecahan	71
Grafik 5.30	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	62	Grafik 6.3	Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	72
Grafik 5.31	NPL pada Sektor Korporasi	62	Grafik 6.4	Perkembangan Nilai Transaksi RTGS	72
Grafik 5.32	Perkembangan DPK Korporasi	62	Grafik 6.5	Perkembangan Volume Transaksi RTGS	72
Grafik 5.33	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	62	Grafik 6.6	Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI	72
Grafik 5.34	Komposisi DPK Korporasi	62			

Grafik 6.7	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	73
Grafik 6.8	Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet serta Jumlah Mesin ATM	73
Grafik 6.9	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet dan ATM	73
Grafik 6.10	Perkembangan Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran	73
Grafik 6.11	Pangsa Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran	73
Grafik 6.12	Perkembangan merchant QRIS	74
Grafik 6.13	Pangsa merchant QRIS	74
Grafik 6.14	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	74
Grafik 6.15	Market Share Valuta Asing	74
Grafik B3.1	PDRB Jakarta (% , yoy)	77
Grafik B3.2	<i>Digital Competitiveness Index</i> (DCI) Jakarta (skala 0-100)	77
Grafik B3.3	Pilar DCI Jakarta (skala 0-100)	78
Grafik B3.5	Komposisi Kunjungan Kepulauan Seribu	78
Grafik B3.4	Total Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu	78
Grafik B3.6	<i>Digital Nomad Island</i> Kepulauan Seribu	78
Grafik 7.1	Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	83
Grafik 7.2	Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja	83
Grafik 7.3	Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja	84
Grafik 7.4	Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	84
Grafik 7.5	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	84
Grafik 7.6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	84
Grafik 7.7	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)	85
Grafik 7.8	Produktivitas TK Regional Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)	85
Grafik 7.9	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	85
Grafik 7.10	Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja	85
Grafik 7.11	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	85

Grafik 7.12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta	86
Grafik 7.13	Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional	86
Grafik 7.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	86
Grafik 7.15	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	86
Grafik 7.16	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta	86
Grafik 7.17	Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya	86
Grafik 7.18	Pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan dan Inflasi Subkelompok Makanan	87
Grafik 7.19	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	87
Grafik 7.20	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	87
Grafik 7.21	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	87
Grafik 7.22	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	87
Grafik 7.23	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	87
Grafik 7.24	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	88
Grafik 7.25	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	88
Grafik 7.26	IPM Jakarta dan Nasional	88
Grafik 7.27	Pertumbuhan IPM DKI Jakarta	88
Grafik 7.28	IPM Kabupaten/Kota di DKI Jakarta	88
Grafik 7.29	IKG Jakarta dan Nasional	89
Grafik 7.31	IKG Menurut Provinsi	89
Grafik 7.30	IKG DKI Jakarta Menurut Kab/Kota	89
Grafik 7.33	UMP Provinsi di Indonesia	90
Grafik 7.32	UMP Provinsi di Indonesia	90
Grafik 8.1	Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia	93
Grafik 8.2	Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral di Dunia	93
Grafik 8.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2024	95
Grafik 8.4	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2024	97
Grafik 8.5	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2024	97
Grafik 8.6	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2024	98

Ringkasan Eksekutif

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada tahun 2024, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,0% dan 2,8%. Perbaikan terutama ditopang oleh kinerja ekonomi negara Amerika Serikat (AS) dan India yang lebih kuat sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi dunia. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga berpotensi mengganggu rantai pasokan, mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. Yield US Treasury kembali meningkat sejalan dengan meningkatnya premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar dan mata uang di negara emerging market.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh lebih baik dari prakiraan, yakni tumbuh sebesar 5,05% (yoy). Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh kenaikan ekspor, peningkatan investasi bangunan, dan dampak positif Pemilu. Inflasi IHK Januari 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, yakni sebesar 2,57% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,61% (yoy). Perkembangan inflasi yang tetap terjaga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024.

Perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,62% terhadap nasional, pada triwulan IV 2023 tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 4,85% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,93%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih tetap tumbuh tinggi ditopang oleh meningkatnya investasi, konsumsi Pemerintah dan konsumsi LNPRT. Meningkatnya investasi terutama didorong oleh investasi bangunan seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Adapun konsumsi Pemerintah juga mengalami perbaikan sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah di akhir tahun terutama belanja modal yang bersumber melalui APBN. Konsumsi LNPRT juga tumbuh tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik jelang pemilu 2024. Di sisi lain, konsumsi RT dan ekspor tumbuh melambat yang masing-masing bersumber dari penurunan konsumsi untuk transportasi dan komunikasi serta penurunan kinerja ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan yang tinggi bersumber dari kinerja positif LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Industri Pengolahan. Adapun LU yang menjadi penahan yaitu melambatnya kinerja LU Perdagangan dan dan LU Infokom sejalan dengan perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Selain itu, perlambatan juga bersumber dari penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan yang disebabkan oleh perlambatan transportasi barang seiring penurunan kinerja ekspor dan penurunan kinerja LU Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman seiring perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.

Ringkasan Eksekutif

Secara keseluruhan tahun, kinerja ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tumbuh mencapai 4,96% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,25% (yoy). Pertumbuhan yang masih tinggi pada tahun 2023 terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali konsumsi pemerintah yang masih berkontraksi. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2023 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,05% (yoy) didorong oleh perbaikan permintaan domestik, kemudian diikuti oleh ekspor yang tumbuh sebesar 7,67% (yoy), investasi PMTB sebesar 3,89% (yoy) seiring meningkatnya realisasi investasi swasta dan pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Infokom, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan bobot terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023 masing-masing sebesar 15,69%, 13,74%, 11,36%, 10,82%, dan 10,56%. Pada tahun 2023, terdapat tiga LU utama yang mencatatkan peningkatan kinerja yakni LU Infokom, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan masing-masing tumbuh 7,45% (yoy), 5,39% (yoy), dan 2,50% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang masing-masing sebesar 6,96% (yoy), 1,21% (yoy), dan 1,69% (yoy). Adapun LU yang menjadi penahan pertumbuhan yaitu LU Perdagangan, LU Infokom, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akumulator.

Memasuki triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh lebih baiknya Konsumsi RT, Konsumsi LNPRT, dan Konsumsi Pemerintah. Lebih baiknya Konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli yang turut didukung oleh peningkatan UMP dan gaji ASN, serta semakin maraknya pelaksanaan MICE dan event skala internasional di Jakarta. Sejalan dengan berlangsungnya safari politik dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, aktivitas politik terus meningkat sehingga mendorong kinerja Konsumsi LNPRT. Perbaikan postur belanja APBN dan APBD, akselerasi belanja barang dan jasa, serta belanja bansos untuk mendukung Pemilu turut mendorong perbaikan kinerja Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja investasi diperkirakan akan tertahan seiring perilaku *wait and see* investor pada periode Pemilu. Lebih lanjut, kinerja ekspor juga diperkirakan tertahan sejalan dengan kondisi geopolitik terutama konflik Laut Merah, isu uji keselamatan kendaraan yang mempengaruhi berhentinya produksi dan ekspor industri otomotif ke Jepang, serta terbatasnya kuota ekspor ke Meksiko. Lebih lanjut, LU Perdagangan pada triwulan I 2024, diperkirakan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan prakiraan peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang didorong oleh semakin meningkatnya mobilitas didukung oleh semakin meningkatnya penyelenggaraan MICE baik skala nasional maupun internasional di DKI Jakarta. Lebih lanjut, prakiraan peningkatan kinerja LU Perdagangan juga seiring dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung pada triwulan I 2024, peningkatan penghasilan yang sejalan dengan peningkatan UMP dan gaji ASN juga turut mendorong optimisme ini. Namun demikian, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi diperkirakan melambat yang masing-masing disebabkan oleh tensi geopolitik yang semakin memanas khususnya di jalur distribusi di Laut Merah, sejalan pula dengan permintaan ekspor yang diperkirakan melambat, serta perlambatan pertumbuhan Investasi yang dipengaruhi oleh *wait and see* investor pada periode pemilu, serta bulan Ramadan yang sudah dimulai pada triwulan I 2024 yang diperkirakan akan berdampak terhadap pengurangan jam kerja.

Ringkasan Eksekutif

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD-P 2023, berdasarkan pengesahan DPRD, ditargetkan masing-masing sebesar Rp 70,66 Triliun dan Rp 72,14 Triliun, lebih rendah dari APBD murni 2023 yang masing-masing sebesar Rp 74,38 Triliun dan Rp 74,61 Triliun. Pada tahun 2023, secara kumulatif, capaian realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,34% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2022. Sedangkan, dari sisi belanja, capaian realisasi Belanja Daerah mencapai 92,45% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 84,32% dari pagu APBD-P 2022.

Kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 tetap kuat. Hal ini didorong oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif pada komponen PPh Non Migas, PPN dan PPNBM, PBB, Pajak Lainnya, Cukai, Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN serta Pendapatan BLU. Dari sisi Belanja K/L di DKI Jakarta, pada triwulan IV 2023, juga mencatatkan kinerja baik. Hal ini didukung oleh peningkatan pada komponen Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang pada Kementerian Sosial serta Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Pembiayaan JKN/KIS pada Kementerian Kesehatan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2023 masih terkendali yaitu sebesar 2,28% (yoy), meskipun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,89% (yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan sinergi TPID, utamanya melalui GNPIP. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2023 yaitu beras, cabai merah, daging ayam ras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Memasuki triwulan I 2024, inflasi Jakarta pada Januari 2024 tercatat sebesar 1,83% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran yang lebih rendah 2,5±1%.

Intermediasi perbankan meningkat didukung ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, perbankan memiliki kapasitas yang baik untuk menyalurkan kredit sejalan dengan kondisi likuiditas yang memadai dan risiko kredit yang terjaga rendah. Kecukupan likuiditas perbankan ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih tetap positif, penguatan strategi pendanaan dari sumber lainnya, serta implementasi berbagai pelonggaran kebijakan dan insentif makroprudensial sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Sementara itu, risiko kredit yang terjaga rendah, tercermin dari penurunan rasio *Non-Performing Loans* (NPL) sehingga mendorong perbankan tetap dapat meningkatkan penyaluran kredit.

Dari sisi permintaan, kredit korporasi meningkat seiring dengan tetap tumbuh positifnya kinerja korporasi. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan positif penjualan dan tingkat profitabilitas yang masih cukup baik. Dengan demikian, kemampuan membayar korporasi nonkeuangan tetap terjaga tercermin dari rendahnya rasio NPL kredit korporasi. Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi nonkeuangan, kinerja sektor rumah tangga pada triwulan IV 2023 juga menunjukkan perbaikan meskipun terbatas. Kondisi ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen yang tetap berada pada level optimis meskipun tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor UMKM juga terus membaik sejalan dengan peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat.

Ringkasan Eksekutif

Kredit UMKM melanjutkan pertumbuhan yang positif terutama didorong oleh tetap positifnya pertumbuhan kredit UMKM dari skala mikro dan kecil terutama dari sektor perdagangan. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.

Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran tunai mengonfirmasi tetap tingginya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pada triwulan IV 2023, arus kas tercatat *net outflow* sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan transaksi nontunai pada beberapa instrumen pembayaran yaitu SKNBI, APMK, dan BI-RTGS, adapun transaksi *e-commerce* juga mengalami peningkatan.

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2023 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor jasa perdagangan, penyedia akomodasi, dan pengangkutan.

Tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta Triwulan IV 2023 masih dalam tingkatan yang baik. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan ekonomi masih berada pada level optimis meskipun mengalami penurunan dibanding Triwulan III 2023.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event di Jakarta, berlangsungnya pemilu, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; serta membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD. Di sisi lain, kinerja investasi diperkirakan sedikit tertahan dipengaruhi sikap *wait and see* investor pada periode pemilu, sebagaimana pola historisnya. Kinerja ekspor juga diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan meluasnya tensi geopolitik serta tertahannya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama Jakarta. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu tertahannya perekonomian global, berlanjutnya tensi geopolitik, dan keberlanjutan *stance* moneter ketat AS.

Inflasi DKI Jakarta pada 2024 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program TPID, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Tabel Indikator

INDIKATOR	2020					2021					2022					2023				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
Ekonomi Makro Regional																				
Produk Domestik Regional Bruto (% , yoy)	5,03	-8,35	-3,93	-2,18	-2,39	-1,94	10,92	2,42	3,63	3,56	4,61	5,61	5,93	4,85	5,25	4,95	5,13	4,93	4,85	4,96
Berdasarkan Lapangan Usaha:																				
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,74	0,14	0,53	0,56	0,49	-0,34	6,26	3,25	7,33	4,12	-0,16	3,11	4,38	2,60	2,51	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94
2 Pertambangan dan Penggalian	-5,60	-8,07	-1,66	-10,38	-6,43	-6,38	-2,15	-9,77	2,73	-4,06	0,45	-5,07	-7,78	-9,34	-5,42	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75
3 Industri Pengolahan	-1,51	-20,52	-12,08	-7,64	-10,36	-0,96	25,28	11,93	11,15	11,06	9,64	6,83	4,95	2,66	5,95	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86
4 Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	-12,73	-16,97	-16,88	-10,95	-6,88	-8,63	-18,61	-30,59	-16,30	-13,27	2,83	-0,20	3,67	-2,38	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,08	-6,21	-0,34	-5,07	-2,68	2,77	10,07	1,33	2,53	4,07	-0,35	-0,65	0,93	2,11	0,51	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33
6 Konstruksi	2,41	-9,79	-6,37	-8,33	-5,55	-5,33	5,34	-1,40	2,53	0,09	0,75	4,80	3,36	-1,81	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,18	-13,52	-9,73	-6,72	-7,04	-1,08	13,93	3,64	6,38	5,46	6,87	8,25	9,65	6,41	7,78	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52
8 Transportasi dan Pergudangan	7,30	-23,73	-8,57	-5,24	-7,63	-0,48	41,45	7,78	9,55	12,77	3,46	1,47	11,82	11,92	7,19	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,20	-34,96	-18,43	-15,42	-16,21	-10,44	45,24	6,78	7,12	8,99	6,14	6,29	13,63	11,26	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69
10 Informasi dan Komunikasi	9,09	12,63	11,21	11,20	11,05	7,84	2,52	2,70	5,74	4,65	6,17	7,14	6,09	8,39	6,96	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45
11 Jasa keuangan dan Asuransi	15,79	0,81	-4,51	5,56	4,38	-7,32	9,90	4,88	-5,01	0,13	0,57	2,54	-1,01	3,02	1,28	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39
12 Real Estate	3,84	-0,34	1,85	0,96	1,57	0,38	3,79	0,53	2,44	1,77	2,51	2,36	2,45	0,85	2,04	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74
13 Jasa Perusahaan	3,87	-7,27	-2,63	-2,08	-2,07	-4,57	4,48	-1,99	1,62	-0,21	3,91	5,53	7,27	6,63	5,84	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,53	-16,83	-1,77	-2,00	-5,79	-1,22	1,32	-7,00	-4,52	-2,82	-4,01	0,59	5,56	6,25	2,01	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04
15 Jasa Pendidikan	7,51	1,10	3,28	-0,86	2,64	0,01	3,66	-1,76	1,51	0,82	0,10	-0,52	0,76	-0,76	-0,11	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,13	9,65	31,21	27,49	19,85	14,92	14,02	1,90	4,01	8,10	14,73	15,66	6,51	1,53	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85
17 Jasa Lainnya	5,46	-10,34	-4,56	-6,56	-4,08	-9,59	5,32	-5,14	2,82	-1,90	13,10	15,02	18,28	14,77	15,27	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60
Berdasarkan Permintaan:																				
1 Konsumsi																				
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,93	-5,36	-5,36	-2,90	-2,23	-1,58	8,22	4,34	3,58	3,54	4,09	5,12	7,62	5,74	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05
b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,42	-7,68	-1,37	-1,50	-4,06	-4,62	2,24	0,56	2,19	0,10	5,99	6,03	6,68	6,28	6,25	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,03	-8,19	45,70	20,02	14,05	21,54	22,13	6,77	-2,04	9,82	-15,90	-9,79	-9,93	-4,48	-9,41	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86
3 PMTB	1,64	-10,36	-8,92	-10,04	-6,98	-6,75	5,48	1,22	5,10	1,05	4,85	5,71	6,37	1,23	4,48	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89
4 Perubahan Inventori	119,49	366,96	-91,82	-420,76	-137,85	-123,36	-87,76	79,74	-93,80	-101,72	268,06	-36,83	3,34	72,67	1028,62	-27,79	37,25	209,14	44,75	-8,82
5 Ekspor	9,30	-15,38	-20,94	-11,54	-9,70	-10,27	23,31	19,82	19,32	11,36	8,54	10,96	17,60	13,19	12,60	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67
6 Impor	4,38	-16,60	-17,59	-13,05	-10,88	-5,71	22,84	18,61	17,54	12,45	5,63	6,52	13,73	7,87	8,48	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25
Ekspor																				
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	2,593	1,813	2,671	2,786	9,862	2,760	2,716	2,871	2,995	11,341	2,938	2,657	2,934	2,940	11,470	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	836	586	829	861	3,112	802	916	856	981	3,555	779	716	901	924	3,320	849	764	809	922	3,344
Impor																				
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	13,819	11,668	10,433	12,024	47,944	14,186	15,513	16,135	18,367	64,201	18,922	18,608	20,187	19,295	77,012	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	7,791	6,669	6,411	6,948	27,819	7,592	7,612	7,649	8,107	30,960	8,218	8,142	8,134	8,271	32,765	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479
Indeks Harga Konsumen	105,19	105,53	105,39	105,96	105,96	106,36	106,60	106,59	107,58	107,58	108,49	109,67	111,50	112,11	112,11	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67
Laju Inflasi Tahunan (% , yoy)	3,21	2,18	1,76	1,59	1,59	1,11	1,01	1,14	1,53	1,53	2,00	2,88	4,61	4,21	4,21	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28

Sumber: BPS, BI

Tabel Indikator

INDIKATOR	2020					2021					2022					2023				
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
Perbankan																				
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	3.139	3.111	3.352	3.359	3.359	3.454	3.505	3.667	3.864	3.864	3.849	3.887	3.910	4.321	4.321	4.211	4.234	4.235	4.461	4.461
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	1.903	1.811	1.763	1.723	1.723	1.704	1.750	1.805	1.751	1.751	1.784	1.949	1.965	2.006	2.006	2.010	2.103	2.193	2.324	2.324
- Modal Kerja	1.049	1.006	961	929	929	908	954	971	967	967	990	1.110	1.105	1.120	1.120	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315
- Investasi	627	585	590	585	585	590	588	624	570	570	578	615	621	645	645	640	672	703	749	749
- Konsumsi	227	219	212	210	210	207	208	211	214	214	216	224	238	241	241	240	244	253	260	260
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	8,9	-1,5	-3,0	-7,1	-7,1	-10,4	-3,4	2,4	1,6	1,6	4,7	11,4	8,8	14,6	14,6	12,7	8,0	11,6	15,8%	15,8%
- Modal Kerja	7,2	-3,0	-5,9	-8,5	-8,5	-13,5	-5,2	1,0	4,1	4,1	9,1	16,3	13,9	15,7	15,7	14,2	6,9	11,9	17,5%	17,5%
- Investasi	16,5	1,6	1,7	-4,1	-4,1	-5,9	0,4	5,8	-2,6	-2,6	-1,9	4,6	-0,4	13,3	13,3	10,7	9,3	13,2	16,0%	16,0%
- Konsumsi	-1,8	-2,6	-5,0	-8,6	-8,6	-8,7	-5,3	-0,8	2,2	2,2	4,4	7,6	13,0	12,5	12,5	11,0	9,2	6,2	7,8%	7,8%
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	159	149	147	144	144	141	140	148	139	139	139	143	140	144	144	140	144	146	150	150
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek (%)	60,60	58,23	52,60	51,30	51,30	49,35	49,93	49,24	45,32	45,32	46,36	50,13	50,25	46,42	46,42	47,75	50,18	50,46	49,68	49,68
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	1,90	2,27	2,48	2,44	2,44	2,40	2,32	2,19	1,97	1,97	1,94	1,70	1,62	1,42	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,33
Sistem Pembayaran																				
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	13,72	11,35	10,60	13,26	13,26	12,89	12,47	12,85	15,50	15,50	21,80	16,82	17,56	18,43	18,43	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	11,75	9,32	8,97	11,34	11,34	11,41	10,61	10,56	13,42	13,42	18,58	15,55	16,94	20,11	20,11	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20
- Nominal Transaksi E-Commerce (Rp Triliun)	15,27	12,07	14,74	18,34	60,42	18,80	20,16	21,76	22,42	83,15	22,20	23,12	25,27	28,48	82,23	21,55	20,59	22,86	24,45	89,46
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	0,67	0,74	0,88	1,03	1,03	1,17	1,30	1,64	3,16	3,16	3,42	3,60	3,90	4,28	4,28	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16
- Volume Transaksi UE (Juta)	884	619	774	816	3.093	705	814	735	949	3.203	1.049	1.151	1.391	1.587	2.978	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	30	27	31	37	124	32	38	40	54	164	56	67	90	97	187	103	127	136	151	518

Sumber: BPS, BI

BAB 1

PEREKONOMIAN GLOBAL & NASIONAL

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 3,0% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang masing-masing sebesar 3,0% dan 2,8%. Perbaikan terutama ditopang oleh kinerja ekonomi negara Amerika Serikat (AS) dan India yang lebih kuat sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi dunia. Eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga berpotensi mengganggu rantai pasokan, mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. *Yield US Treasury* kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara *emerging market*.

Ekonomi Indonesia 2023 tumbuh lebih baik dari prakiraan, yakni tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh kenaikan ekspor, peningkatan investasi bangunan, dan dampak positif Pemilu. Inflasi IHK Januari 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, yakni sebesar 2,57% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,61% (yoy). Perkembangan inflasi yang tetap terjaga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024.



**Pertumbuhan
Ekonomi Nasional (yoy)**



5,04%

Triwulan IV 2023

4,94%

Triwulan III 2023

**Inflasi
IHK Nasional (yoy)**



2,61%

Triwulan IV 2023

2,28%

Triwulan III 2023

**Capital Adequacy Ratio
(CAR)**

Perbankan Nasional

27,66%

Triwulan IV 2023

**BI 7-Days
Reverse Repo Rate**

6,00%

Desember 2023

A. PEREKONOMIAN GLOBAL¹

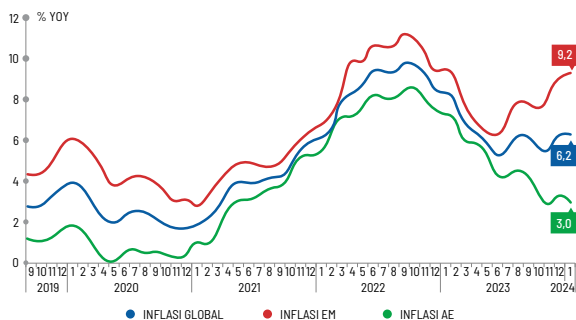
Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Ekonomi global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya, yakni menjadi sebesar 3,1% pada tahun 2023 dan 3,0% pada tahun 2024. Perbaikan ini utamanya ditopang oleh menguatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India yang didukung oleh konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, perekonomian Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Masih berlanjutnya eskalasi ketegangan politik dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini mengakibatkan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan dunia dan menahan penurunan inflasi global. Suku bunga *Fed Funds*

Tabel 1.1 Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% yoy)

NEGARA	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,1	3,0
Negara Maju	1,7	-4,2	5,6	2,6	1,6	1,6
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,5	1,9
Kawasan Eropa	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,5	0,8
Jepang	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,9	1,1
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,9	4,1	4,1	3,9
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,5
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	6,8	5,9
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,4	4,6
Amerika Latin	0,2	-7,0	7,4	4,2	2,5	2,0
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	1,2	2,7	2,7
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	-2,6	4,3	5,5	2,0	3,0

Sumber: IMF WEO
*Proyeksi Bank Indonesia



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Grafik 1.1 Inflasi Global

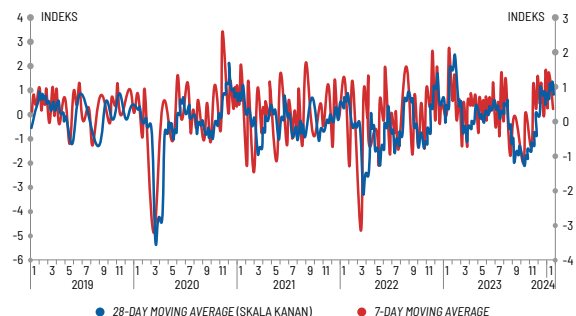
Rate (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi. *Yield US Treasury* kembali meningkat sejalan dengan meningkatnya premi risiko jangka panjang (*term-premial*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara *emerging market*. Penguatan respons kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia.

B. PEREKONOMIAN NASIONAL²

Ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dari prakiraan. Pada triwulan IV 2023, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (4,94%, yoy). Pertumbuhan ekonomi triwulan ini didukung oleh hampir seluruh komponen PDB, utamanya oleh kenaikan ekspor, peningkatan investasi bangunan, dan dampak positif pemilu. Sementara itu, menurut Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi pada LU Transportasi dan Perdagangan Besar dan Eceran seiring dengan meningkatnya mobilitas. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05% (yoy).

Secara spasial, sebagian besar wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2023 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Jawa.

Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7 – 5,5%. Prospek ini dipengaruhi oleh tetap baiknya permintaan domestik yang didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi dan membaiknya ekspor sejalan dengan



Sumber: IIF, diolah. Data s.d. 26 Januari 2024

Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang

¹ Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2024

² Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2023 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2024

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

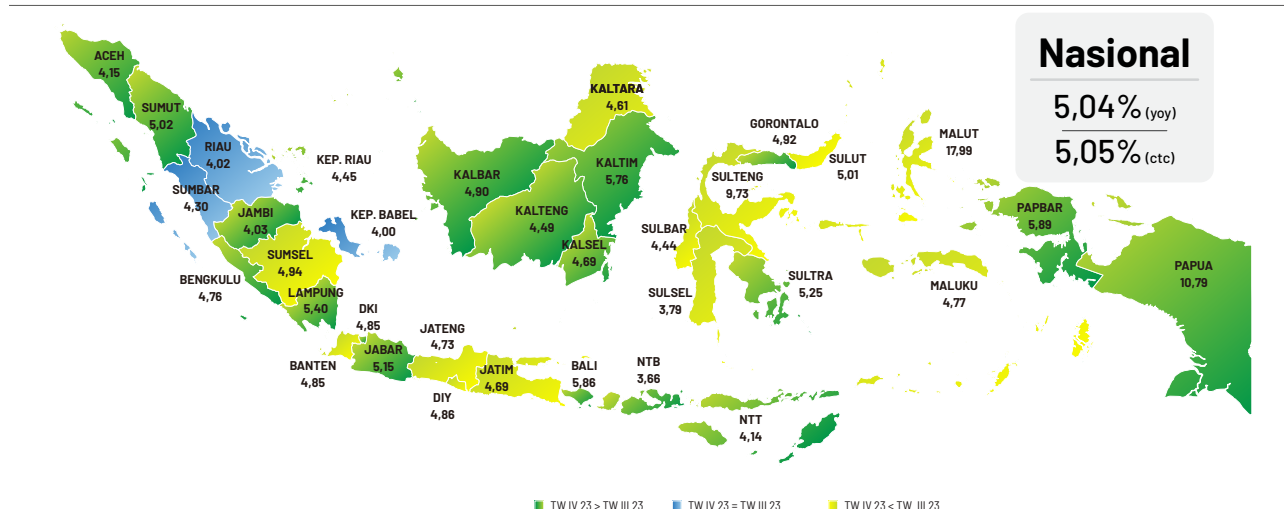
KOMODITAS	2019	2020	2021	2022				2022	2023				2023
				I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	-2,63	2,01	4,35	5,52	5,40	4,50	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82
Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga	10,62	-4,21	1,62	5,91	5,03	5,99	5,72	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83
Konsumsi Pemerintah	3,27	2,12	4,25	-6,60	-4,61	-2,50	-4,72	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95
Investasi (PMTDB)	4,45	-4,96	3,80	4,08	3,09	4,98	3,87	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40
Investasi Bangunan	5,37	-3,78	2,32	2,58	0,92	0,07	0,91	0,91	0,08	3,32	6,31	6,42	4,04
Investasi Nonbangunan	1,83	-8,44	8,42	8,63	9,71	19,32	12,53	12,53	7,93	8,30	4,45	1,80	5,34
Ekspor	-0,48	-8,42	17,99	14,40	16,32	19,09	16,23	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32
Impor	-7,13	-17,60	24,86	16,06	13,06	25,73	15,00	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65
PDB	5,02	-2,07	3,70	5,02	5,46	5,73	5,31	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

KOMODITAS	2019	2020	2021	2022				2022	2023				2023
				I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,61	1,77	1,87	1,16	1,68	1,95	4,51	2,25	0,44	2,03	1,49	1,12	1,30
Pertambangan dan Penggalian	1,22	-1,95	4,00	3,82	4,01	3,22	6,46	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12
Industri Pengolahan	3,80	-2,93	3,39	5,07	4,01	4,83	5,64	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64
Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	7,04	9,33	8,05	2,31	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	1,35	4,46	4,26	2,84	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90
Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	4,83	1,02	0,63	1,61	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,60	-3,79	4,63	5,74	4,43	5,37	6,56	5,53	4,94	5,29	5,10	4,09	4,85
Transportasi dan Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	15,79	21,27	25,80	16,99	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	-10,26	3,88	6,57	9,79	17,79	13,77	11,94	11,54	9,91	10,94	7,89	10,01
Informasi dan Komunikasi	9,42	1,61	6,82	7,15	8,06	6,94	8,72	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,64	1,50	0,87	3,76	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77
Real estat	5,76	2,32	2,78	3,78	2,16	0,63	0,39	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43
Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	5,96	7,92	10,79	10,42	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	-0,03	-1,29	-1,29	-1,53	12,47	1,77	2,51	2,10	8,16	-6,24	1,61	1,50
Jasa Pendidikan	6,30	2,61	-1,41	-1,41	-1,07	4,45	0,40	0,57	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	11,56	4,52	4,52	6,51	-1,70	2,48	2,75	4,77	8,28	2,91	3,09	4,66
Jasa lainnya	10,57	-4,10	8,25	8,25	9,26	9,13	11,14	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52
PDB	5,02	-2,07	3,70	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan IV 2023 (% , yoy)

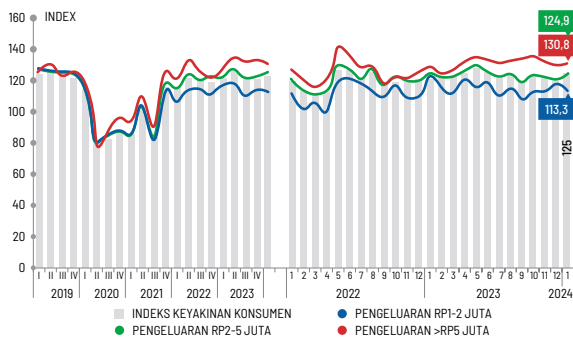
prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih baik. Selain itu, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi, khususnya nonbangunan, perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan, khususnya melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, serta bersinergi dengan stimulus fiskal Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik.

Inflasi terjaga rendah dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Mulai Januari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2022. Inflasi IHK pada Januari 2024 tercatat sebesar sebesar 2,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 2,61% (yoy). Inflasi inti pada Januari 2024 tercatat sebesar 1,68% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya (1,80%, yoy), didorong oleh ekspektasi yang terjaga serta harga komoditas global yang rendah. Sementara itu, di tengah perbaikan pasokan khususnya aneka cabai, penurunan inflasi VF lebih lanjut tertahan oleh kenaikan harga komoditas tomat, bawang merah, dan beras akibat pasokannya yang terbatas sehingga mendorong kelompok VF mengalami inflasi sebesar 7,22% (yoy) pada Januari 2024, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,73% (yoy). Di sisi lain, inflasi *administered price* (AP) secara tahunan tercatat

inflasi sebesar 1,74% (yoy), relatif stabil dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,72% (yoy), sejalan dengan pola musimannya dan minimnya penyesuaian kebijakan AP. Hal ini utamanya disumbang oleh normalisasi tarif angkutan udara pasca Natal dan Tahun Baru dan penurunan harga BBM nonsubsidi pada awal Januari 2024. Penurunan inflasi AP lebih lanjut tertahan oleh dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada komoditas rokok kretek filter dan rokok putih pada tahun 2024.

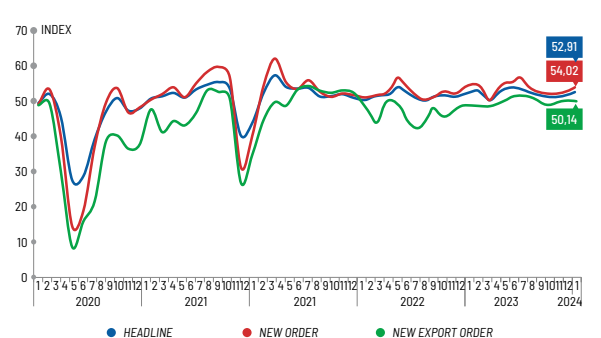
Secara spasial, sebagian besar daerah mengalami inflasi pada Januari 2024. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah yang mencapai 4,76% (yoy) dan Provinsi Gorontalo sebesar 4,40% (yoy). Beberapa komoditas penyumbang inflasi antara lain beras, bawang putih, dan aneka cabai. Sedangkan, inflasi terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,21% (yoy) dan Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,83% (yoy).

Inflasi yang tetap terjaga pada rentang sasaran tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi erat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap



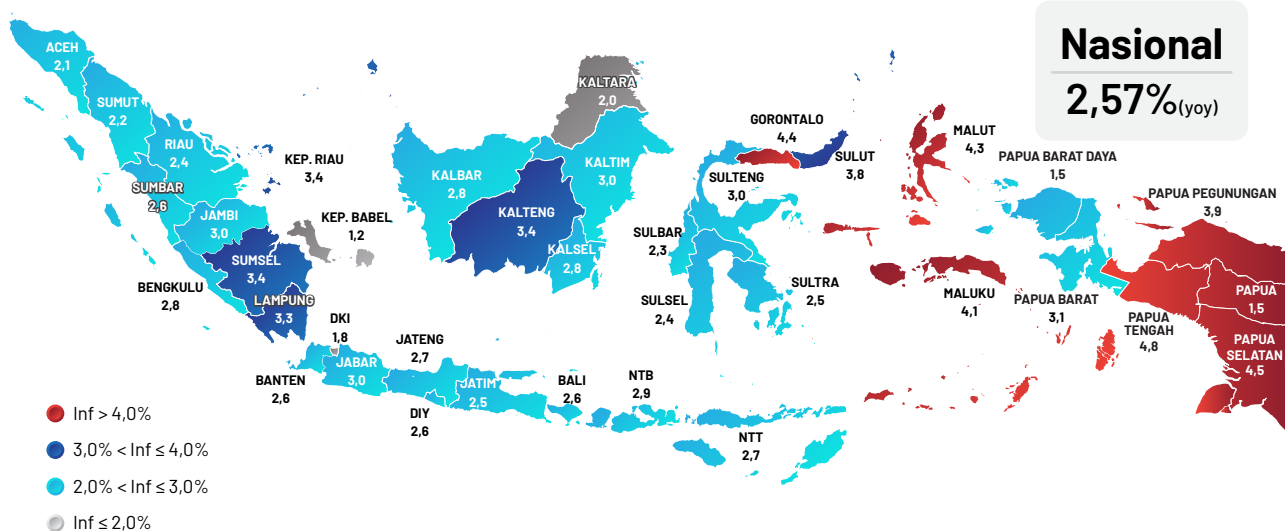
Sumber: Bank Indonesia. *Data s.d. Januari 2024

Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: S&P Global (HIS Markit)

Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur



Sumber : BPS, diolah

Gambar 1.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Januari 2024 (% yoy)

terkendali di dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024. Bank Indonesia perlu tetap memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memastikan terkendalinya inflasi.

Ketahanan perbankan tetap kuat. Likuiditas perbankan dalam kondisi memadai, tercermin dari rasio AL/DPK pada Januari 2024 yang terjaga tinggi pada 27,79%. Pengelolaan likuiditas perbankan juga semakin baik, sejalan dengan tingginya penempatan perbankan pada surat berharga yang tergolong likuid. Penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market*, antara lain melalui perdagangan SRBI di pasar sekunder, memberikan fleksibilitas bank dalam mengelola likuiditas dan turut menjaga kapasitas pembiayaan perbankan (*lending capacity*). Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) tercatat pada level yang tinggi, yakni sebesar 27,66% pada Desember 2023, ditopang rasio kredit bermasalah perbankan (*Non-Performing Loan/NPL*) yang tercatat rendah, sebesar 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto). Selain itu, ketahanan perbankan yang kuat tersebut juga didukung oleh kemampuan bayar korporasi rumah tangga yang tetap baik, terlihat dari penjualan korporasi dan ekspektasi penghasilan rumah tangga yang terus membaik. Hasil *stress-test* Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian ke depan. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko tersebut yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Nilai transaksi *digital banking* pada Januari 2024 tercatat tumbuh 17,19% (yoy) atau sebesar Rp5.335,33 triliun. Selain itu, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 39,28% (yoy), mencapai Rp83,37 triliun. Nominal transaksi QRIS juga tercatat tumbuh sebesar 149,46% (yoy) dan mencapai Rp31,65 triliun, dengan jumlah pengguna sebanyak 46,37 juta dan jumlah *merchant* mencapai 30,88 juta, yang sebagian besar adalah UMKM. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit naik sebesar 2,58% (yoy) atau mencapai Rp692,32 triliun. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Januari 2024 meningkat 9,21% (yoy) menjadi Rp1.015,68 triliun. Sementara itu, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai. SPBI berjalan dengan aman, lancar, dan andal serta didukung oleh risiko likuiditas dan risiko operasional yang terjaga. Ke depan, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI khususnya dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1445 H melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2024.

C. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20 – 21 Februari 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 5,25%, dan suku bunga *Lending*

Facility sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability*, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, melalui upaya sebagai berikut.

1. Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
2. Penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market* untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);
3. Perluasan pendalaman pasar uang dan pasar valas melalui peningkatan volume dan jumlah pelaku transaksi repurchase agreement (repo);
4. Penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi;
5. Akselerasi digital sistem pembayaran guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas Ekonomi Keuangan Digital (EKD) termasuk perluasan QRIS antarnegara, baik volume transaksi maupun peserta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP);
6. Perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan termasuk peningkatan Local Currency Transaction (LCT) untuk fasilitasi transaksi perdagangan dan investasi, sistem pembayaran, dan pasar keuangan antarnegara.

Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas.

BAB 2

EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,62% terhadap nasional, pada triwulan IV 2023 tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 4,85% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,93%, yoy).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih tumbuh tinggi ditopang oleh meningkatnya investasi, konsumsi Pemerintah dan konsumsi LNPRT. Meningkatnya investasi terutama didorong oleh investasi bangunan seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Adapun konsumsi Pemerintah juga mengalami perbaikan sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah di akhir tahun terutama belanja modal yang bersumber dari APBN. Konsumsi LNPRT juga tumbuh tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik jelang pemilu 2024. Di sisi lain, konsumsi RT dan ekspor tumbuh melambat yang masing-masing bersumber dari penurunan konsumsi untuk transportasi dan komunikasi serta penurunan kinerja ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Dari sisi sektoral atau Lapangan Usaha (LU), melambatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja LU Perdagangan dan LU Infokom sejalan dengan perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Selain itu, perlambatan juga bersumber dari penurunan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan yang disebabkan oleh perlambatan transportasi barang seiring penurunan kinerja ekspor dan penurunan kinerja LU Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman seiring perlambatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.

Secara keseluruhan tahun, kinerja ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tumbuh tinggi mencapai 4,96% (yoy), meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,25% (yoy). Pertumbuhan pada tahun 2023 terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali konsumsi pemerintah yang masih berkontraksi. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2023 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,05% (yoy) didorong oleh perbaikan permintaan domestik, kemudian diikuti oleh ekspor yang tumbuh sebesar 7,67% (yoy), investasi sebesar 3,89% (yoy) seiring meningkatnya realisasi investasi baik oleh swasta maupun pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Infokom, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan bobot terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023 masing-masing sebesar 15,69%, 13,74%, 11,36%, 10,82%, dan 10,56%. Pada tahun 2023, terdapat tiga LU utama yang mencatatkan peningkatan kinerja yakni LU Infokom, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan masing-masing tumbuh 7,45% (yoy), 5,39% (yoy), dan 2,50% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang masing-masing sebesar 6,96% (yoy), 1,21% (yoy), dan 1,69% (yoy). Adapun LU yang menjadi penahan pertumbuhan yaitu LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan dengan masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,52% (yoy) dan 1,86% (yoy), melambat dari pertumbuhan pada tahun 2022 yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,78% (yoy) dan 5,87% (yoy).

Memasuki triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh lebih baiknya pertumbuhan Konsumsi RT, Konsumsi LNPRT, dan Konsumsi Pemerintah. Lebih baiknya Konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli yang turut didukung oleh peningkatan UMP dan gaji ASN, serta semakin maraknya pelaksanaan MICE dan event skala internasional di Jakarta. Sejalan dengan berlangsungnya safari politik dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, aktivitas politik terus meningkat sehingga mendorong kinerja Konsumsi LNPRT. Perbaikan postur belanja APBN dan APBD, akselerasi belanja barang dan jasa, serta belanja bansos untuk mendukung Pemilu turut mendorong perbaikan kinerja Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja investasi diperkirakan akan tertahan seiring perilaku wait and see investor pada periode Pemilu. Lebih lanjut, ekspor diperkirakan tertahan sejalan dengan kondisi geopolitik terutama konflik Laut Merah, isu uji keselamatan kendaraan yang mempengaruhi berhentinya produksi dan ekspor industri otomotif ke Jepang, serta terbatasnya kuota ekspor ke Meksiko. Lebih lanjut, LU Perdagangan pada triwulan I 2024, diperkirakan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini seiring pula dengan prakiraan peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang didorong oleh semakin meningkatnya mobilitas didukung oleh semakin meningkatnya penyelenggaraan MICE baik skala nasional maupun internasional di DKI Jakarta. Lebih lanjut, prakiraan peningkatan kinerja LU Perdagangan juga seiring dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung pada triwulan I 2024, peningkatan penghasilan yang sejalan dengan peningkatan UMP dan gaji ASN juga turut mendorong optimisme ini. Namun demikian, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi diperkirakan melambat yang masing-masing disebabkan oleh tensi geopolitik yang semakin memanas khususnya di jalur distribusi di Laut Merah serta perlambatan kinerja Investasi yang dipengaruhi oleh wait and see investor menjelang pesta demokrasi 2024 serta bulan Ramadan yang sudah dimulai pada triwulan I 2024 dimana, hal ini akan berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja.



Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (yoy)



4,85%

Triwulan IV 2023

4,93%

Triwulan III 2023

Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)



5,23%

Triwulan IV 2023

5,49%

Triwulan III 2023

Pertumbuhan Investasi (yoy)



5,17%

Triwulan IV 2023

4,38%

Triwulan II 2023

Pertumbuhan Ekspor (yoy)



4,46%

Triwulan IV 2023

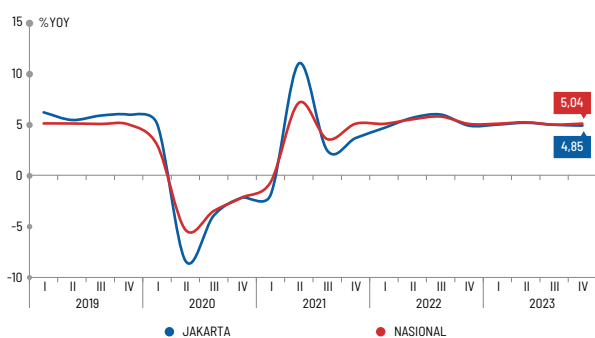
5,93%

Triwulan III 2023

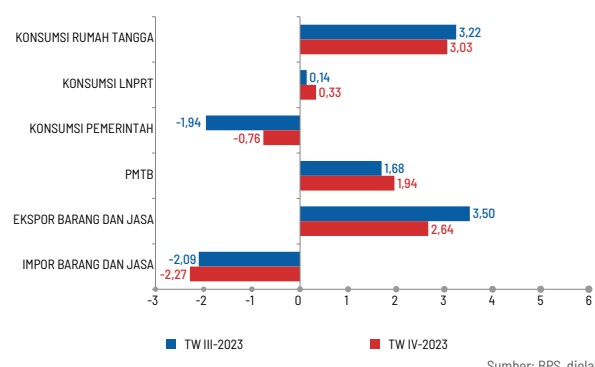
A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV 2023

Perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh tinggi pada triwulan IV 2023 yaitu sebesar 4,85% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,93%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih tetap tumbuh tinggi ditopang oleh meningkatnya investasi, konsumsi Pemerintah, dan Konsumsi LNPR. Di sisi lain, konsumsi RT dan ekspor tumbuh melambat. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU Jasa Keuangan. Namun, LU utama lainnya seperti perdagangan dan infokom tumbuh lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap tumbuh tinggi juga sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 5,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,94%, yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian DKI Jakarta secara keseluruhan tahun 2023 tetap tumbuh tinggi yaitu sebesar 4,96% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 5,25% (yoy). Pertumbuhan tersebut sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,05 (yoy).



Grafik 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional



Grafik 2.2 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Komponen Pengeluaran

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

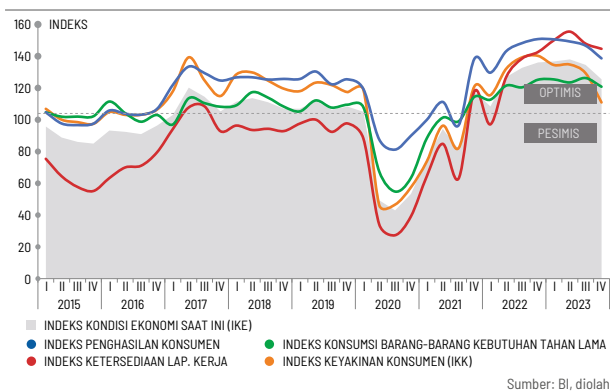
Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 terutama disumbang oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponennya, kecuali Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (RT) yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan komponen lainnya, yaitu sebesar 58,23%, melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 5,23% (yoy), meski melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,49%, yoy). Konsumsi RT memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian DKI Jakarta triwulan IV 2023, yakni 3,03% (Grafik 2.2). Dari sisi Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), kinerjanya tercatat tumbuh sebesar 15,43% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (6,27%, yoy) dan memberikan kontribusi sebesar 0,33% terhadap perekonomian DKI Jakarta triwulan IV 2023. Dengan pangsa sebesar 37,72%, Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi tercatat tumbuh sebesar 5,17% (yoy) pada triwulan IV 2023 dan berkontribusi sebesar 1,94% terhadap perekonomian DKI Jakarta. Kinerja PMTB tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,38% (yoy).

Kinerja ekspor tercatat masih tumbuh tinggi pada triwulan IV 2023, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor tercatat tumbuh melambat dari 5,93% (yoy) pada triwulan III 2023 menjadi 4,46% (yoy) pada triwulan IV 2023. Adapun Ekspor memiliki pangsa sebesar 58,99% dan menyumbang 2,64% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023. Lebih lanjut, kinerja Impor tercatat tumbuh 3,16% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (2,96%, yoy). Kinerja impor tersebut memberikan kontribusi sebesar -2,27% terhadap perekonomian DKI Jakarta. Secara keseluruhan, komponen Net Ekspor mencatatkan surplus dengan kontribusi sebesar 0,37% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 seiring dengan kontribusi ekspor yang lebih besar dibandingkan impor.

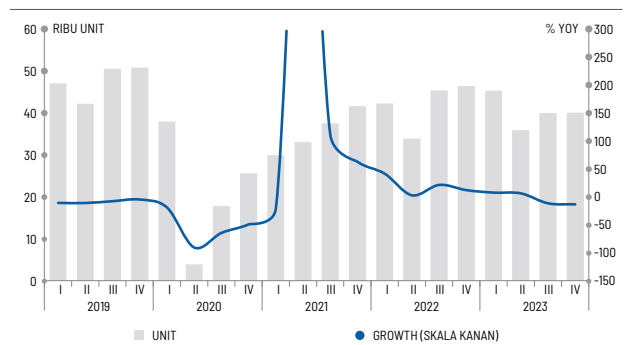
Di sisi lain, Konsumsi Pemerintah dengan pangsa sebesar 13,60% terhadap perekonomian DKI Jakarta triwulan IV 2023 masih mencatat pertumbuhan yang negatif. Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2023 mengalami kontraksi sebesar 5,04% (yoy), meski membaik dibandingkan triwulan lalu yang terkontraksi sebesar 16,18% (yoy) sehingga memberikan kontribusi sebesar -0,76% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023.

Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Pada triwulan IV 2023, kinerja konsumsi rumah tangga masih tumbuh tinggi sebesar 5,23% (yoy), meskipun melambat



Grafik 2.3 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

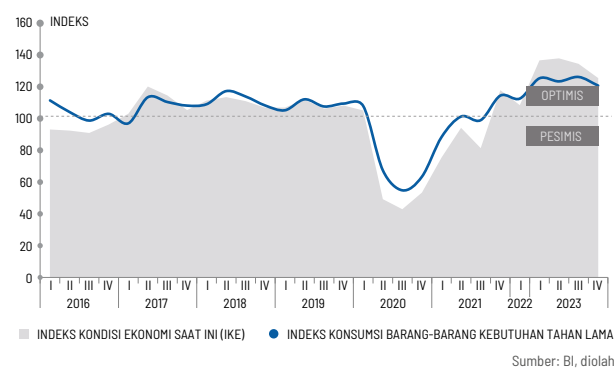


Grafik 2.5 Perkembangan Penjualan Mobil di DKI Jakarta

bahwa masyarakat lebih memilih untuk menunda konsumsi barang tahan lama pada triwulan IV 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. Fenomena tersebut salah satunya tercermin dari indikator penjualan mobil di DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Gaikindo, penjualan mobil di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 mengalami kontraksi 13,73% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 11,95% (yoy) (Grafik 2.5).

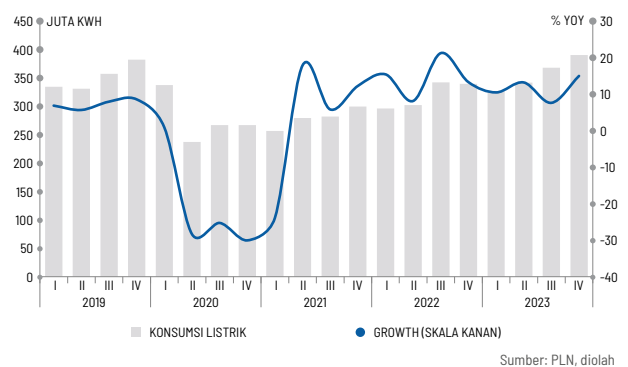
Konsumsi LNPRT

Konsumsi LNPRT tumbuh tinggi pada triwulan IV 2023. Konsumsi LNPRT tumbuh sangat tinggi yaitu sebesar 15,43% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,27% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, konsumsi LNPRT memberikan kontribusi sebesar 0,33% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 (Grafik 2.2). Sangat tingginya konsumsi LNPRT pada triwulan IV 2023 seiring dengan meningkatnya aktivitas partai politik pada periode pemilu. Selain itu, aktivitas Lembaga sosial juga meningkat, tercermin dari pertumbuhan konsumsi listrik kategori sosial di DKI Jakarta. Konsumsi listrik kategori sosial di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 tumbuh mencapai 14,95%, meningkat dua kali lipat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,59% (yoy) (Grafik 2.6).



Grafik 2.4 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE)

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,49% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar yaitu 3,03% terhadap perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 (Grafik 2.2). Masih tetap tingginya pertumbuhan konsumsi RT sejalan dengan berlangsungnya HBKN Nataru dan masifnya penyelenggaraan MICE dan event di DKI Jakarta pada akhir tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut sedikit tertahan yang tercermin dari beberapa indikator antara lain indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), dan indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama. Berdasarkan hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, IKK pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 137,75, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (145,68). Adapun IKE pada triwulan IV 2023 juga tercatat lebih rendah yaitu sebesar 124,64 dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 133,62 (Grafik 2.3). Lebih rendahnya IKE pada triwulan IV 2023 terutama bersumber dari penurunan seluruh komponen yaitu indeks penghasilan konsumen, indeks ketersediaan lapangan kerja, dan indeks konsumsi barang-barang tahan lama. Namun, dari ketiga komponen tersebut, yang mengalami penurunan tertinggi adalah indeks penghasilan konsumen dari 128,48 menjadi 110,19. Indeks konsumsi barang-barang tahan lama juga mengalami penurunan dari 125,43 menjadi 120,00 (Grafik 2.4) yang menunjukkan

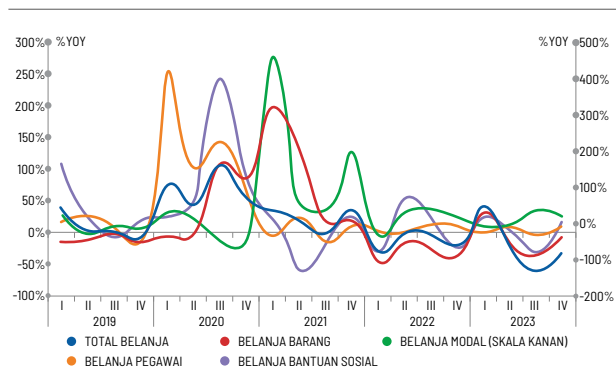


Grafik 2.6 Konsumsi Listrik Sosial DKI Jakarta

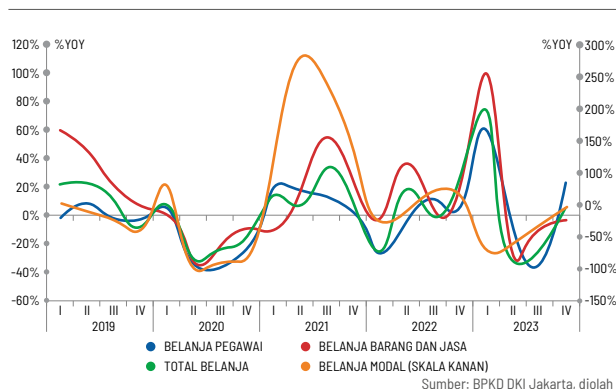
Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah membaik pada triwulan IV 2023, meski masih mengalami kontraksi yaitu sebesar -5,04% (yoy), dari triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar -15,87% (yoy). Berdasarkan perkembangan tersebut, dengan pangsa sebesar 12,91%, kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar -0,76% (Grafik 2.2).

Konsumsi Pemerintah yang membaik dipengaruhi oleh meningkatnya belanja bantuan sosial pada APBN. Belanja Modal pada triwulan IV 2023 meningkat 15,15% (yoy) atau menyerap 59,43% dari pagu APBN-P 2023. Selanjutnya, belanja bantuan sosial pada triwulan IV 2023 meningkat 13,48% (yoy) atau menyerap 32,65% dari pagu belanja APBN-P 2023 (Grafik 2.7). Meskipun demikian, secara total, belanja Pemerintah Pusat melalui APBN mengalami penurunan 33,94% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya (4,58%; yoy) yang terutama bersumber dari penurunan belanja lainnya. Dari sisi belanja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, realisasi total belanja pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,13% (yoy) atau menyerap 38,34% dari pagu APBD-P 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan belanja pegawai sebesar 22,42% (yoy). Di sisi lain, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,84% (yoy) dan 13,50% (yoy) (Grafik 2.8).



Grafik 2.7 Pertumbuhan Belanja Utama Kementerian/Lembaga di Jakarta

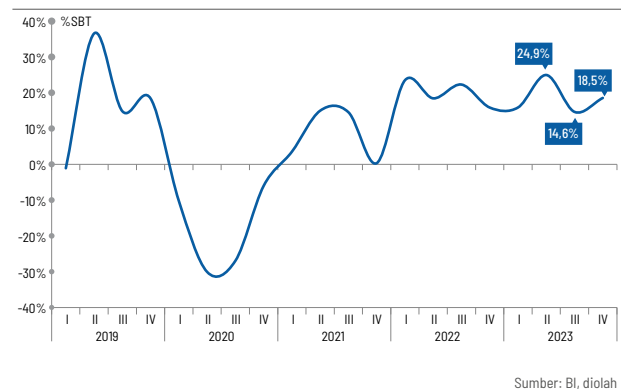


Grafik 2.8 Realisasi Belanja APBD

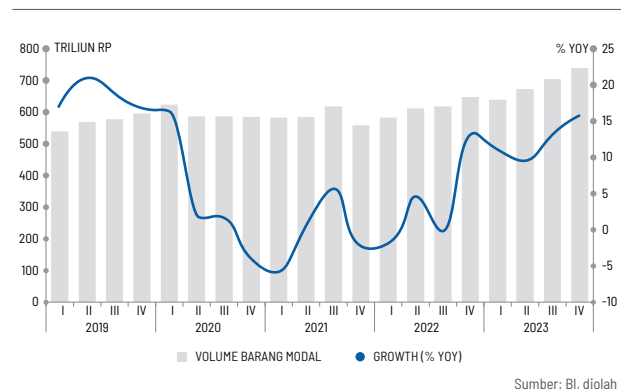
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kinerja investasi pada triwulan IV 2023 melanjutkan pertumbuhan lebih tinggi, ditengah periode Pemilu 2024. Pada triwulan IV 2023, investasi tumbuh sebesar 5,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,17% (yoy) sehingga memberikan andil sebesar 1,94% (Grafik 2.2). Pertumbuhan terutama didorong oleh investasi bangunan seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta di DKI Jakarta, seperti MRT, bangunan kantor dan apartemen. Kinerja investasi yang meningkat juga tercermin dari survei kegiatan dunia usaha yang menunjukkan bahwa investasi perusahaan masih mengalami peningkatan (Grafik 2.9). Selain itu, peningkatan juga tercermin dari penyaluran kredit investasi di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 yang tumbuh tinggi mencapai 15,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit pada triwulan sebelumnya (13,31% yoy) (Grafik 2.10).

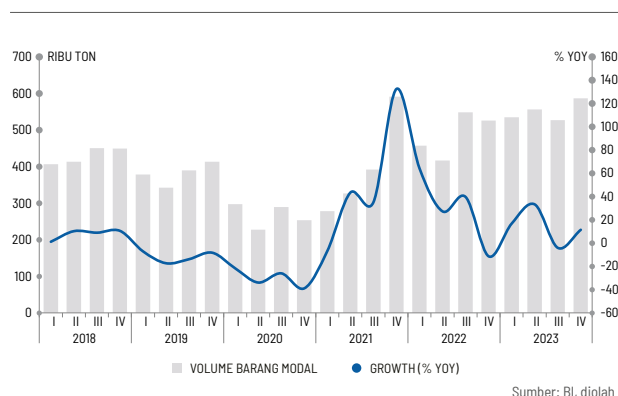
Lebih lanjut, peningkatan kinerja investasi juga tercermin dari volume impor barang modal yang pada triwulan IV 2023 tumbuh positif menjadi sebesar 11,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (-3,78% yoy) (Grafik 2.11).



Grafik 2.9 Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha di DKI Jakarta



Grafik 2.10 Perkembangan Penyaluran Kredit Investasi di DKI Jakarta

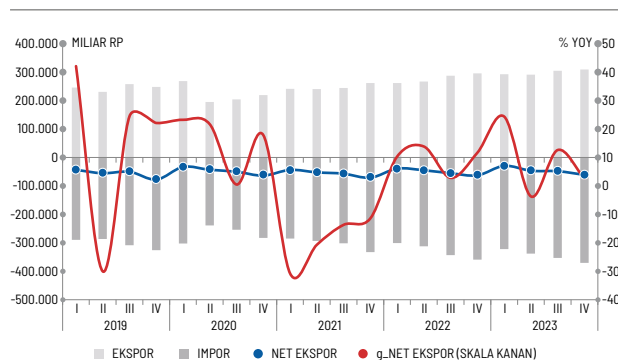


Grafik 2.11 Perkembangan Volume Impor Barang Modal DKI Jakarta

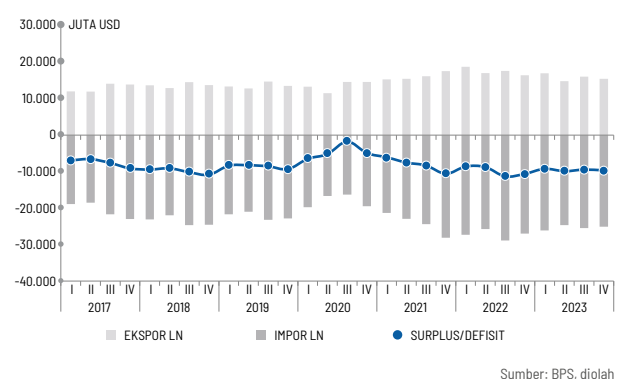
Net Ekspor

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 masih ditopang oleh kinerja pertumbuhan yang positif dari ekspor dan impor, di tengah perlambatan ekonomi global dan permintaan domestik yang meningkat secara gradual. Pada triwulan IV 2023, total ekspor dan impor DKI Jakarta masih mencatat pertumbuhan yang tinggi, meskipun kinerja ekspor melambat dan kinerja impor lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun secara keseluruhan *net* ekspor DKI Jakarta tercatat defisit, dengan defisit yang lebih tinggi dibandingkan triwulan lalu.

Net ekspor (barang dan jasa) DKI Jakarta mencatatkan defisit sebesar Rp61,22 triliun pada triwulan IV 2023, lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp48,58 triliun.



Grafik 2.12 Pertumbuhan Net Ekspor Total DKI Jakarta



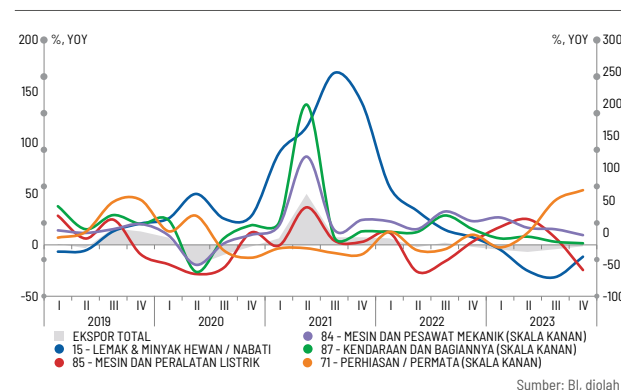
Grafik 2.13 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta

Kinerja tersebut mencatatkan pertumbuhan net ekspor sebesar 2,94% (yoy)(Grafik 2.12). Dari sisi perdagangan barang luar negeri, DKI Jakarta mencatatkan defisit net ekspor, yakni sebesar sebesar USD9,62 miliar pada triwulan IV 2023. Defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan defisit perdagangan barang pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD9,41 miliar (Grafik 2.13). Jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui DKI Jakarta tercatat mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi sebesar 5,94% (yoy) pada triwulan IV 2023 dibandingkan kinerja pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 8,75% (yoy). Di sisi lain, kinerja impor luar negeri mengalami kontraksi sebesar 7,15% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mencatat kontraksi sebesar 11,79% (yoy).

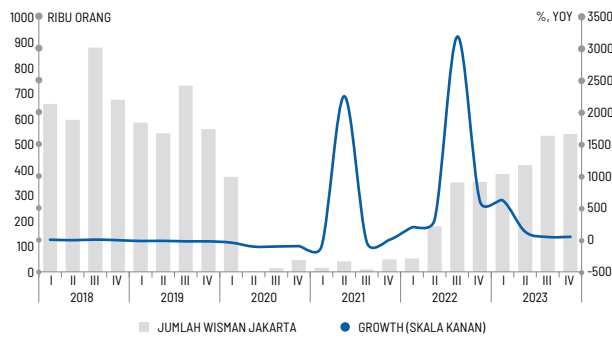
Ekspor

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih tertahan dan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,46% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,93%, yoy), sehingga memberikan kontribusi sebesar 2,64% terhadap perekonomian Jakarta (Grafik 2.2). Melambatnya kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh penurunan pada ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor (Laut Merah). Penurunan kinerja ekspor barang utamanya dipengaruhi oleh penurunan ekspor mesin dan peralatan listrik, karet dan barang dari karet, serta mesin dan pesawat mekanik (Grafik 2.14). Ekspor mesin dan peralatan listrik pada triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif 6,93% (yoy). Adapun ekspor karet dan barang dari karet juga mengalami kontraksi 13,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang juga tumbuh negatif 2,99% (yoy). Sementara itu, ekspor mesin dan pesawat mekanik juga mengalami kontraksi 4,65% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh positif 4,50% (yoy).

Dari sisi ekspor jasa, kinerja ekspor jasa pada triwulan IV 2023 juga tumbuh melambat yang tercermin dari menurunnya kedatangan wisman ke Jakarta. Jumlah kedatangan wisman ke Jakarta pada triwulan IV 2023 hanya tumbuh sebesar 4,32% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh mencapai 51,96% (yoy)(Grafik 2.15).



Grafik 2.14 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Barang

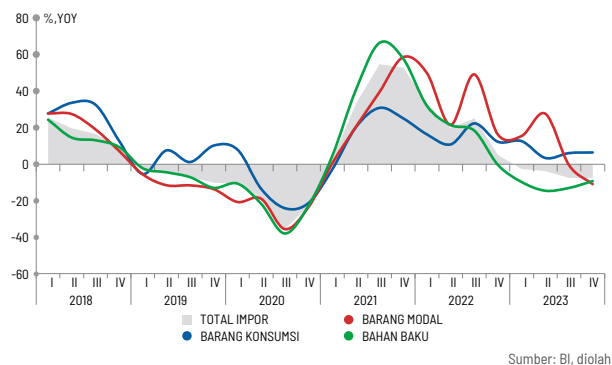


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.15 Perkembangan Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Impor

Dari sisi impor, kinerja impor tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2023. Impor pada triwulan IV 2023 tumbuh 3,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (2,96%, yoy), sehingga memberikan kontribusi sebesar -2,27% terhadap perekonomian Jakarta (Grafik 2.2). Meningkatnya kinerja impor terutama bersumber dari pertumbuhan positif impor barang konsumsi pada triwulan IV 2023 yang tumbuh 6,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (6,13%; yoy). sementara itu, kinerja impor bahan baku juga mengalami perbaikan, meski masih terkontraksi pada triwulan IV 2023 yang sebesar 9,14% (yoy), tidak sedalam kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 12,87% (yoy) (Grafik 2.16).

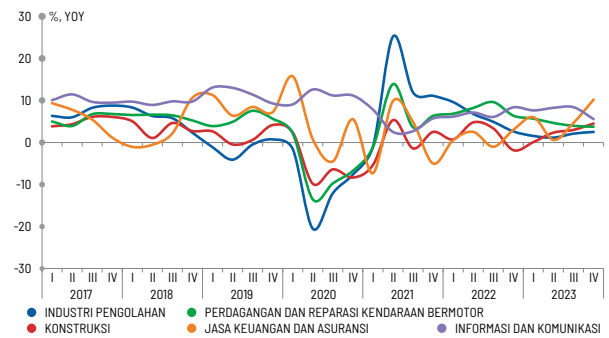


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.16 Perkembangan Impor berdasarkan Jenisnya

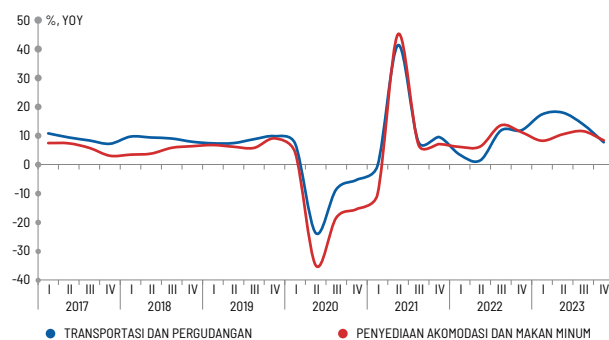
Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU Perdagangan sebagai salah satu LU utama dengan pangsa terhadap PDRB DKI Jakarta sebesar 17,55%, tumbuh melambat dan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV 2023. Selain itu, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (Akmamin), serta Transportasi dan Pergudangan (Transgud) dengan *share* terhadap PDRB DKI Jakarta masing-masing sebesar 9,35%, 4,79%, dan 4,49% juga tumbuh melambat. Namun demikian, tiga LU utama DKI Jakarta lainnya yaitu Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, dan Konstruksi dengan *share* masing-masing sebesar 11,90%, 11,20%, dan 10,97% terhadap PDRB DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan



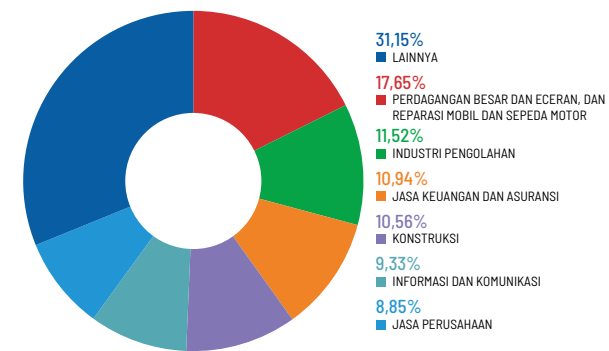
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.17 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.18 Pertumbuhan LU Akmamin dan Transgud

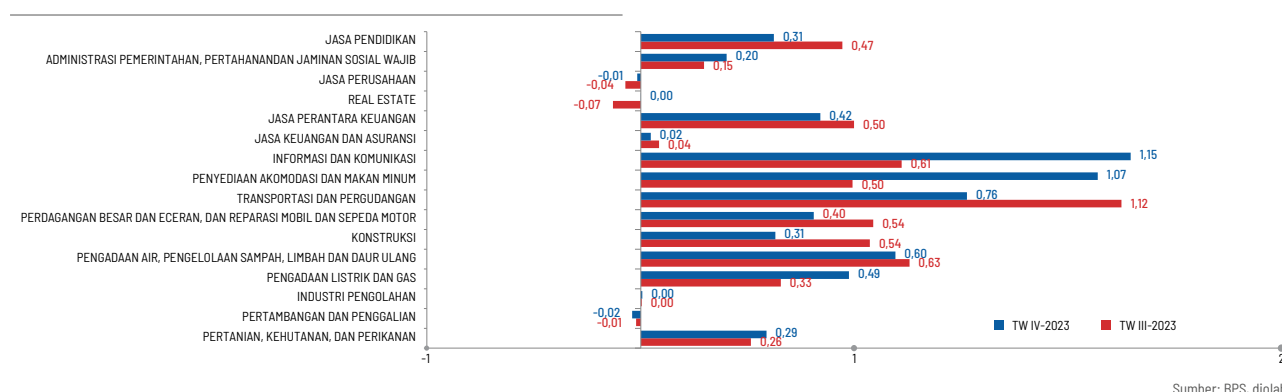


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.19 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan IV 2023

positif pada triwulan laporan (Grafik 2.17). Perlambatan kinerja pada LU Perdagangan sejalan dengan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang juga tumbuh melambat. Sedangkan, kinerja baik pada tiga LU utama Jakarta lainnya didorong oleh peningkatan kinerja industri TPT dan alas kaki, industri kimia, perantara jasa keuangan, hingga masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta di DKI Jakarta.

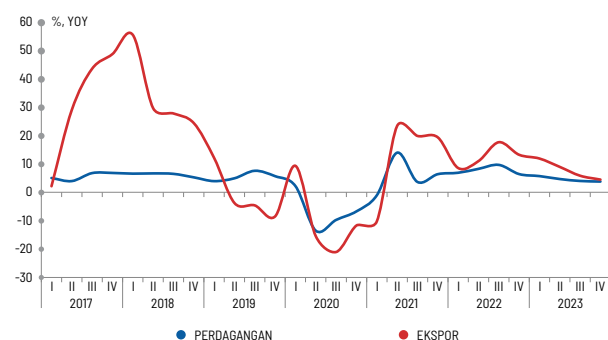
Berdasarkan kontribusinya, lima LU penyumbang pertumbuhan terbesar yaitu LU Jasa Keuangan, LU Infokom, LU Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Jasa Perusahaan dengan masing-masing memberikan kontribusi sebesar 1,07%, 0,76%, 0,60%, 0,49%, dan 0,42% (Grafik 2.20).



Grafik 2.20 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

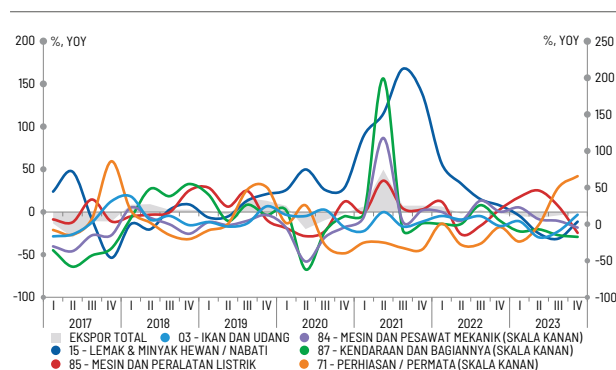
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan kembali mengalami perlambatan kinerja. Hal ini seiring dengan penurunan kinerja perdagangan luar negeri yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global serta tensi geopolitik yang meningkat utamanya di jalur distribusi ekspor, dalam hal ini Laut Merah. LU Perdagangan pada triwulan IV 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,96% (yoy) (Grafik 2.21). Kinerja LU Perdagangan yang melambat pada triwulan IV 2023 kemudian tercermin dari penurunan ekspor barang yang utamanya dipengaruhi oleh penurunan ekspor mesin dan peralatan listrik, karet dan barang dari karet, serta mesin dan pesawat mekanik (Grafik 2.22).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.21 Pertumbuhan LU Perdagangan dan Ekspor DKI Jakarta Tw IV 2023

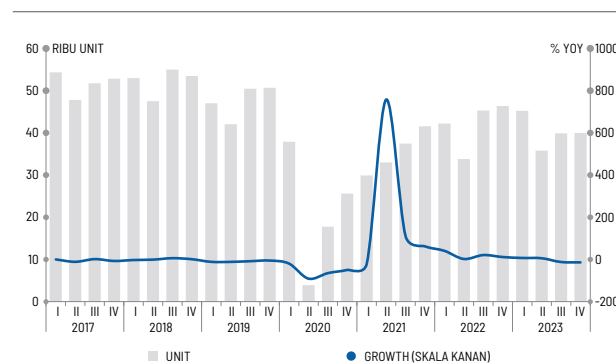


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.22 Perkembangan Nilai Ekspor Unggulan DKI Jakarta

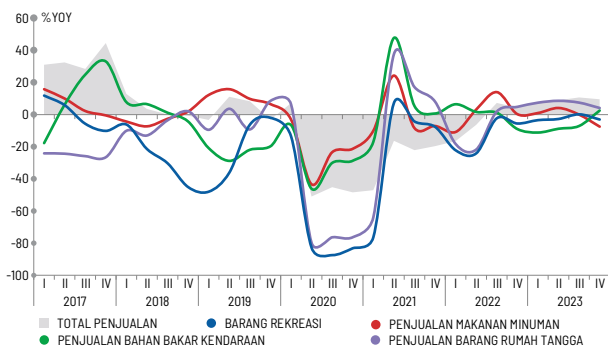
Lebih lanjut, perlambatan kinerja LU Perdagangan juga tercermin dari penjualan mobil *wholesales* di DKI Jakarta yang pada triwulan IV 2023 tercatat sebanyak 40,04 ribu unit atau kembali terkontraksi sebesar 13,73% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya (-11,95%, yoy). Hal ini seiring dengan perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga yang tercermin dari indeks konsumsi barang tahan lama yang mengalami penurunan dari 125,43 menjadi 120,00, menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menunda konsumsi barang tahan lama pada triwulan laporan. Selanjutnya, hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) DKI Jakarta juga menunjukkan perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 10,75% (yoy). Berdasarkan komponennya perlambatan disebabkan oleh penjualan makanan dan minuman dan barang rekreasi yang terkontraksi masing-masing sebesar 7,40% (yoy) dan 3,00% (yoy) serta barang rumah tangga yang tumbuh melambat sebesar 4,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,51% (yoy) (Grafik 2.24).

Dari sisi penjualan domestik korporasi sebagaimana hasil *liaison* KPw BI Provinsi DKI Jakarta, nilai *likert scale* tercatat sebesar 0,7, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,55 (Grafik 2.25). Namun demikian, kinerja penyaluran kredit LU Perdagangan DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 20,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,50% (yoy) (Grafik 2.26).

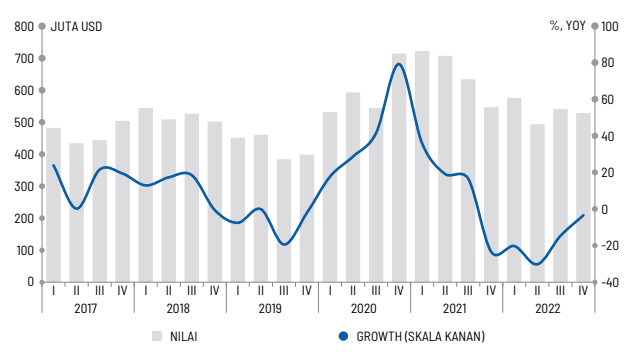


Sumber: Gaikindo, diolah

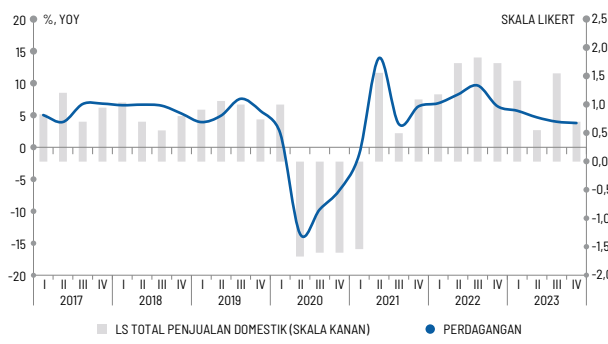
Grafik 2.23 Perkembangan Penjualan Mobil di DKI Jakarta



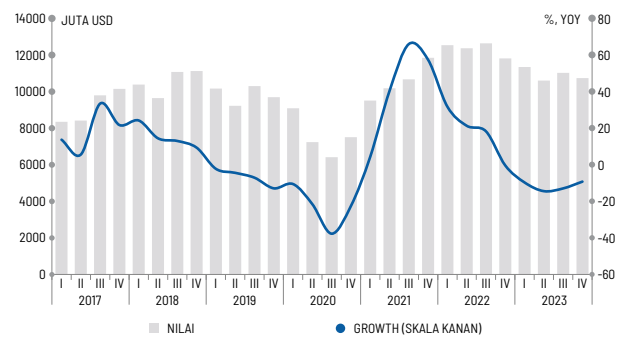
Grafik 2.24 Perkembangan Survei Penjualan Eceran di DKI Jakarta



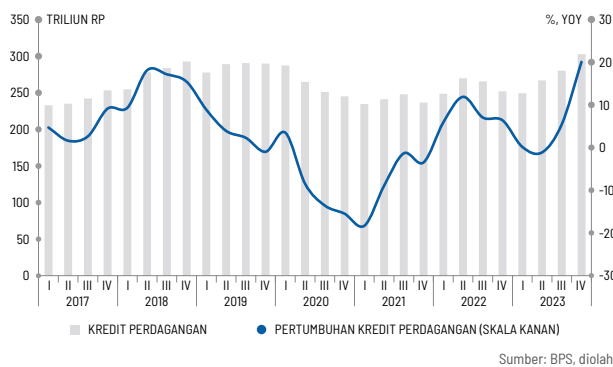
Grafik 2.27 Perkembangan Nilai Impor Bahan Kimia Organik DKI Jakarta



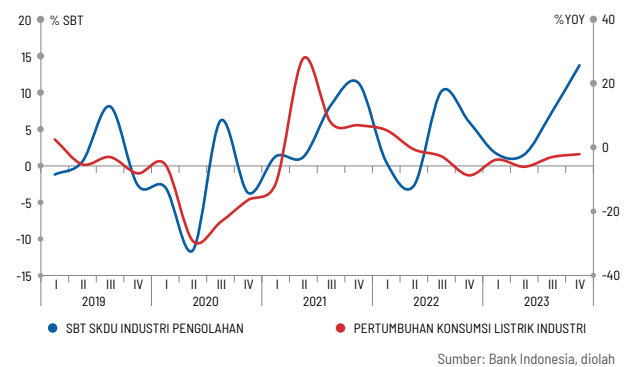
Grafik 2.25 Likert Scale Penjualan Domestik



Grafik 2.28 Perkembangan Nilai Impor Bahan Baku DKI Jakarta



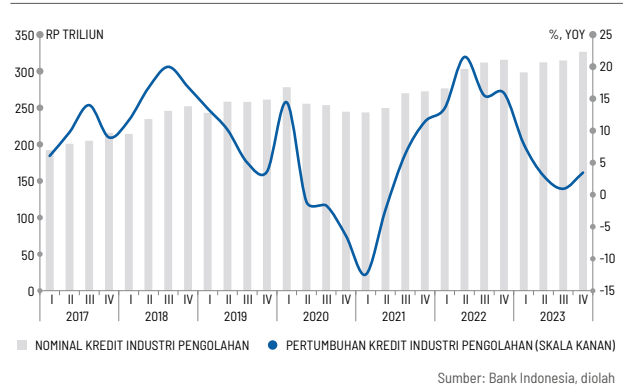
Grafik 2.26 Pertumbuhan Kredit Sektor Perdagangan DKI Jakarta



Grafik 2.29 Perkembangan SBT Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Konsumsi Listrik Industri

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (2,19%, yoy). Pertumbuhan Industri Pengolahan utamanya didorong oleh peningkatan kinerja pada industri TPT dan alas kaki serta industri kimia. Hal ini salah satunya tercermin dari nilai impor bahan kimia organik yang meski masih terkontraksi 3,37% (yoy) pada triwulan IV 2023 namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,70% (yoy) (Grafik 2.27). Nilai impor bahan baku DKI Jakarta juga meski masih terkontraksi 9,1% (yoy) pada triwulan laporan namun, membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 12,90% (yoy) (Grafik 2.28).

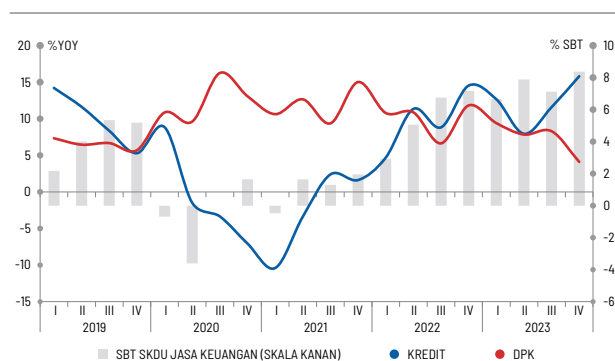


Grafik 2.30 Pertumbuhan Kredit Industri Pengolahan DKI Jakarta

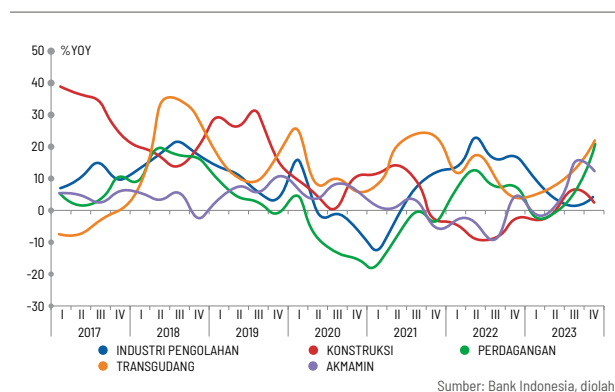
Lebih lanjut, pertumbuhan industri pengolahan tercermin dari nilai SBT kegiatan dunia usaha industri pengolahan yang tercatat sebesar 13,75% pada triwulan laporan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai SBT pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,35%. Selain itu, konsumsi listrik industri DKI Jakarta juga membaik meski masih berkontraksi 2,00% (yoy) namun membaik jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,97% (yoy) (Grafik 2.29). Kinerja penyaluran kredit dari perbankan ke sektor industri pengolahan di DKI Jakarta juga mengalami akselerasi dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,46% (yoy) pada triwulan laporan setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 0,94% (yoy) (Grafik 2.30).

Lapangan Usaha Jasa Keuangan

LU Jasa Keuangan pada triwulan IV 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,24% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (4,75%, yoy). Pertumbuhan yang tinggi ini sejalan dengan kinerja jasa keuangan yang baik pada triwulan laporan. Dari sisi penyaluran kredit, pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh sebesar 15,83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,60% (yoy) (Grafik 2.31). Hal ini juga sejalan dengan nilai SBT kegiatan dunia usaha LU Jasa keuangan yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 8,38%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,13%. Dari sisi sektoral, penyaluran kredit di DKI Jakarta



Grafik 2.31 Perkembangan SBT LU Jasa Keuangan, Penyaluran Kredit, dan DPK DKI Jakarta

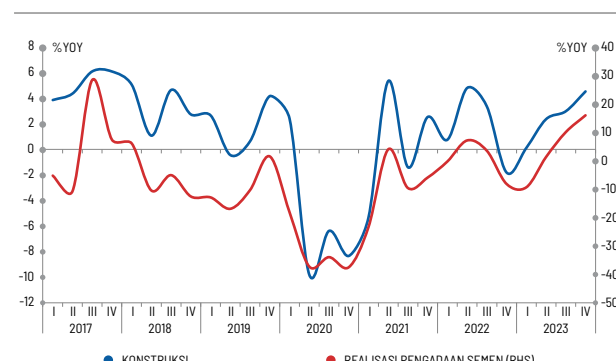


Grafik 2.32 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektoral DKI Jakarta

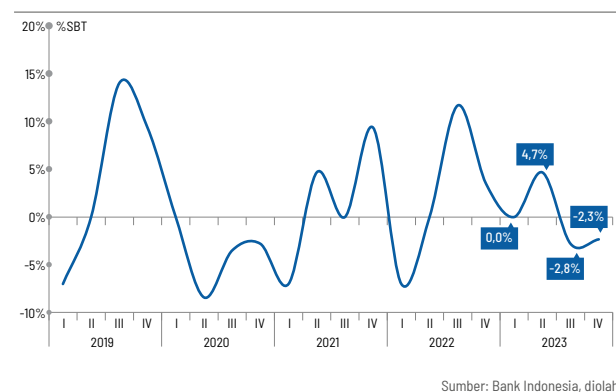
yang mengalami peningkatan tercermin dari beberapa sektor seperti Industri Pengolahan yang tumbuh 7,68% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,46%, yoy), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 12,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 12,11% (yoy), serta Transportasi dan Pergudangan yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,51% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 21,27% (yoy) (Grafik 2.32).

Lapangan Usaha Konstruksi

Sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah dan swasta di DKI Jakarta, LU Konstruksi kembali mencatatkan peningkatan kinerja dengan tumbuh 4,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,98% (yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi tercermin pula dari realisasi pengadaan semen di DKI Jakarta yang pada triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 15,95% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 10,03% (yoy) (Grafik 2.33). Lebih lanjut, nilai SBT kegiatan usaha LU Konstruksi pada triwulan IV meski masih tercatat -2,34% namun membaik jika dibandingkan dengan nilai SBT pada triwulan sebelumnya yang tercatat -2,80% (Grafik 2.34).



Grafik 2.33 Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di DKI Jakarta



Grafik 2.34 Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha LU Konstruksi

Berbagai proyek eksisting Pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga proyek Pemerintah Daerah terus berlanjut pada triwulan IV 2023. Pengerjaan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2 paket CP201 (Stasiun Thamrin dan Monas) fase 2A MRT Jakarta berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan telah mencapai 67,26%. Pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap pekerjaan pengecoran dinding dan lantai peron (*platform slab*) pada suar penyejuk (*cooling tower*), pemasangan *noseblade* persiapan *jacking* pada *entrance* 1 Jalan Museum, serta pengecoran dinding struktur pada *entrance* dua silang barat daya Monas. Selain itu, pengetesan parsial sistem mekanikal elektrik terpasang di gardu induk (RSS), serta pemasangan sistem HVAC, jalur kabel, pipa suplai air, drainase, dan sistem pemadam kebakaran juga telah dilakukan. Adapun, pada Stasiun Thamrin pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi penyelesaian pengecoran lantai beranda peron (*concourse slab*) stasiun, penggalian & pengecoran lantai dasar (*base slab*) stasiun, juga pengecoran kolom sisi utara stasiun. Lebih lanjut, progres konstruksi CP 202 (Harmoni – Sawah Besar – Mangga Besar) telah mencapai 23,81% dan untuk progres konstruksi CP203 (Glodok – Kota), pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal dan saat ini telah mencapai progres sebesar 42,97%.

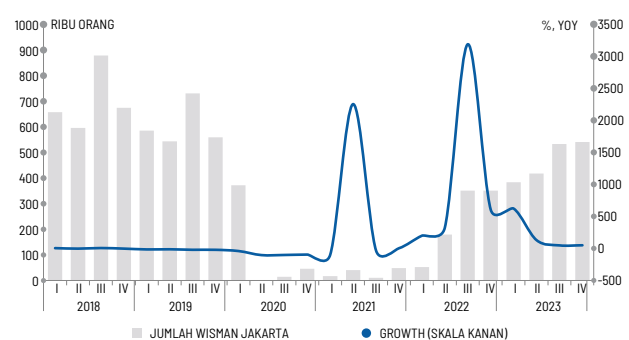
Berdasarkan Building Construction Information (BCI) Asia, beberapa proyek konstruksi yang sedang berlangsung di Jakarta diantaranya New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) sejak Sept 2022 s.d. Agustus 2025, Benhil *Central - Hotel & Serviced Apartment* sejak 15 Maret 2022 s.d. Q2 2025, dan jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg *Toll road development*: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) sejak Juni 2022 s.d. Juli/Des 2024. Selanjutnya, progres proyek pembangunan tanggul pantai atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) terus berlangsung. Pembangunan tanggul Muara Angke dengan target pengerjaan pada 2022 sampai 2028. Proyek pengerjaan 6 ruas jalan tol dalam kota (tahap I sesi B dan C, tahap II, dan tahap III) juga terus berlanjut serta proyek pembangunan kawasan TOD MRT juga terus berjalan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2023 (KBT Istora-Senayan, KBT Blok M-ASEAN, Park and Ride Lebak Bulus, Pelebaran Jalan Pati-Juanda, Pedestrianisasi Jalan Blora, Penataan Taman Kudus, dan KBT Dukuh Atas). Di Jakarta sendiri sepanjang 2023 terdapat total 14 (empat belas) *on going project* dengan nilai tertinggi terdapat pada proyek pekerjaan rancang bangun Terminal Kalibaru tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok.

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi serta Sektor Jasa

Setelah pada beberapa triwulan sebelumnya mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) tumbuh 5,57% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,42% (yoy). Perlambatan kinerja LU Infokom disebabkan oleh penurunan penonton bioskop pada triwulan IV 2023. Kendati demikian, penggunaan internet serta pemanfaatan

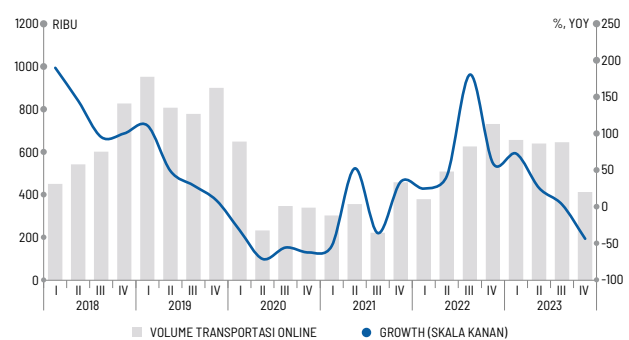
teknologi digital di DKI Jakarta masih terus menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) dan LU Transportasi dan Perdagangan (Transgud) juga turut mengalami perlambatan kinerja. LU Akmamin pada triwulan IV 2023 mencatatkan pertumbuhan 8,40% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 11,62% (yoy), hal ini seiring dengan penurunan jumlah konsumsi rumah tangga untuk restoran, hotel, serta makanan dan minuman. Hal ini juga terlihat dari perkembangan nilai SBT kegiatan usaha LU Akmamin yang tercatat sebesar 0,16%, turun dibandingkan nilai SBT pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,49%. Namun demikian, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DKI Jakarta tercatat tumbuh 53,74% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (13,95%, yoy) (Grafik 2.35).

Lebih lanjut, LU Transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,76% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (13,95%, yoy). Hal ini juga turut disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga untuk komponen transportasi yang tercermin kemudian tercermin dari penggunaan transportasi *online* baik mobil maupun motor yang pada triwulan laporan masing-masing tercatat kontraksi 43,48% (yoy) dan 34,06% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,23% (yoy) dan 3,17% (yoy) (Grafik 2.36 dan 2.37).



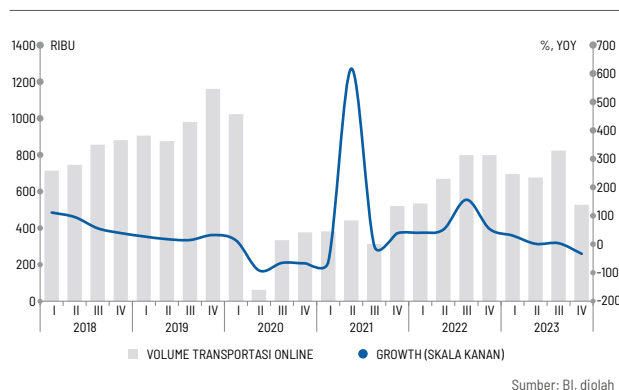
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.35 Perkembangan Kunjungan Wisman di DKI Jakarta

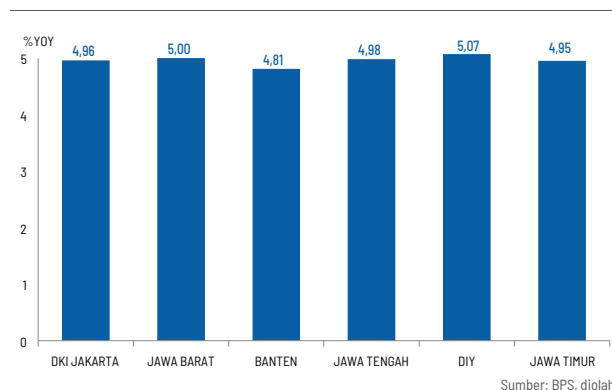


Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.36 Perkembangan Penggunaan Transportasi Mobil Online di DKI Jakarta



Grafik 2.37 Perkembangan Penggunaan Transportasi Motor Online di DKI Jakarta

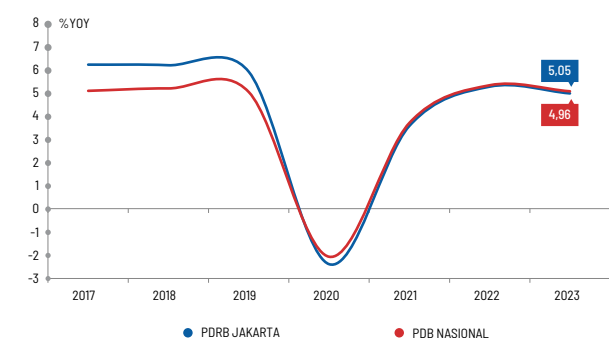


Grafik 2.39 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Provinsi-provinsi di Jawa

B. PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023

Secara keseluruhan tahun, kinerja ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tetap tumbuh tinggi ditengah ketidakpastian ekonomi global.

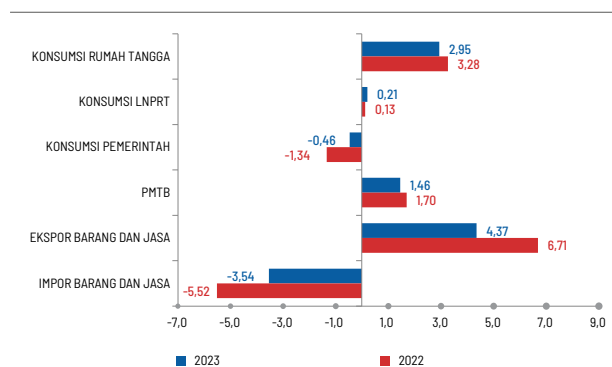
Ekonomi Jakarta pada tahun 2023 tumbuh mencapai 4,96%, meski melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,25% (ctc). Pertumbuhan pada tahun 2023 terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali konsumsi pemerintah yang masih berkontraksi. Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2023 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,05% didorong oleh perbaikan permintaan domestik, kemudian diikuti oleh ekspor yang tumbuh sebesar 7,67%, investasi PMTB sebesar 3,89% seiring meningkatnya realisasi investasi baik oleh swasta maupun pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), ketiga LU utama DKI Jakarta yakni LU Infokom, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi mencatatkan peningkatan kinerja pada tahun 2023. Kendati demikian, LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan mencatatkan perlambatan kinerja pada tahun 2023. Adapun, struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Infokom, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan bobot terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023 masing-masing sebesar 15,69%, 13,74%, 11,36%, 10,82%, dan 10,56%. Kinerja positif ini sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sama halnya dengan perekonomian nasional. Pada tahun 2023, perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,05%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DKI Jakarta (Grafik 2.38). Adapun, kinerja pertumbuhan di DKI Jakarta berada pada urutan ke empat jika dibandingkan dengan pertumbuhan seluruh provinsi lain di Jawa (Grafik 2.39).



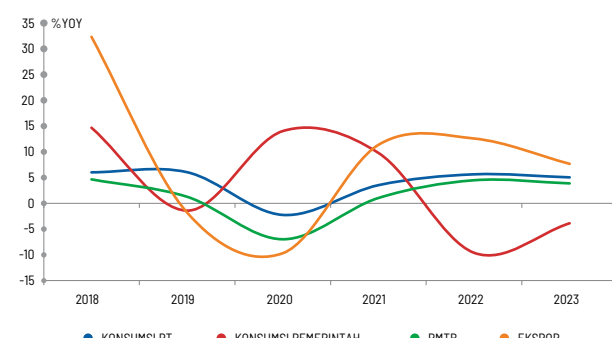
Grafik 2.38 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Selain Konsumsi Pemerintah, seluruh komponen pengeluaran PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023 mencatatkan kinerja positif dan mendukung pertumbuhan dengan komponen Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi paling tinggi (Grafik 2.40). Konsumsi RT tumbuh 5,05% sejalan dengan daya beli dan keyakinan konsumen yang relatif terjaga. Ekspor tumbuh 7,67% sejalan dengan terus berlanjutnya ekspor barang dan jasa. Investasi dan Konsumsi LNPRRT juga menjadi pendorong pertumbuhan, masing-masing tumbuh sebesar 3,89% dan 9,84%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang lebih tinggi tertahan oleh Konsumsi Pemerintah yang masih mengalami kontraksi sebesar 3,86% (yoy) (Grafik 2.41).



Grafik 2.40 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



Grafik 2.41 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Sisi Pengeluaran

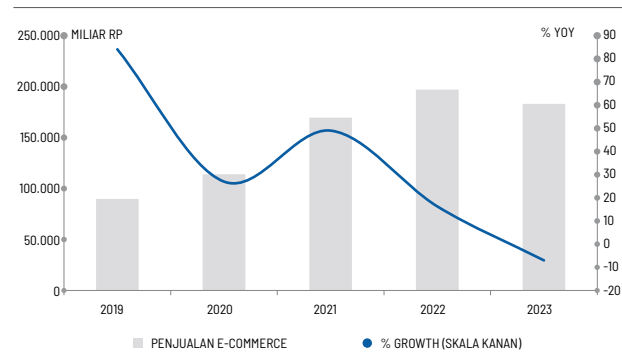
Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Kinerja Konsumsi Rumah Tangga melanjutkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2023 sejalan dengan permintaan domestik yang semakin menguat didukung optimisme masyarakat yang semakin tinggi dilihat dari berbagai *leading indicators* seperti IKK yang terus berada pada level optimis (Grafik 2.42).

Pada tahun 2023 Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,05% (yoy), meski melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,64% (yoy). Terjadinya daya beli dan optimisme konsumen, serta penyelenggaraan berbagai MICE dan event skala internasional pada tahun 2023 mampu mendukung momentum pemulihan ekonomi. Optimisme masyarakat tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada tahun 2022 yang tumbuh 2,32% (yoy) dan terus bertahan pada level optimis (Grafik 2.42). Dengan pangsa sebesar 62,15% dari perekonomian DKI Jakarta, kontribusi Konsumsi RT pada tahun 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 2,95%, meski sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,28%.

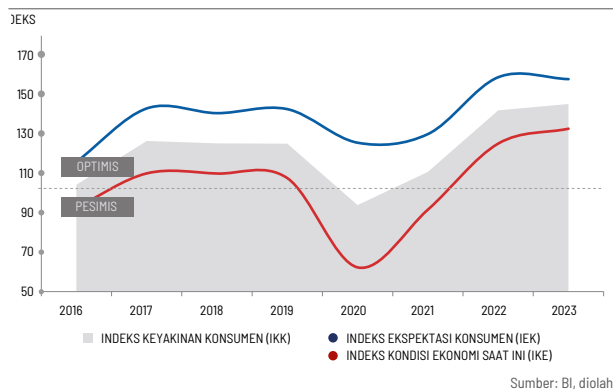
Pertumbuhan tinggi Konsumsi RT juga tercermin dari penjualan ritel luring yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 9,20% (yoy) (Grafik 2.43). Perbaikan penjualan ritel terutama terjadi di suku

cadang dan aksesoris kendaraan, peralatan komunikasi, serta barang rumah tangga, sementara itu makanan dan minuman, bahan bakar kendaraan, barang rekreasi, dan barang lainnya masih mengalami kontraksi namun dalam arah yang semakin membaik. Di sisi lain, kinerja penjualan daring pada tahun 2023 mengalami kontraksi sejalan dengan terkendalanya kasus Covid 19 dan pembatasan sosial yang mulai dilonggarkan sehingga masyarakat sudah mulai lebih banyak melakukan belanja maupun konsumsi secara langsung atau luring (Grafik 2.44).



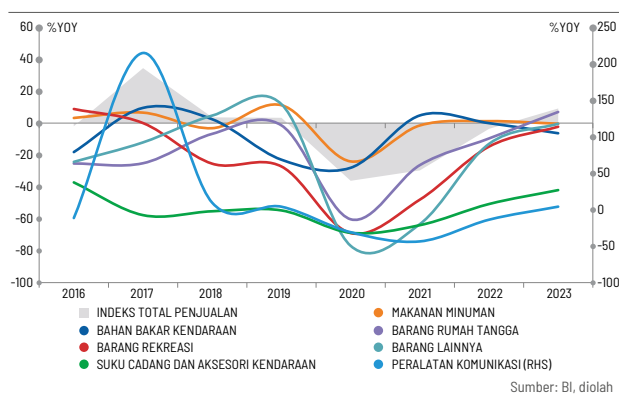
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.44 Perkembangan Penjualan E-commerce



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.42 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.43 Perkembangan Penjualan Eceran

Konsumsi LNPRT

Konsumsi LNPRT tumbuh signifikan pada tahun 2023 sebesar 9,84%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,25%. Pertumbuhan terutama didorong oleh peningkatan kegiatan yang diadakan oleh partai politik seperti Rakernas, Rakerda, Rapimnas, serta persiapan Pemilu, maupun maraknya berbagai aktivitas keagamaan. Konsumsi listrik kategori sosial yang meningkat juga menjadi cerminan pertumbuhan Konsumsi LNPRT.

Konsumsi Pemerintah

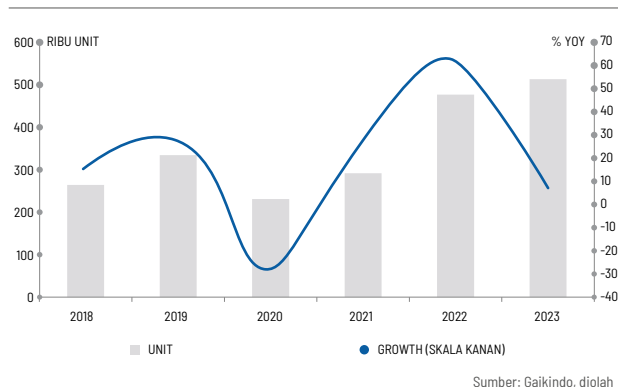
Konsumsi Pemerintah secara tahunan masih terkontraksi sebesar 3,86% (yoy), namun membaik dari tahun sebelumnya yang mencatatkan kontraksi sebesar 9,55% (ctc). Perbaikan Konsumsi Pemerintah ini tercermin dari capaian realisasi Belanja Daerah sebesar 92,45% dari pagu APBD-P 2023 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kendati demikian, secara nominal, pertumbuhan realisasi Belanja Daerah sepanjang tahun 2023 tercatat melambat dibandingkan tahun 2022. Kinerja Belanja daerah tahun 2023 tumbuh 2,76%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,34%. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan kinerja komponen Belanja Modal yang pada tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 0,11%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 28,46%. Dengan *share* sebesar 12,00%, kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2022 sebesar -0,46%.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

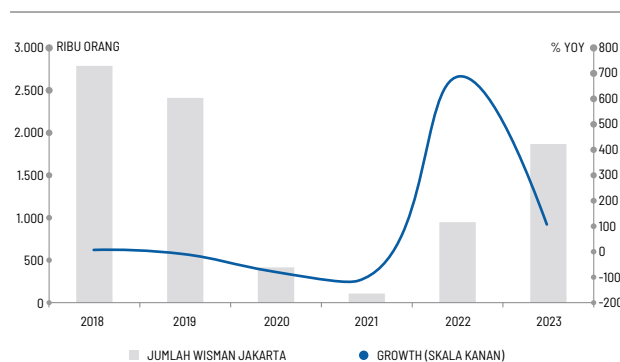
Investasi tumbuh sebesar 3,89% pada tahun 2023, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,51%. Perlambatan investasi terkait dengan perilaku *wait and see* investor pada periode pemilu. Realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2023 masing-masing tumbuh sebesar 6,70% dan 29,00%. Dari sisi investasi bangunan, penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek strategis DKI Jakarta terus berlanjut diantaranya MRT North South Line Fase 2 dan LRT Velodrome Manggarai. Di samping itu, kemudahan perizinan usaha yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui penyesuaian UU Cipta Kerja, digitalisasi pelayanan perizinan, hingga izin operasional dengan kapasitas 100% di lokasi konstruksi juga turut mendorong kelancaran pengerjaan proyek. Lebih lanjut, optimisme dunia usaha yang semakin meningkat sejalan dengan mobilitas masyarakat yang juga terus menggeliat dan pertumbuhan permintaan domestik menjadi pendorong investasi pada sisi nonbangunan. Dengan perannya mencapai 34,24% pada perekonomian DKI Jakarta, kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,46%.

Ekspor

Ekspor Jakarta menjadi penopang pertumbuhan terbesar kedua pada tahun 2023. Aktivitas ekspor mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,67%, meski melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,60%. Kinerja pertumbuhan salah satunya didorong oleh ekspor luar negeri yang bersumber dari komoditas ekspor utama, yakni otomotif yang tumbuh sebesar 6,50% (yoy) (Grafik 2.45). Hal ini seiring dengan kinerja pengapalan kendaraan bermotor dan pasokan chip semikonduktor yang mulai membaik. Pertumbuhan ekspor juga didorong oleh tingginya ekspor jasa, sejalan dengan tetap tumbuh positifnya jumlah kunjungan wisman pada tahun 2023 sebesar 100,71% (yoy) (Grafik 2.46) didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah, salah satunya adalah *Electronic Visa on Arrival* (e-VOA).



Grafik 2.45 Perkembangan Ekspor Mobil CBU



Grafik 2.46 Perkembangan Wisman

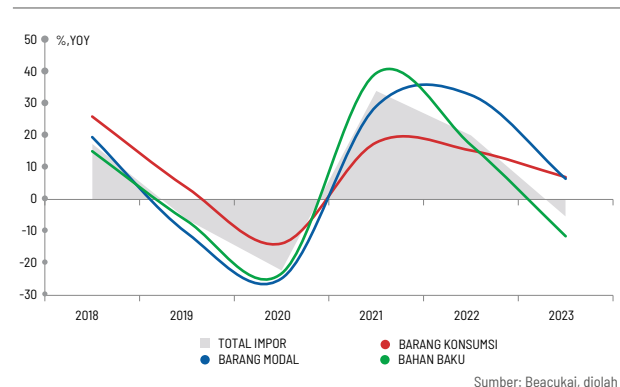
Lebih lanjut, wisatawan asal Asia masih mendominasi, dengan porsi paling tinggi diduduki oleh wisatawan berkebangsaan Tiongkok yang tercatat sebesar 16,29%. Pada tahun 2023, ekspor memberikan kontribusi sebesar 4,37% pada pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Impor

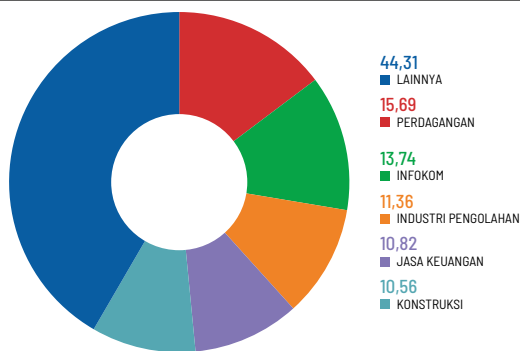
Impor DKI Jakarta tercatat tumbuh 5,25% pada tahun 2023, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,44%. Perlambatan terutama disebabkan oleh impor barang konsumsi dan barang modal sejalan dengan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan investasi yang juga melambat dari pertumbuhan tahun 2022. Impor bahan baku yang mencatatkan kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi penahan komponen Impor untuk tumbuh lebih tinggi (Grafik 2.47). Adapun, pangsa impor sebesar 77,23% pada tahun 2022 memberikan kontribusi -3,54% untuk pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Pada tahun 2023, perekonomian DKI Jakarta mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,96% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 5,25% (yoy). Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh perlambatan kinerja pada

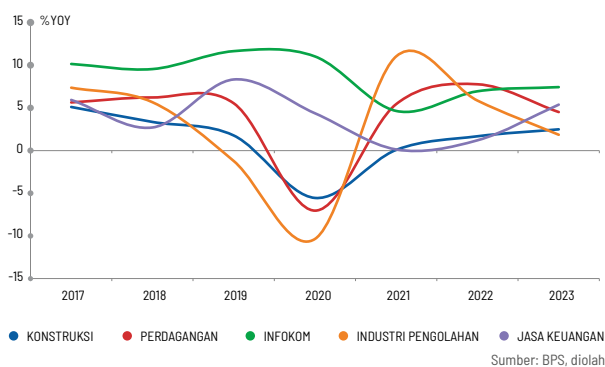


Grafik 2.47 Pertumbuhan Volume Impor Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.48 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta 2023



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.49 Pertumbuhan LU Utama DKI Jakarta 2023

dua LU utama DKI Jakarta yakni LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan. Adapun, struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta terutama ditopang oleh LU Perdagangan, LU Infokom, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan bobot terhadap PDRB DKI Jakarta pada tahun 2023 masing-masing sebesar 15,69%, 13,74%, 11,36%, 10,82%, dan 10,56% (Grafik 2.48). Pada tahun 2023, terdapat tiga LU utama yang mencatatkan peningkatan kinerja yakni LU Infokom, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi dengan masing-masing tumbuh 7,45%, 5,39%, dan 2,50%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang masing-masing sebesar 6,96%, 1,21%, dan 1,69%.

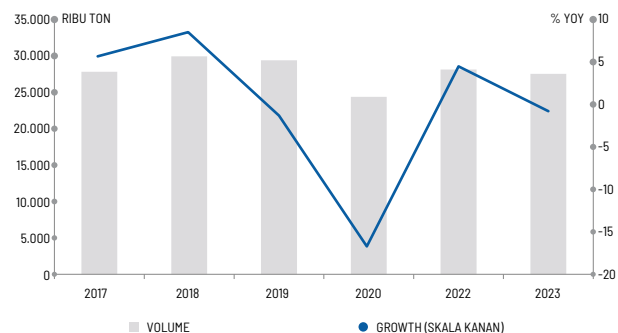
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor pada tahun 2023 tumbuh 4,52%, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 7,78%. Perlambatan kinerja LU Perdagangan pada triwulan laporan juga tercermin dari beberapa hasil survei seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE). Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran, komponen penjualan Makanan dan Minuman serta Bahan Bakar Kendaraan masing-masing berkontraksi 0,40% (yoy) dan 6,33% (yoy) pada tahun 2023 setelah pada tahun 2022 masing-masing

mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,21% (yoy) dan 0,00% (yoy). Lebih lanjut, penjualan ritel daring/e-commerce pada tahun 2023 juga berkontraksi sebesar 7,02% (yoy), berbalik arah dari tahun 2022 yang mencatatkan pertumbuhan 16,19% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan pada seluruh komponennya antara lain penjualan handphone dan aksesoris, hobi dan koleksi lainnya, serta penjualan perlengkapan rumah tangga. Lebih lanjut, berdasarkan data dari GAIKINDO, penjualan mobil di DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebanyak 160,92 ribu unit atau berkontraksi 4,03% (yoy) setelah pada tahun sebelumnya mencatatkan penjualan sebanyak 167,68 ribu unit.

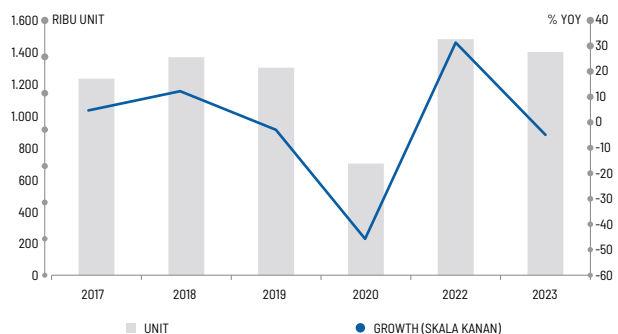
Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan juga turut mencatatkan perlambatan kinerja pada tahun 2023 dengan tumbuh 1,86%, lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 5,87%. Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2023 juga sebagai salah satu dampak dari pelemahan permintaan global untuk produk ekspor industri. Lebih lanjut, penurunan kinerja Industri Pengolahan juga tercermin dari impor bahan baku yang berkontraksi 1,00% (yoy), berbalik arah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,31% (yoy) (Grafik 2.50). Hal yang sama juga terjadi pada produksi mobil di DKI Jakarta yang berkontraksi 5,08% (yoy) pada tahun 2023 setelah pada tahun sebelumnya mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 31,05% (yoy) (Grafik 2.51).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.50 Perkembangan Volume Impor Bahan Baku



Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik 2.51 Perkembangan Produksi Mobil di DKI Jakarta

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

Dengan pangsa sebesar 13,74% terhadap perekonomian DKI Jakarta tahun 2023, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,45%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang sebesar 6,96%. Pertumbuhan tinggi pada LU Infokom seiring dengan pemanfaatan teknologi digital serta penggunaan internet yang semakin tinggi di DKI Jakarta. Selain itu, tingginya kegiatan produksi film di DKI Jakarta juga turut mendorong kinerja LU Infokom. Pemutaran berbagai film di DKI Jakarta baik yang dari luar negeri maupun dalam negeri juga mendorong peningkatan penonton bioskop dan turut pula meningkatkan kinerja daripada LU Infokom.

C. TRACKING PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2024

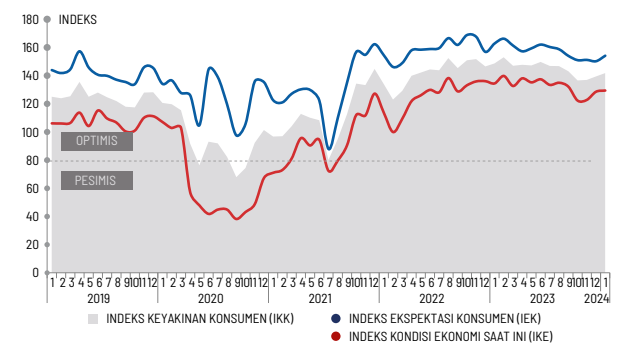
Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2024 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh lebih baiknya kinerja Konsumsi RT, Konsumsi LNPR, dan Konsumsi Pemerintah. Lebih baiknya Konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli yang turut didukung oleh peningkatan penghasilan UMP dan gaji ASN, serta semakin maraknya pelaksanaan MICE dan event skala internasional di Jakarta. Sejalan dengan berlangsungnya safari politik dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, aktivitas politik terus meningkat sehingga mendorong kinerja Konsumsi LNPR. Perbaikan postur belanja APBN dan APBD, akselerasi belanja barang dan jasa, serta belanja bansos untuk mendukung Pemilu turut mendorong perbaikan kinerja Konsumsi Pemerintah. Di sisi lain, kinerja investasi diperkirakan akan tertahan seiring perilaku *wait and see* investor pada periode Pemilu. Lebih lanjut, kinerja ekspor juga diperkirakan tertahan sejalan dengan kondisi geopolitik terutama konflik Laut Merah, isu uji keselamatan kendaraan yang mempengaruhi berhentinya produksi dan ekspor industri otomotif, serta terbatasnya kuota ekspor ke Meksiko.

Dari sisi LU, LU Perdagangan diperkirakan mencatatkan perbaikan kinerja. Peningkatan kinerja LU Perdagangan seiring pula dengan prakiraan peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang didorong oleh terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen, serta meningkatnya penyelenggaraan MICE baik skala nasional maupun internasional di DKI Jakarta. Lebih lanjut, prakiraan peningkatan kinerja LU Perdagangan juga seiring dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung pada triwulan I 2024, peningkatan penghasilan yang sejalan dengan peningkatan UMP dan gaji ASN juga turut mendorong optimisme ini. Di sisi lain, LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh melambat. Prakiraan ini seiring dengan tensi geopolitik yang semakin memanas khususnya di jalur distribusi di Laut Merah. Selain itu, isu uji keselamatan produk ekspor ke Jepang juga turut berdampak pada produksi untuk pasar ekspor. Lebih lanjut, pembatasan ekspor ke Meksiko juga akan turut berdampak pada penurunan produksi di dalam negeri.

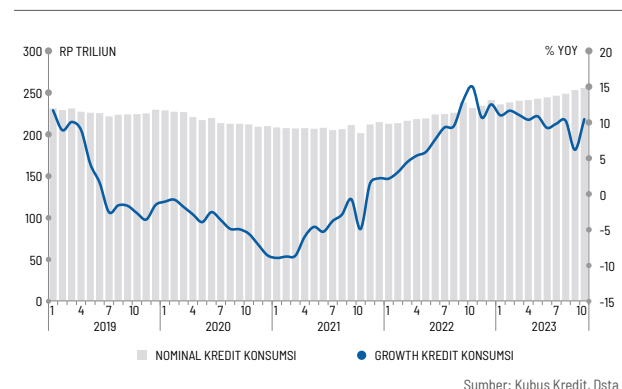
Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Konsumsi Rumah Tangga

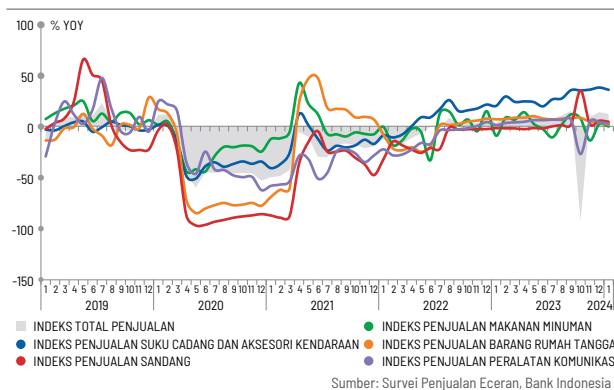
Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan I 2024. Perkiraan meningkatnya konsumsi pada triwulan I 2024 terindikasi dari Indeks Keyakinan Konsumsi (IKK), Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) berdasarkan hasil Survei Konsumen (Grafik 2.52). IKK pada triwulan I 2024 (Jan) sebesar 141,86, lebih tinggi jika dibandingkan IKK pada triwulan IV 2023 (137,75). IEK pada triwulan I 2024 (Jan) juga tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 129,52 dibandingkan IEK pada triwulan IV 2023 (124,64). Meningkatnya IEK terutama didorong oleh meningkatnya indeks penghasilan konsumen dari 110,29 menjadi 122,57. Indeks konsumsi barang tahan lama juga meningkat menjadi 130,29 pada triwulan I 2024 (Jan) dari 126,29 pada triwulan I 2024. Adapun IEK pada triwulan I 2024 (Jan) sebesar 154,19, juga lebih tinggi dibandingkan IEK pada triwulan IV 2023 (150,29) yang terutama didorong oleh peningkatan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Perkiraan peningkatan konsumsi juga terindikasi dari penyaluran kredit konsumsi pada triwulan I 2024 (Jan) yang tercatat sebesar Rp260,25T atau tumbuh 10,46% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan penyaluran kredit pada triwulan IV 2023 (7,82%, yoy) (Grafik 2.53). Selain itu, prakiraan meningkatnya konsumsi RT juga tercermin dari indeks penjualan eceran pada triwulan I 2024 (Jan) tercatat sebesar 56,34, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata indeks pada triwulan IV 2023 yang sebesar 54,47. Peningkatan ini



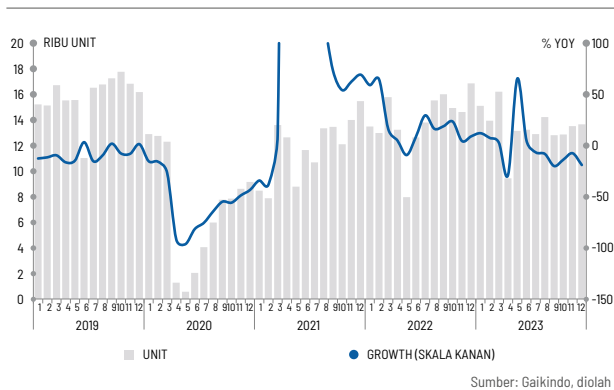
Grafik 2.52 Survei Konsumen (Perkembangan IKK, IEK, dan IKE)



Grafik 2.53 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi di Jakarta



Grafik 2.54 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran



Grafik 2.55 Perkembangan Penjualan Mobil di Jakarta

terutama didorong oleh peningkatan penjualan pada makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 2,62% (yoy) (Grafik 2.54).

Di sisi lain, kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh meningkat tertahan oleh kinerja penjualan mobil Jakarta yang pada Januari 2024 tercatat sebanyak 11,139 unit atau berkontraksi lebih dalam sebesar -26,09% (yoy) dari triwulan IV 2023 yang juga mengalami kontraksi sebesar -11,95% (yoy). (Grafik 2.55).

Konsumsi Pemerintah

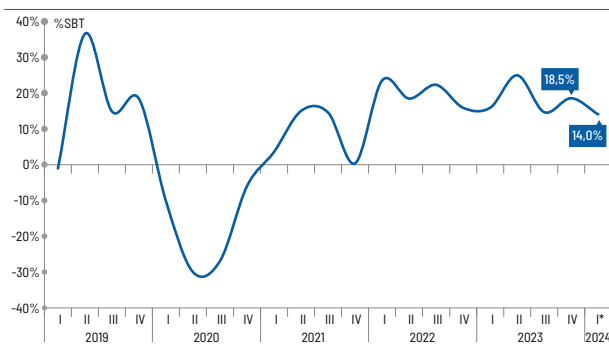
Kinerja konsumsi Pemerintah juga diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan I 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan terutama didorong oleh kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja bansos untuk kepentingan pemilu dan kenaikan belanja pegawai didorong oleh kenaikan gaji ASN. Pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 81,72 Triliun atau naik sebesar 2,71% dari Rp 79,56 Triliun pada 2023. Berdasarkan komponennya, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,52% dibandingkan

APBD-P 2023 dari Rp 70,66 Triliun menjadi Rp 72,45 Triliun. Dari sisi belanja, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,63% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 72,14 Triliun menjadi Rp 72,60 Triliun. Adapun kenaikan pagu belanja pegawai sebesar 6,85% dari RAPBD 2023 sejalan dengan kenaikan gaji ASN pada 2024. Lebih lanjut, kenaikan pagu belanja barang dan jasa dalam APBD sebesar 0,24% serta belanja bantuan sosial pada triwulan I 2024 diperkirakan mendorong kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan berjalan.

Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

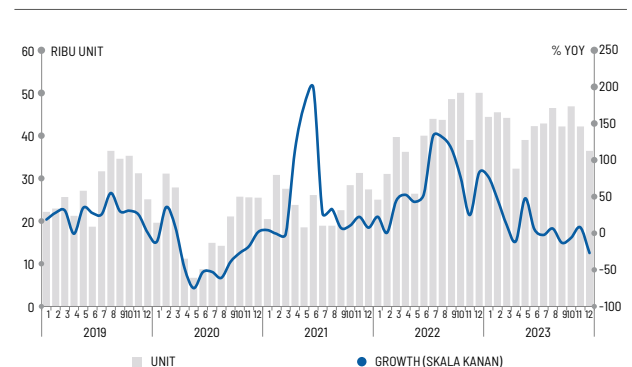
Adapun, kinerja investasi pada triwulan I 2024 diperkirakan tumbuh melambat. Perlambatan kinerja investasi salah satunya terindikasi dari perkembangan investasi kegiatan usaha pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) (Grafik 2.56). Berdasarkan hasil SKDU, perkembangan investasi kegiatan usaha pada Triwulan I 2024 diperkirakan melambat menjadi sebesar 14,02%, jika dibandingkan triwulan sebelumnya (18,52%). Sikap *wait and see investor* pada periode pemilu diperkirakan akan berdampak terhadap tertahannya investasi. Kondisi ini tercermin dari perkembangan data historis pertumbuhan investasi pada periode pemilu sebelumnya yaitu 2019 (penyelenggaraan 17 April 2019) dan 2014 (penyelenggaraan 9 April dan 9 Juli 2014). Pada periode pemilu 2019, pertumbuhan investasi melambat dari 2,18% pada triwulan IV 2018 menjadi 1,55% (yoy) pada triwulan I 2019 dan kembali melambat pada triwulan II 2019 menjadi -0,97% (yoy). Sedangkan pada periode pemilu 2014, pertumbuhan investasi melambat dari 3,18% (yoy) pada triwulan II 2014 menjadi 1,59% (yoy) pada triwulan III 2014 dan kembali meningkat setelah diselenggarakannya pemilu.

Meski demikian, melambatnya kinerja investasi pada triwulan I 2024 lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya pertumbuhan positif beberapa indikator. Pagu belanja modal pada RAPBD 2024 yang meningkat sebesar 6,64% dari Rp10,85 Triliun pada APBD-P 2023 menjadi Rp11,57 Triliun pada RAPBD 2024 mendukung keberlangsungan proyek strategis multitalah pemerintah seperti MRT dan TOD sehingga mendorong investasi. Selain itu banyak proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta yaitu Thamrin Nine - Autograph Tower 1 (Waldorf Astoria) & Luminary Tower 2 (Pan Pacific, Park Royal) & Leparc senilai 326,96 juta USD, MRT CP203 senilai 320,95 juta USD, MRT CP201 senilai 271,4 juta USD, New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) senilai 257,3 juta USD, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment senilai 115,38 juta USD, Mandiri IT Tower - Bumi Slipi Jakarta Barat senilai 57,42 juta USD, dan jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll road development: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) senilai 109,87 juta USD. Serta, masuknya berbagai proyek green investment seperti waste management, infrastruktur EV, dan *green commercial/industrial zone*.



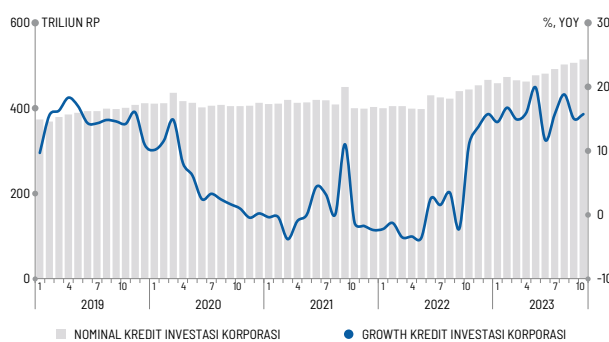
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.56 Perkembangan Investasi Kegiatan Usaha (SKDU)



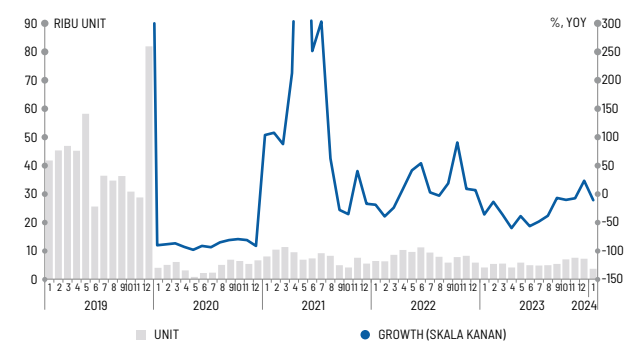
Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.58 Perkembangan Ekspor Mobil CBU



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.57 Perkembangan Kredit Investasi Korporasi

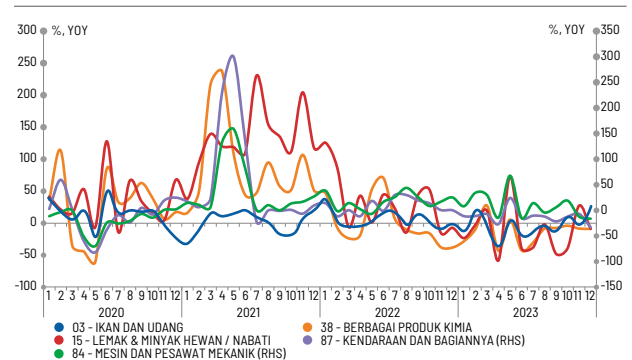


Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.59 Perkembangan Ekspor Mobil CKD

Ekspor

Kinerja ekspor pada triwulan I 2024 diperkirakan masih tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Melambatnya kinerja ekspor pada triwulan berjalan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tertahannya ekspor salah satu industri unggulan Jakarta (otomotif) karena kendala terhambatnya jalur distribusi akibat konflik di Laut Merah, isu uji keselamatan kendaraan yang berdampak pada berhentinya produksi dan ekspor ke Jepang, batasan kuota ekspor ke Meksiko, serta masih tertahannya perekonomian negara tujuan utama ekspor Jakarta seperti Tiongkok dan Jepang. Kondisi ini terindikasi dari ekspor mobil CBU dan CKD, serta ekspor komoditas unggulan Jakarta yang mengalami kontraksi. Ekspor mobil CBU pada triwulan I 2024 (Jan) tercatat sebesar 29.505 unit atau mengalami kontraksi sebesar 33,91% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2023 yang juga mengalami kontraksi sebesar 9,65% (yoy) (Grafik 2.58). Ekspor mobil CKD pada triwulan I 2024 (Jan) tercatat sebesar 3.570 unit atau mengalami kontraksi 27,41% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan triwulan IV 2023 yang kontraksi sebesar 0,70% (yoy) (Grafik 2.59). Beberapa komoditas unggulan Jakarta seperti mesin dan peralatan listrik, mesin dan pesawat mekanik, berbagai produk kimia, pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, serta karet dan barang dari karet mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu masing-masing sebesar -24,48%; -4,65%; -6,79%; -3,73%; -20,37% dan -13,17% (Grafik 2.60). Sementara itu, komoditas lainnya seperti perhiasan/permata, ikan dan udang, serta lemak dan minyak hewan/nabati mengalami perbaikan.

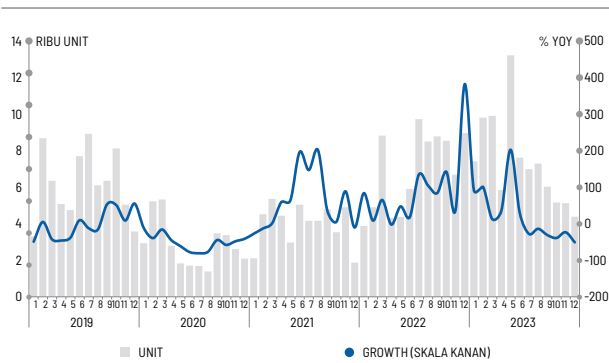


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 2.60 Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan

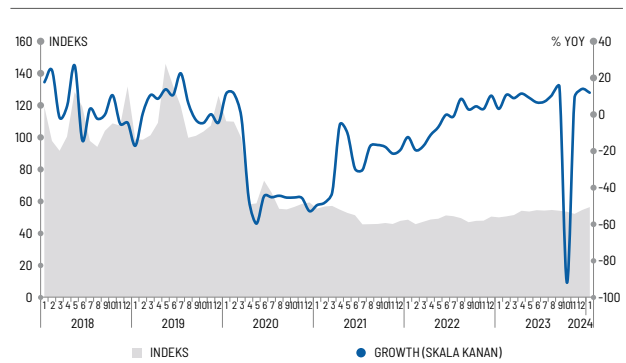
Impor

Sejalan dengan kinerja ekspor, kinerja impor pada triwulan I 2024 diperkirakan juga tumbuh melambat. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh menurunnya impor barang modal sejalan dengan melambatnya investasi dan menurunnya impor bahan baku sejalan dengan melambatnya kinerja ekspor dan industri pengolahan. Sementara itu, impor barang konsumsi diperkirakan masih akan tetap tumbuh positif sejalan dengan meningkatnya konsumsi RT. Melambatnya kinerja impor terindikasi dari impor mobil CBU pada Januari yang tercatat sebanyak 4.245 unit atau mengalami kontraksi 53,01% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan triwulan lalu yang juga mengalami kontraksi sebesar 39,45% (yoy) (Grafik 2.61).



Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik 2.61 Perkembangan Nilai Impor Mobil (Otomotif)



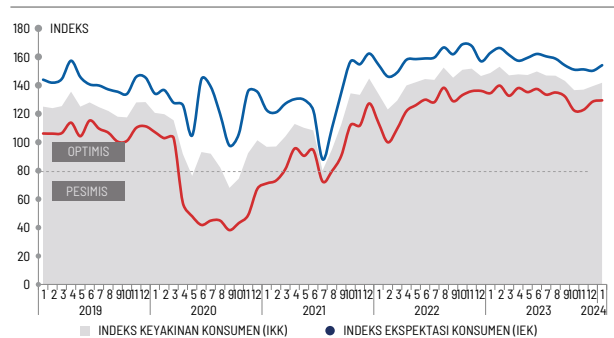
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.62 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

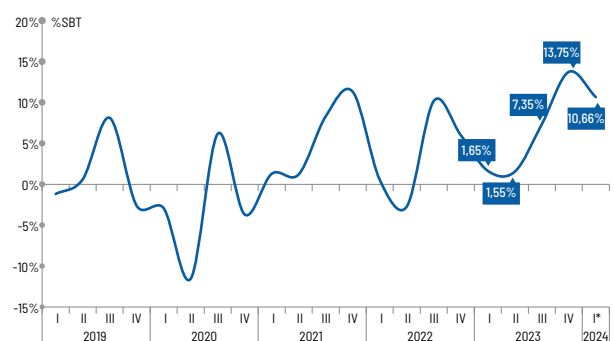
Kinerja LU Perdagangan diperkirakan tumbuh positif pada triwulan I 2024 dan lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja LU Perdagangan seiring pula dengan prakiraan peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga yang didorong oleh terjaganya daya beli dan optimisme konsumen serta semakin meningkatnya penyelenggaraan MICE baik skala nasional maupun internasional di DKI Jakarta. Lebih lanjut, prakiraan peningkatan kinerja LU Perdagangan juga seiring dengan penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung pada triwulan I 2024, serta peningkatan penghasilan yang sejalan dengan peningkatan UMP dan gaji ASN. Prakiraan peningkatan kinerja LU Perdagangan kemudian tercermin pula dari total Indeks Penjualan Eceran (IPE) yang berdasarkan hasil survei pada Januari 2024 sebesar 56,34, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata IPE pada triwulan IV 2023 yang sebesar 53,27 (Grafik 2.62). Lebih lanjut, optimisme konsumen yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen pada Januari 2024 sebesar 141,86, lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata triwulan IV 2023 yang sebesar 137,74 (Grafik 2.63), juga turut mendukung optimisme peningkatan kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2024.

Selanjutnya, LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh melambat pada triwulan I 2024, seiring dengan tensi geopolitik yang semakin memanas khususnya di jalur distribusi di Laut Merah. Selain itu, isu uji keselamatan juga turut berdampak pada terhambatnya produksi dan pengiriman ke Jepang. Lebih lanjut, pembatasan ekspor ke Meksiko juga akan turut berdampak pada penurunan produksi di dalam negeri. Prakiraan perlambatan kinerja pada LU Industri Pengolahan tercermin dari nilai SBT kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2024 yang sebesar 10,66%, lebih rendah dibandingkan nilai SBT pada triwulan IV 2023 yang sebesar 13,75% (Grafik 2.64). Produksi mobil di DKI Jakarta, berdasarkan data dari GAIKINDO, pada Januari 2024 tercatat sebanyak 100,95 ribu unit, lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi pada triwulan IV 2023 yang sebesar 110,82 ribu unit (Grafik 2.65). Meskipun demikian, kinerja penyaluran kredit pada Industri Pengolahan masih



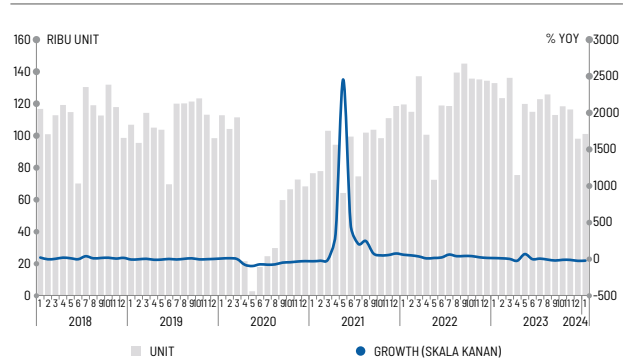
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.63 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK



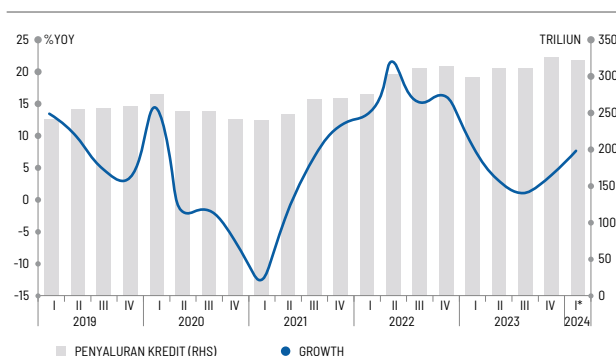
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.64 Perkembangan SBT Industri Pengolahan



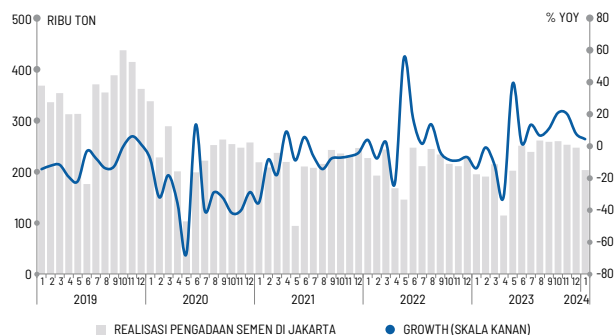
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.65 Perkembangan Produksi Mobil di DKI Jakarta



Grafik 2.66 Perkembangan Penyaluran Kredit Industri Pengolahan

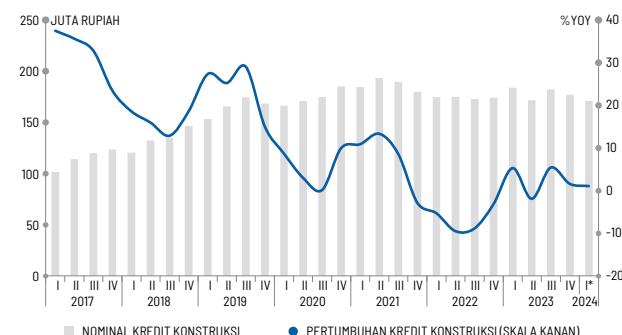
mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,68% (yoy) pada Januari 2024, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan IV 2023 yang sebesar 3,46% (yoy) (Grafik 2.66).



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 2.67 Realisasi Pengadaan Semen di DKI Jakarta

Lebih lanjut, kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024 diperkirakan tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja LU Konstruksi seiring dengan perlambatan kinerja Investasi yang dipengaruhi oleh *wait and see* investor pada periode pemilu. Selain itu terdapat pengurangan jam kerja saat Ramadan. Realisasi pengadaan semen di DKI Jakarta pada Januari 2024 tercatat sebanyak 203,12 ribu ton, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata pengadaan semen pada triwulan IV 2023 yang sebesar 252,99 ribu triliun. Pertumbuhan realisasi pengadaan semen di DKI Jakarta pada Januari 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,28% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata pada triwulan IV 2023 yang sebesar 16,16% (yoy) (Grafik 2.67). Selanjutnya, perlambatan kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari perkembangan penyaluran kredit Konstruksi yang pada Januari 2024 sebesar 1,05% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,58% (yoy) (Grafik 2.68).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.68 Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi



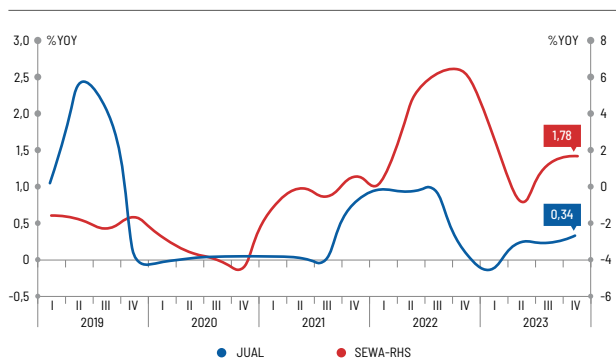
BOKS 1

Perkembangan Properti di DKI Jakarta

Harga sewa properti komersial di DKI Jakarta meningkat dari 1,14% pada triwulan III 2023 menjadi 1,78% pada triwulan IV 2024 (Grafik 1.1). Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan masyarakat akan sewa yang masih tumbuh tinggi di tengah ketersediaan unit properti sewa yang tumbuh melambat (Grafik 1.2). Berdasarkan jenis propertinya, peningkatan harga sewa terutama bersumber dari peningkatan harga sewa perkantoran dan *convention hall*, sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut serta masifnya penyelenggaraan MICE dan event di Jakarta.

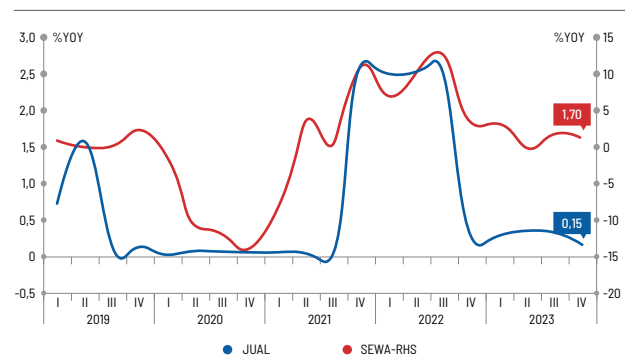
Sementara itu, harga jual properti komersial di DKI Jakarta juga meningkat namun terbatas dari 0,26% pada triwulan III 2023 menjadi 0,34% pada triwulan IV 2023 (Grafik 1.1). Harga jual yang meningkat terutama didorong oleh meningkatnya harga jual pada jenis properti perkantoran. Sementara itu, harga jual untuk properti ritel (mall dan pusat perbelanjaan) serta pergudangan cenderung stabil pada triwulan IV 2023.

Dari sisi properti residensial, harga jual properti residensial di DKI Jakarta (termasuk Bodetabek) pada triwulan IV 2023 juga meningkat (Grafik 1.3). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan yang tercermin dari penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang masih tumbuh tinggi, yaitu sebesar 6,3% (yoy) pada triwulan IV 2023 (Grafik 1.4). Berdasarkan jenis propertinya, pertumbuhan KPR yang tinggi terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran KPR untuk rumah tinggal tipe besar (>70) dan menengah (22-70). Sementara itu, penyaluran KPR untuk rumah tinggal tipe kecil berkontraksi sejalan dengan pasokannya yang makin terbatas. Terbatasnya pasokan rumah tinggal tipe kecil sejalan dengan rendahnya porsi unit tipe kecil yang dibiayai oleh kredit yaitu sebesar 9,7%. Sementara itu, porsi unit rumah tinggal yang dibiayai kredit lebih didominasi oleh unit tipe menengah (49,3%) dan tipe besar (41,0%). Sementara itu, penyaluran KPR untuk flat/apartemen tumbuh melambat yang terutama bersumber dari melambatnya penyaluran KPR untuk tipe kecil (<21). Sama halnya dengan penyaluran KPR pada rumah tapak, melambatnya penyaluran



Sumber : Survei Properti Komersial, Bank Indonesia

Grafik B1.1 Perkembangan Harga Sewa dan Harga Jual Properti Komersial di DKI Jakarta



Sumber : Survei Properti Komersial, Bank Indonesia

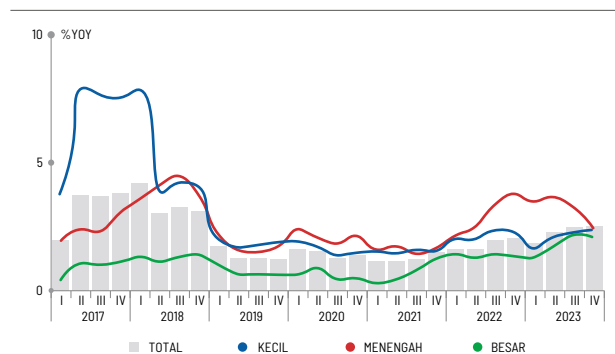
Grafik B1.2 Perkembangan Permintaan Properti Komersial di DKI Jakarta



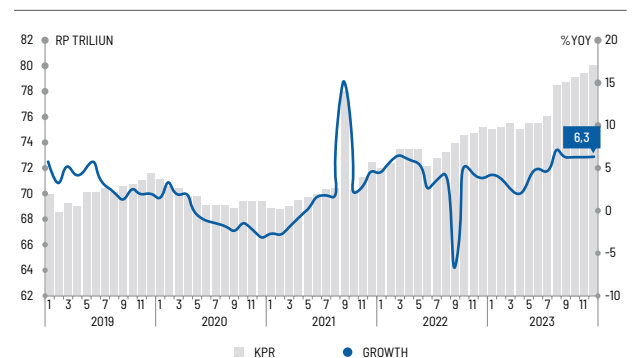
KPR untuk flat/apartemen pada tipe kecil dipengaruhi oleh minimnya pasokan apartemen baru dengan tipe kecil (<21).

Sinergi kebijakan telah dan akan terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan pada sektor properti. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong sektor properti yaitu antara lain (i) Bank Indonesia dengan melakukan perpanjangan kelonggaran Loan to Value Ratio (LTV) 100%/DP 0% hingga 31 Desember 2024; (ii) Kementerian Keuangan dengan melakukan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) Pembelian Rumah hingga 31 Desember 2024; (iii) Kementerian PUPR dengan menghadirkan program KPR Bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM); serta (iv) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami), membangun bantuan hunian kepemilikan (rumapadu),

dan menghadirkan program hunian terjangkau. Namun demikian, sejalan dengan masih rendahnya penyaluran kredit untuk hunian tipe kecil, perluasan pembangunan rusunami atau apartemen dengan harga terjangkau di Jakarta dan Bodetabek diperlukan untuk memperbesar pasokan dan kepemilikan hunian tipe kecil (<22) dan menengah (22 s.d. 70) pada masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, perluasan tersebut juga perlu disertai dukungan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Dengan ketersediaan pasokan yang cukup, fasilitas kredit yang terjangkau serta fasilitas keringanan pajak, maka diharapkan sektor properti dapat tumbuh lebih tinggi disertai dengan kenaikan harga yang lebih terkendali.



Grafik B1.3 Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek



Grafik B1.4 Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta

BAB 3

KEUANGAN PEMERINTAH

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD-P 2023, berdasarkan pengesahan DPRD, ditargetkan masing-masing sebesar Rp 70,66 Triliun dan Rp 72,14 Triliun, lebih rendah dari APBD murni 2023 yang masing-masing sebesar Rp 74,38 Triliun dan Rp 74,61 Triliun. Pada tahun 2023, secara kumulatif, capaian realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,34% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2022. Dari sisi belanja, capaian realisasi Belanja Daerah mencapai 92,45% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 84,32% dari pagu APBD-P 2022.

Kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 tetap kuat. Hal ini didorong oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif pada komponen PPh Non Migas, PPN dan PPNBM, PBB, Pajak Lainnya, Cukai, Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN serta Pendapatan BLU. Belanja K/L di DKI Jakarta, pada triwulan IV 2023, juga mencatatkan kinerja baik. Hal ini didukung oleh peningkatan pada komponen Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang pada Kementerian Sosial serta Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Pembiayaan JKN/KIS pada Kementerian Kesehatan.



**Realisasi
Pendapatan Daerah (yoy)**



19,43%
Triwulan IV 2023
-39,33%
Triwulan III 2023

**Realisasi Pendapatan
Asli Daerah (yoy)**



15,60%
Triwulan IV 2023
-31,96%
Triwulan III 2023

**Realisasi
Belanja Daerah (yoy)**



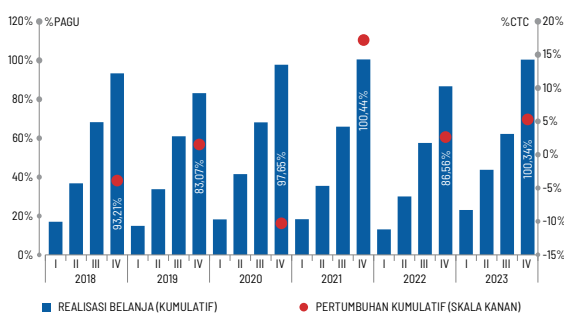
16,76%
Triwulan IV 2023
-19,16%
Triwulan II 2023

A. GAMBARAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) PROVINSI DKI JAKARTA 2023

Secara keseluruhan, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023, berdasarkan pengesahan DPRD, ditargetkan sebesar Rp 79,55 Triliun, lebih rendah dari APBD murni 2023 yang sebesar Rp 83,78 Triliun. Dibandingkan APBD-P 2022, menurun sebesar 3,93% (Tabel 3.1). Penurunan APBD-P pada tahun 2023 bersumber dari penurunan seluruh komponen baik pendapatan maupun belanja. Penurunan APBD-P 2023 seiring dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencapaian realisasi anggaran yang lebih realistis pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan APBD murni, jumlah pendapatan yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 74,38 Triliun turun menjadi Rp 70,66 Triliun, hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan pagu anggaran Pendapatan Asli Daerah yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 52,77 Triliun lalu turun menjadi Rp 48,44 Triliun. Dari sisi belanja, yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 74,61 Triliun pada APBD murni kini mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 71,14 Triliun pada APBD-P 2023. Penurunan pagu belanja disebabkan oleh penurunan pagu belanja modal utamanya belanja modal tanah dan belanja modal gedung dan bangunan. Lebih lanjut, penurunan pagu pada penerimaan pinjaman daerah serta penyertaan modal daerah juga turut menjadi penyebab turunnya APBD-P 2023 jika dibandingkan dengan APBD murni.

B. REALISASI PENDAPATAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pada tahun 2023, secara kumulatif, capaian realisasi Pendapatan Daerah mencapai 100,34% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi jika dibandingkan periode sama beberapa tahun sebelumnya namun, sedikit di bawah capaian tahun 2021 (Grafik 3.1). Capaian realisasi pendapatan yang lebih tinggi disebabkan oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat sebesar 101,18% dari pagu serta capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 86,69% (Grafik 3.2). Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2023



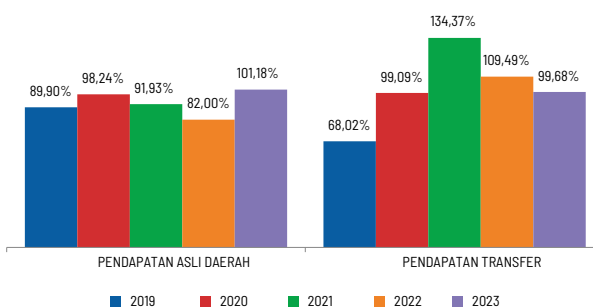
Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.1 Realisasi Kumulatif Pendapatan Daerah

tercatat sebesar Rp 70,90 Triliun atau meningkat sebesar 5,29%, lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,81%. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,39% dan Pendapatan Transfer sebesar 6,88%. Pertumbuhan pada komponen PAD didukung oleh akselerasi pada Retribusi Daerah tahun 2023 yang sebesar 20,65%, didukung oleh Retribusi Perizinan Tertentu serta Retribusi Jasa Umum. Adapun, akselerasi Pendapatan Transfer utamanya didukung oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami peningkatan sebesar 5,61% didorong oleh pendapatan transfer hibah yang tidak diperoleh pada tahun sebelumnya serta pendapatan dari DAK Nonfisik Tunjangan Profesi Guru PNSD serta DAK Nonfisik BOS Reguler.

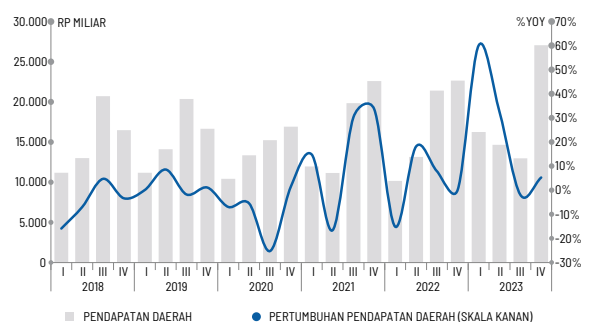
Pada triwulan IV 2023, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta terakselerasi. Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp 27,03 Triliun atau tumbuh 19,43% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 39,33% (yoy) serta tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sama tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,25% (yoy) (Grafik 3.3 dan Tabel 3.2). Pertumbuhan Pendapatan Daerah utamanya didorong oleh akselerasi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,60% (yoy) dan 31,96% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang masing-masing berkontraksi 31,96% (yoy) dan 55,85% (yoy) (Grafik 3.4).

%PAGU



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Capaian PAD dan Transfer DKI Jakarta Tw IV 2023

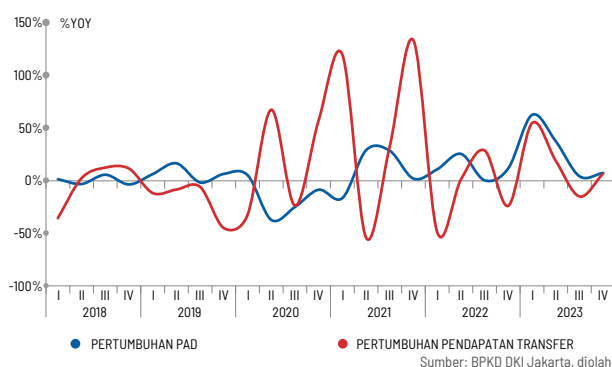


Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

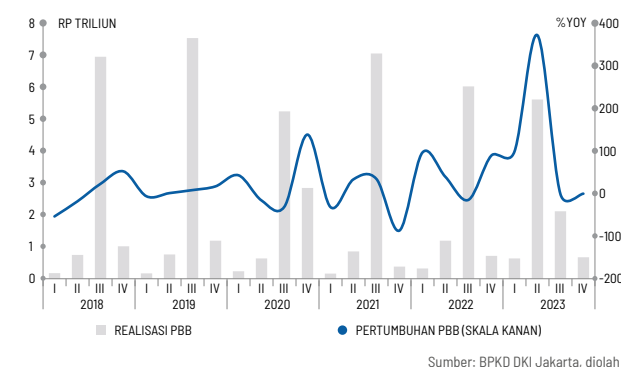
Grafik 3.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah

Peningkatan kinerja PAD didorong oleh pertumbuhan tinggi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 8793,43% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya dan triwulan sama tahun sebelumnya yang masing-masing terkontraksi 73,36% (yoy) dan 96,18% (yoy) (Grafik 3.5). Pajak Daerah juga menjadi penopang kinerja PAD dengan tumbuh 19,02% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya terkontraksi 37,89% (yoy). Kinerja baik ini seiring dengan pemberian insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023. Peningkatan kinerja Pajak Daerah utamanya disebabkan oleh perbaikan kinerja Pajak Bumi dan

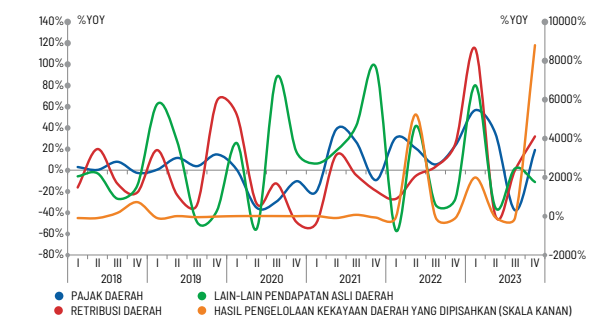
Bangunan yang meski masih terkontraksi 6,02% (yoy) namun membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 64,90% (yoy) (Grafik 3.7). Pajak Rokok pada triwulan laporan juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,91% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,15% (yoy). Kendati demikian, seiring dengan perlambatan kinerja LU Akamin, penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel masing-masing mencatatkan perlambatan kinerja dengan tumbuh 53,37% (yoy), 15,11% (yoy), dan 1,48% (yoy), melambat jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 57,11% (yoy), 31,47% (yoy), dan 13,84% (yoy) (Grafik 3.8). Selanjutnya, Retribusi Daerah yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 31,77% (yoy) juga turut mendorong kinerja baik pada PAD pada triwulan laporan.



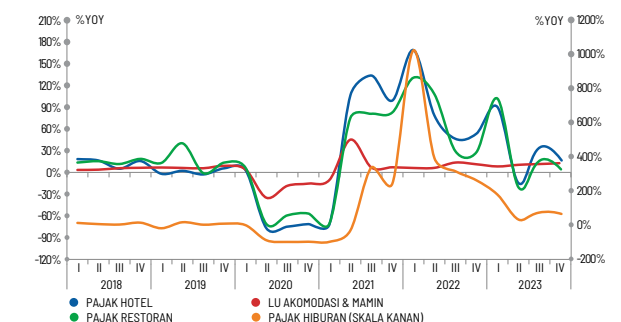
Grafik 3.4 Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Transfer



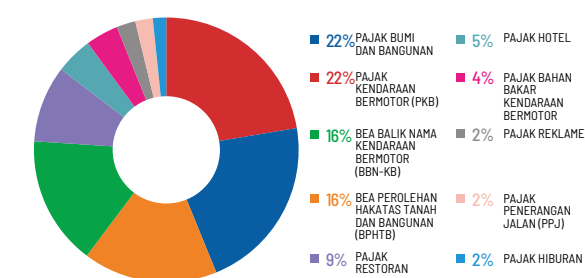
Grafik 3.7 Perkembangan PBB DKI Jakarta



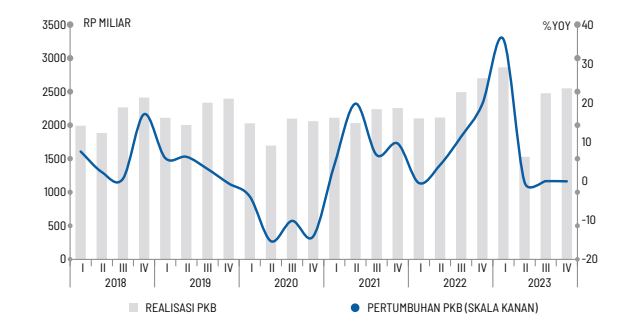
Grafik 3.5 Pertumbuhan Komponen PAD



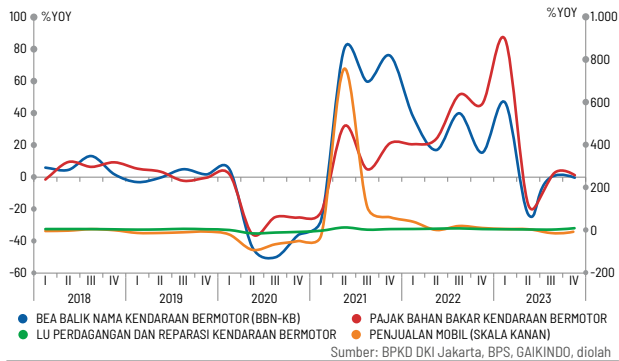
Grafik 3.8 Perkembangan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan



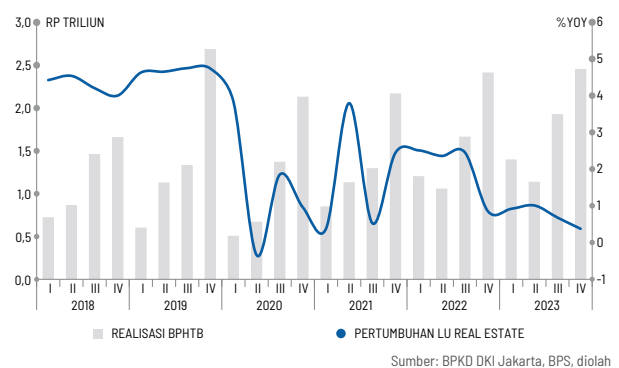
Grafik 3.6 Pangsa Realisasi Pendapatan Komponen Pajak Daerah Tw IV 2023



Grafik 3.9 Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor



Grafik 3.10 Perkembangan BBN-KB, BBKB, LU Perdagangan, dan Penjualan Mobil



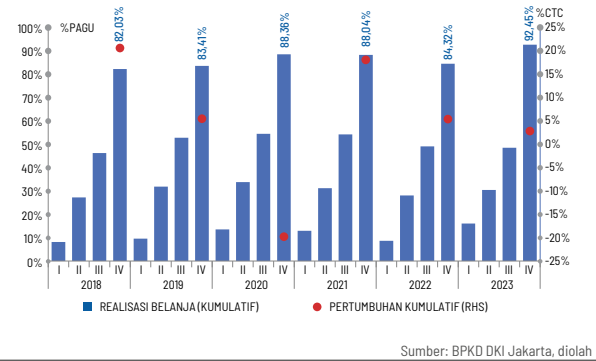
Grafik 3.11 Perkembangan BPHTB dan LU Real Estate DKI Jakarta

Lebih lanjut, kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada triwulan IV 2023 berkontraksi lebih dalam sebesar 5,53% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi 0,64% (yoy) (Grafik 3.9). Sejalan dengan kinerja Pajak Kendaraan Bermotor yang berkontraksi, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga berkontraksi 5,01% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,07% (yoy) (Grafik 3.10).

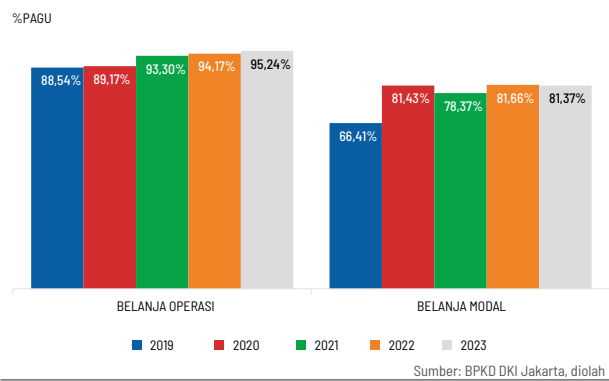
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada triwulan IV 2023 tumbuh 1,64% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,73% (yoy). Perlambatan kinerja penerimaan BPHTB juga sejalan dengan LU Real Estate yang kembali mengalami perlambatan kinerja dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,37% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,68% (yoy) (Grafik 3.11).

C. BELANJA DAERAH APBD

Secara keseluruhan tahun 2023, capaian realisasi Belanja Daerah mencapai 92,45% dari pagu APBD-P 2023, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 84,32% dari pagu APBD-P 2022 (Grafik 3.12). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian realisasi belanja yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan pada komponen Belanja Operasi yang terealisasi sebesar 95,24% dari APBD-P 2023 (Grafik 3.13 dan Tabel 3.2). Secara nominal, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 66,69 Triliun atau mengalami



Grafik 3.12 Realisasi Kumulatif Belanja Daerah

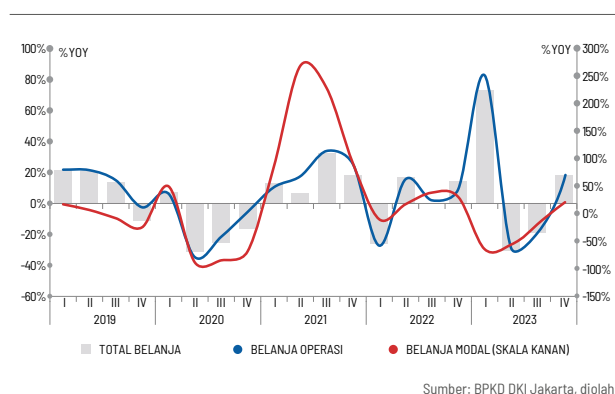


Grafik 3.13 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

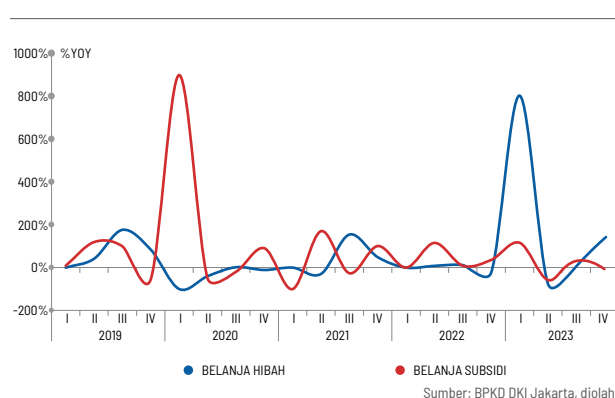
peningkatan sebesar 2,76%, peningkatan tersebut didorong oleh komponen Belanja Operasi sebesar 3,56% serta Belanja Modal sebesar 0,11%.

Pada triwulan IV 2023, realisasi Belanja Daerah mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,76% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 19,16% (yoy) (Grafik 3.14 dan Tabel 3.2). Jika dilihat masing-masing berdasarkan komponennya, Belanja Operasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 16,70% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi 19,16% (yoy). Perbaikan kinerja pada Belanja Operasi utamanya didorong oleh pertumbuhan Belanja Hibah yang tumbuh tinggi sebesar 135,87% (yoy), jauh lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya (6,04%, yoy) (Grafik 3.15). Pertumbuhan tinggi pada komponen Belanja Hibah seiring dengan penyaluran hibah pada beberapa kegiatan di dunia pendidikan seperti penyaluran dana BOS, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lebih lanjut, komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai yang masing-masing tumbuh 23,59% (yoy) dan 21,96% (yoy) juga turut mendorong pertumbuhan pada Belanja Operasi (Grafik 3.14).

Setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi 19,11% (yoy), realisasi Belanja Modal tumbuh 15,80% (yoy) pada triwulan IV 2023 (Grafik 3.14). Pertumbuhan pada komponen Belanja Modal utamanya didorong oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tumbuh 50,95% (yoy),



Grafik 3.14 Pertumbuhan Belanja Daerah dan Komponen Utamanya



Grafik 3.15 Pertumbuhan Belanja Hibah dan Belanja Subsidi

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (25,21%, yoy). Selain itu, Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga turut mendorong peningkatan Belanja Modal dengan tumbuh 38,84% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 73,33% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh Belanja Modal Bangunan Waduk dan Irigasi untuk Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya, serta Instalasi Air Kotor untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi juga mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan sebesar 1,10% (yoy), setelah terkontraksi 13,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 3.2). Hal ini didorong oleh realisasi pembebasan lahan dan pembangunan jalan provinsi.

D. PEMBIAYAAN DAERAH APBD

Capaian realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 tercatat sebesar 99,96% dari pagu. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 213,38% dari pagu. Capaian yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh capaian Penerimaan Pinjaman Daerah yang sebesar 98,91% dari pagu, turun dari tahun 2022 yang mencapai 100%. Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, tercatat realisasi sebesar 89,16% dari pagu yang dimana pada triwulan laporan terdapat realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 727,72 Miliar serta Penyertaan Modal Daerah yang sebesar Rp 4,27 Triliun (Tabel 3.2).

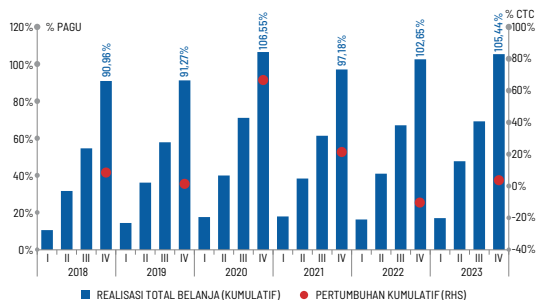
E. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI DKI JAKARTA

Kinerja APBN di wilayah DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 tetap kuat, berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didorong oleh Pendapatan Negara yang tumbuh positif pada komponen PPh Non Migas, PPN dan PPNBM, PBB, Pajak Lainnya, Cukai, Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN serta Pendapatan BLU. Realisasi Pendapatan tercatat mencapai Rp 1.779,42 Triliun atau setara dengan 122,42% dari pagu. Penerimaan Pajak pada triwulan IV 2023 sebesar Rp 1.356,02 Triliun atau 116,06% dari pagu dan tumbuh 7,84% (yoy). Kinerja Penerimaan Pajak yang baik ditopang oleh PPh Non-migas yang berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan dan Pajak Lainnya yang berasal dari Pendapatan Bunga Penagihan PPh. Lebih lanjut, Penerimaan Cukai juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar Rp 655,87 Triliun atau 104,91% dari pagu dan tumbuh 24,17% (yoy), hal ini didorong oleh meningkatnya pendapatan yang berasal dari cukai minuman mengandung *ethyl alcohol*. Di sisi lain, Penerimaan Bea Masuk terkontraksi 1,85% (yoy) utamanya disebabkan oleh penurunan aktivitas impor sedangkan, Bea Keluar terkontraksi 71,23% (yoy) disebabkan oleh penurunan harga komoditas terutama referensi CPD yang masih di bawah rata-rata. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp 413,39 Triliun atau sebesar 145,48% dari pagu. Capaian ini utamanya didorong oleh komponen penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sebesar Rp 135,33 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14,78% (yoy). Peningkatan PNBP juga berasal dari peningkatan Bagian Laba BUMN yang tumbuh tinggi sebesar 102,13% (yoy), hal ini didorong oleh setoran dividen BUMN perbankan dan non perbankan yang juga mengalami peningkatan.

Dari sisi Belanja K/L di DKI Jakarta, pada triwulan IV 2023, telah mencapai 105,44% dari pagu. Capaian ini utamanya didorong oleh capaian Belanja Bantuan sosial yang pada triwulan IV 2023 mencapai 118,80% dari pagu (Grafik 3.16). Secara nominal, Belanja K/L di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 mencapai Rp 861,02 Triliun atau tumbuh 3,57% (yoy) (Grafik 3.17). Capaian kinerja ini didorong oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang pada triwulan laporan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,53% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 31,32% (yoy). Hal ini didukung oleh peningkatan pada komponen Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang pada Kementerian Sosial serta Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang untuk Pembiayaan JKN/KIS pada Kementerian Kesehatan. Lebih lanjut, komponen Belanja Pegawai juga turut mendorong realisasi Belanja K/L di DKI Jakarta dengan mencatatkan pertumbuhan 3,72% (yoy), berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,92% (yoy). Selanjutnya, meski masih terkontraksi 9,78% (yoy), komponen Belanja Barang mencatatkan perbaikan dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi dalam sebesar 34,41% (yoy) (Grafik 3.18). Kinerja

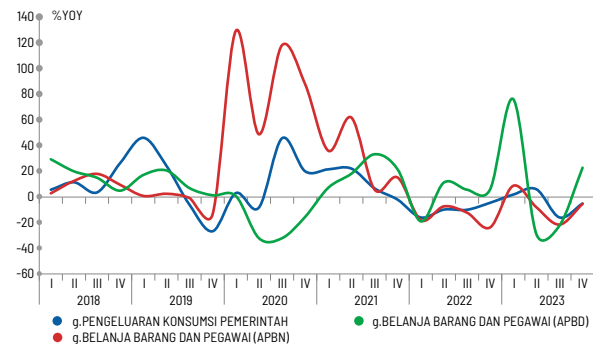
komponen Belanja Barang yang masih terkontraksi utamanya disebabkan oleh normalisasi Belanja Barang Non-operasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kementerian Kesehatan. Lebih lanjut, komponen Belanja Modal mencatatkan pertumbuhan sebesar

15,17% (yoy) pada triwulan laporan, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 29,04% (yoy)(Grafik 3.19).



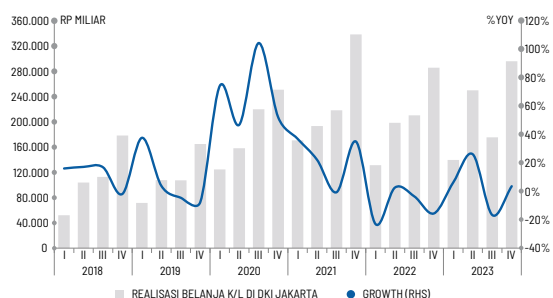
Sumber: DJPb, BI, diolah

Grafik 3.16 Realisasi Kumulatif Total Belanja APBN di DKI Jakarta



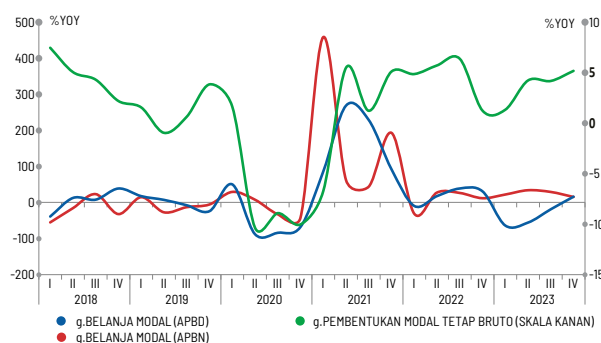
Sumber: BPS, BPKD DKI Jakarta, DJPb, diolah

Grafik 3.18 Perkembangan Belanja Barang dan Pegawai (APBN dan APBD)



Sumber: DJPb, BI, diolah

Grafik 3.17 Realisasi Total Belanja K/L di DKI Jakarta



Sumber: BPS, BPKD DKI Jakarta, DJPb, diolah

Grafik 3.19 Perkembangan Belanja Modal (APBN dan APBD)

Tabel 3.1 Perkembangan Pagu APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta

URAIAN	APBD-P 2020	APBD-P 2021		APBD-P 2022		APBD 2023	
	Rp Miliar	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
PENDAPATAN	57.234,62	65.209,11	13,93%	77.796,65	19,30%	70.662,94	-9,17%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.085,99	45.182,09	18,63%	55.662,83	23,20%	48.442,04	-12,97%
Pajak Daerah	32.480,00	37.215,00	14,58%	45.700,00	22,80%	43.000,00	-5,91%
Pajak Kendaraan Bermotor	8.000,00	8.800,00	10,00%	9.000,00	2,27%	9.416,56	4,63%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.700,00	4.700,00	27,03%	6.000,00	27,66%	6.643,61	10,73%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	950,00	1.000,00	5,26%	1.350,00	35,00%	1.680,81	24,50%
Pajak Hotel	675,00	800,00	18,52%	1.400,00	75,00%	1.900,35	35,74%
Pajak Restoran	1.850,00	2.000,00	8,11%	4.000,00	100,00%	3.947,26	-1,32%
Pajak Hiburan	215,00	70,00	-67,44%	750,00	971,43%	687,00	-8,40%
Pajak Reklame	775,00	875,00	12,90%	1.250,00	42,86%	974,34	-22,05%
Pajak Penerangan Jalan	775,00	750,00	-3,23%	1.300,00	73,33%	902,31	-30,59%
Pajak Air Tanah	75,00	50,00	-33,33%	75,00	50,00%	83,77	11,69%
Pajak Parkir	325,00	300,00	-7,69%	1.350,00	350,00%	477,11	-64,66%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.000,00	6.920,00	38,40%	8.195,00	18,42%	6.913,46	-15,64%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.450,00	10.250,00	8,47%	10.250,00	0,00%	9.041,23	-11,79%
Pajak Rokok	690,00	700,00	1,45%	780,00	11,43%	855,30	9,65%
Retribusi Daerah	468,41	755,76	61,34%	806,88	6,76%	462,11	-42,73%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	844,47	390,25	-53,79%	793,74	103,39%	545,87	-31,23%
Lain-Lain PAD	4.293,10	6.821,08	58,88%	8.362,22	22,59%	4.434,07	-46,97%
PENDAPATAN TRANSFER	17.118,54	16.873,54	-1,43%	17.226,48	2,09%	20.224,32	17,40%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.030,09	3.153,47	55,34%	4.907,21	55,61%	1.996,58	-59,31%
BELANJA	58.951,07	69.992,62	18,73%	76.972,17	9,97%	72.144,89	-6,27%
BELANJA OPERASI	49.161,59	57.799,91	17,57%	58.971,57	2,03%	60.383,69	2,39%
Belanja Pegawai	18.991,31	19.486,42	2,61%	18.638,61	-4,35%	18.778,03	0,75%
Belanja Barang dan Jasa	18.098,72	23.122,50	27,76%	25.070,95	8,43%	27.281,51	8,82%
Belanja Bunga	76,00	168,20	121,32%	789,54	369,41%	258,00	-67,32%
Belanja Subsidi	4.508,89	5.371,15	19,12%	6.542,35	21,81%	5.908,31	-9,69%
Belanja Hibah	2.373,12	2.791,73	17,64%	2.814,87	0,83%	3.707,37	31,71%
Belanja Bantuan Sosial	5.113,56	6.859,90	34,15%	5.115,25	-25,43%	4.450,48	-13,00%
BELANJA MODAL	3.896,68	8.761,14	124,84%	10.800,99	23,28%	10.850,18	0,46%
Belanja Modal Tanah	1.391,23	1.822,55	31,00%	1.904,95	4,52%	837,73	-56,02%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	824,20	1.661,66	101,61%	2.020,82	21,61%	3.085,13	52,67%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	464,30	2.346,96	405,49%	2.054,54	-12,46%	2.556,81	24,45%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.087,28	2.555,19	135,01%	4.659,21	82,34%	4.222,74	-9,37%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	129,66	374,78	189,04%	161,48	-56,81%	147,78	-8,48%
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.521,44	3.043,97	-44,87%	6.714,84	120,60%	554,56	-91,74%
Belanja Tidak Terduga	5.521,44	3.043,97	-44,87%	6.714,84	120,60%	554,56	-91,74%
BELANJA TRANSFER	371,36	387,60	4,37%	484,76	25,07%	356,45	-26,47%
Belanja Bantuan Keuangan	371,36	387,60	4,37%	484,76	25,07%	356,45	-26,47%
SURPLUS / (DEFISIT) = PENDAPATAN - BELANJA	(1.716,45)	(4.783,52)		824,48		(1.481,95)	
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.166,48	14.681,13	138,08%	5.015,11	-65,84%	8.895,32	77,37%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.203,97	5.165,70	329,05%	4.035,86	-21,87%	8.600,10	113,09%
Penerimaan Pinjaman Daerah	3.562,51	9.515,43	167,10%	979,25	-89,71%	295,22	-69,85%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.450,03	9.897,62	122,42%	5.839,59	-41,00%	7.413,37	26,95%
Penyertaan Modal Daerah	4.416,38	9.663,97	118,82%	4.722,71	-51,13%	5.434,68	15,08%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33,65	33,65	0,00%	1.034,58	2974,53%	1.802,67	74,24%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	200,00	0,00%	82,30	-58,85%	176,02	113,87%
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63.401,10	79.890,24		82.811,76	3,66%	79.558,25	-3,93%
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	63.401,10	79.890,24		82.811,76	3,66%	79.558,25	-3,93%
SILPA	-	-		-		-	

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Tabel 3.2 Rincian Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Triwulan IV 2023

URAIAN	REALISASI TRIWULAN IV 2022			REALISASI TRIWULAN III 2023			REALISASI TRIWULAN IV 2023		
	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy	Rp Miliar	% APBD-P	%yoy
PENDAPATAN	22.635,40	29,10%	0,25%	12.982,13	18,37%	-39,33%	27.032,49	38,26%	19,43%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.646,31	22,72%	11,84%	10.753,79	30,18%	-31,96%	14.619,29	30,18%	15,60%
Pajak Daerah	10.684,21	23,38%	23,40%	9.019,93	29,57%	-37,89%	12.716,50	29,57%	19,02%
Pajak Kendaraan Bermotor	9.404,93	23,35%	19,65%	6.867,23	25,79%	-0,64%	9.416,56	26,56%	-5,53%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.297,77	22,67%	15,38%	4.969,03	29,69%	8,07%	6.643,61	26,79%	-5,01%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.434,16	21,89%	45,77%	1.240,67	29,54%	11,72%	1.680,81	31,44%	1,41%
Pajak Hotel	1.487,12	21,43%	53,38%	1.337,19	32,46%	31,47%	1.900,35	37,54%	15,11%
Pajak Restoran	3.387,59	14,92%	27,84%	2.946,73	27,10%	13,84%	3.947,26	26,68%	1,48%
Pajak Hiburan	399,58	9,12%	263,58%	488,47	30,16%	57,11%	687,00	33,09%	53,37%
Pajak Reklame	1.095,09	16,74%	27,93%	719,23	19,70%	-34,90%	974,34	25,51%	-31,91%
Pajak Penerangan Jalan	821,98	15,28%	10,77%	664,93	28,76%	10,70%	902,31	29,67%	8,52%
Pajak Air Tanah	48,39	9,62%	110,88%	55,12	21,86%	312,65%	83,77	31,84%	-19,69%
Pajak Parkir	414,42	5,76%	37,94%	354,85	15,39%	12,06%	477,11	15,28%	-7,46%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.341,24	14,69%	11,27%	4.460,42	26,40%	15,73%	6.913,46	33,60%	1,64%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.250,70	3,13%	89,65%	8.367,06	21,80%	-64,90%	9.041,23	6,95%	-6,02%
Pajak Rokok	884,79	0,00%	-2,86%	539,97	23,68%	-24,15%	855,30	38,93%	7,91%
Retribusi Daerah	109,58	13,58%	25,30%	100,92	21,84%	0,10%	144,39	31,25%	31,77%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,30	0,16%	-96,18%	37,18	6,81%	-73,36%	115,29	21,12%	8793,43%
Lain-Lain PAD	1.851,22	22,14%	-26,78%	1.058,98	23,88%	1,65%	1.643,10	37,06%	-11,24%
PENDAPATAN TRANSFER	7.755,31	45,02%	-23,76%	2.221,26	10,98%	-55,85%	10.708,16	52,95%	38,08%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.233,79	45,52%	103,39%	7,07	0,35%	-98,74%	1.705,05	85,40%	-23,67%
BELANJA	27.207,11	35,35%	14,44%	13.031,67	18,06%	-19,16%	31.767,47	44,03%	16,76%
BELANJA OPERASI	21.000,81	35,61%	9,27%	11.688,63	19,36%	-19,16%	24.508,50	40,59%	16,70%
Belanja Pegawai	4.543,85	24,38%	4,63%	3.212,86	17,11%	-33,59%	5.541,81	29,51%	21,96%
Belanja Barang dan Jasa	9.162,12	36,54%	6,52%	5.524,13	20,25%	-10,96%	11.323,77	41,51%	23,59%
Belanja Bunga	64,90	8,22%	36,16%	44,56	17,27%	-32,75%	64,53	25,01%	-0,56%
Belanja Subsidi	3.841,04	58,71%	35,98%	1.268,75	21,47%	31,19%	3.501,48	59,26%	-8,84%
Belanja Hibah	766,85	27,24%	-22,91%	1.314,49	35,46%	6,04%	1.808,73	48,79%	135,87%
Belanja Bantuan Sosial	2.622,06	51,26%	8,85%	323,85	7,28%	-71,70%	2.268,18	50,96%	-13,50%
BELANJA MODAL	6.080,33	56,29%	30,63%	1.343,04	12,38%	-19,11%	7.040,97	64,89%	15,80%
Belanja Modal Tanah	551,81	28,97%	-44,43%	92,02	10,98%	-32,71%	349,23	41,69%	-36,71%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.411,94	69,87%	32,81%	405,21	13,13%	25,21%	2.131,31	69,08%	50,95%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.079,32	52,53%	-15,74%	97,61	3,82%	-73,33%	1.498,55	58,61%	38,84%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.942,55	63,16%	134,09%	696,34	16,49%	-13,15%	2.974,83	70,45%	1,10%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94,71	58,65%	56,60%	51,86	35,09%	61,35%	87,05	58,91%	-8,08%
BELANJA TIDAK TERDUGA	118,92	24,53%	-6,77%	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	118,92	24,53%	-6,77%	-	-	-	-	-	-
BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	292,00	3,28%	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	98,91%	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.520,81	60,29%	-40,96%	1.138,37	15,36%	45,41%	5.001,59	67,47%	42,06%
Penerimaan Pinjaman Daerah	2.972,66	62,94%	-48,42%	533,00	9,81%	-1,24%	4.273,87	78,64%	43,77%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	548,16	52,98%	-	605,37	33,58%	148,91%	727,72	40,37%	32,76%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN + PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.635,40	-	-	12.982,13	-	-	27.324,49	-	-
BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.727,92	-	-	14.170,04	-	-	36.769,05	-	-
SILPA	(4.571,71)	-	-	(49,54)	-	-	(4.734,97)	-	-

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Tabel 3.3 Perkembangan Pagu Belanja APBN di Provinsi DKI Jakarta

KOMPONEN BELANJA	PAGU 2021		PAGU 2022		PAGU 2023	
	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy	Rp Miliar	%yoy
Belanja Pegawai	234.229	0,39%	254.224	8,54%	257.255	1,19%
Belanja Barang	397.230	37,02%	277.446	-30,15%	241.569	-12,93%
Belanja Modal	139.814	41,98%	128.698	-7,95%	161.016	25,11%
Belanja Bantuan Sosial	176.191	-14,72%	144.225	-18,14%	156.773	8,70%
Total	947.463	14,39%	804.594	-15,08%	816.613	1,49%

Sumber: DJPb, BI, diolah

Tabel 3.4 Rincian Realisasi APBN di DKI Jakarta Triwulan IV 2023

KOMPONEN BELANJA	REALISASI TW IV 2022			REALISASI TW III 2023			REALISASI TW IV 2023		
	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy	Rp Miliar	% APBN	%yoy
Belanja Pegawai	51.194	20,14%	8,87%	55.822	21,70%	-3,92%	53.098	20,64%	3,72%
Belanja Barang	106.330	38,32%	-33,31%	51.664	21,39%	-34,41%	95.934	39,71%	-9,78%
Belanja Modal	83.085	64,56%	11,67%	37.088	23,03%	29,04%	95.687	59,43%	15,17%
Belanja Bantuan Sosial	45.088	31,26%	-21,66%	30.762	19,62%	-31,32%	51.187	32,65%	13,53%
Total	285.697	35,51%	-15,58%	175.336	21,47%	-16,67%	295.906	36,24%	3,57%

Sumber: DJPb, BI, diolah

BAB 4

INFLASI

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2023 masih terkendali yaitu sebesar 2,28% (yoy), meskipun lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,89% (yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Relatif terkendalnya inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan sinergi TPID, utamanya melalui GNPIP. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2023 yaitu beras, cabai merah, daging ayam ras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Memasuki triwulan I 2024, inflasi Jakarta pada Januari 2024 tercatat sebesar 1,83% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,28% (yoy). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran yang lebih rendah $2,5 \pm 1\%$.



**Inflasi IHK
DKI Jakarta (yoy)**



2,61%
Triwulan IV 2023

2,08%
Triwulan III 2023

0,50%
Desember 2023, ytd

**Rata-rata
Inflasi IHK (yoy)**

2,67%
Rerata Inflasi Tw IV 2021-2023, yoy

**Inflasi IHK
DKI Jakarta (ytd)**

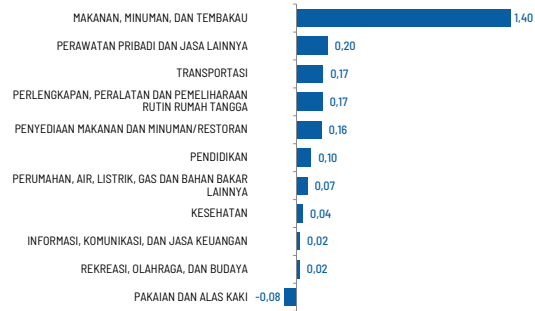
2,28%
Desember 2023, ytd

A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN IV 2023

Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan IV 2023 tetap terkendali dalam sasaran target inflasi. Inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (1,89%, yoy). Capaian ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan tekanan inflasi tetap terkendali dalam target sasaran 3,0±1% dengan tetap mendukung stabilitas ekonomi. Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan dan tercermin dari efektifitas pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi dan koordinasi TPID dan GNPIP dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif turut menahan laju inflasi.

Meningkatnya tekanan inflasi pada triwulan IV 2023 bersumber dari kenaikan harga sebagian besar kelompok pengeluaran, diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (Grafik 4.1). Kelompok dengan andil inflasi tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (Grafik 4.2). Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2022 diantaranya beras, cabai merah, daging ayam ras, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Namun demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2023 tertahan oleh beberapa komoditas seperti telur ayam ras, bensin, sabun cair/cuci piring, air conditioner, dan celana dalam pria.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi IHK Jakarta triwulan IV 2023. Dengan sumbangan sekitar 1,40%, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 6,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,03% (yoy). Penyumbang inflasi kelompok ini terutama bersumber dari komoditas yang tergabung dalam



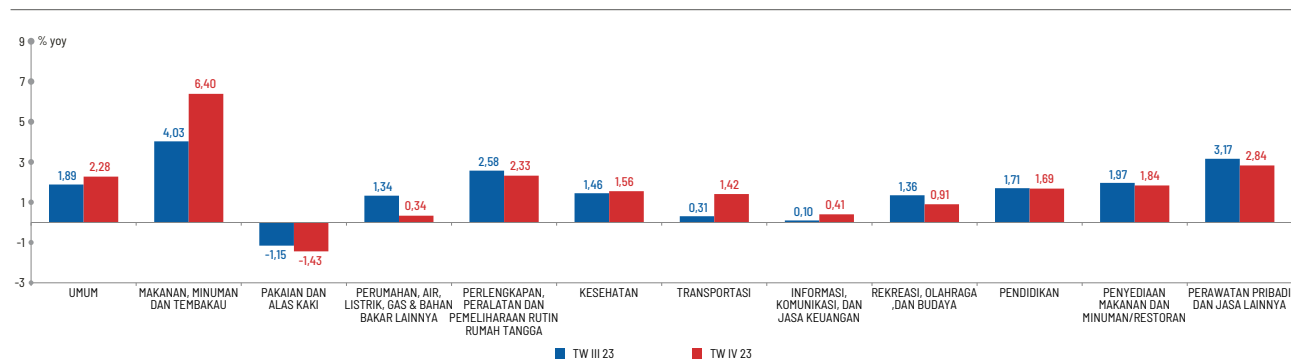
Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

subkelompok Makanan diikuti dengan subkelompok Tembakau. Adapun berdasarkan komoditasnya sumbangan inflasi kelompok ini berasal dari beras, cabai merah, daging ayam ras, dan rokok kretek filter.

Kontributor terbesar pada subkelompok Makanan masih berasal dari komoditas beras dengan andil 0,27%. Inflasi komoditas beras mengalami peningkatan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Berdasarkan pantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ), pada triwulan IV 2023 rata-rata harga beras mencapai Rp13.806/kg atau mencatatkan perubahan harga sebesar 19,30% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang inflasi 12,66% (yoy) (Grafik 4.3). Berlanjutnya kenaikan harga beras utamanya sebagai dampak penurunan hasil panen di wilayah sentra produksi sebagai dampak fenomena el-nino. Selain itu, pembatasan ekspor dari beberapa negara mitra dagang salah satunya India, serta belum optimalnya realisasi impor turut menjadi pendorong kenaikan harga beras. Kondisi ini sebagaimana tercermin dari perkembangan stok beras di PT Food Station dan Bulog dengan rata-rata sebanyak 83.202 ton/minggu pada triwulan IV 2023, lebih rendah dari rata-rata stok triwulan sebelumnya yang sebesar 88.099 ton/minggu.

Selanjutnya, komoditas cabai merah menjadi kontributor terbesar kedua pada subkelompok Makanan dengan andil 0,15%. Berdasarkan pantauan IPJ pada triwulan IV 2023, rata-rata harga cabai merah



Sumber: BPS, diolah

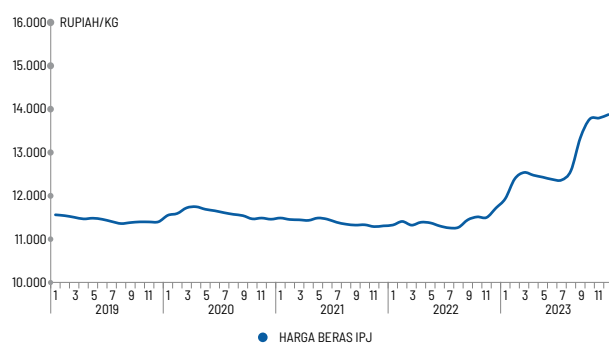
Grafik 4.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

mencapai Rp73.269/kg atau mencatatkan perubahan 56,60% (yoy), lebih tinggi dari perubahan harga pada triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi -43,05% (yoy) (Grafik 4.4). Meningkatnya harga cabai merah terutama didorong oleh peningkatan *demand* dalam rangka HBKN Nataru ditengah pasokan dari wilayah sentra yang belum optimal seiring periode tanam pada akhir tahun sebagaimana pola seasonalnya. Kendati demikian, kondisi stok cabai merah di BUMD DKI Jakarta masih terpantau aman dengan rata-rata 39,2/minggu pada triwulan IV 2023, lebih tinggi dari rata-rata stok triwulan sebelumnya yang tercatat 34,2/minggu.

Kemudian, komoditas daging ayam ras menjadi kontributor terbesar selanjutnya pada subkelompok Makanan dengan andil 0,13%. Berdasarkan pantauan IPJ, rata-rata harga daging ayam ras pada triwulan IV 2023 sebesar Rp40.233/kg, atau mencatatkan perubahan harga mencapai 4,82% (yoy), meski lebih rendah dari perubahan harga pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,00% (yoy) (Grafik 4.6). Terjadinya inflasi pada komoditas daging ayam ras tersebut masih didorong oleh tingginya harga pakan dan *Day Old Chicken* (DOC). Dari sisi perkembangan stok BUMD Pangan Jakarta, rata-rata stok daging ayam ras pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 260 ton/minggu, menurun dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya yang sebesar 34 ton/minggu.

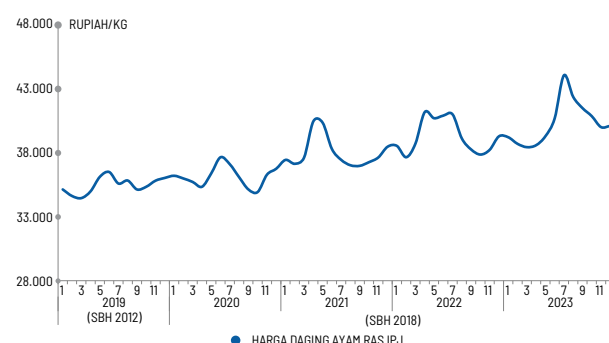
Pada subkelompok Tembakau, inflasi yang terjadi masih sebagai dampak kebijakan tarif cukai rokok dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hasil tembakau yang dilakukan oleh produsen secara bertahap setiap bulan. Dari tiga jenis rokok yang disurvei, rokok kretek filter mengalami inflasi tertinggi dengan sumbangan 0,10% (yoy), disusul oleh inflasi rokok putih dan rokok kretek. Meski demikian, tekanan inflasi rokok kretek filter terpantau stabil jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat memberikan sumbangan inflasi 0,10% (yoy).

Inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh penurunan harga pada komoditas yang berasal dari subkelompok makanan yaitu telur ayam ras. Berlanjutnya penurunan harga telur ayam ras utamanya disebabkan oleh *over-supply* pasokan ditingkat peternak ditengah *demand* yang cenderung stabil. Berdasarkan pantauan IPJ, pada triwulan IV 2023 perkembangan rerata harga telur ayam ras sebesar Rp27.308/kg, atau mencatatkan perubahan harga -2,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan perubahan harga mencapai 5,09% (yoy) (Grafik 4.6). Dari sisi pasokan, perkembangan rata-rata stok telur ayam di BUMD DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 terpantau stabil mencapai 5 ton/minggu (Grafik 4.7).



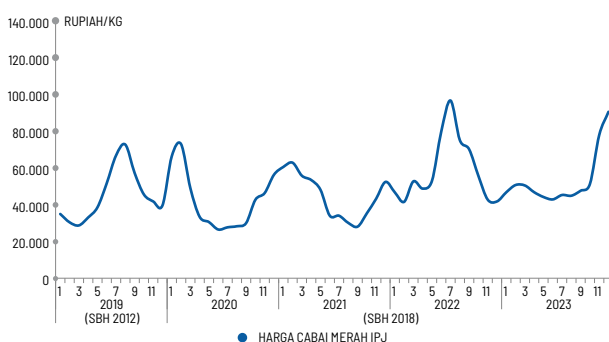
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.3 Perkembangan Harga Beras



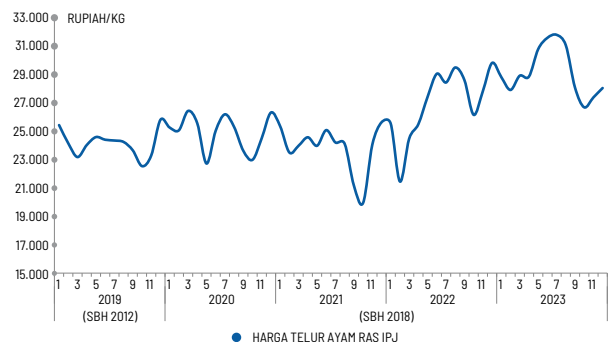
Sumber: IPJ, Bloomberg, diolah

Grafik 4.5 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



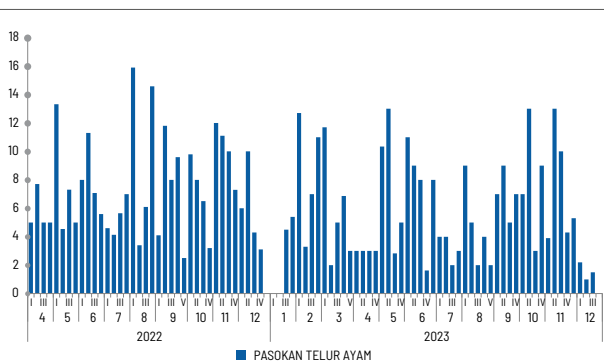
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Harga Cabai Merah



Sumber: IPJ, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras



Sumber: BUMD DKI Jakarta diolah

Grafik 4.7 Perkembangan Stok Telur Ayam Ras

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua dengan tingkat inflasi sebesar 2,84% (yoy) sehingga memberikan andil sebesar 0,20% terhadap inflasi IHK Jakarta. Perkembangan ini lebih rendah dibandingkan tekanan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,17% (yoy). Berlanjutnya inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan dan barang kebutuhan sehari-hari seperti diapers, parfum, shampoo, dsb. Meningkatnya harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global. Berdasarkan pantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia, rata-rata harga emas perhiasan 22 karat dan 24 karat pada triwulan IV 2023 masing-masing sebesar Rp762.058/gram dan Rp961.251/gram atau mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 13,01% (yoy) dan 15,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,42% (yoy) dan 9,31% (yoy). Sementara, kenaikan berbagai barang kebutuhan sehari-hari didorong oleh meningkatnya harga bahan baku dan biaya produksi.

Selanjutnya, inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2023 juga disumbang oleh **kelompok Transportasi** yang memberikan andil sebesar 0,17% terhadap inflasi IHK Jakarta. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,42%, lebih tinggi dibandingkan laju inflasi pada triwulan sebelumnya (0,31%; yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,10% terhadap inflasi triwulan IV 2024. Meningkatnya tarif angkutan udara sejalan dengan kenaikan permintaan mobilitas pada momen HBKN Nataru sebagaimana pola seasonalnya.

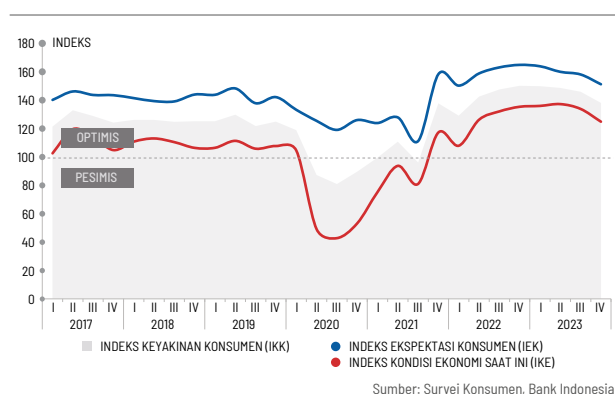
Inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2023 juga disumbang oleh **kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga** dengan andil sebesar 0,17%. Meski memberikan andil inflasi, tekanan inflasi kelompok ini tercatat menurun dari triwulan sebelumnya yaitu dari 2,58% (yoy) menjadi 2,33% (yoy) pada triwulan IV 2023. Inflasi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga utamanya didorong oleh kenaikan upah asisten rumah tangga sejalan dengan kenaikan UMK Tahun 2023.

Pada triwulan IV 2023 **kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** tercatat memberikan kontribusi moderat terhadap inflasi IHK Jakarta sebesar 0,16%. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,84% (yoy), lebih rendah dari inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1,97% (yoy). Terjadinya inflasi pada kelompok ini terutama bersumber dari naiknya harga komoditas bakso siap santap, pizza, dan ketoprak sejalan dengan meningkatnya berbagai harga bahan pangan penyusunnya.

Inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2023 juga didorong oleh **kelompok Pendidikan** dengan inflasi sebesar 1,69% (yoy) dan andil sebesar 0,10%. Tekanan inflasi tersebut terpantau sedikit menurun jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 1,71% (yoy) dan andil sebesar 0,10%. Selanjutnya, **kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** masih menjadi penyumbang inflasi dengan sumbangan sebesar 0,07% terhadap inflasi IHK triwulan IV 2023, meski dengan tekanan yang menurun menjadi sebesar 0,34% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,34% (yoy). Lebih lanjut, **kelompok Kesehatan** juga tercatat memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,04% terhadap inflasi IHK Jakarta pada triwulan IV 2023, dengan tingkat inflasi 1,56% (yoy). Inflasi pada kelompok ini mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,46% (yoy) dan andil 0,04%. Kemudian, **kelompok Informasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan** turut memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,02% pada triwulan IV 2023. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 0,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,10% (yoy). Terakhir, **kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya** turut memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,02% pada triwulan IV 2023. Inflasi kelompok ini terpantau menurun dari 1,36% pada triwulan III 2023 menjadi 0,91% pada triwulan IV 2023.

Adapun inflasi IHK Jakarta yang lebih tinggi pada triwulan IV 2023 tertahan oleh berlanjutnya deflasi yang terjadi pada **kelompok Pakaian dan Alas Kaki**. Dengan andil sebesar -0,08%, deflasi pada kelompok ini tercatat sebesar -1,43% (yoy), lebih dalam dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -1,15% (yoy). Deflasi yang terjadi pada kelompok ini merupakan dampak penurunan harga pada bulan-bulan sebelumnya seiring belum adanya peningkatan harga yang signifikan.

Terkendalnya inflasi pada triwulan IV 2023 dipengaruhi oleh momentum pemulihan ekonomi yang didukung keyakinan dan ekspektasi masyarakat yang masih optimis terhadap kondisi ekonomi. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks ekspektasi konsumen (IEK) dan indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) masih berada diatas batas level optimis pada triwulan IV 2023 meski mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.8). Pada triwulan IV 2023, indeks keyakinan konsumen tercatat sebesar 137,7, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (145,7). Indeks kondisi ekonomi saat ini pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 124,6



Grafik 4.8 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)

juga sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (133,6). Lebih lanjut, indeks ekspektasi konsumen juga sedikit menurun dari 157,7 pada triwulan III 2023, menjadi sebesar 150,9 pada triwulan laporan. Kendati demikian, indeks tersebut masih berada di atas level optimis (100).

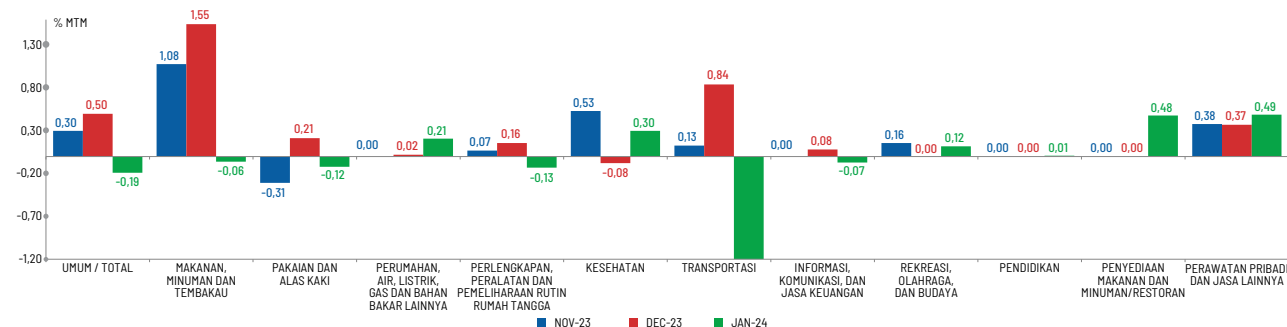
B. TRACKING INFLASI TRIWULAN I 2024

Pada awal tahun 2024, perkembangan IHK Jakarta tetap terjaga.

IHK Jakarta pada Januari 2024 terpantau mengalami deflasi sebesar -0,19% (mtm), dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,50% (mtm). Terjadinya deflasi pada bulan Januari 2024 utamanya disebabkan oleh deflasi yang terjadi pada kelompok Transportasi seiring dengan penurunan harga pada komoditas tarif angkutan udara dan bensin seiring normalisasi permintaan travel pasca HBKN Nataru (Natal dan Tahun Baru), serta penurunan harga BBM nonsubsidi. Selain itu, deflasi pada bulan Januari juga didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya pada komoditas cabai merah, cabai rawit, udang basah, dan telur ayam ras sejalan terjaganya pasokan. Kendati demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan harga pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (kue kering berminyak), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (emas perhiasan), serta kelompok perumahan, air, listrik, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (sewa rumah) (Grafik 4.9).

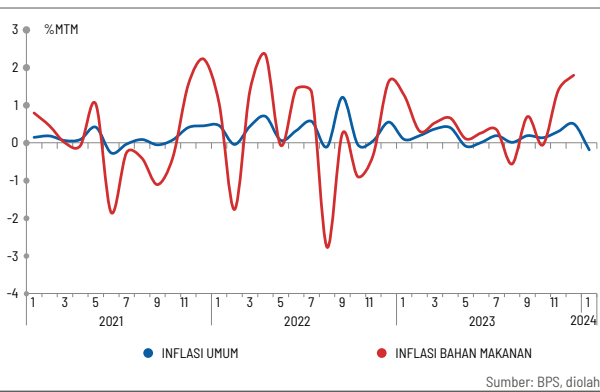
Kelompok Transportasi menjadi penyumbang utama deflasi Jakarta pada Januari 2024. Dengan andil sebesar -0,31%, kelompok Transportasi mencatat deflasi sebesar 2,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,84% (mtm). Menurunnya tekanan inflasi kelompok Transportasi utamanya bersumber dari penurunan tarif angkutan udara dan bensin yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,26% dan 0,05%. Penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan normalisasi permintaan travel pasca HBKN Nataru, sementara menurunnya harga bensin seiring penurunan harga BBM non-subsidi. Dengan perkembangan tersebut, kelompok Transportasi secara tahunan tercatat inflasi sebesar 0,61% (yoy), menurun dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,42% (yoy).

Selanjutnya, **Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau** menjadi penyumbang deflasi terdalam kedua pada Januari 2024. Dengan andil -0,01% pada periode laporan, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat deflasi sebesar 0,06% (mtm), menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 1,55% (mtm). Terjadinya deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas cabai merah yang memberikan andil deflasi 0,07%, cabai rawit sebesar -0,04%, udang basah, telur ayam ras, air kemasan, kacang panjang, dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,01%. Penurunan harga aneka cabai ditopang oleh pasokan yang terjaga dari daerah sentra untuk memenuhi permintaan meski peningkatan pasokan ini belum optimal karena faktor musim hujan. Sementara koreksi harga daging dan telur ayam ras juga ditopang oleh pasokan yang terjaga. Kondisi ini kemudian tercermin dari pantauan Info Pangan Jakarta (IPJ) pada Januari 2024, rata-rata harga cabai merah dan cabai rawit masing-masing tercatat sebesar Rp75.882,-/kg dan Rp54.701/kg atau menurun -16,24% dan -24,34% dari rata-rata harga bulan sebelumnya yang tercatat Rp90.593,-/kg dan Rp79.789/kg (Grafik 4.11 – 4.12). Selanjutnya, rata-rata harga telur ayam ras pada Januari 2024 sebesar Rp27.288/kg atau menurun -2,46% dari rata-rata harga bulan sebelumnya yang tercatat Rp27.977/kg (Grafik 4.13). Dari sisi pasokan, rata-rata pasokan daging ayam ras pada Januari tercatat sebanyak 574 ton/minggu, lebih tinggi dari rata-rata pada bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 372 ton/minggu.

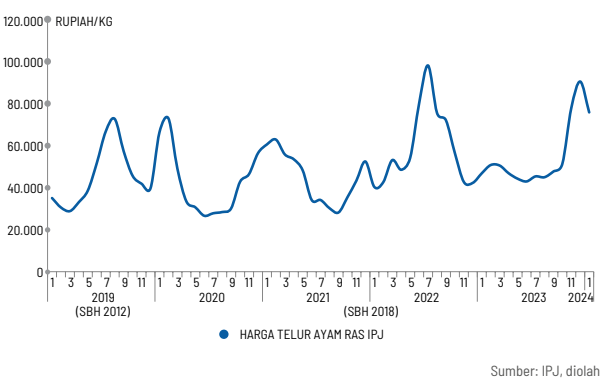


Grafik 4.9 Inflasi Kelompok Pengeluaran Januari 2024

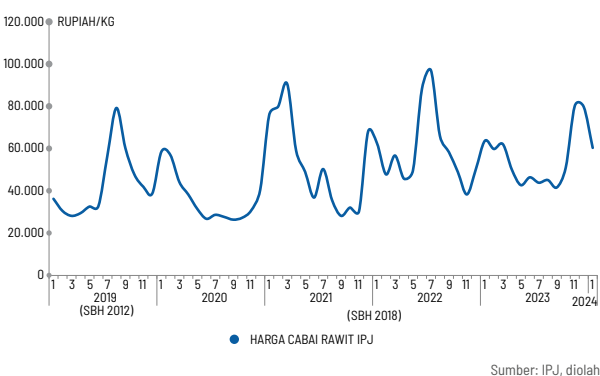
Sumber: BPS, diolah



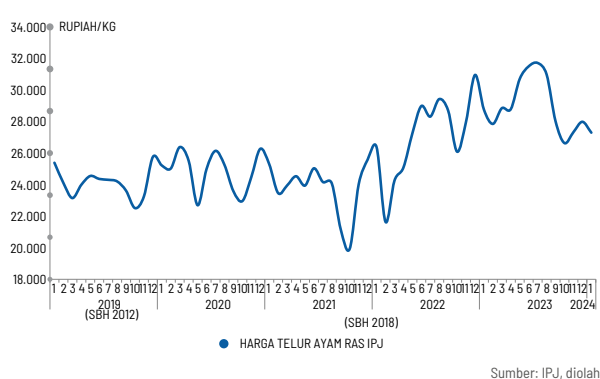
Grafik 4.10 Perkembangan Inflasi Umum dan Bahan Makanan



Grafik 4.11 Perkembangan Harga Cabai Merah



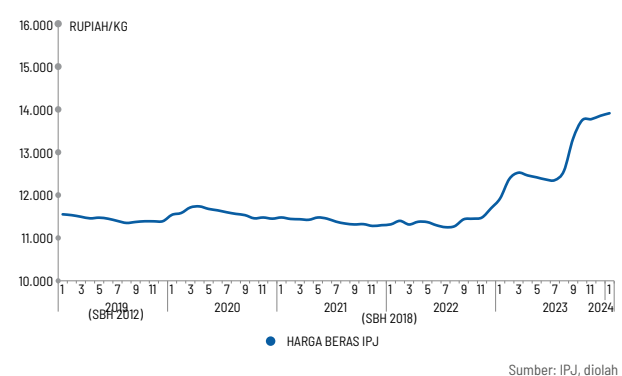
Grafik 4.12 Perkembangan Harga Cabai Rawit



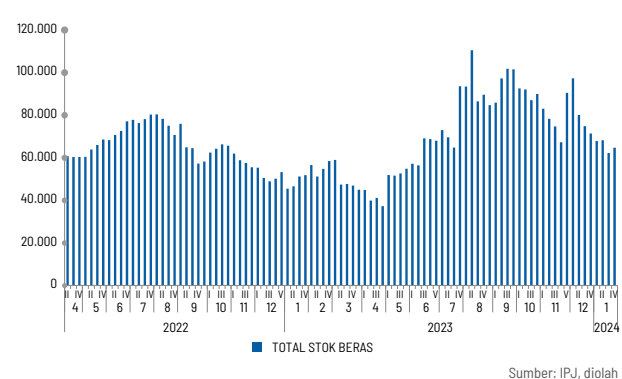
Grafik 4.13 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras

Deflasi yang lebih dalam pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh peningkatan harga pada komoditas tomat dan beras yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05% dan 0,03%. Kenaikan harga beras didorong oleh menurunnya pasokan akibat realisasi impor tambahan yang belum maksimal, dampak el-nino yang menurunkan produksi wilayah sentra di tengah tingginya permintaan dalam rangka penyaluran bantuan sosial dan tahun politik. Hal ini tercermin dari pantauan IPJ pada Januari 2024, rata-rata harga beras tercatat sebesar Rp13.927/kg atau meningkat dari rata-rata harga pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.868/kg (Grafik 4.14). Dari sisi pasokan, rata-rata pasokan beras di BUMD tercatat sebesar 65.614 ton/minggu, menurun dari rata-rata pasokan bulan Desember 2023 yang tercatat sebanyak 80.755 ton/minggu (Grafik 4.15). Dengan perkembangan tersebut, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau secara tahunan tercatat inflasi 1,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,40% (yoy).

Lebih lanjut, **Kelompok Pakaian dan Alas Kaki** juga turut menjadi kontributor penyumbang deflasi Jakarta pada Januari 2024. Dengan andil -0,01%, kelompok ini tercatat deflasi 0,10% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat inflasi 0,21% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, kelompok Pakaian dan Alas kaki secara tahunan tercatat deflasi sebesar 2,08% (yoy), tidak sedalam deflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,43% (yoy).



Grafik 4.14 Perkembangan Harga Beras



Grafik 4.15 Perkembangan Stok Beras

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang memiliki andil -0,01% juga turut menjadi penyumbang utama deflasi Jakarta pada Januari 2024. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar -0,13% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi (0,16%, mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan kelompok ini tercatat inflasi sebesar 2,10% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,33% (yoy).

Deflasi Jakarta pada Januari 2024 yang lebih dalam tertahan oleh inflasi yang terjadi pada **kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran**. Dengan andil 0,05% (mtm), kelompok ini tercatat inflasi 0,48% (mtm) atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang inflasi 0,00% (mtm). Komoditas yang mendorong inflasi pada kelompok ini yaitu kue kering berminyak dengan andil 0,04%. Meningkatnya harga kue kering berminyak sejalan dengan meningkatnya harga bahan baku dan kenaikan permintaan menjelang perayaan Imlek 2024. Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan kelompok ini tercatat inflasi sebesar 2,06% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,84% (yoy).

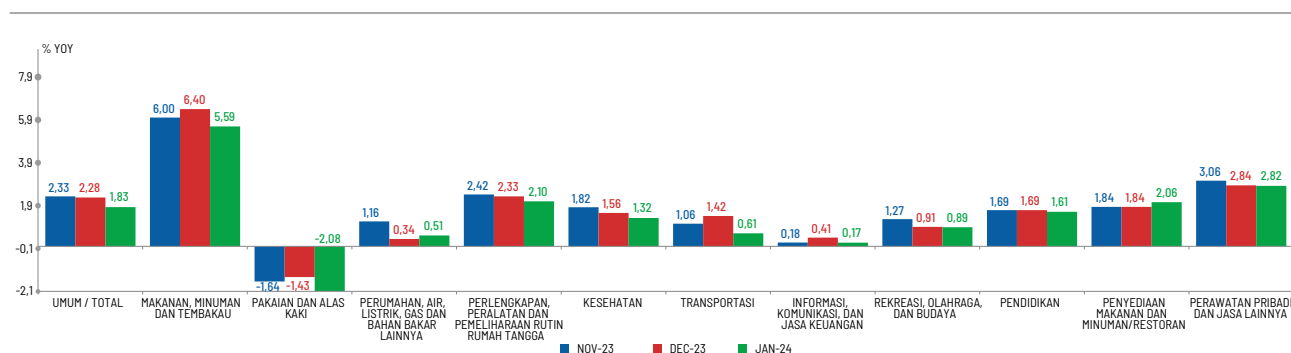
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi selanjutnya pada Januari 2024 dengan andil 0,04%. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,02% (mtm). Komoditas yang menyumbang inflasi kelompok ini yaitu sewa rumah dengan andil 0,04%. Meningkatnya harga sewa rumah sejalan dengan tren meningkatnya permintaan termasuk pada periode pemilu. Dengan perkembangan tersebut, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga secara tahunan tercatat inflasi 2,10% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,34% (yoy).

Terakhir, **Kelompok Kesehatan** juga turut menjadi kontributor penyumbang inflasi Jakarta pada Januari 2024. Dengan andil 0,01%, kelompok ini tercatat inflasi 0,30% (mtm), lebih tinggi dibandingkan

bulan sebelumnya yang mencatat deflasi 0,08% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, kelompok Kesehatan secara tahunan tercatat deflasi sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,56% (yoy).

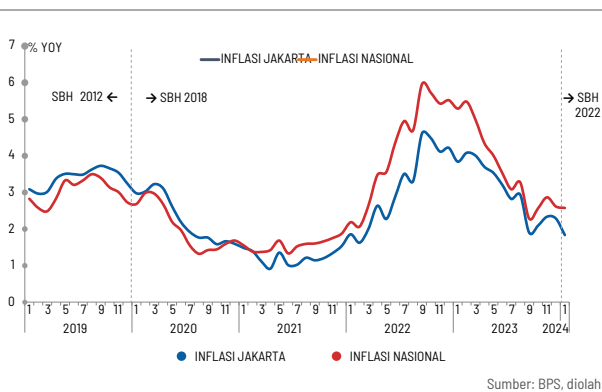
Sementara itu, kelompok lainnya seperti kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya, serta kelompok Pendidikan pada Januari 2024 tidak memberikan sumbangan yang signifikan terhadap inflasi bulanan Jakarta.

Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada Januari 2024 terpantau menurun dan tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. IHK Jakarta pada Januari 2024 tercatat mengalami inflasi 1,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang inflasi sebesar 2,28% (yoy) (Grafik 4.15). Tekanan inflasi secara tahunan terutama bersumber dari inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan tingkat inflasi mencapai 5,59% (yoy) dan andil 1,04%, diikuti kelompok Perumahan Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan tingkat inflasi 0,51% (yoy) dan andil 0,11%, serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dengan tingkat inflasi 2,10% (yoy) dan andil 0,13%. Inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau utamanya bersumber dari komoditas beras, daging ayam ras, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tomat, dan Sigaret Putih Mesin (SPM) akibat penurunan produksi di wilayah sentra sebagai dampak el-nino (beras), tingginya harga pakan (daging ayam ras), dan transmisi kenaikan cukai tembakau (SKM dan SPM). Sementara itu, pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, sumber tekanan inflasi terutama berasal dari komoditas sewa rumah dan kontrak rumah seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan sewa rumah utamanya dalam rangka Pemilu. Pada kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, sumber utama inflasi berasal dari komoditas upah asisten rumah tangga sejalan dengan peningkatan UMP 2024. Berbagai perkembangan tersebut berdampak pada inflasi tahunan Jakarta pada Januari 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,57% (yoy) (Grafik 4.16-4.17).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 4.16 Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran



Grafik 4.17 Inflasi Jakarta dan Nasional

C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN IV 2023

Realisasi inflasi di Jakarta yang terkendali dalam rentang sasaran target inflasi tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta yang semakin kuat, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang juga tertuang pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 – 2024. Berbagai program pengendalian inflasi dilakukan TPID Provinsi DKI Jakarta dengan fokus penguatan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup, dan mudah dijangkau baik dari sisi fisik komoditas, maupun dari sisi harga di tengah peningkatan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi tanaman pangan, dan kenaikan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespons perkembangan inflasi pangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama dengan TPID dan TPIP melanjutkan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP merupakan salah satu langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah, Komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta Implementasi Gerakan *urban farming* dan *digital farming*.

Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya diantaranya:

- Melanjutkan pelaksanaan program pangan bersubsidi untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, kembung, susu UHT, dan telur ayam pada Oktober – Desember 2023 yang dilaksanakan di gerai kelurahan, kecamatan, JakGrosir, JakMart, Mini DC dan gerai Pasar Jaya lainnya. Program pangan bersubsidi ini ditujukan

untuk masyarakat golongan tertentu khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Penerima manfaat bisa mendapatkan komoditas pangan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu beras dengan harga Rp30.000/5 kg, daging sapi dengan harga Rp35.000/kg, daging ayam dengan harga Rp8.000/ekor, ikan kembung dengan harga Rp13.000/kg, telur ayam dengan harga Rp10.000/tray, dan susu UHT dengan harga Rp30.000/karton. Melalui program ini, kebutuhan pangan masyarakat golongan tertentu bisa terpenuhi dan permintaan ke pasar bisa sedikit berkurang, sehingga harga dapat terkendali. Program ini merupakan kolaborasi dari BUMD Pangan DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu yang diselenggarakan di berbagai titik lokasi meliputi RPTRA, gerai kelurahan, kecamatan, gerai Perumda Pasar Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, dan gerai Perumda Dharma Jaya.

- Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama Oktober – Desember 2023 yang merupakan kolaborasi Badan Pangan Nasional dan BUMD DKI Jakarta untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, kembung, susu UHT, tepung terigu, gula pasir, dan telur ayam yang dilaksanakan di gerai kelurahan, kecamatan, JakGrosir, JakMart, Mini DC dan gerai Pasar Jaya lainnya.

Ketersediaan Pasokan

Selanjutnya, beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan melalui pengamanan pasokan komoditas pangan, diantaranya:

- Realisasi program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) komoditas beras dari Januari hingga 27 Desember 2023 oleh Perum BULOG Divre Jakarta – Banten untuk Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 219.575 ton. Selain itu, juga dilakukan kegiatan peninjauan operasi pasar beras SPHP di Pasar Beras Induk Beras Cipinang dan komoditas strategis lainnya di Pasar Jatinegara.
- Melakukan kegiatan panen padi bersama mitra budidaya (*on farming*) PT. Food Station Tjipinang Jaya di Desa Purwajaya, Karawang pada tanggal 20 Desember 2023 dengan total hasil panen mencapai 6,5-7 ton per ha. Kegiatan ini juga termasuk dalam kerangka implelementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) program GNPIP DKI Jakarta.
- Melakukan kegiatan panen cabai serentak sebagai tindaklanjut HLM TPID dalam rangka pengendalian inflasi menjelang HBKN Nataru. Kegiatan ini dilakukan di 345 titik lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, yang meliputi lahan pekarangan, RPTRA, permukiman maupun perkantoran dengan potensi panen mencapai 10,2 ton.

Kelancaran Distribusi

Adapun untuk mendorong kelancaran distribusi, beberapa kegiatan dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi, diantaranya adalah:

- Perumda Dharma Jaya melanjutkan penjualan untuk komoditas daging sapi, daging kerbau, dan daging ayam melalui toko *mobile*

menggunakan kendaraan berupa *foodtruck* yang berjualan di daerah Koja, Mampang, dan Cililitan.

- Program SPHP disalurkan oleh BULOG melalui RPK, agen distributor, 32 pasar di wilayah Jakarta serta melalui penjualan secara *online* atau via *e-commerce*

Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, diantaranya:

- Menyelenggarakan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi DKI Jakarta pada 15 November 2023 dalam rangka memperkuat koordinasi dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi di DKI Jakarta. HLM yang mengusung tema “Menjaga momentum inflasi yang terkendali dan akselerasi ekosistem digital yang maju untuk mendorong Jakarta sebagai kota global” tersebut dipimpin oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda), serta dihadiri oleh anggota TPID dan TP2DD Jakarta. Adapun agenda pembahasan meliputi pemaparan prospek ekonomi, inflasi, dan digitalisasi di Jakarta, pemaparan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi tekanan inflasi pangan dan upaya mengakselerasi digitalisasi keuangan, serta arahan Pj Gubernur DKI Jakarta. Ke depan, sinergi dan kolaborasi TPID dan TP2DD DKI Jakarta akan terus diperkuat untuk memastikan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi dapat berjalan baik dan efektif.
- Menyelenggarakan kegiatan *High Level Meeting* (HLM) TPID yang bersinergi 4 Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten pada Rabu, 29 November 2023. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penguatan koordinasi pengendalian inflasi di tingkat Jabodetabek dan mengusung tema “Sinergi dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pengendalian Inflasi”. HLM dipimpin oleh Pj. Gubernur Jakarta dan dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Pj. Gubernur Banten, Pj Gub Jawa Tengah, Kemenko Perekonomian, Bapanas, Para Walikota Bogor, Depok, Tangerang, dan Pj Walikota Bekasi, Pimpinan BI Jabar dan BI Banten, pejabat SKPD terkait, dan Direktur Utama BUMD DKI Jakarta. Adapun agenda pembahasan dalam HLM ini meliputi ketahanan pangan dan stabilitas harga, terutama di daerah Jabodetabek, menjelang agenda Nataru, Pemilu 2024, hingga Ramadhan-Idul Fitri 2024. HLM diakhiri dengan kesepakatan bersama antara Pj. Gubernur Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pj. Gubernur menyambut baik inisiasi koordinasi antara 3 wilayah ini dan berharap agar komitmen ini tetap berlanjut untuk menjaga inflasi di Jawa, mengingat kontribusi 4 wilayah ini yang besar terhadap stabilitas nasional.
- Penyelenggaraan beberapa kegiatan *capacity building*, diantaranya: (i) *Capacity Building* Enumerator Info Pangan Jakarta (IPJ) Tahun 2023 pada tanggal 20-21 November 2023; (ii) *Capacity*

Building TPID Malang dengan TPID Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Desember 2023; dan (iii) *Capacity Building* TPID Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 November 2024.

- Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta secara aktif mengunggah rilis Inflasi DKI Jakarta pada sosial media Instagram, program komunikasi berupa siaran pers terkait “perkembangan dan prospek inflasi dan peran TPID Jakarta” secara bulanan, serta bincang – bincang media terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga telah dilaksanakan. Program komunikasi juga dilaksanakan melalui platform online dalam bentuk video ataupun webinar, serta optimalisasi media sosial oleh masing-masing anggota TPID DKI Jakarta.
- Kegiatan rutin mingguan yaitu Rapat Kamisan anggota TPID DKI Jakarta dalam rangka monitoring perkembangan stok dan harga di wilayah DKI Jakarta. Dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan keterjangkauan harga tim TPID melakukan sinergi setiap Hari Kamis untuk membahas informasi harga setiap komoditas, rencana program pengendalian inflasi yang telah ataupun akan dilaksanakan, serta kondisi stok khususnya yang dimiliki oleh BUMD pangan dan Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten.
- Mengoptimalkan rencana 7 program unggulan dalam mengendalikan inflasi pangan baik secara daerah maupun nasional salah satunya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi DKI Jakarta yang akan berlangsung sepanjang tahun 2023.

BOKS 2

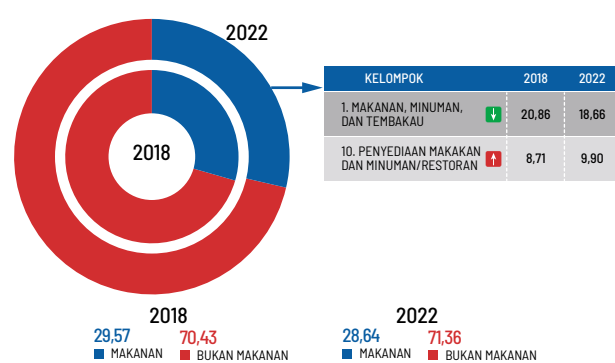
Tantangan dan Strategi Pengendalian Inflasi 2024:

Faktor Eksternal dan Pergeseran Komoditas Terkait SBH 2022

Pada tahun 2024, target inflasi akan semakin rendah yaitu 2,5±1%. Pencapaian target ini menghadapi sejumlah tantangan yang masih mengemuka, khususnya dari sisi eksternal, yaitu meluasnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik di laut merah, yang berisiko mengganggu alur pelayaran dan pasokan komoditas di dunia. Pengangkutan barang juga menjadi tidak efisien karena harus mengambil jalur memutar guna menghindari Laut Merah. Sementara itu, efek El-Nino masih terasa pada awal 2024, seiring pergeseran waktu tanam, yang berdampak pada mundurnya panen raya ke April 2024. Untuk keseluruhan tahun 2024, cuaca yang lebih kondusif menjadi faktor pendukung membaiknya produksi pangan, yang berkontribusi terhadap harga pangan yang lebih terkendali.

Mulai Januari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 sebagai dasar perhitungan untuk inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), sebagai pembaharuan dari SBH 2018. Pembaharuan mempertimbangkan a.l. perubahan pola konsumsi masyarakat yang disebabkan oleh perubahan teknologi, perilaku, dan pendapatan, serta perkembangan jenis barang dan jasa sesuai dengan dinamika pergeseran minat dan prioritas Masyarakat. Perubahan SBH 2022 berdampak pada perubahan cakupan kota, cakupan sampel, dan cakupan komoditas. Pada SBH 2022 dilakukan perluasan cakupan wilayah pada area pedesaan (*rural area*) untuk menghilangkan *urban bias* pada penghitungan nilai konsumsi Rumah Tangga. Pada tingkat nasional, penambahan jumlah cakupan kota penghitungan inflasi sebanyak 60 kabupaten/kota, yang tersebar di seluruh provinsi yang mayoritas berada di wilayah timur. Sementara paket komoditas bertambah dari sebelumnya 835 komoditas menjadi 847 komoditas. Berdasarkan hasil SBH 2022, DKI Jakarta masih menempati peringkat pertama nasional dengan rata-rata Nilai Konsumsi tertinggi, yakni sebesar Rp14.884.110.

Pada lingkup Jakarta, pembaharuan SBH 2022 berdampak pada penambahan jumlah paket komoditas dari 473 komoditas menjadi 479 komoditas, yang terdiri dari 452 komoditas lama yang terpilih kembali, 27 komoditas baru, dan 21 komoditas lama tidak terpilih. Beberapa komoditas yang hilang diantaranya beberapa jenis kerupuk, ikan asin, majalah berkala, surat kabar harian, dan VCD/DVD *player*. Adapun beberapa komoditas baru yang ditambahkan, di antaranya tarif LRT/ MRT (kelompok *administered price/AP*); serta CCTV, masker, *hand sanitizer*, dan *receiver TV* (kelompok inti). Pola konsumsi masyarakat



Sumber: BPS, sesuai Materi Sosialisasi Hasil SBH Tahun 2022
Gambar B2.1 Bobot Nilai Konsumsi Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan

pada SBH 2022 semakin bergeser ke kelompok bukan Makanan (Gambar B.2.1). Pada kelompok makanan, pangsa nilai konsumsi kelompok Makanan, Minuman, Tembakau turun menjadi 18,66%, namun di sisi lain pangsa nilai konsumsi Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran naik menjadi 9,90%.

Selain itu, terdapat pergeseran komoditas dengan Bobot Terbesar. Pada SBH 2022, 10 besar komoditas meliputi: Tarif Listrik, Kontrak Rumah, Bensin, Sewa Rumah, Nasi Dengan Lauk, Biaya Langganan Internet, Akademi/Perguruan Tinggi, Upah ART, Tarif Pulsa Ponsel, dan Tarif PAM. Berdasarkan hal tersebut, selain komoditas Makanan, inflasi pada komoditas Nonmakanan juga perlu menjadi perhatian, terutama pada siklus tertentu seperti saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru, maupun dinamika harga energi global, terkait komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah.

Sehubungan dengan itu, sinergi TPID perlu semakin diperkuat, untuk memitigasi dampak eksternal, maupun strategi pengendalian inflasi yang perlu semakin memperhatikan dinamika komoditas Nonmakanan. Perkembangan harga dan pasokan komoditas Makanan juga perlu terus dipantau, agar tidak memberikan dampak lanjutan pada harga komoditas Makanan Jadi. Untuk itu, sinergi antardaerah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas pangan di Jakarta, terutama menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024, perlu terus diperkuat melalui penguatan peran BUMD dan ekstensifikasi Kerjasama Antar Daerah dengan daerah surplus.



BAB 5

PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Intermediasi perbankan meningkat didukung ketahanan yang terjaga. Dari sisi penawaran, perbankan memiliki kapasitas yang baik untuk menyalurkan kredit sejalan dengan kondisi likuiditas yang memadai dan risiko kredit yang terjaga rendah. Kecukupan likuiditas perbankan ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih tetap positif, penguatan strategi pendanaan dari sumber lainnya, serta implementasi berbagai pelonggaran kebijakan dan insentif makroprudensial sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Sementara itu, risiko kredit yang terjaga rendah, tercermin dari penurunan rasio *Non-Performing Loans* (NPL) sehingga mendorong perbankan tetap dapat meningkatkan penyaluran kredit.

Dari sisi permintaan, kredit korporasi meningkat seiring dengan tetap tumbuh positifnya kinerja korporasi. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan positif penjualan dan tingkat profitabilitas yang masih cukup baik. Dengan demikian, kemampuan membayar korporasi nonkeuangan tetap terjaga tercermin dari rendahnya rasio NPL kredit korporasi.

Sejalan dengan perbaikan kinerja sektor korporasi non keuangan, kinerja sektor rumah tangga pada triwulan IV 2023 juga menunjukkan perbaikan meskipun terbatas. Kondisi ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen yang tetap berada pada level optimis meskipun tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor UMKM juga terus membaik sejalan dengan peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat. Kredit UMKM melanjutkan pertumbuhan yang positif terutama didorong oleh tetap positifnya pertumbuhan kredit UMKM dari skala mikro dan kecil terutama dari sektor perdagangan. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.



**Pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga (yoy)**



3,23%

Triwulan IV 2023

8,31%

Triwulan III 2023

**Pertumbuhan Kredit
(Lokasi Proyek), yoy**



15,83%

Triwulan IV 2023

11,60%

Triwulan III 2023

**Non-Performing Loan
(Lokasi Proyek), yoy**



1,33%

Triwulan IV 2023

1,45%

Triwulan III 2023

A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

Kinerja bank umum di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 terjaga baik. Intermediasi meningkat dengan risiko kredit yang rendah. Capaian ini tidak terlepas oleh dukungan konsistensi, inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian bauran kebijakan nasional.

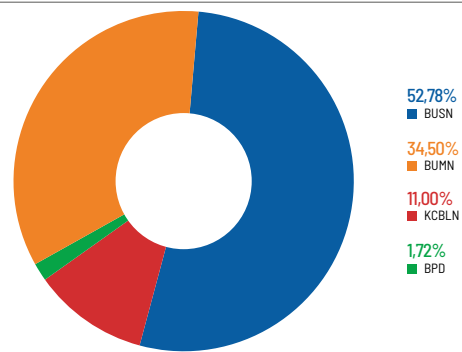
Pada tahun 2023 Bank Indonesia secara konsisten menerapkan bauran kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui kebijakan makroprudensial serta juga didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah meningkatnya tantangan perekonomian dan sistem keuangan global akibat pergeseran sumber pertumbuhan dunia yang diikuti oleh peningkatan inflasi global sehingga memicu respons pengetatan kebijakan moneter global agresif melalui kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*).

Kapasitas perbankan yang terjaga baik antara lain dapat dilihat dari kondisi likuiditas perbankan yang memadai dengan diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Selain itu, kapasitas perbankan diperkuat oleh berbagai pelonggaran kebijakan dan pemberlakuan Kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan. Kebijakan insentif makroprudensial mulai diberlakukan pada Oktober 2023 yang bertujuan mendorong penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khususnya pada sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, dan perikanan),

perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata, inklusif (termasuk UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi), serta ekonomi keuangan hijau. Perbankan yang melakukan penyaluran kredit kepada sektor-sektor tersebut akan mendapatkan insentif melalui pengurangan kewajiban giro bank di Bank Indonesia.

Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Lebih lanjut, dengan *cost of fund* lebih ringan bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga lebih murah sehingga mendorong pertumbuhan kredit.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, total aset juga meningkat menjadi sebesar Rp7.661 triliun dengan pertumbuhan yang tetap solid sebesar 4,96% (yoy) (Tabel 5.1). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 52,78%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 34,50%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 11,00%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,72% (Grafik 5.1).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

Tabel 5.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

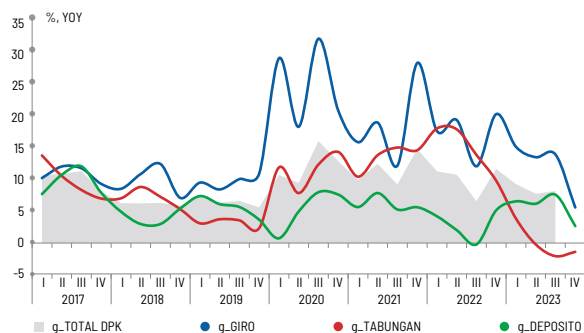
NO	KOMPONEN BELANJA	2020				2021				2022				2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Total Asset	5.579	5.514	5.804	5.913	5.935	6.057	6.334	6.642	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.139	3.111	3.352	3.359	3.454	3.505	3.667	3.864	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461
3	Kredit																
	- Lokasi Bank (LB)	2.830	2.717	2.665	2.574	2.539	2.607	2.639	2.686	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493
	- Lokasi Proyek (LP)	1.903	1.811	1.763	1.723	1.704	1.750	1.805	1.751	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324
4	Pertumbuhan :																
	- g.Asset (% , yoy)	10,46	8,71	13,29	11,57	6,39	9,83	9,14	12,32	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96
	- g.DPK (% , yoy)	10,87	9,62	16,27	13,10	10,02	12,67	9,38	15,03	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23
	- g.Kredit Lokasi Bank (% , yoy)	6,29	-2,60	-4,35	-9,24	-10,28	-4,02	-1,00	4,36	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98
	- g.Kredit Lokasi Proyek (% , yoy)	8,87	-1,47	-2,95	-7,05	-10,41	-3,40	2,40	1,63	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,60	15,83
5	Intermediasi (tanpa SB)																
	-Lokasi Bank	90,14	87,33	79,51	76,62	73,51	74,39	71,96	69,51	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31
	-Lokasi Proyek	60,60	58,23	52,60	51,30	49,35	49,93	49,24	45,32	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09
6	Non performing loan (NPL)																
	- Lokasi Bank	2,33	2,74	2,91	2,89	3,01	3,17	3,06	2,93	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81
	- Lokasi Proyek	1,90	2,27	2,48	2,44	2,40	2,32	2,19	1,97	1,94	1,70	1,62	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

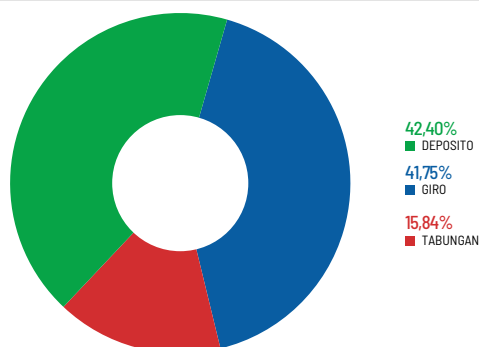
Kinerja penghimpunan DPK di DKI Jakarta tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, pertumbuhan DPK tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,31% (yoy) (Grafik 5.2). Perlambatan pertumbuhan DPK tersebut disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan Giro dan Deposito dengan diiringi pertumbuhan Tabungan yang masih tetap negatif meskipun sudah tidak sedalam triwulan sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pada triwulan IV 2023, pangsa Deposito tetap dominan mencapai sebesar 42,40% dari total DPK Jakarta, diikuti oleh Giro sebesar 41,75% dan Tabungan yaitu sebesar 15,84% (Grafik 5.3).

Perlambatan pertumbuhan DPK diantaranya dipengaruhi oleh perilaku sektor Korporasi yang masih mengandalkan dana internal untuk kebutuhan operasional perusahaan. Selain itu, banyaknya alternatif penempatan dana lain di luar DPK yang menawarkan imbal hasil lebih menguntungkan turut berpengaruh kepada perlambatan pertumbuhan DPK terutama dari kelompok masyarakat menengah atas yang cenderung mengalihkan dana simpanannya kepada penempatan lain di luar DPK. Sementara itu, kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi mendorong masyarakat khususnya kelompok menengah bawah kembali menarik tabungannya yang terakumulasi di masa pandemi untuk konsumsi. Fenomena ini tercermin dari hasil analisis



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan DPK Jakarta



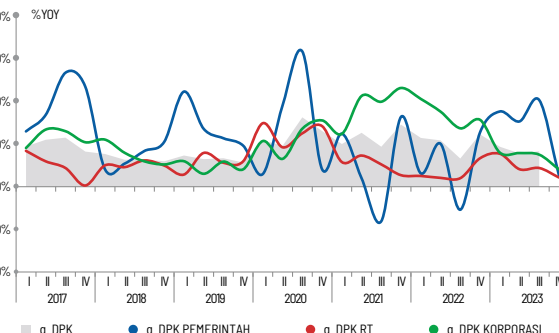
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Komposisi DPK Jakarta

Mandiri Spending Index (MSI) yang mencatat tren masyarakat kelas menengah bawah menggerus Tabungannya sejak April 2023 dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2024¹.

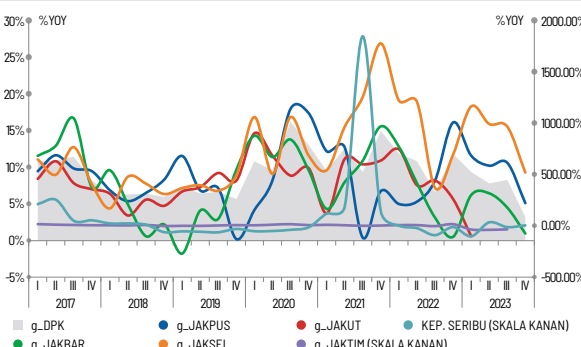
Berdasarkan pemiliknya, perlambatan pertumbuhan DPK terutama disebabkan oleh perlambatan DPK milik Pemerintah dan Rumah tangga. Perlambatan DPK milik Pemerintah sejalan dengan meningkatnya penarikan simpanan di akhir tahun untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah, sementara itu perlambatan DPK milik rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh kecenderungan penarikan DPK untuk kebutuhan konsumsi oleh masyarakat kelompok menengah bawah dan shifting simpanan kepada penempatan lain di luar DPK oleh masyarakat kelompok menengah atas. Sementara itu, DPK milik korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan DPK milik Pemerintah dan Rumah Tangga meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.4).

Secara spasial, peningkatan pertumbuhan DPK terutama ditopang oleh pertumbuhan DPK di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Pertumbuhan DPK di kedua wilayah tersebut terutama disumbang oleh pertumbuhan Giro dan Deposito. Sementara itu, DPK di Jakarta Timur masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Penurunan DPK di Jakarta Timur terjadi di semua jenis DPK dengan kontributor utama penurunan adalah Giro (Grafik 5.5).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

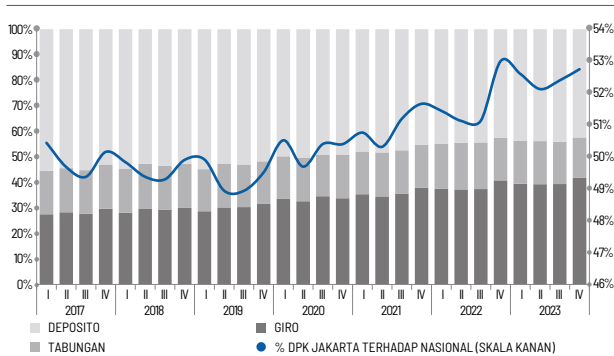
Grafik 5.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta



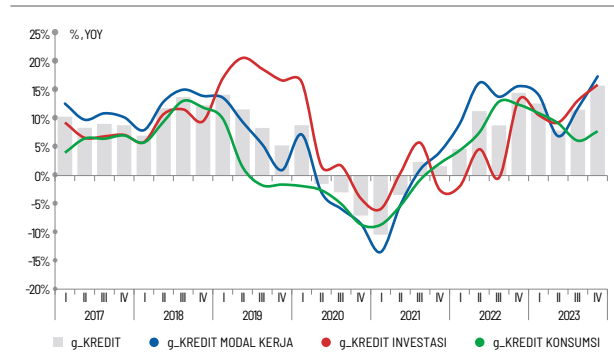
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta

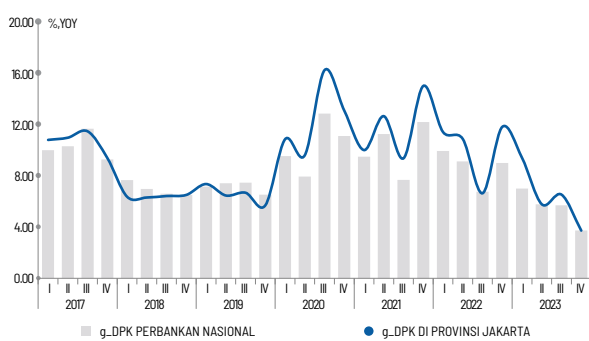
¹ Tabungan Menipis, Masyarakat Ekonomi Menengah Bawah Mulai 'Makan' Tabungan Buat Belanja (Infobanknews)



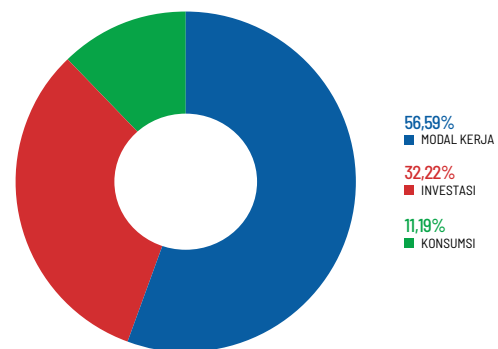
Grafik 5.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional



Grafik 5.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta



Grafik 5.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional



Grafik 5.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

Kenaikan pertumbuhan DPK Jakarta mendorong semakin dominannya pangsa DPK DKI Jakarta terhadap Nasional. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai 52,75% terhadap DPK perbankan nasional pada triwulan IV 2023 atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 52,40% (Grafik 5.6). Pangsa DPK di DKI Jakarta selalu berada diatas 50% pangsa DPK nasional sejak triwulan III 2020. Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai tumpuan perbankan nasional dalam penghimpunan dana, terutama Deposito. Dengan demikian, pertumbuhan DPK DKI Jakarta sangat dominan memengaruhi pertumbuhan DPK di nasional. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 adalah sebesar 3,23% (yoy) sedikit dibawah pertumbuhan DPK Nasional yang sebesar 3,73% (yoy) (Grafik 5.7). Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta.

Perkembangan Kredit Bank Umum

Pada triwulan IV 2023, kredit bank umum di DKI Jakarta tumbuh meningkat dibandingkan triwulan III 2023. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi bank dan lokasi proyek masing-masing tercatat sebesar 13,98% (yoy) dan 15,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing 10,52% (yoy) dan 11,60% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kredit produktif yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dan Investasi (KI). Pada

triwulan IV 2023, KMK dan KI masing-masing tumbuh sebesar 17,46% (yoy) dan 15,99% (yoy), meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 11,86% (yoy) dan 13,23% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi juga tumbuh meningkat meskipun pada level yang lebih rendah yaitu 7,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 6,15% (yoy) (Grafik 5.8). Seiring dengan perkembangan tersebut, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 56,59%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 32,22% dan 11,19% (Grafik 5.9).

Peningkatan pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh semakin meningkatnya permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen kebijakan makprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta inovasi Kebijakan insentif Likuiditas Makprudensial yang ditempuh secara konsisten dan inovatif mampu membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga kredit dapat dilakukan secara terbatas pada suku bunga kredit baru².

2 BI Rate Naik ke 6%, Begini Kondisi Suku Bunga Kredit Baru Perbankan (bisnis.com)

Fungsi intermediasi bank yang terjaga juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik. Sinergi tersebut sejalan dengan penguatan mandat dan kewenangan masing-masing lembaga serta mekanisme koordinasi yang telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penguatan sinergi dengan otoritas di tingkat internasional antara lain ditunjukkan dengan kontribusi aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional.

Kondisi pertumbuhan kredit yang membaik juga terkonfirmasi dari hasil survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Desember 2023 yang menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan dari korporasi terindikasi meningkat. Hasil survei menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi terutama didorong oleh peningkatan kebutuhan pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan. Peningkatan kredit dari korporasi didorong oleh pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik dan pembiayaan dari perbankan dalam negeri. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa penawaran penyaluran kredit baru dari perbankan juga diperkirakan tetap tumbuh.

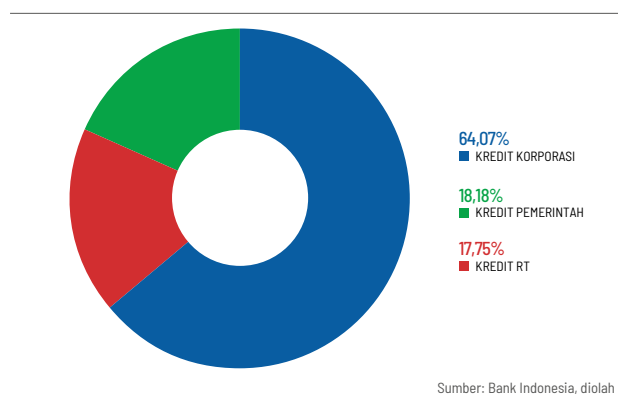
Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 64,07% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti

oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 18,18% dan rumah tangga sebesar 17,75% (Grafik 5.10). Sementara itu dilihat dari pertumbuhannya, pada triwulan IV 2023, kredit kelompok Rumah Tangga, Korporasi dan Pemerintah tumbuh meningkat dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit dari Rumah Tangga diikuti oleh Korporasi dan Pemerintah masing-masing sebesar 11,05% (yoy), 10,69% (yoy) dan 10,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 8,15% (yoy), 9,89% (yoy) dan 0,45% (yoy) (Grafik 5.11).

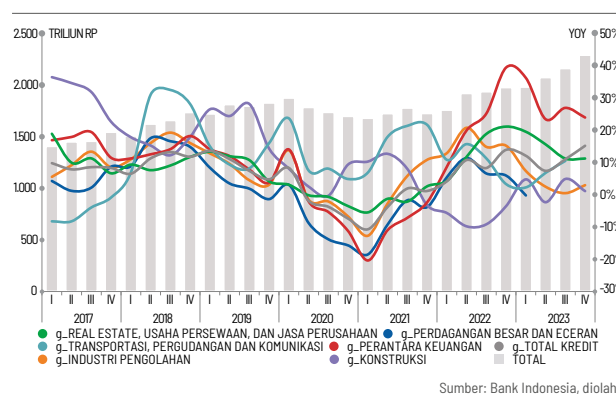
Secara sektoral, pertumbuhan kredit positif terjadi di semua sektor utama, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perantara Jasa Keuangan, Transportasi Pergudangan dan Komunikasi serta Perdagangan Besar dan Eceran. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 5.12).

Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai sentra perekonomian dan niaga. Pada triwulan IV 2023, porsi kredit yang disalurkan kepada dua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 36,64% dan 35,04% (Grafik 5.13).

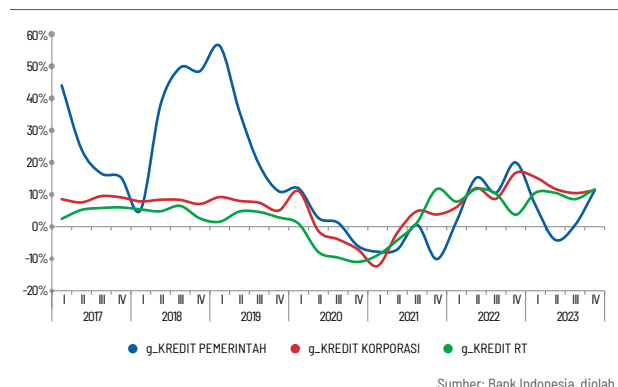
Meningkatnya penyaluran kredit yang ditunjukkan oleh pertumbuhan positif kredit mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas



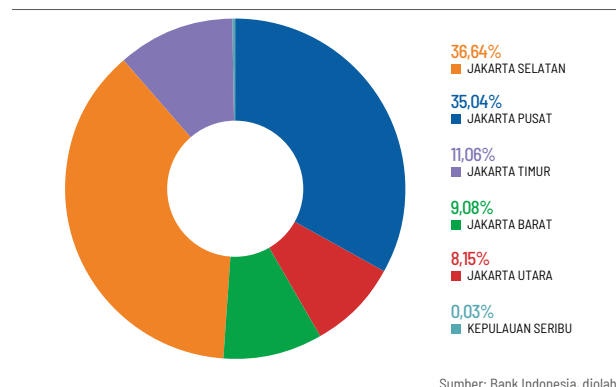
Grafik 5.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan



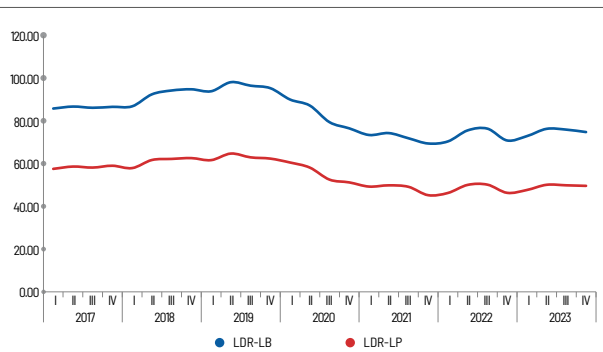
Grafik 5.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral



Grafik 5.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Grafik 5.13 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

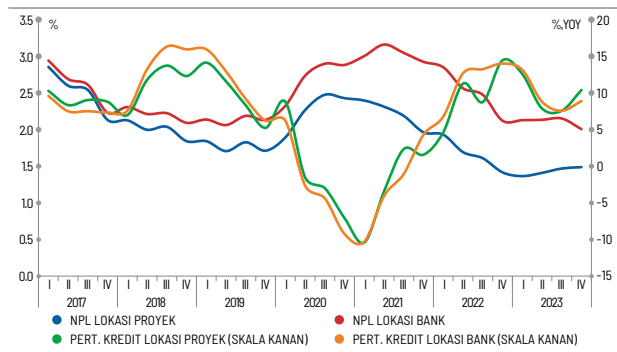
Grafik 5.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

intermediasi perbankan. Pada triwulan IV 2023, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 52,09% dan 78,31%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 51,78% dan 78,04% (Grafik 5.14). Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit disalurkan ke luar DKI Jakarta.

Risiko Kredit Bank Umum

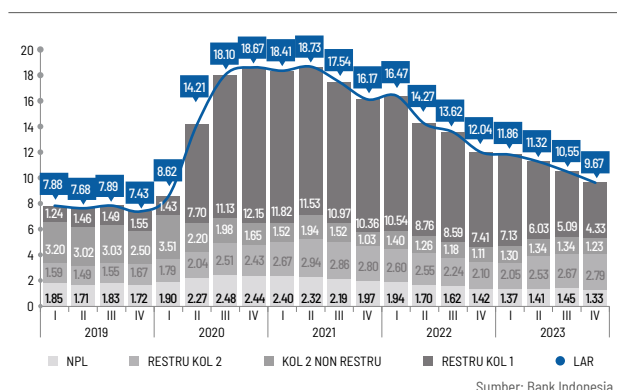
Tingkat ketahanan perbankan tetap terjaga di tengah meningkatnya penyaluran kredit. Hal ini ditunjukkan oleh tetap rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dan rasio *Loan at Risk* (LaR). Pada triwulan IV 2023, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 1,33%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 1,45%. Sejalan dengan itu, rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga tercatat rendah yaitu sebesar 1,81% menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 2,08% (Grafik 5.15). Risiko kredit yang terkendali juga terlihat dari rasio kredit berisiko atau *Loan at Risk* (LaR) menunjukkan penurunan sejalan dengan penurunan *outstanding* kredit restrukturisasi (Grafik 5.16).

Rasio NPL yang terjaga di bawah *threshold* 5% didukung oleh implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah dan otoritas terkait berupa pemberian subsidi suku bunga UMKM, *risk sharing* penjaminan kredit korporasi, serta relaksasi restrukturisasi kredit yang diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Maret 2024 secara *targeted* untuk segmen UMKM, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki³. Sementara disisi internal perbankan, dalam upaya mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit dari *downgrade* debitur restrukturisasi yang tidak layak atau pemburukan kondisi ekonomi ke depan, perbankan senantiasa juga menjaga pembentukan pencadangan dengan rasio pencadangan atau *NPL coverage ratio* berada di level yang memadai⁴.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia

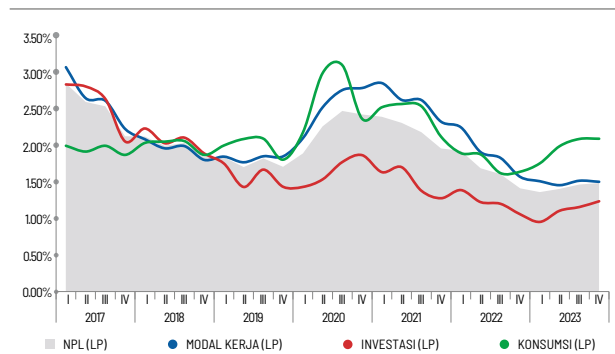
Grafik 5.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta

Dilihat dari jenis penggunaan, penurunan rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek didorong oleh penurunan NPL Kredit Modal Kerja. Pada triwulan IV 2023, rasio NPL Kredit Modal Kerja berdasarkan lokasi proyek adalah sebesar 1,51%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,53%. Sementara itu rasio NPL kredit Konsumsi stabil pada level 2,12%. Sedangkan rasio NPL kredit Investasi meningkat tipis dari 1,16% menjadi 1,24% pada triwulan IV 2023 (Grafik 5.17). Perkembangan rasio NPL serupa juga terjadi pada perhitungan NPL kredit berdasarkan lokasi bank. Jika dibandingkan dengan kualitas kredit nasional, NPL di DKI Jakarta, baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 5.18).

Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain potensi pelemahan permintaan ekspor, risiko suku bunga dan penurunan harga komoditas, risiko nilai tukar, serta konsolidasi fiskal yang diperkirakan dapat menahan laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun disisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi tersebut lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.

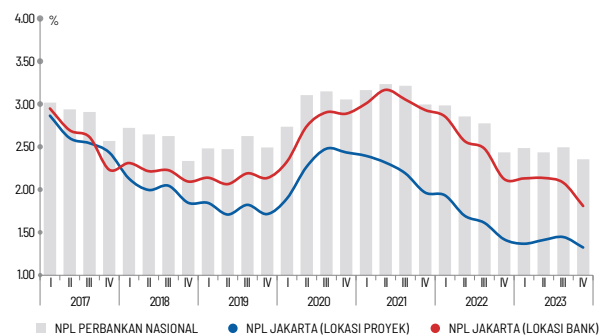
3 Siaran Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor: 01/KSSK/Pers/2023 "Stabilitas Sistem Keuangan Terus Membaik Ditopang Optimisme Pemulihan Perekonomian Dan Sistem Keuangan Domestik Dengan Terus Mewaspadai Berbagai Risiko Global", 31 Januari 2023

4 BRI Antisipasi Berakhirnya Restrukturisasi, Tingkatkan Kualitas Kredit (cnnindonesia.com)



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

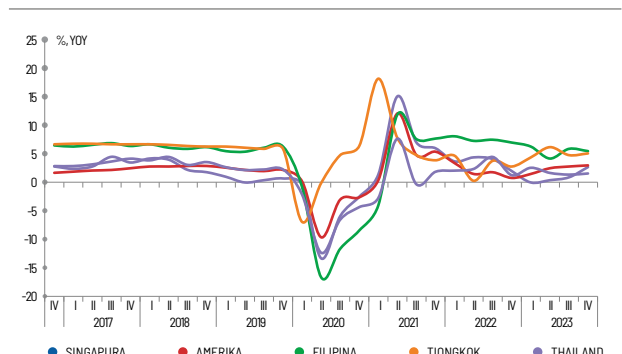
B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

Kinerja korporasi DKI Jakarta dipengaruhi oleh perkembangan sektor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, perkembangan ekonomi global memengaruhi kondisi ekonomi beberapa negara mitra dagang, sehingga memengaruhi kinerja korporasi terutama yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, korporasi juga mengalami ketergantungan bahan baku dari impor. Keketatan likuiditas di pasar global seiring kebijakan kenaikan suku bunga tinggi dalam jangka panjang juga memengaruhi kinerja korporasi terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu, aktivitas korporasi yang berorientasi domestik ditentukan oleh perkembangan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan inflasi, serta berbagai kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

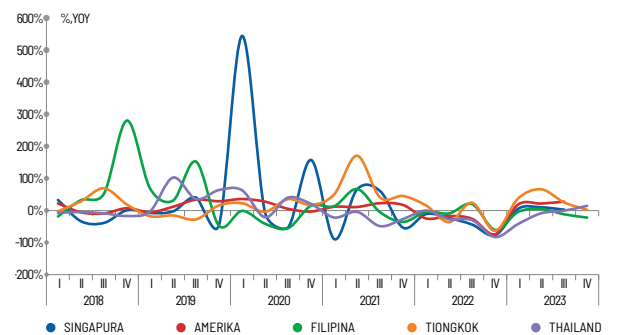
1. Pertumbuhan ekonomi global belum cukup kuat dan risiko SSK global yang masih tinggi

Pada triwulan IV 2023, hampir semua negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan perbaikan pertumbuhan ekonomi meskipun belum cukup kuat (Grafik 5.19). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan yang terjadi di Inggris dan Jepang dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut juga dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global. Perkembangan ini



Sumber: Trading Economics

Grafik 5.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



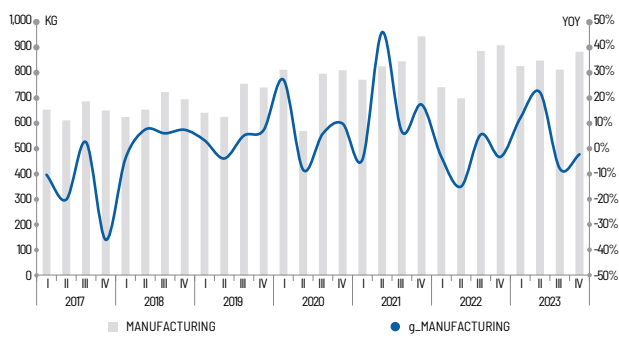
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Perekonomian global yang masih tumbuh terbatas dengan diiringi ketidakpastian di pasar keuangan global dan gangguan distribusi akibat eskalasi ketegangan geopolitik berdampak terhadap penurunan volume ekspor Indonesia termasuk Jakarta kepada negara mitra dagang utama (Grafik 5.20).

Disisi lain, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi, suku bunga Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan baru mulai menurun pada semester II 2024. Yield US treasury kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka Panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut mendorong menguatnya dolar AS secara global dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara *emerging market*, termasuk Rupiah. Pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor yang akan berdampak pula pada penurunan kinerja sektor perdagangan di Indonesia maupun DKI Jakarta.

Dinamika kondisi makroekonomi menjadi tantangan sendiri bagi stabilitas ekonomi dan keuangan di dalam negeri. Namun, ditengah ketidakpastian perekonomian global, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan yang membaik. Stabilitas makroekonomi dan prospek positif ekonomi jangka menengah Indonesia mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan internasional sebagaimana keputusan Fitch pada September 2023 yang mempertahankan rating Indonesia pada peringkat BBB dengan *outlook* stabil. Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepercayaan internasional yang terjaga baik ini diharapkan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta

memberikan sentimen positif dan mendukung perbaikan kinerja sektor usaha ke depan.

2. Penurunan Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta

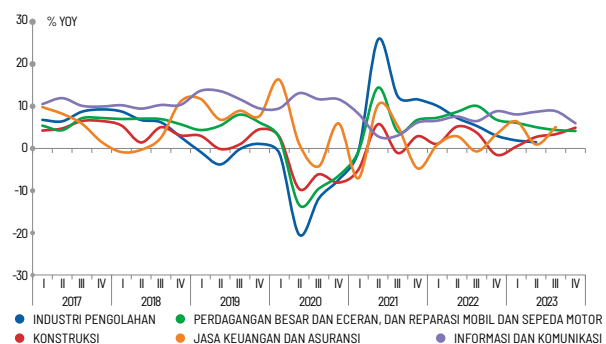
Tekanan volume perdagangan global yang masih terus berlangsung terdampak fragmentasi dunia dari tensi geopolitik global yang belum berakhir secara keseluruhan memengaruhi volume ekspor sektor korporasi manufaktur. Hal tersebut terlihat dari tren perkembangan volume ekspor manufaktur DKI Jakarta yang pada triwulan IV 2023 masih tumbuh negatif 2,80% (Grafik 5.21). Kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional ke depan guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi di lapangan usaha manufaktur.

3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif namun perlu dijaga iklim investasi yang tetap kondusif di periode pemilu 2024

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 melanjutkan pertumbuhan yang positif. Kinerja investasi yang positif secara tahunan diantaranya didukung oleh berlangsungnya percepatan pembangunan, tidak hanya proyek pemerintah namun juga proyek swasta. Investasi dari sisi nonbangunan juga tumbuh positif tercermin dari perkembangan investasi dunia usaha sebagaimana tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang meningkat menjadi 18,52% pada triwulan IV 2023. Pertumbuhan ekonomi positif yang dialami Indonesia, tingkat inflasi yang cukup terkendali serta stabilitas keuangan yang terjaga dengan baik berpotensi mendorong kepercayaan investor asing untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Namun demikian, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat memengaruhi iklim investasi kondusif Indonesia yang salah satunya adalah peningkatan dinamika politik seiring dengan periode politik 2024.

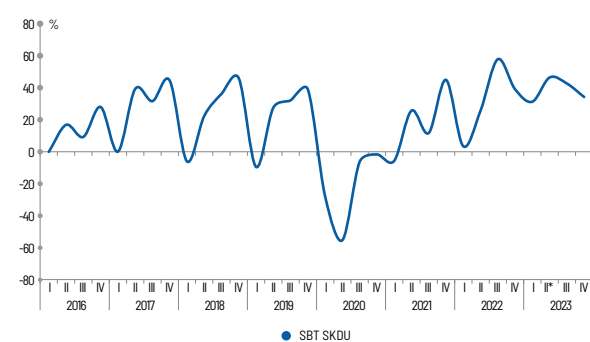
Kinerja Korporasi - Umum

Di tengah berbagai tantangan, baik dari sisi eksternal maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta masih melanjutkan tren perbaikan. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan positif ekonomi triwulan IV 2023



Sumber: BPS

Grafik 5.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta



Sumber: BPS

Grafik 5.23 Perkembangan Realisasi SKDU sektor Unggulan DKI Jakarta

didukung oleh pertumbuhan positif kredit pada semua sektor utama dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Informasi dan Komunikasi (Grafik 5.22). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengonfirmasi perkembangan positif kegiatan ekonomi pelaku usaha di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 yang ditunjukkan melalui nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang masih berada di zona optimis (Grafik 5.23).

Kinerja Korporasi Nonkeuangan

Berdasarkan data terkini (data triwulan III 2023), kinerja korporasi non-keuangan DKI Jakarta yang terdaftar di bursa (selanjutnya disebut korporasi) masih tetap tumbuh positif meskipun melambat. Perlambatan ini terdampak ketidakpastian ekonomi global serta pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Sementara itu dari sisi domestik, pelaku usaha terindikasi cenderung *wait and see* dalam pengembangan investasi dan usahanya di tengah dinamika politik pada periode pemilu (Tabel 5.2).

Ketidakpastian ekonomi global dan kelesuan ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan ekspor terbesar memengaruhi volume perdagangan dunia dan memberikan dampak kepada penurunan kinerja perdagangan/ekspor Indonesia termasuk DKI Jakarta. Perkembangan tersebut menyebabkan kinerja penjualan korporasi melambat menjadi 4,42% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 11,34% (yoy) (Grafik 5.24). Kinerja penjualan yang melambat memberikan dampak pada penurunan profitabilitas tahunan korporasi yang tercermin dari menurunnya *return on asset* (ROA) korporasi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi 4,69%. Sejalan dengan penurunan ROA,

Tabel 5.2 Tabel Rasio Keuangan Korporasi Nonkeuangan

NO	SEKTOR	SALES GROWTH		ROA		ROE		CURRENT RATIO	
		TW II'23	TW III'23	TW II'23	TW III'23	TW II'23	TW III'23	TW II'23	TW III'23
1	Pertanian	2,09%	-8,86%	7,38%	4,76%	15,29%	9,66%	1,82	2,18
2	Pertambangan	32,72%	2,64%	19,33%	15,08%	31,38%	24,57%	2,21	2,40
3	Industri	8,08%	4,19%	6,42%	6,55%	12,26%	12,70%	1,43	1,40
4	Listrik, Gas, dan Air	16,65%	12,49%	3,63%	3,33%	7,69%	6,84%	1,09	1,18
5	Konstruksi	11,32%	6,20%	0,41%	0,21%	1,05%	0,55%	1,41	1,30
6	Perdagangan	17,01%	9,90%	10,01%	8,82%	21,32%	19,01%	1,27	1,23
7	Pengangkutan	16,30%	11,43%	4,18%	4,40%	14,35%	14,52%	0,54	0,55
8	Jasa dunia Usaha	-34,00%	-43,58%	-7,10%	-9,10%	-10,24%	-12,98%	1,29	1,21
9	Jasa Sosial	1,37%	-2,27%	2,76%	1,22%	4,07%	1,79%	1,55	1,56
Agregat		11,34%	4,42%	5,08%	4,69%	11,07%	10,15%	1,22	1,24

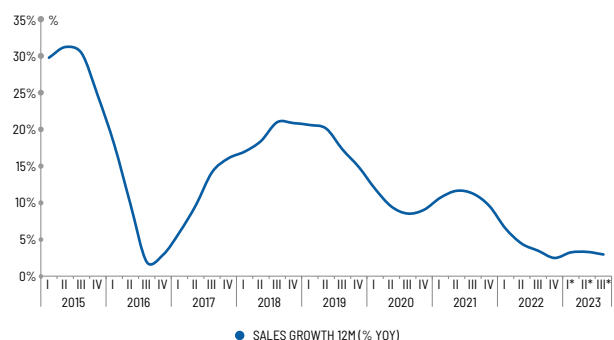
NO	SEKTOR	DER		ICR		ROE		CURRENT RATIO	
		TW II'23	TW III'23	TW II'23	TW III'23	TW II'23	TW III'23	TW II'23	TW III'23
1	Pertanian	0,68	0,69	1,36	3,92	1,47	1,36	7,18	7,69
2	Pertambangan	0,32	0,31	3,27	10,31	0,97	0,80	26,99	22,74
3	Industri	0,47	0,46	1,70	3,67	0,92	0,88	6,14	5,99
4	Listrik, Gas, dan Air	0,58	0,35	4,43	1,44	0,52	0,52	59,68	58,44
5	Konstruksi	0,96	0,96	1,36	1,71	0,23	0,22	1,46	1,45
6	Perdagangan	0,43	0,44	1,45	1,96	1,50	1,42	8,19	7,86
7	Pengangkutan	1,46	1,41	2,28	2,46	0,44	0,44	86,03	78,21
8	Jasa dunia Usaha	0,18	0,16	1,19	1,67	0,40	0,36	7,36	7,94
9	Jasa Sosial	0,27	0,28	0,65	0,92	0,36	0,36	5,31	5,23
Agregat		0,64	0,63	1,71	2,13	0,68	0,66	6,36	6,22

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

pemilik modal dan investor juga menerima tingkat imbal hasil yang lebih rendah dengan nilai *return on equity* (ROE) yang menurun menjadi 10,15% pada triwulan III 2023 (Grafik 5.25).

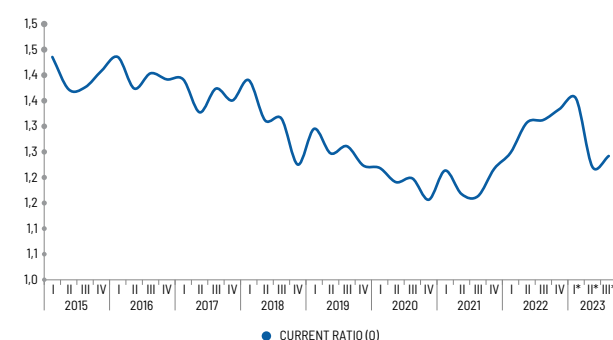
Di tengah perlambatan kinerja penjualan dan profitabilitas, kinerja likuiditas korporasi masih tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *current ratio* yang masih diatas 1 yaitu sebesar 1,24. Nilai rasio

ini menunjukkan bahwa korporasi non-keuangan DKI Jakarta masih memiliki posisi likuiditas yang sehat (Grafik 5.26). Selain itu, meskipun penjualan mengalami perlambatan, rasio *inventory turnover* korporasi masih terjaga baik pada level 6,22. Korporasi juga masih cukup efisien dengan mampu mengoptimalkan penjualan korporasi dari total aset yang dimiliki sehingga rasio *Asset turnover* (ATO) terjaga stabil pada level 0,69 (Grafik 5.27).



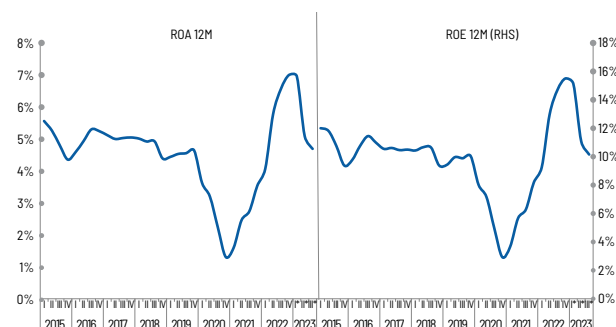
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.24 Penjualan Korporasi DKI Jakarta



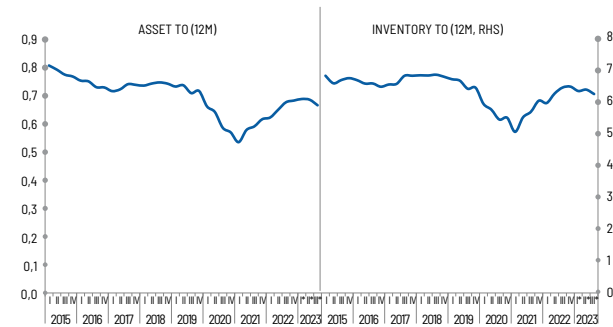
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.26 Likuiditas Korporasi DKI Jakarta



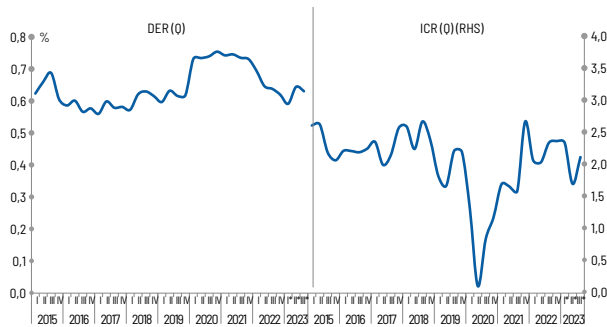
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.25 Profitabilitas Korporasi DKI Jakarta



Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.27 Produktivitas Korporasi DKI Jakarta



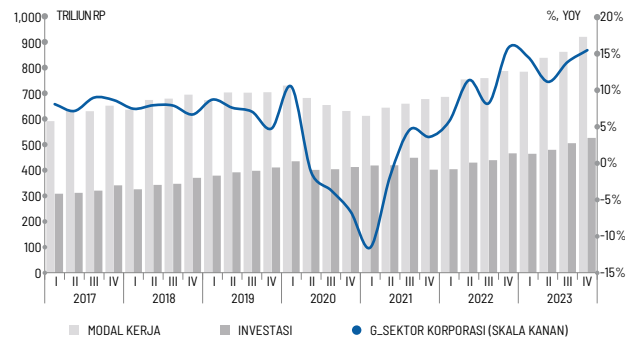
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 5.28 Kemampuan Membayar Korporasi DKI Jakarta

Di tengah kondisi ketidakpastian, sektor korporasi bersikap hati-hati dalam mengelola kinerja usaha. Penawaran kredit yang cukup kuat yang disertai beragam kebijakan *pro growth* Bank Indonesia mendorong sektor korporasi mulai menarik kredit dengan rasio *leverage* terjaga stabil sebesar 0,63 pada triwulan III 2023. Sejalan dengan kondisi likuiditas yang masih memadai serta didukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan korporasi, berdampak kepada terjaganya tingkat kelayakan kredit korporasi (*creditworthiness*) yang tercermin dari rasio median *Interest Coverage Ratio* (ICR) korporasi secara agregat hingga mencapai 2,13 kali (Grafik 5.28).

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan

Sejalan dengan perkembangan kredit bank umum, kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 juga tumbuh meningkat. Pertumbuhan kredit korporasi didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja. Pada triwulan IV 2023, kredit modal kerja korporasi tumbuh sebesar 17,05%



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.29 Pertumbuhan kredit Korporasi

(yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 13,53% (yoy). Kredit Investasi korporasi juga tumbuh positif namun melambat dari 15,04% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 13,07% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, kredit korporasi pada triwulan IV 2023 tercatat 15,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 13,86% (yoy) (Grafik 5.29).

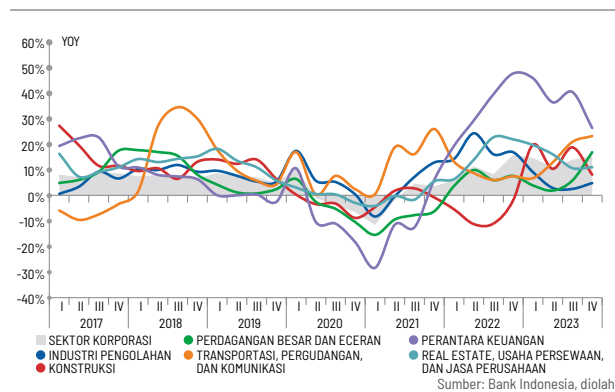
Secara sektoral, mayoritas kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta juga menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan kredit korporasi terutama disumbang oleh kredit korporasi pada sektor Perantara Keuangan, sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, serta sektor Perdagangan Besar dan eceran sejalan dengan tetap kuatnya kinerja usaha pada sektor-sektor tersebut (Tabel 5.3 dan Grafik 5.30).

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah yaitu sebesar 1,33%, menurun dibandingkan

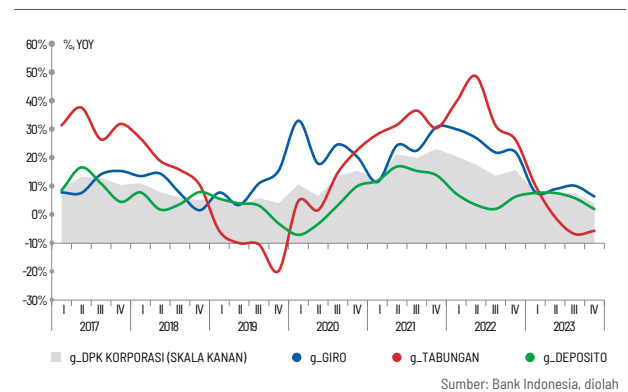
Tabel 5.3 Kredit Korporasi menurut sektor ekonomi

NO	SEKTOR EKONOMI	DEC-22			SEP-23			DEC-23		
		BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (% yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (% yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (% yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	194,04	15,42%	7,58%	207,01	15,08%	5,81%	226,69	15,60%	16,82%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	282,56	22,46%	16,80%	283,68	20,67%	2,46%	295,97	20,37%	4,75%
3	PERANTARA KEUANGAN	208,33	16,56%	47,61%	250,39	18,24%	40,35%	263,07	18,11%	26,27%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	176,47	14,03%	21,83%	187,83	13,69%	10,61%	195,84	13,48%	10,97%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	146,41	11,64%	7,43%	167,26	12,19%	20,87%	180,26	12,41%	23,12%
6	KONSTRUKSI	78,16	6,21%	-1,94%	90,03	6,56%	18,74%	84,46	5,81%	8,05%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	53,92	4,29%	-5,03%	46,64	3,40%	-18,17%	54,05	3,72%	0,25%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	35,06	2,79%	59,66%	42,48	3,10%	35,48%	52,68	3,63%	50,27%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	25,91	2,06%	1,62%	28,27	2,06%	12,13%	28,47	1,96%	9,90%
10	LISTRIK, GAS DAN AIR	27,78	2,21%	5,40%	33,59	2,45%	27,84%	32,89	2,26%	18,42%
11	LAIN-LAIN	29,55	2,35%	-6,37%	35,32	2,57%	15,33%	38,53	2,65%	30,39%
Total		1258,19	100,00%	15,81%	1372,51	100,00%	13,86%	1452,91	100,00%	15,48%

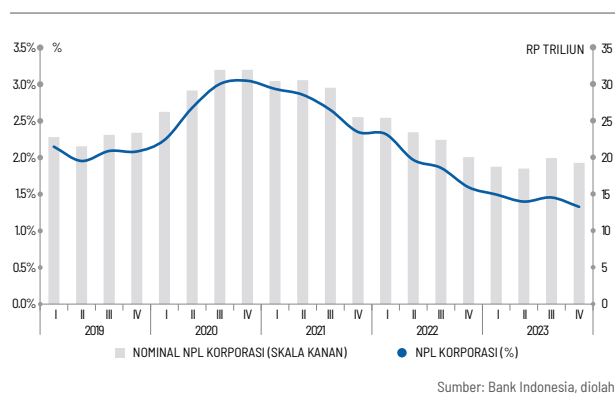
Sumber: Bank Indonesia



Grafik 5.30 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi



Grafik 5.33 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi

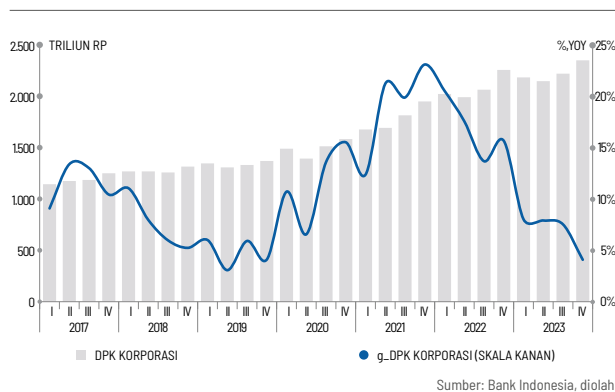


Grafik 5.31 NPL pada Sektor Korporasi

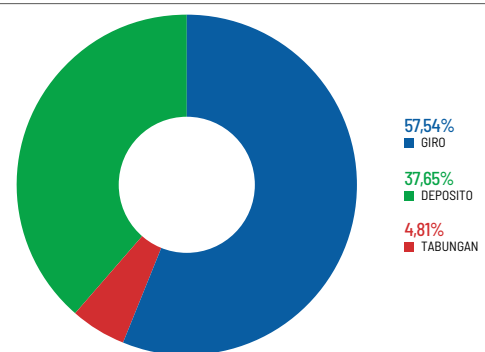
dengan rasio NPL bulan sebelumnya yang sebesar 1,46% (Grafik 5.31). Kondisi ini dipengaruhi masih tetap baiknya kemampuan membayar korporasi sejalan dengan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.

Dana Pihak Ketiga

Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi tumbuh melambat sejalan penarikan sebagian anggaran internal perusahaan untuk pembiayaan operasional perusahaan. Pada triwulan IV 2023, DPK Korporasi tumbuh sebesar 4,09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,55% (yoy) (Grafik 5.32). Perlambatan tersebut disumbang oleh penurunan pertumbuhan Tabungan Korporasi, yang tumbuh negatif sebesar 5,66% (yoy).



Grafik 5.32 Perkembangan DPK Korporasi



Grafik 5.34 Komposisi DPK Korporasi

Sementara itu, Giro dan Deposito Korporasi tumbuh melambat masing-masing dari 10,24% (yoy) dan 5,90% (yoy) menjadi masing-masing sebesar 6,43% (yoy) dan 2,00% (yoy) (Grafik 5.33). Perlambatan DPK Korporasi diperkirakan dipengaruhi kecenderungan Korporasi menggunakan dana internalnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek korporasi. Berdasarkan komposisinya, dana korporasi di perbankan mayoritas dalam bentuk Giro (57,54%), diikuti oleh Deposito dan Tabungan yang masing-masing sebesar 37,65% dan 4,81% (Grafik 5.34).

Eksposur Pasar Modal pada Sektor Korporasi

Pembiayaan korporasi dapat bersumber dari dana internal dan eksternal. Selama periode pandemi sektor korporasi cenderung mengandalkan pembiayaan dari dana internalnya. Namun, seiring dengan mulai meredanya pandemi dan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi, pembiayaan korporasi dari sumber-sumber eksternal kembali meningkat. Sumber dana eksternal dari pasar keuangan, selain berasal dari perbankan juga dapat berasal dari pasar modal seperti melalui penerbitan obligasi, *Initial Public Offering* (IPO) dan *Right Issue*. Kinerja perekonomian domestik yang masih cukup solid mendorong tetap baiknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Grafik 5.35). Berdasarkan laporan OJK, per 28 Desember 2023, IHSG telah berada di posisi 7.303,89 poin atau berhasil tumbuh sebesar 6,62 persen secara *year-to-date*. Seiring dengan pertumbuhan IHSG tersebut, kapitalisasi pasar juga tumbuh sebesar 23,82 persen



Sumber: ihsg-idx.com

Grafik 5.35 Indeks Harga Saham Gabungan BEI

secara *year-to-date* yaitu sebesar Rp11.762 triliun. Sementara itu, *Indonesia Composite Bond Index* tumbuh sebesar 8,51 persen dari akhir tahun 2022 sebesar 344,78 menjadi 374,20. Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian domestik, kegiatan penghimpunan dana melalui Pasar Modal terus meningkat. Per 28 Desember 2023, OJK telah merilis surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 211 penawaran umum dengan total emisi sebesar Rp247,06 triliun. Dari sisi *demand*, OJK mencatat pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia juga sangat pesat, hal ini ditunjukkan dengan jumlah *Single Investor Identification* (SID) yang tercatat mencapai 12,16 juta SID atau meningkat hampir lima kali lipat dalam empat tahun terakhir⁵.

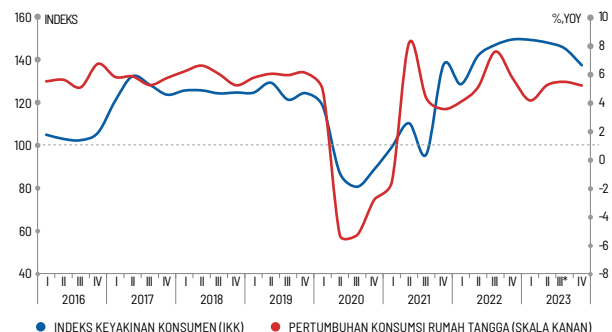
Ke depan, meskipun suku bunga bank sentral di negara-negara maju diperkirakan masih bertahan di level tinggi, kinerja pasar saham dan obligasi Indonesia berpotensi tetap menarik sebagai alternatif sumber pendanaan. Potensi kenaikan pasar saham tersebut ditopang beberapa faktor. Pertama, sentimen positif terhadap fundamental makroekonomi yang solid, inflasi yang terkendali dan prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Kedua, berlanjutnya reformasi sektor keuangan Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan perlindungan investor serta konsumen, mendorong efisiensi di sektor keuangan, serta semakin bervariasi instrumen keuangan. Sementara itu, perlu tetap diwaspadai risiko dari faktor geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Sentimen terkait citra Indonesia sebagai negara pengekspor bahan mentah masih melekat di mata investor sehingga volatilitas harga komoditas dapat menjadi risiko jangka pendek yang membayangi pergerakan bursa saham Indonesia.

C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

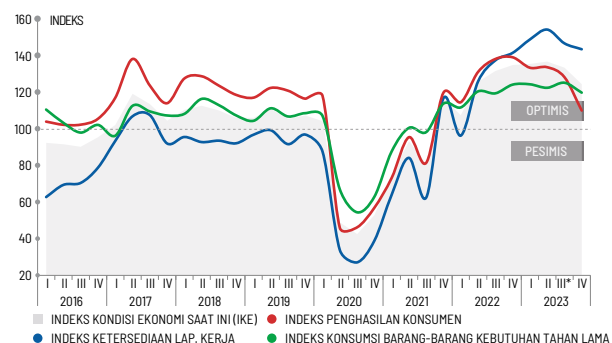
Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan IV 2023 juga masih tercatat tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap solid terutama dari sisi konsumsi rumah tangga meskipun tidak setinggi perkiraan awal. Kondisi tersebut juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan IV 2023 sebesar 137,7 sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 145,7 meskipun masih sama-sama masih berada di zona optimis (Grafik 5.36). Sejalan dengan itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, Indeks Penghasilan Konsumen, dan Indeks Konsumsi Barang-barang Kebutuhan Tahan Lama juga menunjukkan penurunan, masing-masing dari 147,0, 128,5, 125,4 menjadi 143,7, 110,2, dan 120,0. Meskipun demikian, ketiga indkes tersebut masih tetap berada pada zona optimis (Grafik 5.37).

Tingkat penghasilan konsumen yang relatif terbatas berpotensi memengaruhi pola dan tingkat konsumsi serta kemampuan membayar Rumah Tangga. Ke depan, perlu diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan



Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.36 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT



Sumber: Bank Indonesia, diolah

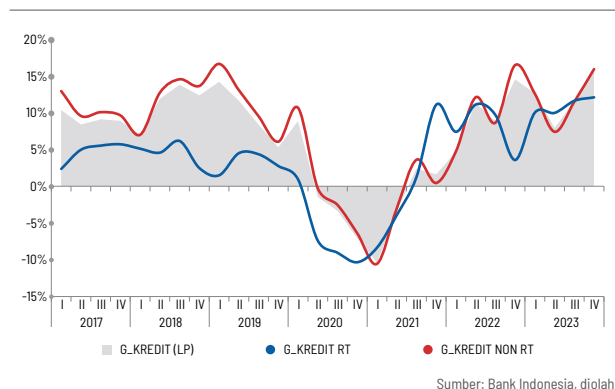
Grafik 5.37 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

5 Siaran Pers OJK No. SP 198/GKPB/OJK/XII/2023 "Pasar Modal Indonesia Tumbuh Di Tengah Dinamika Global Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023"

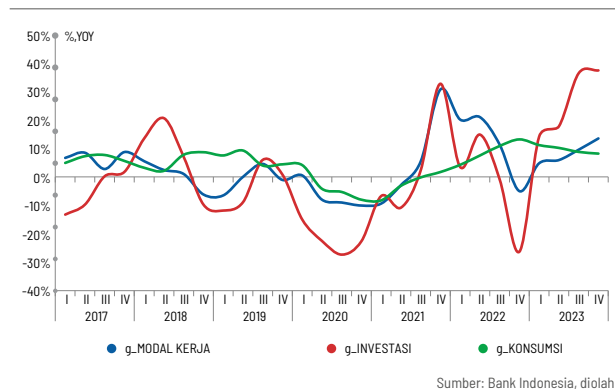
inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, berlanjutnya tren kenaikan suku bunga sehingga meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Perkreditan

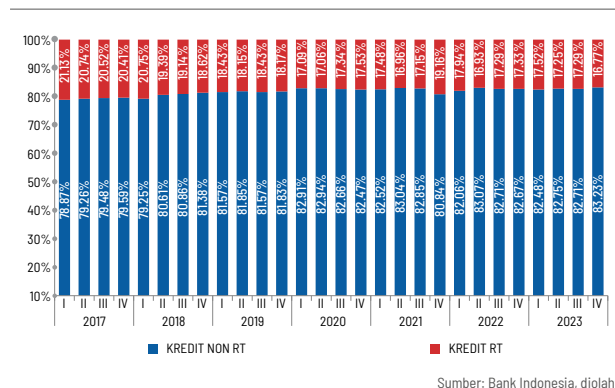
Pada triwulan IV 2023, kredit sektor rumah tangga tumbuh positif sebesar 12,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,63% (yoy) (Grafik 5.38). Pertumbuhan positif tersebut



Grafik 5.38 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Grafik 5.39 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



Grafik 5.40 Komposisi Kredit RT dan Non RT

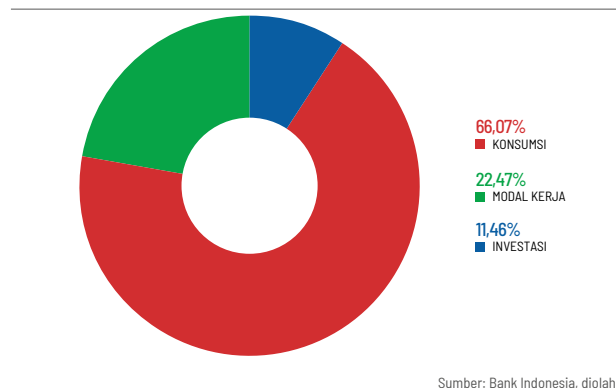
terjadi pada semua jenis kredit rumah tangga. Namun demikian, meskipun masih tumbuh positif, kredit konsumsi rumah tangga yang merupakan pangsa terbesar kredit rumah tangga cenderung menunjukkan perlambatan sejak awal tahun 2023 (Grafik 5.39). Perlambatan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2023 terutama didorong oleh perlambatan kredit multiguna. Dengan perkembangan tersebut pangsa kredit Rumah Tangga terhadap total kredit, pada triwulan IV 2023 sedikit menurun menjadi 16,77% (Grafik 5.40).

Sebagian besar kredit rumah tangga digunakan untuk keperluan konsumsi (66,07%), diikuti oleh kredit modal kerja (22,47%), dan kredit investasi (11,46%) (Grafik 5.41).

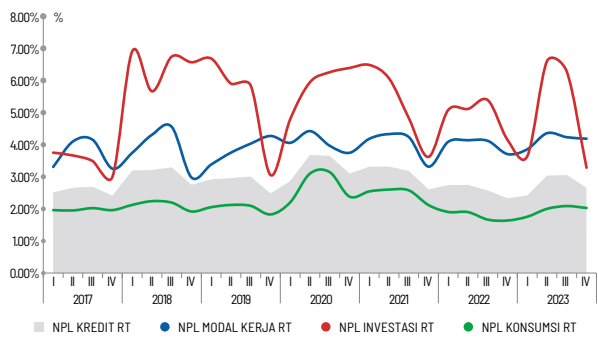
Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga mengalami penurunan dan cukup jauh di bawah threshold 5%. Pada triwulan IV 2023, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) rumah tangga berada pada level 2,66%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,06%. Penurunan rasio NPL terjadi di semua jenis kredit dengan penurunan terbesar pada kredit Konsumsi Rumah Tangga. (Grafik 5.42).

Dalam hal kredit konsumsi Rumah Tangga, perlambatan pertumbuhan kredit terutama disebabkan oleh perlambatan kredit Multiguna. Pada triwulan IV 2023, kredit Multiguna tumbuh sebesar 8,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 13,49% (yoy). Adapun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 6,36% (yoy). Sementara itu, kredit KKB tumbuh positif sebesar 13,68% (yoy) membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh negatif 9,45% (yoy) (Grafik 5.43). Berdasarkan pangsa, kredit KPR dan Multiguna mayoritas terhadap total kredit Konsumsi rumah tangga masing-masing dengan pangsa sebesar 31,04% dan 30,55% (Grafik 5.44).

Dari sisi risiko kredit, penurunan rasio NPL kredit konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh penurunan rasio NPL pada kredit KPR rumah tangga. Pada triwulan IV 2023, rasio kredit bermasalah (NPL) kredit KPR 2,86%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 3,13%. Sementara itu, rasio NPL kredit KKB dan Multiguna masing-masing meningkat

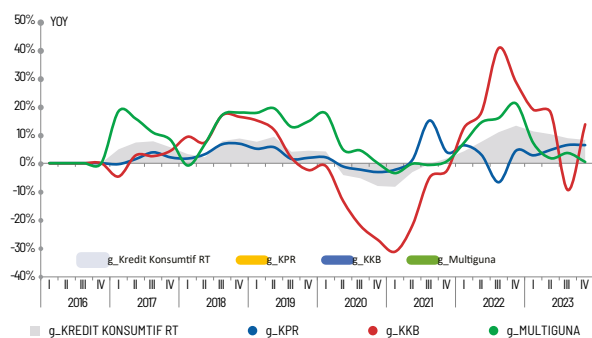


Grafik 5.41 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



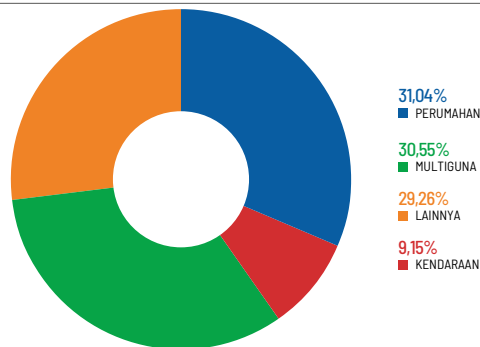
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.42 NPL Kredit Rumah Tangga



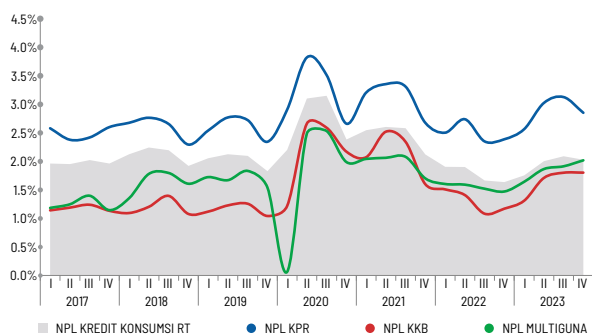
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.43 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.44 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga



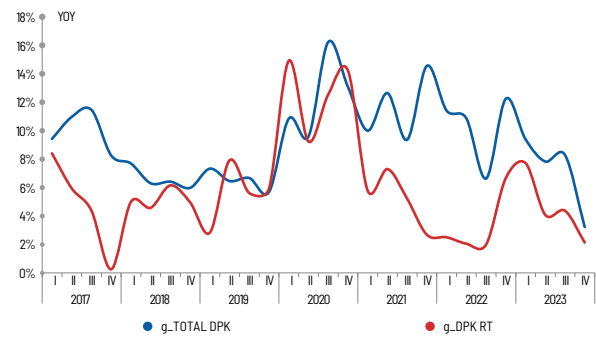
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.45 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

tipis dari 1,80% dan 1,92% menjadi masing-masing sebesar 1,81% dan 2,02% (Grafik 5.45). Meskipun mengalami peningkatan, namun rasio NPL kredit KKB dan Multiguna tersebut masih cukup jauh di bawah threshold 5%.

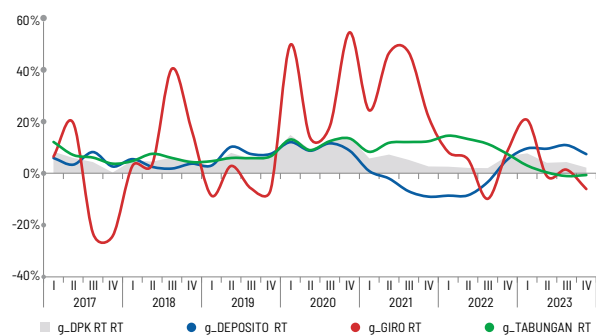
Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK rumah tangga di DKI Jakarta tumbuh positif namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, DPK rumah tangga tumbuh sebesar 2,14% (yoy), lebih rendah lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK pada triwulan sebelumnya 4,38% (yoy), (Grafik 5.46). Berdasarkan jenisnya, perlambatan pertumbuhan DPK Rumah Tangga terutama disebabkan oleh Giro yang pada triwulan IV 2023 yang mengalami pertumbuhan negatif 6,18% (yoy), menurun



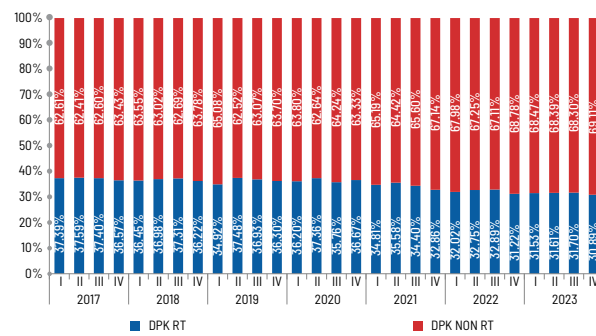
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.46 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga



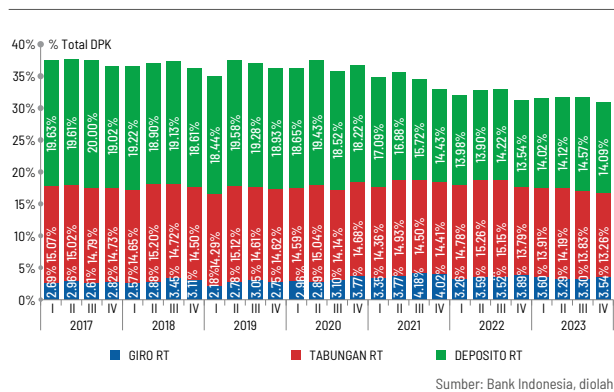
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.47 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.48 Komposisi DPK



Grafik 5.49 Komposisi DPK Rumah Tangga

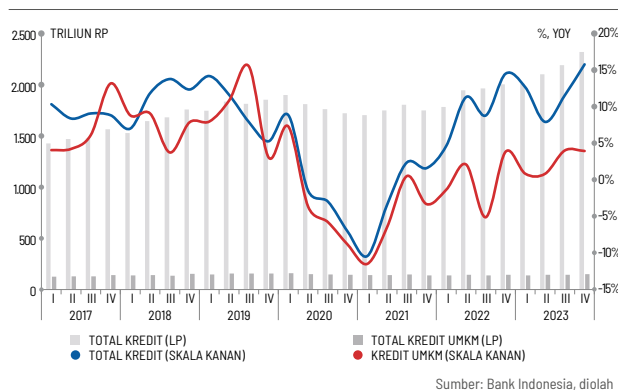
dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tercatat tumbuh positif 1,38% (yoy). Sejalan dengan itu, Tabungan Rumah Tangga juga tercatat tumbuh negatif 0,72% (yoy) meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif 1,11% (yoy). Sementara itu, Deposito masih mencatatkan pertumbuhan positif 7,44% (yoy) namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 10,96% (yoy) (Grafik 5.47). Perlambatan DPK rumah tangga disinyalir dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi Rumah tangga khususnya dari Rumah tangga kelompok menengah ke bawah. Sementara itu, Rumah Tangga kelompok menengah atas cenderung mengalihkan simpanan DPK nya kepada penempatan lain di luar untuk memaksimalkan keuntungan.

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga mencapai 30,89% dari total DPK di DKI Jakarta (Grafik 5.48). Sementara itu, pangsa DPK Rumah Tangga terhadap total DPK didominasi oleh Deposito 14,09%, diikuti oleh Tabungan dan Giro masing-masing sebesar 13,26% dan 3,54% (Grafik 5.49).

D. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melanjutkan pertumbuhan yang positif namun sedikit melambat pada triwulan IV 2023. Setelah hampir selalu mengalami pertumbuhan

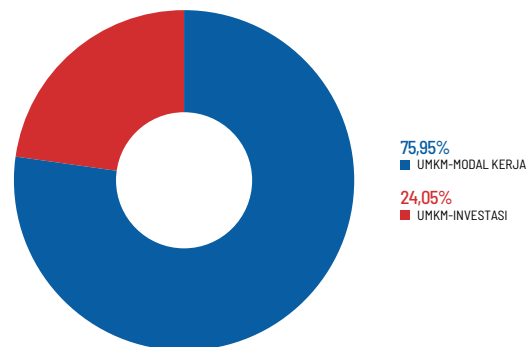


Grafik 5.50 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta

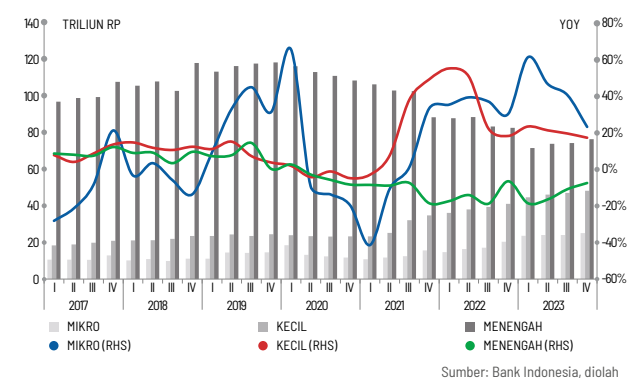
negatif sejak terjadinya pandemi COVID-19, pada triwulan IV 2023, pertumbuhan kredit UMKM kembali mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,69% (yoy meskipun sedikit lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 4,04% (yoy) (Grafik 5.50). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja, yaitu sebesar 75,95% dan sisanya diberikan untuk kredit investasi sebesar 24,05% (Grafik 5.51).

Berdasarkan skala usahanya, perlambatan pertumbuhan kredit UMKM disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit kepada UMKM skala mikro dan kecil. Sementara itu, kredit UMKM skala menengah masih mencatatkan pertumbuhan negatif meskipun sudah tidak sedalam triwulan sebelumnya (Grafik 5.52).

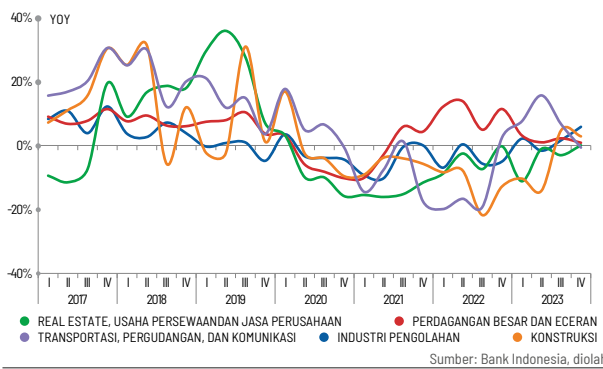
Meskipun mengalami peningkatan kredit, namun secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 6,5% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi sektor usaha di Jakarta lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah disekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/ transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.



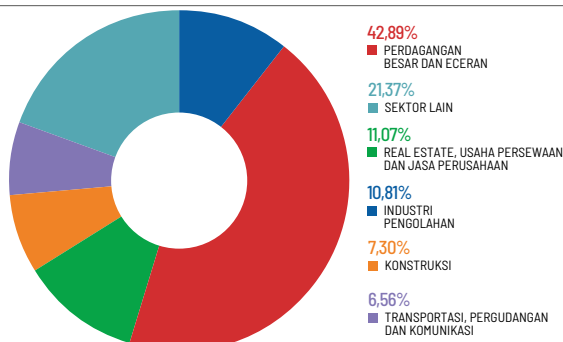
Grafik 5.51 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 5.52 UMKM Berdasarkan Skala Usaha



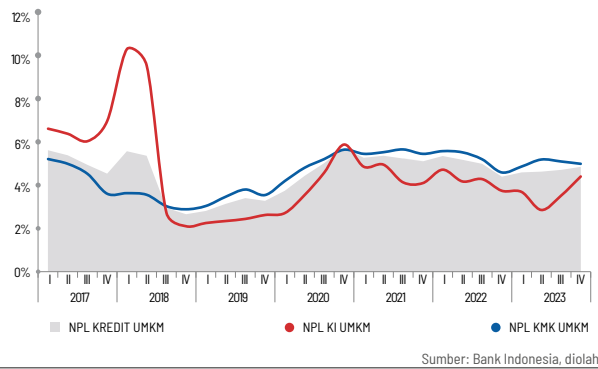
Grafik 5.54 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama



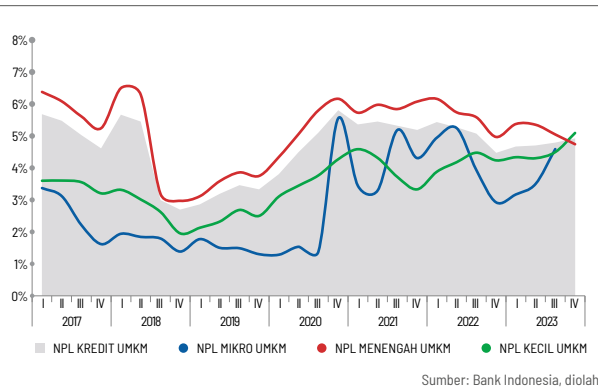
Grafik 5.53 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor ekonomi utama yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 42,89%, sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (11,07%), sektor industri pengolahan (10,81%), sektor konstruksi (7,30%), serta sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (6,56%) (Grafik 5.53). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan kredit UMKM terjadi pada semua sektor utama kecuali transportasi, pergudangan dan komunikasi. Dengan mempertimbangkan pangsa dan pertumbuhannya, kontributor utama pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan IV 2023 adalah kredit UMKM kepada sektor Industri Pengolahan (Grafik 5.54).

Perkembangan yang tetap positif ini mengindikasikan perbankan mulai bergairah untuk menyalurkan kredit ke sektor UMKM seiring dengan terjaganya perkembangan kinerja UMKM. Kepercayaan perbankan dalam penyaluran kredit UMKM juga meningkat seiring dengan keputusan OJK untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit hingga Maret 2024 secara *targeted* yang salah satunya untuk segmen UMKM. Namun demikian tetap perlu diperhatikan tingkat kemampuan membayar UMKM. Hal ini dikarenakan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM pada triwulan IV 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 4,93% dibandingkan triwulan sebelumnya 4,79%. Berdasarkan jenis kreditnya, kenaikan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/ NPL) UMKM didorong oleh kenaikan rasio kredit bermasalah pada Kredit Investasi UMKM (Grafik 5.55). Sedangkan berdasarkan kelompok debiturnya, kenaikan risiko kredit UMKM disumbang oleh kenaikan risiko Kredit UMKM golongan Mikro dan Kecil (Grafik 5.56).



Grafik 5.55 NPL Kredit UMKM



Grafik 5.56 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pengembangan UMKM di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pilar kebijakan yakni korporatisasi, pengembangan kapasitas dan akses pembiayaan. Program pengembangan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 terdiri dari berbagai kegiatan antara lain penyelenggaraan berbagai pelatihan salah satunya *fashion show*, diseminasi hasil survei BISAID untuk meningkatkan *business matching* pembiayaan UMKM, program pengembangan *digital farming*, serta pelaksanaan promosi perdagangan di dalam negeri. Selain itu, terkait program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui program sertifikasi halal untuk pelaku usaha syariah dan penyelia halal.

1. Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (GBWI) DKI Jakarta Tahun 2023

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya menyelenggarakannya kegiatan GBBI dan GBWI secara bergantian di setiap provinsi. Pada bulan September – November 2023, Provinsi DKI Jakarta berkesempatan menyelenggarakan kegiatan GBBI dan GBWI dengan tema "Karya Jakarta untuk Indonesia Hebat". Kegiatan GBBI dan GBWI di DKI Jakarta merupakan sinergi dan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga antara lain yaitu Ketua GBBI dan GBWI Nasional adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *campaign manager* adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *co-campaign manager* adalah Kementerian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini BUMN yang telah ditunjuk adalah PT. Telkom Indonesia. Bank Indonesia turut berperan melalui KPwBI DKI Jakarta sebagai KPwDN *host*.

Dalam rangka mendukung kegiatan GBBi dan GBWi di DKI Jakarta, KPwBI DKI Jakarta berkolaborasi dengan seluruh *stakeholders* telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung kemajuan UMKM, antara lain:

- Pelatihan Pencatatan Keuangan SIAPIK menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kemampuan pencatatan keuangan bagi UMKM.
- Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (Pendamping Halal) bekerja sama dengan LP3H dalam upaya meningkatkan pemahaman para pengurus masjid dan anggota Hebitren pendamping halal terhadap proses sertifikasi halal serta sistem jaminan halal.
- Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal (Penyelia Halal) dalam rangka sosialisasi kepada *owner* UMKM mengenai sistem jaminan halal dan proses sertifikasi halal.
- Workshop Live Selling E-Commerce* dan Media Sosial sebagai upaya meningkatkan penjualan UMKM melalui *live selling* di *e-commerce*.
- Lomba desain dengan tema *wastra nusantara* untuk pakaian *ready to wear* dan *affordable* dengan tajuk "Lomba Desain Kreatifitas Busana untuk Pelajar SMK dan Sekolah Vokasi". Penyelenggaraan lomba ini bertujuan meningkatkan kolaborasi, inovasi, dan sinergi (KIS) antar Kementerian/ Lembaga sekaligus sebagai wadah bagi para desainer yang berasal dari SMK dan sekolah vokasi di DKI Jakarta untuk berinovasi dan berkreasi. Hasil karya dari 30 (tiga puluh) peserta SMK dan sekolah vokasi diperagakan oleh model profesional dan model dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) pada malam *harvesting* GBBi dan GBWi di Plataran Kota Tua.
- Showcasing* produk pangan olahan pada kegiatan *harvesting* GBBi dan GBWi di Plataran Kota Tua dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk pangan olahan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi risiko inflasi yang bersumber dari komoditas pangan.

2. Diseminasi Hasil Survei BISAID UMKM Potensial Dibiayai

Survei BISAID merupakan survei untuk membangun database profil UMKM potensial dibiayai. Pembangunan database ini bertujuan untuk mendorong akses pembiayaan kepada UMKM guna mendukung percepatan keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. UMKM yang menjadi responden survei BISAID adalah UMKM yang usahanya telah berjalan minimal selama 3 (tiga) tahun, tidak sedang menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank dan lembaga jasa keuangan non-bank, serta membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan kapasitas usaha. Pada tahun

2023, KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah membangun database 100 UMKM potensial dibiayai di wilayah DKI Jakarta. Terhadap UMKM yang telah masuk dalam database, selanjutnya akan dilakukan *business matching* secara digital antara UMKM dan Lembaga Keuangan untuk mengakselerasi akses pembiayaan.

3. Implementasi Program Digital Farming

Pelaksanaan Program Implementasi Digital Farming Tahun 2023 bertujuan untuk memperkuat ketahanan komoditas pangan strategis dengan mengoptimalkan dan memperkuat langkah pengendalian inflasi di daerah, baik dari sisi suplai maupun produksi. Implementasi digital farming adalah ragam teknologi digital yang diterapkan di sepanjang rantai nilai pertanian, baik sisi hulu (budidaya) maupun sisi hilir (pemasaran) untuk mendorong produktivitas, efisiensi biaya, maupun akses pemasaran dan nilai tambah. Salah satu alat yang digunakan dalam implementasi dimaksud adalah *Internet of Things* (IoT) berupa *Rapid Soil Check* dan penggunaan kamera guna mengetahui kondisi dan komposisi tanah secara *real time*. KPwBI DKI Jakarta telah memfasilitasi penggunaan IoT tersebut di Gapoktan Rorotan Jaya dan Kelompok Petani Pinggir Buperta. Pada triwulan IV 2023, KPwBI DKI Jakarta menyelenggarakan panen bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang turut dihadiri oleh Bapak Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

E. SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Pembangunan DKI Jakarta ke depan diarahkan kepada pembangunan yang berkelanjutan berbasiskan ekonomi hijau sebagai kota global. Sejalan dengan itu pembangunan Jakarta ke depan fokus pada perbaikan infrastruktur strategis daerah untuk mengurai berbagai permasalahan yang ada mencakup perbaikan infrastruktur strategis di bidang transportasi, pengendalian banjir, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Pembiayaan proyek-proyek tersebut diindikasikan bersumber dari APBN, APBD, ataupun pinjaman daerah. Adapun pembangunan proyek dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau dinas-dinas terkait. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk penyertaan modal ke BUMD maupun mendorong proyek untuk mendapatkan dukungan pusat, baik melalui APBN, pinjaman daerah, atau pinjaman PEN. Pembahasan strategi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek, upaya promosi investasi untuk mendapatkan dukungan pembiayaan, serta instrumen *creative financing* lainnya dilakukan secara bersama-sama melalui wadah Regional Investor Relation Unit (RIRU) Provinsi DKI Jakarta yang mencakup sinergi antara Pemrov DKI Jakarta, KPwBI Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan instansi.

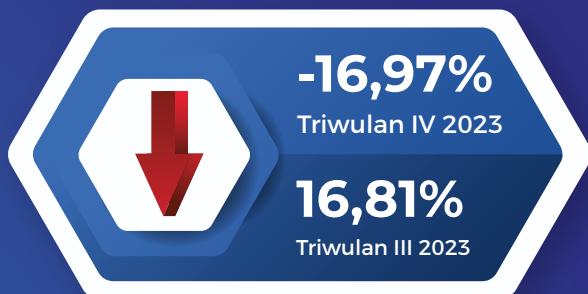
BAB 6

SISTEM PEMBAYARAN

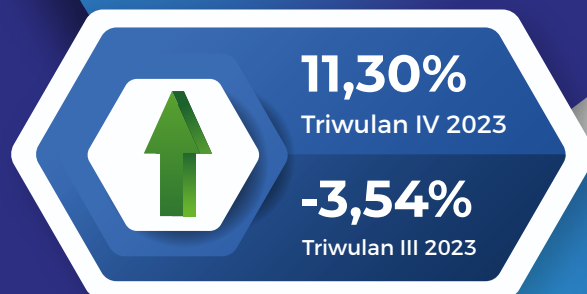
Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran tunai mengonfirmasi tetap tingginya pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pada triwulan IV 2023, arus kas tercatat *net outflow* sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan transaksi nontunai pada beberapa instrumen pembayaran yaitu SKNBI, APMK, dan BI-RTGS, adapun transaksi *e-commerce* juga mengalami peningkatan. Dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), pada Triwulan IV 2023, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB mengalami peningkatan. Meningkatnya kunjungan wisata yang diikuti dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara global menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan transaksi valuta asing pada Triwulan IV 2023. Lebih lanjut, dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan transaksi transfer dana pada Triwulan IV 2023 cenderung meningkat. Peningkatan tersebut tercermin baik pada transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri), *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta), dan domestik (di wilayah DKI Jakarta). Lebih lanjut, jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya (uang palsu) di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan program KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan edukasi dan sosialisasi keaslian uang dan kampanye Cinta, Bangga dan Paham Rupiah (CBP). Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada ketika melakukan kegiatan penukaran atau penarikan uang sehingga, dapat meminimalkan penyebaran uang yang diragukan keasliannya.



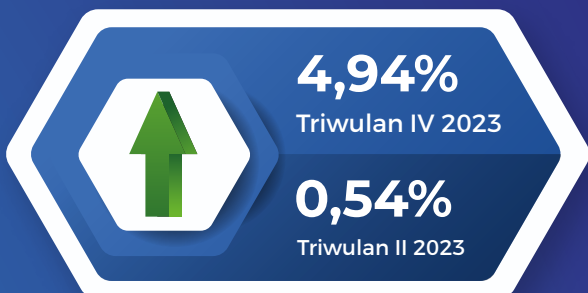
**Pertumbuhan *Inflow*
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



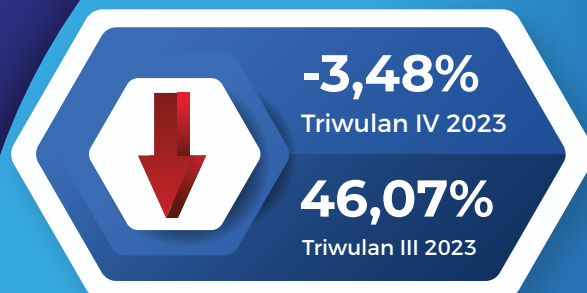
**Pertumbuhan *Outflow*
Transaksi Uang Kartal (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai
Transaksi BI-RTGS (yoy)**



**Pertumbuhan Nilai
Transaksi SKN-BI (yoy)**



A. KONDISI UMUM

Pada Triwulan IV 2023, pergerakan uang masuk (*inflow*) dan uang keluar (*outflow*) di Provinsi DKI Jakarta tercatat dalam posisi *net outflow*, naik dari triwulan sebelumnya yang juga tercatat dalam posisi *net outflow*. Adapun posisi *net outflow* pada periode laporan sejalan dengan kinerja ekonomi yang masih tumbuh tinggi yang didukung oleh daya beli dan optimism konsumen yang terjaga, termasuk pada momen HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Ekonomi yang tetap tumbuh kuat juga turut terkonfirmasi melalui pertumbuhan nilai transaksi Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) sebagai salah satu indikator instrumen sistem pembayaran nontunai masyarakat. Selanjutnya, nilai transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada jenis kartu kredit mengalami kenaikan walaupun pada jenis kartu debit mengalami kontraksi. Transaksi pada *e-commerce* juga sedikit meningkat, hal ini sejalan dengan preferensi masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan media digital dalam berbelanja dan daya beli masyarakat yang tetap stabil. Implementasi QRIS terus digencarkan sehingga jumlah *merchant* di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 5,16 juta *merchant*, didominasi kenaikan *merchant* pada usaha mikro.

Dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus mengawasi 317 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB), 77 Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP-LR), dan 19 Badan Berizin pembawaan Uang Kertas Asing (BB-UKA).

B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Pengelolaan Uang Rupiah

Pada Triwulan IV 2023, aktivitas peredaran uang kartal di Provinsi DKI Jakarta mengalami *net outflow*. Hal ini menunjukkan jumlah aliran uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia (*outflow*) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia (*inflow*). *Net outflow* peredaran uang kartal pada periode laporan tercatat sebesar Rp46,21 triliun, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp3,11 triliun (Tabel 6.1). Hal ini sejalan dengan menguatnya perekonomian DKI Jakarta, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang mencatatkan pertumbuhan positif.

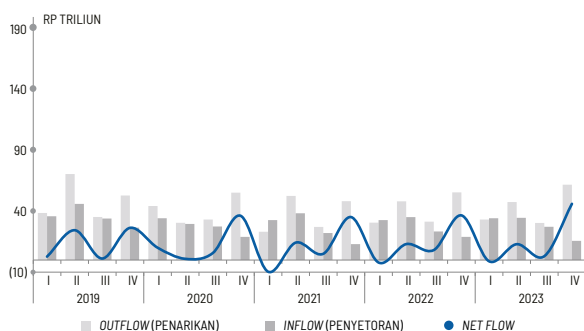
Terjadinya peningkatan *net outflow* pada periode laporan, terutama disebabkan oleh nilai *outflow* yang tercatat sebesar Rp62,00 triliun atau meningkat sebesar 103,43% (qoq) dari triwulan sebelumnya. Di sisi lain, *inflow* tercatat sebesar Rp15,78 triliun atau menurun 42,30% (qoq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp27,36 triliun. Secara tahunan, *net outflow* pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan sebesar 25,94% jika dibandingkan dengan triwulan IV 2022.

Berdasarkan jenis pecahannya, *net outflow* terjadi pada hampir seluruh pecahan terutama pada pecahan 100.000 dan 50.000 sebagai nilai pecahan yang banyak digunakan di masyarakat (Grafik 6.2), sementara pecahan 1.000 mengalami *net inflow*. Peningkatan *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang terus bergeliat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta serta diiringi pula dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru.

Tabel 6.1 Perkembangan Transaksi Uang Kartal

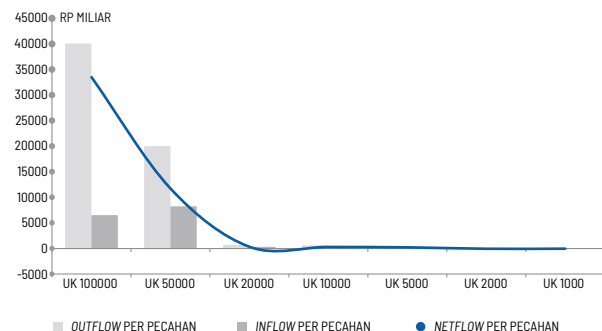
INDIKATOR (RP MILIAR)	2020			2021				2022				2023			
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Penarikan / Outflow	30.599,99	33.323,41	55.405,33	23.262,44	52.752,19	27.268,94	48.370,62	30.728,45	48.319,59	31.594,94	55.707,70	33.252,42	47.711,56	30.476,99	62.000,31
Penyetoran / Inflow	29.644,23	27.613,70	18.987,95	32.895,37	38.486,86	22.158,98	13.048,09	32.803,23	35.262,53	23.425,89	19.014,24	34.305,48	34.729,91	27.363,28	15.787,47
Net Flow	955,76	5.709,71	36.417,38	-9.632,94	14.265,33	5.109,96	35.322,52	-2.074,77	13.057,06	8.169,05	36.693,46	-1.053,06	12.981,64	3.113,71	46.212,84

Sumber: Bank Indonesia



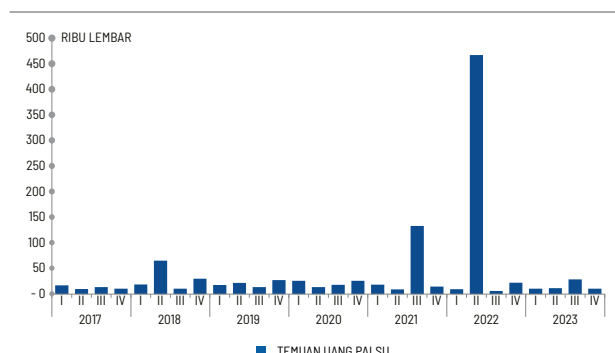
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan Inflow, Outflow, dan Net Flow Uang Kartal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.2 Inflow, Outflow, dan Net Flow per Pecahan



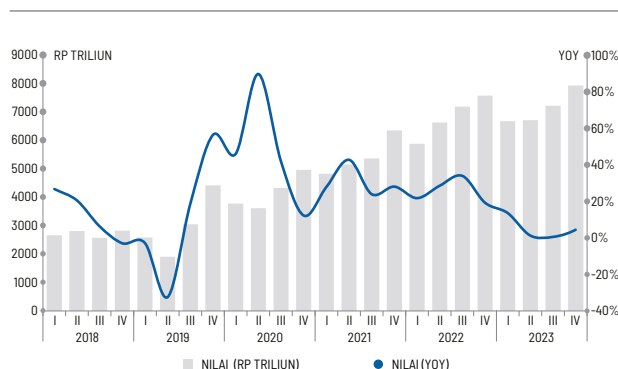
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya

Sementara itu, jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya (uang palsu) di Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan IV 2023 melalui laporan dan setoran perbankan ke Bank Indonesia tercatat sebanyak 10.557 lembar atau turun 63,51% (qtd) jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 28.931 lembar (Grafik 6.3). Secara tahunan, jumlah temuan uang palsu menurun sebesar 52,45% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2022. Hal ini sejalan dengan program KPwBI Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan edukasi dan sosialisasi keaslian uang dan kampanye Cinta, Bangga dan Paham Rupiah (CBP). Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada ketika melakukan kegiatan penukaran atau penarikan uang sehingga, dapat meminimalkan penyebaran uang yang diragukan keasliannya. Lebih lanjut, semakin luasnya peredaran uang tahun emisi (TE) 2022 dengan fitur pengaman yang lebih canggih juga mendukung penurunan pada temuan uang yang diragukan keasliannya.

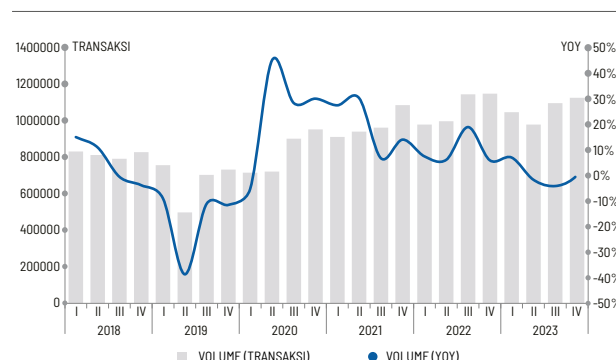
Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Nilai transaksi BI RTGS juga tercatat mengalami kenaikan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan IV 2023. Nilai transaksi BI-RTGS pada periode laporan tercatat sebesar Rp7.947 triliun atau tumbuh 4,45% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,54% (yoy) (Grafik 6.4). Sementara itu, transaksi BI-RTGS tercatat sebanyak 1,13 juta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Transaksi RTGS



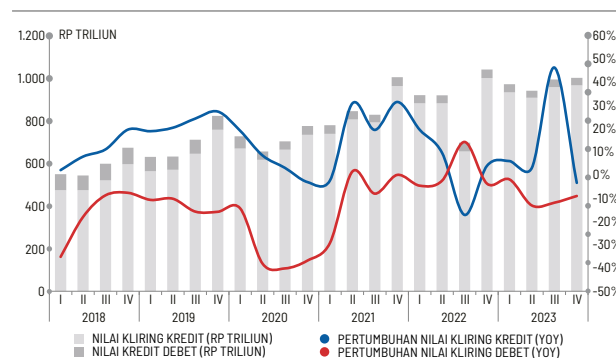
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.5 Perkembangan Volume Transaksi RTGS

transaksi atau mengalami penurunan sebesar 1,20% (yoy), membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 4,19% (yoy) (Grafik 6.5). Meskipun transaksi BI RTGS memiliki keterbatasan waktu layanan serta biaya layanan yang lebih mahal jika dibandingkan dengan transaksi melalui SKNBI dan BI-FAST, para nasabah dengan nilai transaksi lebih dari Rp 100 juta masih tetap memilih layanan ini yang kemudian mendukung pertumbuhan pada jenis transaksi ini.

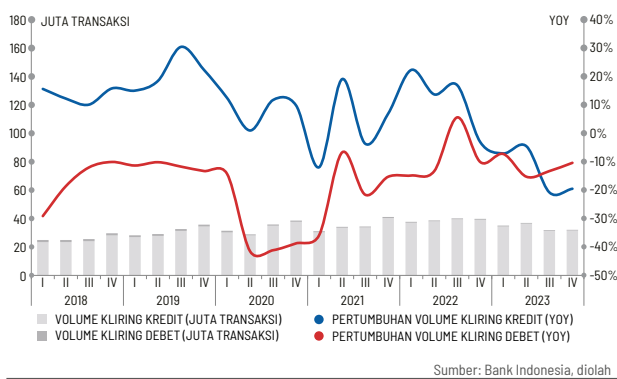
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sejalan dengan meningkatnya transaksi BI-RTGS, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada Triwulan IV 2023 juga mengalami peningkatan. Nilai transaksi SKNBI dengan kliring kredit pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp964,41 triliun atau meningkat sebesar 0,85% (qtd) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp956,34 triliun (Grafik 6.6). Semakin meluasnya pemanfaatan BI-FAST turut memengaruhi volume kliring kredit yang masih tumbuh rendah sebesar 0,80% (qtd) yaitu dari 31,31 juta lembar menjadi 31,56 juta lembar pada triwulan IV 2023. Sementara itu, nilai transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 1,05% (qtd) atau dari Rp36,29 triliun menjadi Rp35,90 triliun. Demikian pula dengan volume transaksi kliring debit menurun dari 0,58 juta lembar menjadi 0,57 juta lembar (Grafik 6.7).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

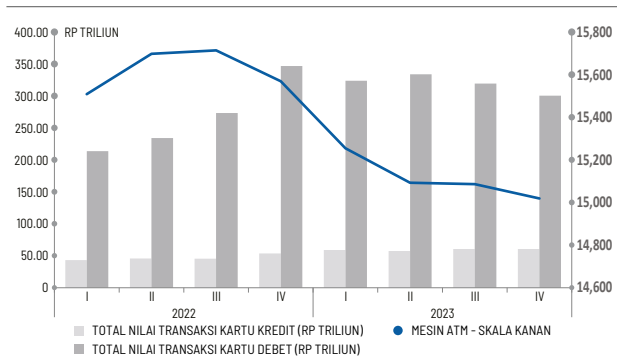
Grafik 6.6 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI



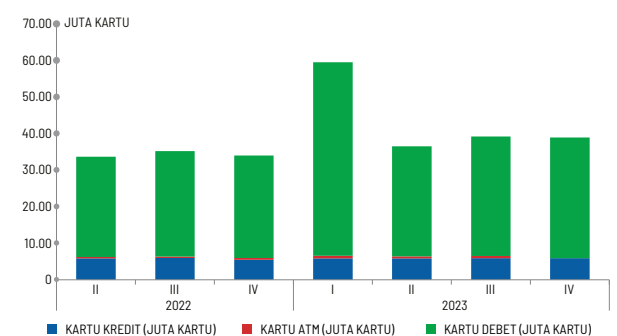
Grafik 6.7 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

Instrumen Pembayaran Nontunai

Transaksi pada alat pembayaran menggunakan kartu terutama kartu kredit mengalami peningkatan. Di sisi lain, transaksi menggunakan kartu debit menurun. Nilai transaksi kartu debit pada periode pelaporan tercatat mengalami penurunan sebesar 5,95% (qtq), atau menjadi sebesar Rp300,99 triliun dari Rp320,04 triliun pada triwulan III 2023. Adapun nilai transaksi kartu kredit pada periode pelaporan tercatat tumbuh sebesar 0,36% (qtq) dari Rp60,59 triliun menjadi Rp60,81 triliun (Grafik 6.8). Peningkatan nilai transaksi kartu kredit dapat menjadi salah satu indikator terjaganya daya beli masyarakat, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi serta peningkatan penggunaan kartu kredit pemerintah. Selain itu, peningkatan tersebut diindikasikan oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan kinerja korporasi yang tumbuh tinggi serta terjadinya likuiditas dan longgarnya standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan.



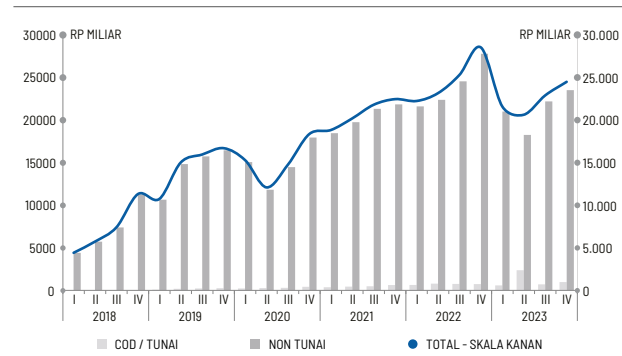
Grafik 6.8 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debit serta Jumlah Mesin ATM



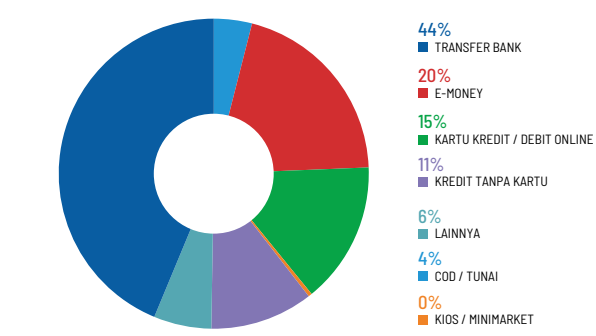
Grafik 6.9 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debit dan ATM

Transaksi pembayaran nontunai melalui *e-commerce* pada Triwulan IV 2023 terus menunjukkan peningkatan, hal ini sejalan dengan preferensi masyarakat yang semakin tinggi dalam menggunakan media digital untuk berbelanja serta daya beli masyarakat yang terjaga baik. Nilai transaksi *e-commerce* pada periode laporan tercatat meningkat sebesar 6,96% (qtq) dari Rp22,86 menjadi Rp24,45 triliun. Adapun, metode pembayaran transaksi *e-commerce* didominasi oleh transfer bank (44%), disusul oleh *e-money* (20%), diikuti oleh kartu kredit/debit *online* dan kredit tanpa kartu masing-masing sebesar 15% dan 11%.

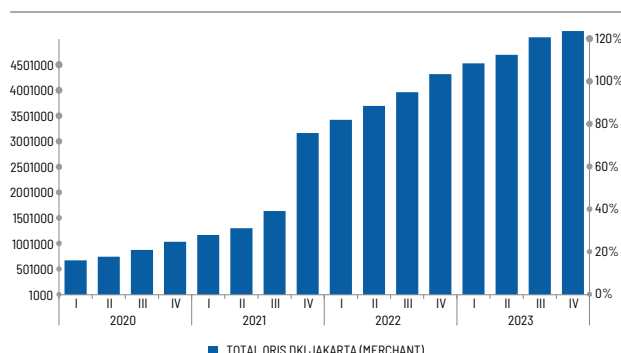
Dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi pembayaran secara nontunai di masyarakat, Bank Indonesia terus mendorong perluasan penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada pasar dan pusat perbelanjaan. Jumlah *merchant* QRIS di Jakarta pada Triwulan IV 2023 tercatat sebanyak 5,16 juta *merchant* atau naik 2,46% (qtq), dibanding triwulan sebelumnya yang sebanyak 5,03 juta *merchant* (Grafik 6.12). Berdasarkan wilayahnya, jumlah *merchant* QRIS tertinggi terdapat pada Kota Administratif Jakarta Selatan dengan porsi 43,29%, sejalan dengan penambahan jumlah *merchant* QRIS terbanyak terdapat pada Kota Administratif Jakarta Selatan dengan total penambahan sebanyak 37.506 *merchant* (Grafik 6.12). Lebih lanjut, berdasarkan jenis usahanya, jumlah *merchant* QRIS tertinggi didominasi oleh usaha mikro sebesar 36,03% (Grafik 6.13). Adapun, penambahan jumlah *merchant* QRIS tertinggi tercatat pada usaha reguler, yaitu sebanyak 115.964 *merchant*. Hal ini mengindikasikan semakin meluasnya minat pelaku usaha dalam pemanfaatan QRIS sebagai salah satu alat pembayaran nontunai.



Grafik 6.10 Perkembangan Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran

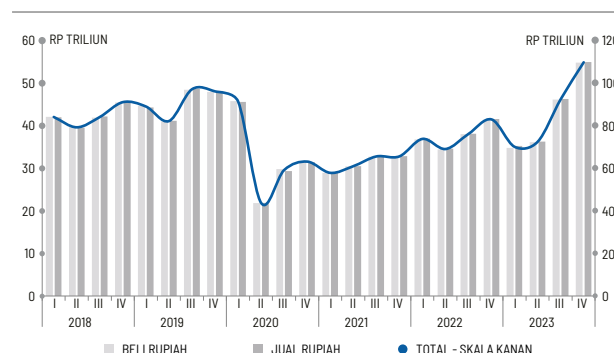


Grafik 6.11 Pangsa Transaksi E-commerce Berdasarkan Metode Pembayaran



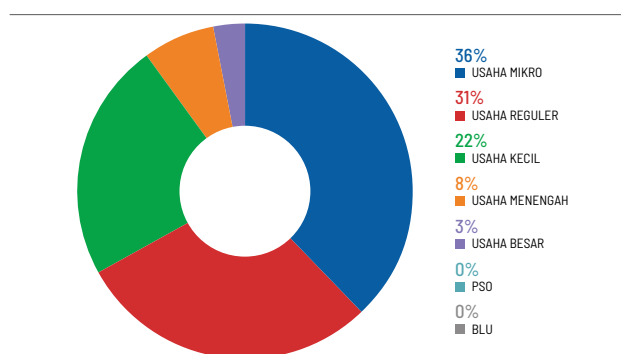
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.12 Perkembangan merchant QRIS



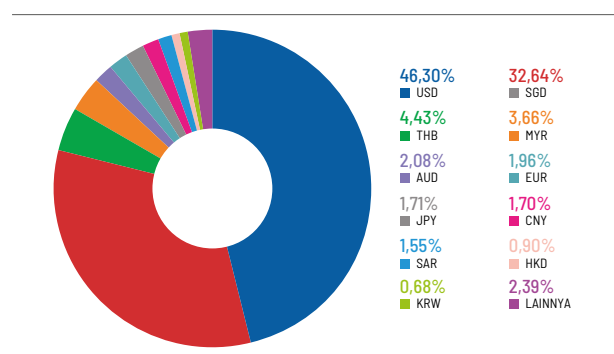
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.14 Perkembangan Transaksi KUPVA BB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.13 Pangsa merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.15 Market Share Valuta Asing

C. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada Triwulan IV 2023, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB mengalami peningkatan. Nilai transaksi jual beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB pada pelaporan mencapai Rp109,70 Triliun, terdiri atas transaksi beli sebesar Rp54,78 triliun dan transaksi jual sebesar Rp54,92 Triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 32,35% (yoy) dan 18,80% (qtq). Hal ini sejalan dengan nilai transaksi jual beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB pada triwulan sebelumnya yang juga mengalami peningkatan sebesar 21,38% (yoy) dan 27,60% (qtq) (Grafik 6.14).

Meningkatnya kunjungan wisata yang diikuti dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara global menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan transaksi valuta asing pada Triwulan IV 2023. Tercatat, pada Triwulan IV 2023, terdapat 317 KUPVA BB (Kantor Pusat) yang telah diberikan izin operasional dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Tabel 6.2). Industri KUPVA BB saat ini banyak beroperasi di wilayah Jakarta Pusat

(29,86%) dan Jakarta Selatan (28,47%). Adapun *market share* valuta asing yang ditransaksikan di wilayah pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh mata uang USD dan SGD dengan persentase masing – masing sebesar 47,17% dan 31,84% (Grafik 6.15)

Tabel 6.2 Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	288	77	365
2	Bekasi	12	5	17
3	Bogor	6	8	14
4	Depok	7	1	8
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang	1	19	20
7	Pulau Bali	0	2	2
8	Pulau Jawa (lainnya)	0	29	29
9	Pulau Kalimantan	0	1	1
10	Pulau Sumatera	0	10	10
TOTAL		317	153	470

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan transaksi transfer dana pada Triwulan IV 2023 cenderung meningkat (Tabel 6.3). Peningkatan tersebut tercermin baik pada transaksi *outgoing* (dari DKI Jakarta ke luar negeri), *incoming* (dari luar negeri ke DKI Jakarta), dan domestik (di wilayah DKI Jakarta) yang dijalankan oleh Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi sebagai berikut:

- Nilai transaksi *outgoing* PJP LR di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan IV 2023 mencapai Rp9,75 triliun atau tumbuh sebesar 4,54% (yoy), berbanding terbalik dari triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 13,45% (yoy). Sementara itu, frekuensi transaksi *outgoing* tercatat sebanyak 614.882 transaksi atau mengalami kontraksi sebesar 29,51% (yoy), turun lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 22,63% (yoy).
- Nilai transaksi *incoming* PJP LR tercatat sebesar Rp17,77 triliun atau tumbuh sebesar 35,46% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami tumbuh 37,94% (yoy).

Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 3,63 juta atau tumbuh sebesar 23,24% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 35,42% (yoy).

- Nilai transaksi domestik PJP LR tercatat sebesar Rp94,02 triliun atau tumbuh sebesar 36,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,88% (yoy). Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 64,71 juta transaksi atau tumbuh sebesar 26,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5% (yoy).

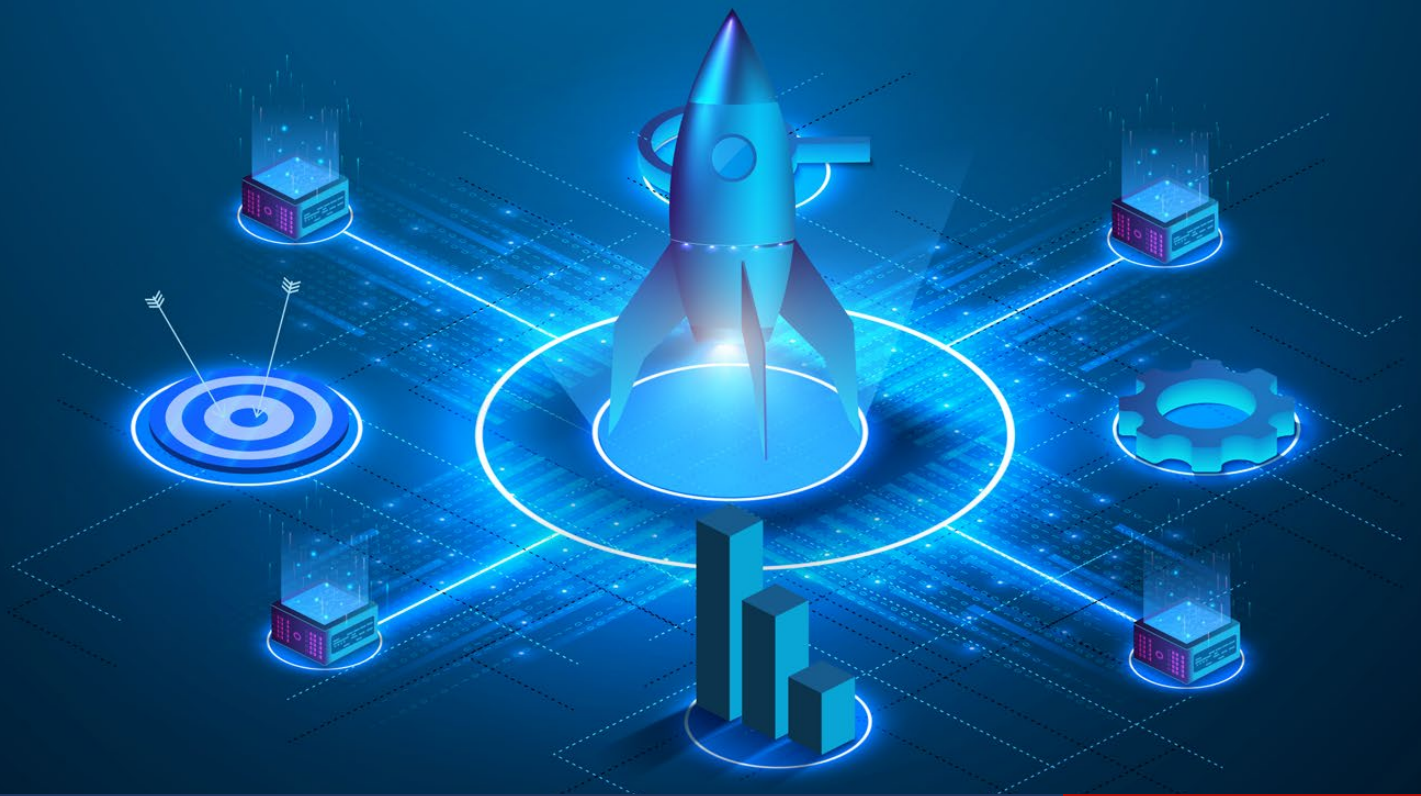
Dengan demikian, secara umum terjadi peningkatan nilai dan frekuensi transaksi PJP LR baik *outgoing*, *incoming*, dan domestik, sementara penurunan frekuensi hanya terjadi pada transaksi *outgoing*. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta terutama menjelang momen HKBN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Tabel 6.3 Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE		OUTGOING		INCOMING		DOMESTIC	
		FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)
TW I 2020	Jan-20	19.244	876.029.558.924	2.790.747	2.448.962.056.681	2.318.460	3.652.836.612.761
	Feb-20	17.820	705.196.274.574	464.055	2.541.422.928.345	3.207.777	4.268.574.298.242
	Mar-20	14.973	786.786.445.415	513.070	3.249.878.679.624	3.187.842	4.291.224.204.144
	Total	52.037	2.368.012.278.913	3.767.872	8.240.263.664.650	8.714.079	12.212.635.115.147
TW II 2020	Apr-20	9.843	451.330.534.267	518.556	3.109.213.840.919	1.835.884	3.035.059.526.763
	May-20	11.646	317.617.797.609	638.902	3.272.985.284.693	2.190.258	3.100.375.671.350
	Jun-20	16.362	609.234.172.893	592.505	3.021.071.820.858	2.547.826	3.469.218.209.499
	Total	37.851	1.378.182.504.769	1.749.963	9.403.270.946.470	6.573.968	9.604.653.407.612
TW III 2020	Jul-20	17.307	776.735.132.076	625.951	3.578.380.589.317	3.196.653	4.498.767.441.505
	Aug-20	16.536	682.778.854.093	562.361	3.331.395.275.865	3.745.893	4.536.278.891.917
	Sep-20	17.272	872.519.689.320	570.496	3.371.000.771.677	4.273.546	5.311.898.312.574
	Total	51.115	2.332.033.675.489	1.758.808	10.280.776.636.859	11.216.092	14.346.944.645.996
TW IV 2020	Oct-20	17.695	970.727.059.198	593.571	3.281.780.541.285	4.997.412	6.184.066.710.486
	Nov-20	20.811	1.382.025.507.414	531.845	2.885.258.608.907	5.429.305	7.050.762.370.538
	Dec-20	23.083	1.275.443.128.213	598.304	3.018.815.956.838	5.639.375	6.988.830.657.280
	Total	61.589	3.628.195.694.825	1.723.720	9.185.855.107.030	16.066.092	20.223.659.738.304
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.581	11.536.770.574.232
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091
	Total	67.455	5.263.457.646.331	1.987.596	10.398.209.605.689	22.162.776	35.785.444.069.552
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151
	Total	76.628	5.637.880.175.501	2.273.604	12.261.451.509.696	26.875.474	45.612.912.031.179
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666
	Total	97.632	5.835.657.566.296	2.176.073	11.495.068.339.839	33.213.753	53.447.272.460.300
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247
	Nov-21	47.330	2.280.183.690.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286
	Total	143.369	6.300.451.379.147	2.625.074	13.578.376.913.495	38.062.938	61.489.971.254.076
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.453	13.945.338	21.276.650.265.317
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313
	Total	163.400	7.373.774.034.626	2.484.401	12.872.980.050.221	43.119.024	63.207.560.041.907
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.641.826.505
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629
	Total	276.908	9.049.494.321.218	2.914.434	12.731.612.320.781	49.035.834	72.088.046.860.069

PERIODE		OUTGOING		INCOMING		DOMESTIC	
		FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)	FREKUENSI (ribu Vol)	NILAI (miliar Rp)
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.674.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.553.090	24.691.222.695.268
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235
	Total	1.033.193	9.963.395.156.232	2.676.518	11.759.415.849.376	52.585.961	72.981.510.546.583
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.688	826.067	3.498.815.511.210	16.657.239	21.432.734.318.000
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594
	Total	872.277	9.329.642.084.380	2.946.050	13.123.827.550.990	51.003.158	68.757.500.654.299
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361
	Total	601.008	11.844.809.980.387	3.687.439	14.789.258.847.420	50.866.399	71.383.168.654.195
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113
	Jun-23	247.246	2.675.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855
	Total	699.004	8.501.127.052.747	4.010.528	15.966.497.142.495	55.402.461	82.472.536.915.009
TW III 2023	Apr-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742
	May-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395
	Jun-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086
	Total	799.400	8.623.526.841.571	3.624.421	16.220.975.566.657	55.216.913	75.812.772.606.223
TW IV 2023	Oct-21	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.091	23.441.197	30.412.963.804.944
	Nov-21	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.171	20.364.548	30.652.789.833.843
	Dec-21	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490
	Total	614.882	9.753.625.146.263	3.630.718	17.777.375.668.200	64.712.537	94.026.730.956.277
Grand Total		5.032.866	97.429.640.392.432	40.406.501	182.307.840.051.668	520.114.922	759.426.589.000.451

Sumber: Bank Indonesia



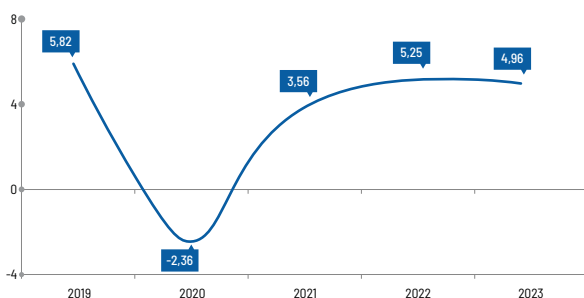
BOKS 3

Intensifikasi Sistem Pembayaran Ritel di Kawasan Wisata Kepulauan Seribu Dorong Penguatan Ekonomi Digital Jakarta

Pemulihan ekonomi Jakarta pasca-pandemi COVID-19 masih berlanjut dan tetap tumbuh kuat pada tahun 2023 sebesar 4,96% (yoy). Walau lebih rendah dari tahun sebelumnya, kuatnya ekonomi Jakarta didorong oleh optimalisasi ekosistem digital di beberapa sektor aktivitas ekonomi masyarakat. Potensi digital Jakarta tercermin pada pencapaian *Digital Competitiveness Index* (DCI) pada tahun 2023 sebesar 76,6 (skala 100) yang didorong oleh penguatan aspek output meliputi infrastruktur digital, keuangan, serta regulasi dan kapasitas Pemda. Selain itu, aspek input dan penunjang *Digital Competitiveness Index* Jakarta juga optimal yang didorong oleh investasi untuk teknologi informasi dan pemanfaatan digital bagi kewirausahaan dan

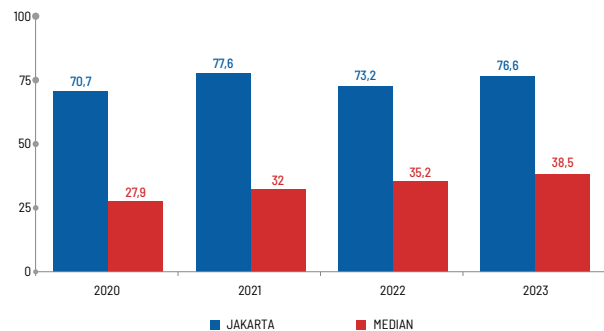
produktivitas. Sejalan dengan pencapaian digitalisasi tersebut, adopsi digital di Jakarta telah menjadi katalisator pemulihan ekonomi dalam mendorong produktivitas, memunculkan aktivitas ekonomi baru, efisiensi biaya produksi, dan meningkatkan transaksi *cross border*.

Dampak adopsi digital Jakarta juga tercermin dari kinerja wisata Kepulauan Seribu. *Digital tourism* telah menjadi katalisator dalam mendorong promosi berbagai destinasi wisata, potensi pariwisata, dan ekonomi kreatif di Jakarta melalui berbagai platform. Inisiatif ini telah berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara



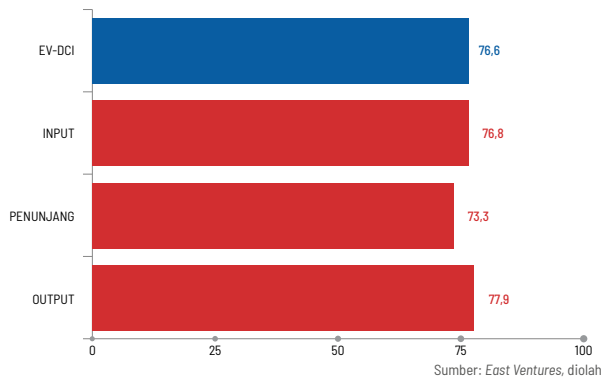
Sumber : BPS, diolah

Grafik B3.1 PDRB Jakarta (% yoy)

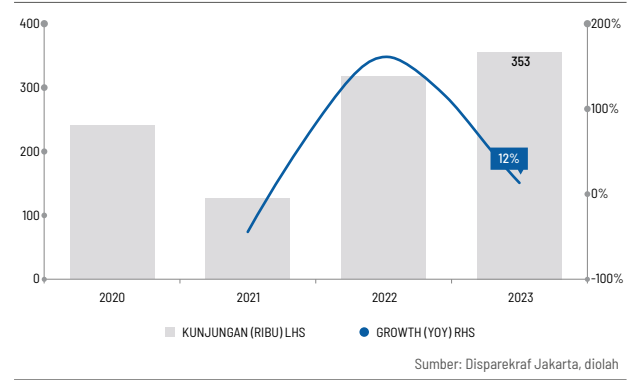


Sumber : East Ventures, diolah

Grafik B3.2 *Digital Competitiveness Index* (DCI) Jakarta (skala 0-100)



Grafik B3.3 Pilar DCI Jakarta (skala 0-100)



Grafik B3.4 Total Kunjungan Wisatawan Kepulauan Seribu

Tabel B.3.1 Detail Pilar Digital Competitiveness Index (DCI) Jakarta (skala 0-100)

INPUT			OUTPUT			PENUNJANG		
SUMBER DAYA MANUSIA	PENGUNAAN TIK	PENGELUARAN UNTUK TIK	PEREKONOMIAN	KEWIRUSAHAAN DAN PRODUKTIVITAS	KETENAGAKERJAAN	INFRASTRUKTUR	KEUANGAN	REGULASI DAN KAPASITAS PEMDA
62,4	83,0	85,1	73,6	100	60,1	98,2	84,4	37,4

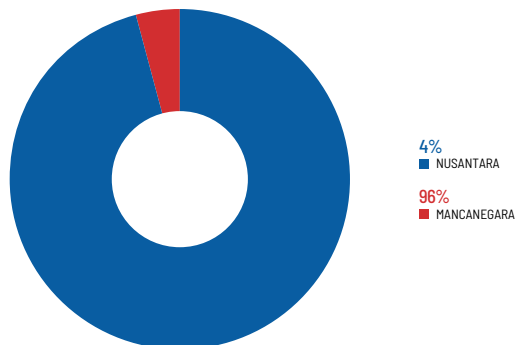
Sumber: East Ventures

dan mancanegara di berbagai destinasi wisata Jakarta antara lain Kepulauan Seribu. Berdasarkan data Dinas Parekraf Kepulauan Seribu, total kunjungan wisatawan mencapai 353 ribu atau tumbuh 11,6% (yoy) pada tahun 2023 yang diatribusi dari 96% kunjungan wisatawan nusantara dan 4% mancanegara. Pulau-pulau yang menjadi konsentrasi tujuan wisata meliputi Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Tidung, dan Pulau Pramuka.

Peningkatan wisatawan ini didorong oleh promosi media sosial serta program hiburan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejalan dengan upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kepulauan Seribu serta semangat Kepulauan Seribu berinisiatif bertransformasi menjadi Digital Island. Selain itu, tingginya minat wisatawan ke Kepulauan Seribu juga dipengaruhi oleh pesatnya adopsi digital pada beberapa segmen aktivitas meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas, promosi dan pelaku usaha. Program Digital Nomad Island Kepulauan Seribu yang telah diluncurkan pada Perencanaan Jakarta Hajatan Mei 2022

yang lalu, telah menjadi salah satu program penguatan atraksi digital yang mendorong minat wisatawan. Konsep ini mengintegrasikan kawasan wisata di Pulau Onrust, Kelor, Bidadari, dan Khayangan yang didukung melalui penguatan infrastruktur jaringan internet berbasis 4G, amenitas yang memadai, dan aksesibilitas yang terjangkau.

Lebih lanjut, intensifikasi sistem pembayaran ritel di kawasan wisata Kepulauan Seribu terus menguat melalui ekspansi pelaku usaha digital dan aksesibilitas melalui platform digital. Kepulauan Seribu telah mencatat 548 ribu volume transaksi QRIS yang didorong oleh akselerasi pelaku usaha dengan QRIS yang mencapai 3.254 atau tumbuh 27,5% (yoy) selama tahun 2023. Percepatan adopsi digital pada aspek aksesibilitas menuju Kepulauan Seribu juga didukung oleh optimalisasi aplikasi JaketBoat sebagai sistem pembayaran Dinas Perhubungan. Lebih lanjut, untuk memperluas akses sistem pembayaran non tunai di Kepulauan Seribu, Bank DKI juga meluncurkan Jakarta Tourist Pass yang memberikan akses penyajian daftar lokasi destinasi wisata, penyelenggaraan event, dan kebutuhan transaksi pembayaran dengan



Grafik B3.5 Komposisi Kunjungan Kepulauan Seribu



Sumber: Disparekraf Jakarta, diolah

Grafik B3.6 Digital Nomad Island Kepulauan Seribu

Tabel B.3.2 Data QRIS Kepulauan Seribu 2023

Volume Transaksi (ribu)	548
Pelaku usaha dengan QRIS	3.254
Pertumbuhan QRIS Merchant	27,5% (yoy)

Sumber: DKSP, diolah

opsi pembayaran non tunai yang beragam. Kedepan, Jakarta Tourist Pass diharapkan dapat memudahkan transaksi bagi wisatawan, meningkatkan produktivitas transaksi industri pariwisata, dan sentralisasi data untuk Pemerintah yang efisien.

Peningkatan transaksi digital di kawasan wisata Kepulauan Seribu tentunya tidak terlepas dari peran Bank Indonesia untuk menjaga efektivitas sistem pembayaran non tunai. Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta senantiasa melakukan kunjungan on-site di Kepulauan Seribu untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi, sinergi aksesibilitas digital menuju Kepulauan Seribu melalui aplikasi JaketBoat, dan monitoring implementasi layanan SP di destinasi wisata.

Kedepan, untuk mendorong penggunaan QRIS di beberapa Kawasan wisata di DKI Jakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta akan terus bersinergi dalam penyelenggaraan joint-event dengan beberapa instansi (a.l PJP bank dan non bank, asosiasi serta akademisi) untuk mendorong peningkatan pengguna baru dan volume transaksi QRIS. Beberapa strategi penguatan SP ritel di kawasan Kepulauan Seribu akan mencakup segmen transportasi, ekonomi kreatif, eco-wisata, serta MICE dan ruang terbuka.



Gambar B3.2 Sosialisasi QRIS di Kepulauan Seribu



Sumber: Bank DKI

Gambar B3.1 Jakarta Tourist Pass



Gambar B3.2 Sosialisasi Berkonsumsi Bijak dengan QRIS Kep. Seribu



Gambar B3.3 Sinergi JaketBoat sebagai aplikasi Sistem Pembayaran Dinas Perhubungan menuju Kep. Seribu



Gambar B3.4 Focus Group Discussion Optimalisasi Aplikasi Sistem Pembayaran Dinas Perhubungan



Gambar B3.5 Monitoring Implementasi QRIS di Kawasan Wisata Pulau Pramuka



BAB 7

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2023 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor jasa perdagangan, penyedia akomodasi, dan pengangkutan.

Tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta Triwulan IV 2023 masih dalam tingkatan yang baik. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan ekonomi masih berada pada level optimis meskipun mengalami penurunan dibanding Triwulan III 2023.



Tingkat Kesempatan Kerja



93,47%

Agustus 2023

92,82%

Agustus 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka



6,53%

Agustus 2023

7,18%

Agustus 2022

Upah Minimum Provinsi (UMP)



Rp5.067.381

2024

Rp4.901.798

2023

Indeks Penghasilan Konsumen



110,48%

Triwulan IV 2023

128,48%

Triwulan III 2023

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



143,71%

Triwulan IV 2023

146,95%

Triwulan III 2023

A. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Agustus 2023, angka penduduk bekerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,07 juta orang, meningkat sebesar 4,05% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya (Grafik 7.1 dan Tabel 7.1). Dari sisi serapan tenaga kerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tercatat sebesar 93,47%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (92,82%) (Grafik 7.2).

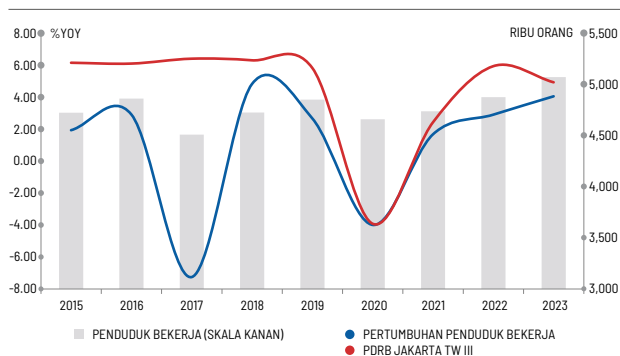
Kondisi pekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu dengan pangsa sebesar 84,26%. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dengan pangsa sebesar 15,74%. Pekerja tidak penuh dikelompokkan berdasarkan dua kategori, yaitu Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) dan Pekerja Paruh Waktu (Grafik 7.3). Dibandingkan Agustus 2022, TSP mengalami kenaikan, yakni 2,71% menjadi 2,96%. Berbeda dengan TSP, pekerja paruh waktu berkurang dari 15,48% menjadi 12,78% dari total penduduk bekerja di DKI Jakarta.

Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebanyak 63,77% dari total pekerja dan sisanya

sebanyak 36,23% bekerja pada sektor informal. Jumlah pekerja sektor formal pada Agustus 2023 tumbuh sebesar 5,11% (yoy), sedikit melambat dibandingkan periode Agustus 2022 sebesar 5,22% (yoy). Sementara itu, jumlah pekerja sektor informal tumbuh sebesar 2,24% (yoy), meningkatkan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 0,82% (yoy) (Grafik 7.4).

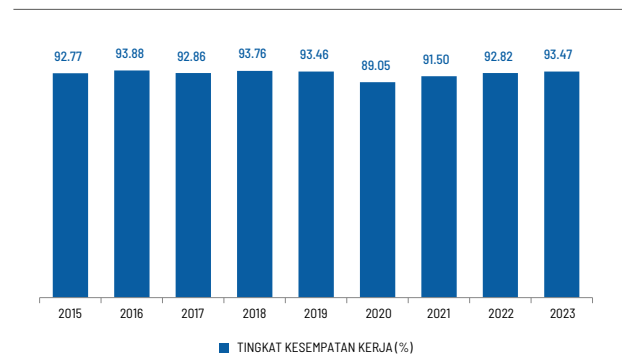
Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 3,0 juta orang. Sementara itu, status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,2 juta orang (Tabel 7.2).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi di DKI Jakarta semakin meningkat. Hal ini tercermin dari pangsa yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan cukup tinggi 22,13% (yoy). Sementara itu, meskipun tenaga kerja lulusan SMA masih mendominasi dengan pangsa sebesar 26,27%, namun mulai menunjukkan tren yang menurun dengan pertumbuhan terkontraksi sebesar 2,56% (yoy) (Grafik 7.5 dan 7.6).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.1 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



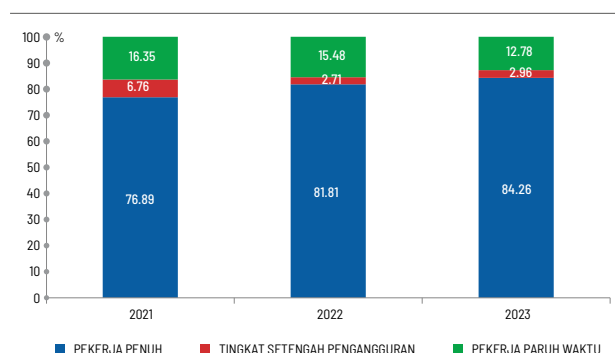
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.2 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja

Tabel 7.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

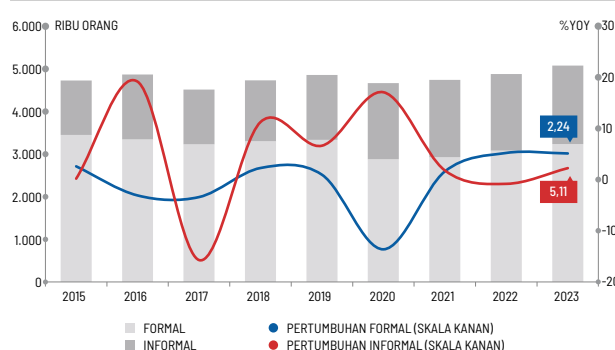
KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	7.837,20	7.884,02	7.930,26	8.126,12	8.004,78	8.199,69	8.239,83	8.266,36	8.245,33	8.327,00	8.332,26	8.322,91
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.429,20	5.041,62	5.447,51	5.192,35	5.438,99	5.232,03	5.365,77	5.177,31	5.134,13	5.252,40	5.255,24	5.427,23
Bekerja (ribu orang)	5.139,08	4.726,78	5.167,92	4.852,95	5.170,67	4.659,25	4.909,17	4.737,42	4.723,54	4.875,10	4.857,62	5.072,74
Pengangguran (ribu orang)	290,12	314,84	279,59	339,40	268,32	572,78	456,60	439,90	410,59	377,29	397,62	354,49
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	2.408,00	2.842,40	2.482,75	2.933,77	2.565,78	2.967,66	2.874,05	3.089,04	3.111,20	3.074,61	3.077,02	2.895,68
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.451,80	3.300,10	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.234,64
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.687,29	1.426,68	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.838,10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,27	63,95	68,69	63,90	67,95	63,81	65,12	62,63	62,27	63,08	63,07	65,21
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	94,66	93,76	94,87	93,46	95,07	89,05	91,49	91,50	92,00	92,82	92,43	93,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	6,24	5,13	6,54	4,93	10,95	8,51	8,50	8,00	7,18	7,57	6,53

Sumber: BPS, diolah



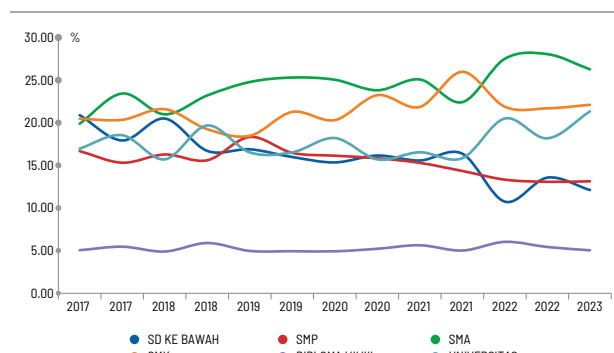
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.3 Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja



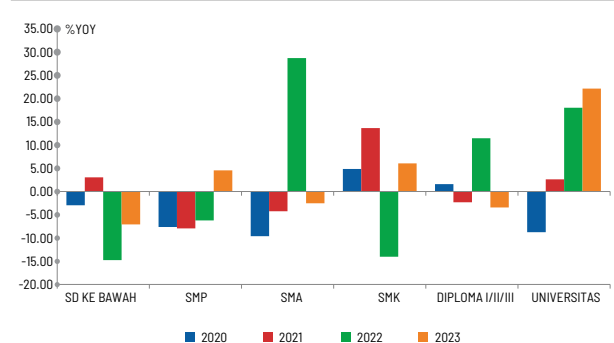
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.4 Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.6 Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 7.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS
Pekerja Sektor Formal	3.451,80	3.300,10	3.381,35	3.331,72	3.509,49	2.878,42	3.146,80	2.924,71	2.985,37	3.077,31	3.167,99	3.230,00
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	191,45	195,40	226,63	182,54	252,49	152,65	203,20	151,53	186,23	154,05	269,38	186,11
Buruh/karyawan/pegawai	3.290,19	3.105,68	3.157,96	3.149,18	3.274,00	2.725,78	2.943,60	2.773,22	2.799,15	2.923,11	2.898,61	3.048,53
Pekerja Sektor Informal	1.687,29	1.426,68	1.786,57	1.521,23	1.661,18	1.780,83	1.762,38	1.812,71	1.738,17	1.797,80	1.689,63	1.840,00
Berusaha sendiri	933,70	925,70	1.163,75	1.039,46	1.129,09	1.136,33	1.112,88	1.111,80	1.080,50	1.183,19	1.084,94	1.162,88
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	275,05	218,62	224,32	213,64	227,02	241,51	254,75	253,86	249,18	195,49	253,32	248,45
Pekerja bebas pertanian	-	2,58	3,04	0,35	2,19	0,23	0,10	0,88	3,62	2,44	-	1,55
Pekerja bebas non pertanian	174,32	89,07	66,12	98,46	75,69	150,29	135,26	191,32	126,84	174,53	90,72	140,26
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	303,55	188,69	328,63	169,33	227,97	252,47	259,39	254,81	278,04	242,29	260,65	284,95

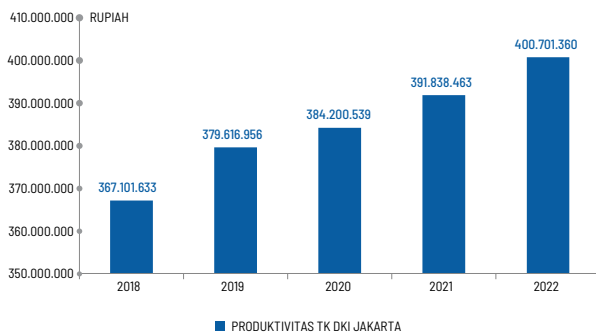
Sumber: BPS, diolah

Lebih lanjut, tingkat pendidikan tenaga kerja yang membaik tersebut turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp400,7 juta/TK/tahun, meningkat dibandingkan 4 tahun sebelumnya (Grafik 7.7). Secara spasial, produktivitas tertinggi di DKI Jakarta terjadi di Jakarta Pusat (Grafik 7.8).

Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan pertumbuhan positif sektor tersebut. Pangsa serapan tenaga kerja

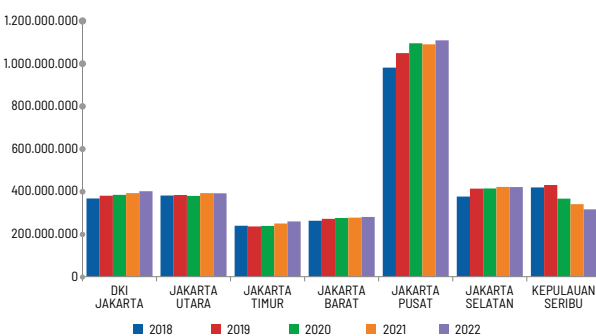
pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 23,21% terhadap total penduduk bekerja Agustus 2023. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (12,26%), LU Pengangkutan dan Pergudangan (11,87%), LU Industri Pengolahan (11,08%), LU Jasa Lainnya (9,24%) (Grafik 7.9 dan 7.10).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2023 tercatat mencapai 6,53%, menunjukkan penurunan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,18%. Kondisi



Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

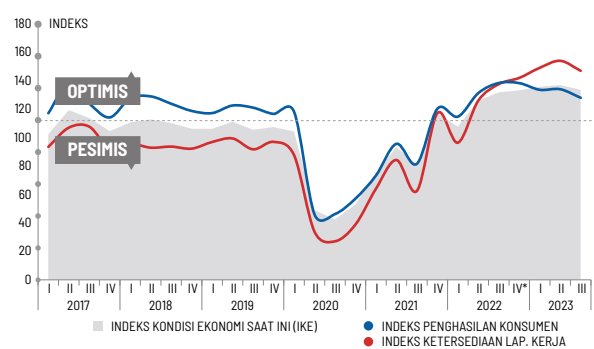
Grafik 7.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)



Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta

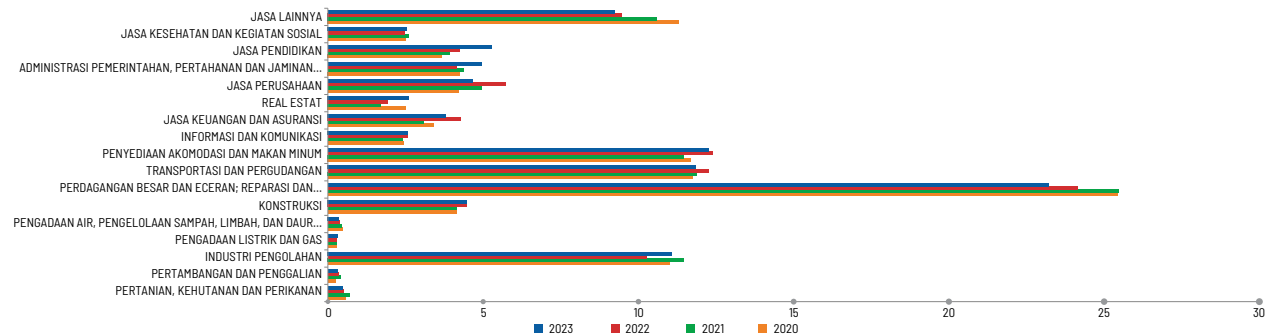
Grafik 7.8 Produktivitas TK Regional Provinsi DKI Jakarta (Rp/TK/Tahun)

ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen di wilayah DKI Jakarta yang menunjukkan tren peningkatan dan berada pada level optimis meskipun pada Triwulan III 2023 mengalami sedikit penurunan indeks dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 7.11). Meskipun membaik, level TPT di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan Nasional dan berada di posisi kedua tertinggi di wilayah Jawa setelah Banten (Grafik 7.12). Ditinjau dari jenis kelamin, TPT laki laki pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 7,76% (yoy), meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,50%. Sementara itu, TPT tumbuh sebesar 4,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 6,65% (yoy).



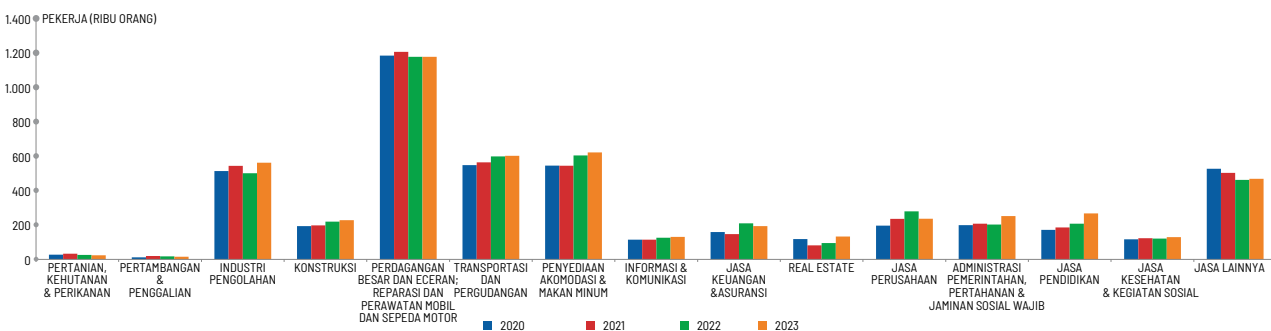
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 7.11 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja



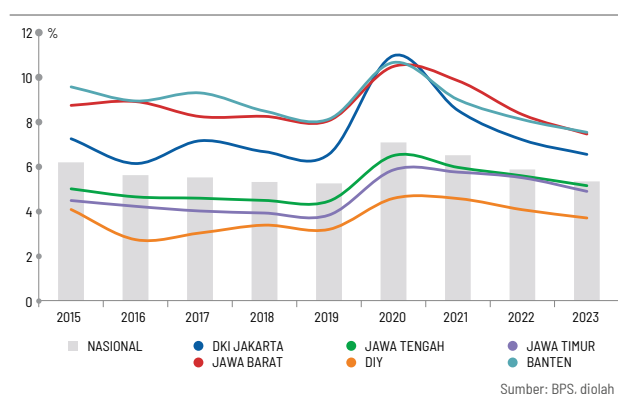
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.9 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS, diolah

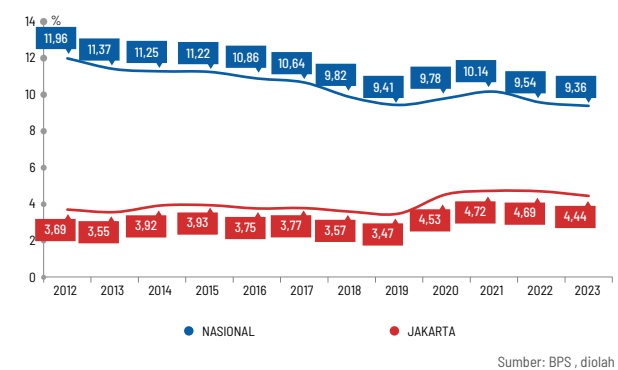
Grafik 7.10 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja



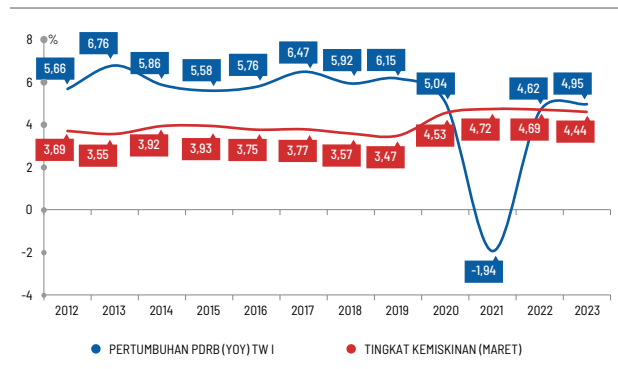
Grafik 7.12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta

B. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta mengalami penurunan. Berdasarkan data Maret 2023, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,44%, menurun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 4,69% (Tabel 7.3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada Maret 2023 berada pada level 9,36% (Grafik 7.13). Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2023 dan pengurangan jumlah pengangguran (Grafik 7.14). Selain itu, gencarnya program bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi turut berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin.



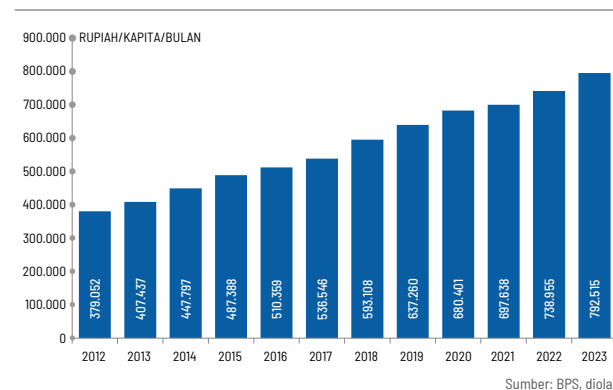
Grafik 7.13 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional



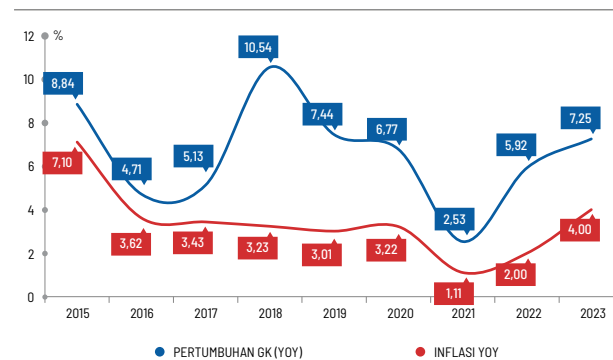
Grafik 7.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

Angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka GK Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp792.515 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 7,25% (yoy) dari angka GK Maret 2022 yang tercatat Rp738.955 per kapita per bulan (Grafik 7.15 dan Grafik 7.16). Pertumbuhan angka GK tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan baik dari sisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) (7,95%, yoy) maupun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (5,71%, yoy) (Grafik 7.17).

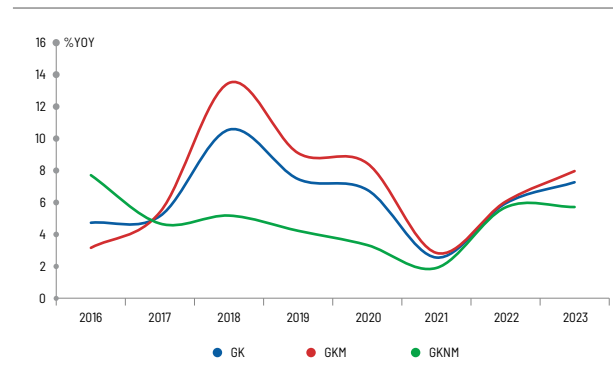
Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan, yakni mencapai 69,23% pada Maret 2023 (Grafik 7.19).



Grafik 7.15 Garis Kemiskinan DKI Jakarta



Grafik 7.16 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Inflasi IHK Jakarta



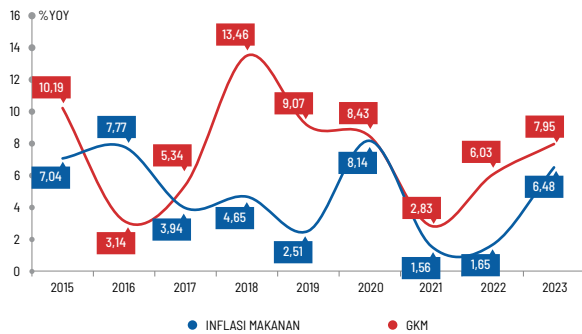
Grafik 7.17 Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan Komponennya

Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah namun dengan Garis Kemiskinan yang paling tinggi (Grafik 7.20 dan Grafik 7.21). Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode Maret 2023 juga menurun masing-masing sebesar 0,18 dan 0,70, lebih rendah dibandingkan Maret 2022 yang masing-masing sebesar 0,19 dan 0,77 (Grafik 7.22).

Sementara itu, tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta pada Triwulan IV masih dalam tingkatan yang baik, hal ini tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) pada Triwulan IV 2023 dengan nilai rata-rata sebesar 124,64, lebih rendah dibandingkan IKE pada Triwulan III 2023 (133,62). Lebih rendahnya IKE disebabkan terutama oleh penurunan indeks penghasilan konsumen dari 128,48 menjadi 110,19 dan penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja dari 146,95 menjadi 143,71. Meskipun demikian, indeks keyakinan konsumen (IKK), indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE), indeks ketersediaan lapangan

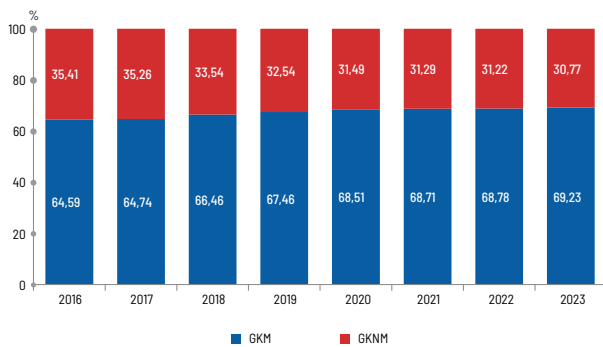
kerja dan indeks penghasilan ekonomi masih berada pada level optimis pada triwulan IV 2023 (Grafik 7.23).

Meskipun tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan di DKI Jakarta pada periode Maret 2023 mengalami peningkatan. *Gap* antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Pada periode pencatatan, indeks Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,431. Indeks tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (0,423) (Grafik 7.24). Indeks tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,388, yang memiliki nilai sama dari periode sama tahun sebelumnya (0,381). Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5. Namun demikian, naiknya angka ini juga patut menjadi perhatian karena berarti bahwa semakin banyak penduduk yang pengeluarannya masuk ke kelompok 40 persen terbawah.



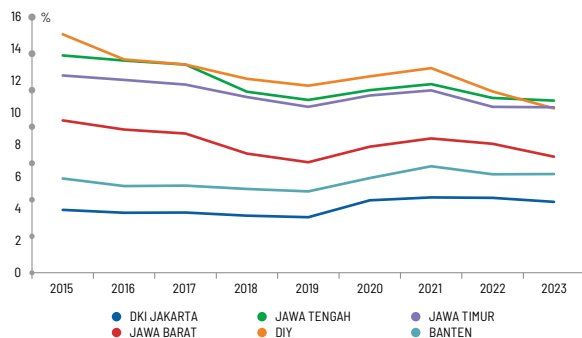
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.18 Pertumbuhan Garis Kemiskinan Makanan dan Inflasi Subkelompok Makanan



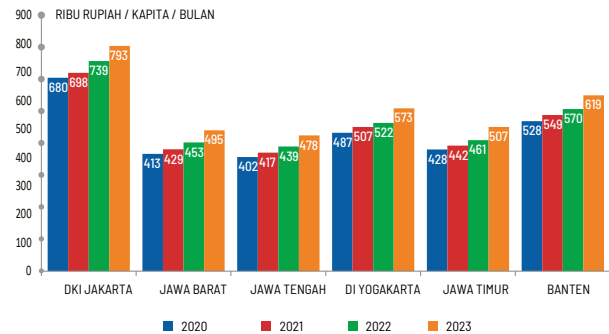
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.19 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan



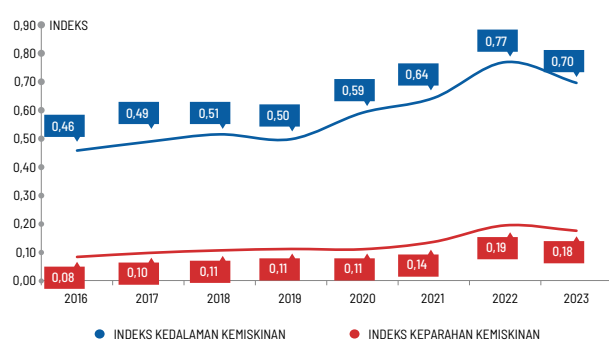
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.20 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa



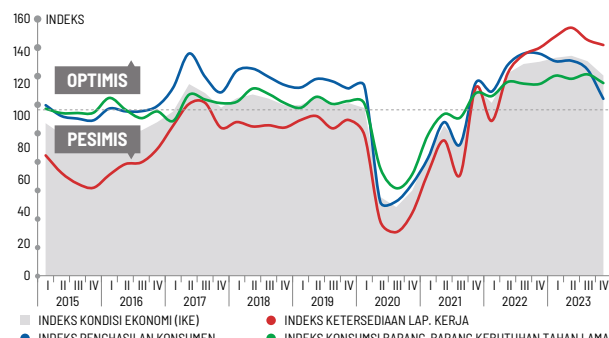
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.21 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa



Sumber: BPS, diolah

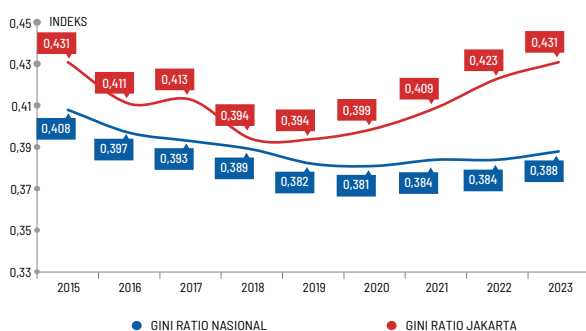
Grafik 7.22 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

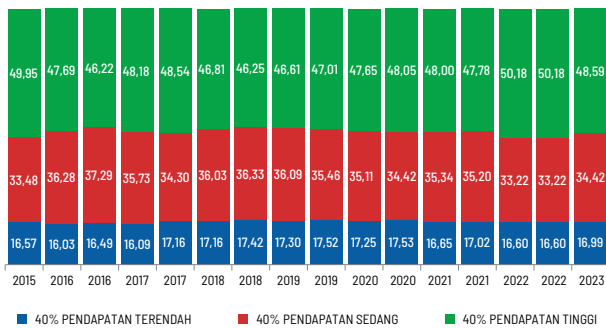
Grafik 7.23 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Ketimpangan pada kelompok pengeluaran terendah lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran atas. Proporsi jumlah pendapatan penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk, yakni sebesar 16,99% pada Maret 2023 (Grafik 7.25). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yakni sebesar 16,60%. Sebaliknya, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas menurun dari 50,18% menjadi 48,59%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi pendapatan kepada 40% masyarakat berpendapatan rendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan pendapatan dapat perlahan membaik.



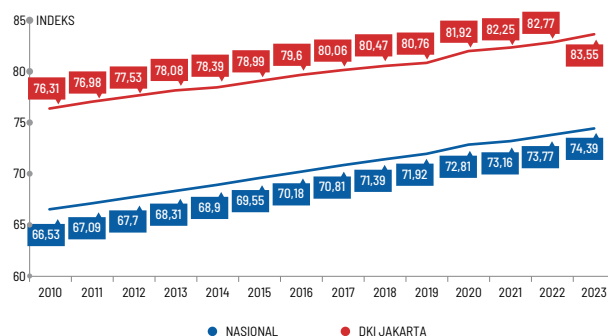
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.24 Rasio Gini Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.25 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.26 IPM Jakarta dan Nasional

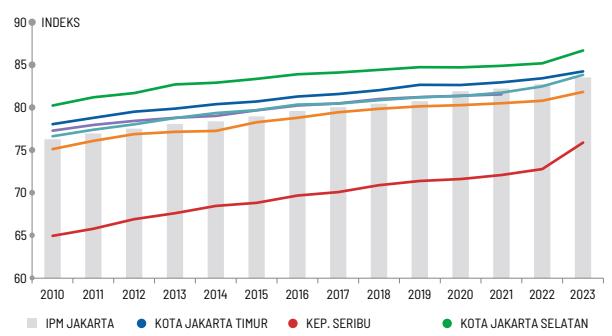
Dampak positif dari peningkatan alokasi pendapatan ini secara tidak langsung dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2023, IPM DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. IPM DKI Jakarta tercatat tumbuh 0,94% (yoy) (Grafik 7.26). Pembangunan manusia di DKI Jakarta terus mengalami kemajuan. Pada 2020 lalu, IPM DKI Jakarta adalah sebesar 81,92 dan telah masuk dalam kategori yang "sangat tinggi" ($IPM \geq 80$). Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 82,25 dan kembali meningkat menjadi 82,77 pada 2022. IPM 2023 kembali mencatatkan peningkatan menjadi 83,55. Secara keseluruhan, pada periode 2020-2023 rata-rata peningkatan adalah sebesar 0,85% setiap tahunnya. IPM DKI Jakarta jauh melampaui angka rata-rata IPM Indonesia yang hanya mencapai 74,39 (Grafik 7.27).

Pencapaian pembangunan manusia di seluruh kota DKI Jakarta juga memiliki tingkat perkembangan manusia yang berstatus "sangat tinggi" ($IPM \geq 80$). Jakarta Selatan memiliki IPM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 86,71, diikuti oleh Jakarta Timur dengan IPM 84,26, Jakarta Barat dengan IPM 83,85, Jakarta Pusat dengan IPM 83,29, dan Jakarta Utara dengan IPM 81,85. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu masih memiliki tingkat perkembangan manusia yang berstatus "tinggi" ($70 \leq IPM < 80$), dengan IPM sebesar 75,91 (Grafik 7.28).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.27 Pertumbuhan IPM DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.28 IPM Kabupaten/Kota di DKI Jakarta

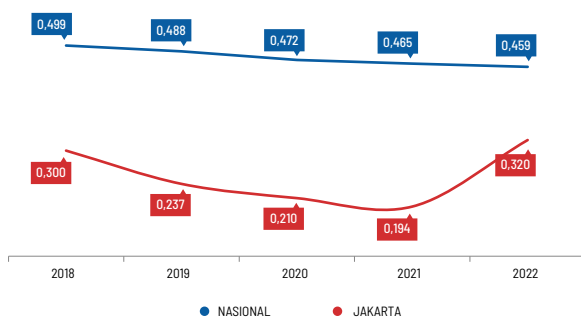
C. INDEKS KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan penerapan Indeks Ketidakesetaraan Gender yang diterapkan baik secara nasional maupun daerah, menggambarkan tingkat pembangunan manusia yang belum mencapai potensi optimal karena disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam aspek-aspek seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Pencapaian IKG akan mencapai titik optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan terjaga dengan baik dan adanya pemberdayaan serta partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pasar tenaga kerja. Indikator yang digunakan dalam mengukur IKG mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, aspek kesehatan reproduksi melibatkan Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20). Kedua, aspek pemberdayaan Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA dan Persentase anggota legislative. Ketiga, dalam dimensi pasar tenaga kerja, indikator mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Ketimpangan gender di DKI Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2021, namun mengalami kenaikan pada tahun

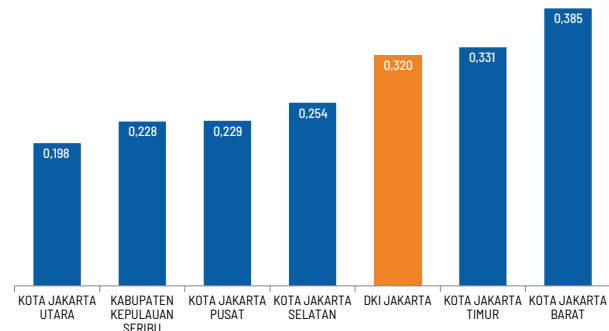
2022. Tercatat bahwa tingkat ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka 0,194, sementara puncak ketimpangan tercapai pada tahun 2022 dengan angka 0,320 (Grafik 7.29). Selama periode 2018-2022, pencapaian IKG DKI Jakarta selalu berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2022, IKG Indonesia mencapai 0,459. Ketimpangan gender di DKI Jakarta relatif lebih baik daripada rata-rata nasional, seiring dengan semakin berkurangnya ketidakesetaraan gender yang mencerminkan perbaikan kesetaraan. Di tahun 2022, tercatat bahwa Kota Jakarta Utara berhasil mencapai tingkat ketimpangan gender yang paling rendah, yakni sebesar 0,198 (Grafik 7.30). Prestasi tersebut diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Seribu dengan tingkat 0,228, sementara Kota Jakarta Pusat dan Kota Jakarta Selatan memiliki tingkat masing-masing sebesar 0,229 dan 0,254. Kota Jakarta Timur mencatat angka 0,331, sedangkan Kota Jakarta Barat memperoleh tingkat ketimpangan gender tertinggi, yaitu 0,385.

Sementara itu, bila dibandingkan antara provinsi-provinsi, nilai IKG Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 0,320 (Grafik 7.31) menempatkan provinsi tersebut pada peringkat kedua terendah, setelah DI Yogyakarta yang mencapai 0,240. Penurunan nilai IKG yang semakin rendah mencerminkan pencapaian dalam kesetaraan gender, dan hal tersebut berlaku pula sebaliknya.



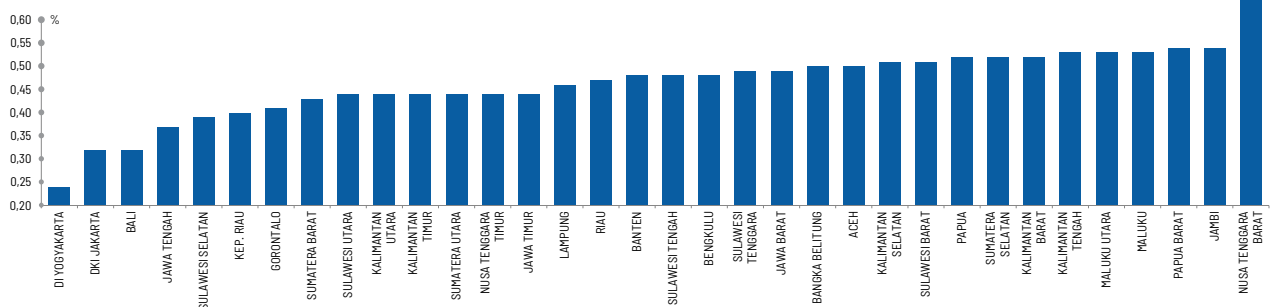
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.29 IKG Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.30 IKG DKI Jakarta Menurut Kab/Kota



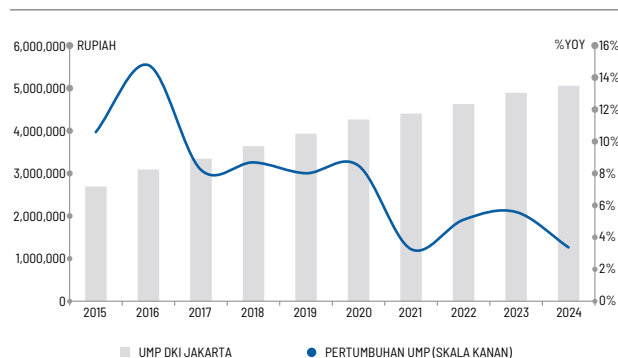
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.31 IKG Menurut Provinsi

D. UPAH TENAGA KERJA

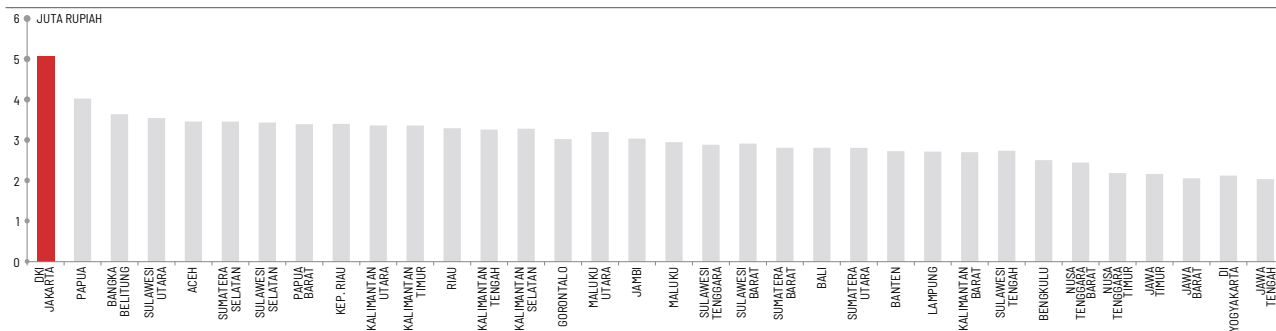
Pada tahun 2024, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.067.381, meningkat 3,38% dibandingkan tahun 2023 (Rp4.901.798) (Grafik 7.31). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 818/2023 tentang UMP Jakarta 2024 tanggal 21 November 2023.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi. Selain itu, UMP tahun 2024 sudah tidak ada lagi yang berada di bawah 2 juta. UMP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.32 UMP Provinsi di Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.33 UMP Provinsi di Indonesia

BAB 8

PROSPEK PEREKONOMIAN

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy) sejalan dengan masih kuatnya optimisme konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan event di Jakarta, berlangsungnya pemilu, serta berlanjutnya pembangunan proyek strategis. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli serta meningkatnya aktivitas MICE dan event; serta membaiknya konsumsi Pemerintah sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD. Di sisi lain, kinerja investasi diperkirakan sedikit tertahan dipengaruhi sikap *wait and see* investor pada periode pemilu, sebagaimana pola historisnya. Kinerja ekspor juga diperkirakan masih akan tertahan sejalan dengan meluasnya tensi geopolitik serta tertahannya pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama Jakarta. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu tertahannya perekonomian global dan berlanjutnya tensi geopolitik.

Inflasi DKI Jakarta pada 2024 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar $2,5\pm 1\%$ (yoy). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya el-nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program TPID, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



**Proyeksi Ekonomi Global
WEO IMF (yoy)**

3,1%

Tahun 2024, yoy

2,9%

Tahun 2023, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan Volume
Perdagangan Dunia WEO IMF (yoy)**

3,3%

Tahun 2024, yoy

3,5%

Tahun 2023, yoy

**Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi DKI Jakarta (yoy)**

4,8% - 5,6%

Tahun 2024, yoy

**Proyeksi Inflasi IHK
DKI Jakarta**

2,5% ± 1%

Tahun 2024, yoy

A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Prospek Perekonomian Global

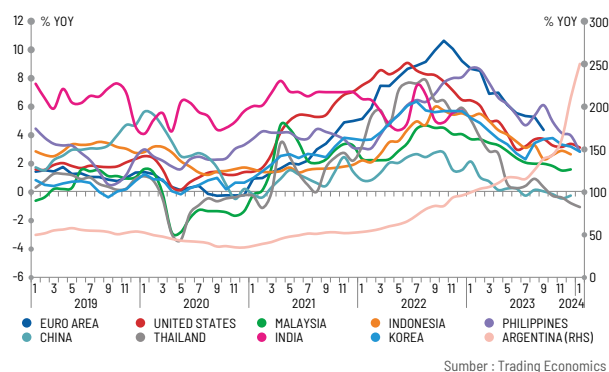
Pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan tumbuh melambat namun direvisi ke atas dari proyeksi sebelumnya. Ekonomi global diprakirakan tumbuh sebesar 3,1% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 2,8%. Perbaikan terutama ditopang lebih kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India sejalan dengan konsumsi dan investasi yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih lemah serta kontraksi pertumbuhan ekonomi di Inggris dan Jepang yang telah terjadi dalam dua triwulan berturut-turut dapat menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Dari sisi inflasi, eskalasi ketegangan geopolitik yang masih berlanjut diperkirakan dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, serta menahan laju penurunan inflasi global (Grafik 8.1). Konflik di Gaza dan Israel dapat meningkat lebih jauh ke wilayah yang lebih luas, yang menghasilkan sekitar 35 persen ekspor minyak dunia dan 14 persen ekspor gas. Konflik berkelanjutan di Laut Merah dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina berisiko menghasilkan guncangan pasokan baru yang merugikan bagi pemulihan global, dengan lonjakan biaya pangan, energi, dan transportasi. Biaya pengiriman kontainer saat ini juga telah meningkat tajam, dan situasi di Timur Tengah tetap bergejolak. Fragmentasi

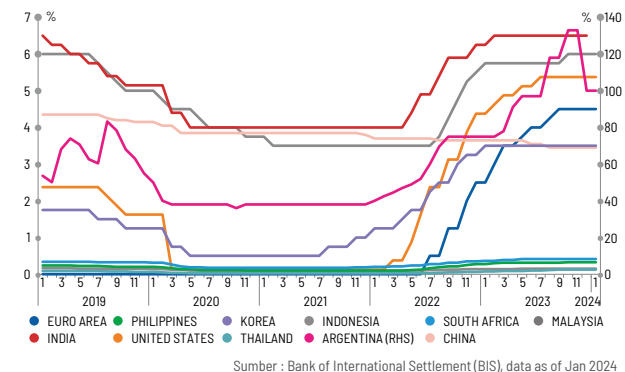
geoekonomi lebih lanjut juga dapat membatasi aliran komoditas yang menyebabkan volatilitas harga.

Perkembangan tersebut mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan dunia masih tinggi. Suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) diprakirakan baru mulai menurun pada semester II 2024, sejalan dengan inflasi AS yang masih tinggi (Grafik 8.2). IMF juga memproyeksikan bahwa suku bunga bank sentral lainnya juga masih akan ditahan pada level yang tetap untuk Bank Sentral Eropa serta *Bank of England* hingga semester II 2024. Yield US Treasury kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Perkembangan tersebut menyebabkan menguatnya dolar AS secara global, menahan berlanjutnya aliran masuk modal asing, dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di negara *emerging market*.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) pada 2024 diperkirakan tumbuh melambat sejalan dengan masih tingginya inflasi dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter AS. Melambatnya kinerja konsumsi dan investasi serta masih berlanjutnya ketegangan geopolitik diperkirakan juga menjadi beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan pada ekonomi AS. Perlambatan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga sejalan dengan suku bunga pinjaman yang masih tinggi dan pasar tenaga kerja yang masih ketat. Investasi juga diperkirakan melambat sejalan dengan pelaku usaha yang lebih berhati-hati mengingat masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan politik. Selain itu, kebijakan fiskal AS juga diperkirakan masih akan restriktif di tengah masih tingginya suku bunga.



Grafik 8.1 Laju Inflasi Negara-Negara di Dunia



Grafik 8.2 Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral di Dunia

Tabel 8.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (yoy))

	REALISASI				ESTIMASI	WEO IMF				WORLD BANK				OECD				
	2019	2020	2021	2022		2023	OCT-23		JAN-24		JUN-23		JAN-24		SEP-23		NOV-23	
							2024		2024		2024		2024		2023		2023	
Dunia	2,8	-3,2	5,9	3,5	3,1	▼	2,9	▲	3,1	▲	2,4		2,4		2,7		2,7	
Negara Maju	1,6	-4,3	5,3	2,6	1,6	▼	1,4	▲	1,5	▲	1,2		1,2					
Amerika Serikat	2,2	-2,8	5,9	2,1	2,5	▼	1,5	▲	2,1	▲	0,8	▲	1,6	▲	1,3	▲	1,5	
Kawasan Euro	1,3	-6,1	5,3	3,3	0,5	▼	1,2	▼	0,9	▲	1,3	▼	0,7	▲	1,1	▼	0,9	
Jepang	0,3	-4,3	2,2	1,0	1,9	▼	1,0	▼	0,9	▼	0,7	▲	0,9	▲	1,0		1,0	
Negara Berkembang	3,6	-1,5	6,7	4,1	4,1	▼	4,0	▲	4,1	▲	3,9		3,9					
Tiongkok	5,8	2,2	8,1	3,0	5,2	▼	4,2	▲	4,6	▲	4,6	▼	4,5	▲	4,6	▲	4,7	
India	4,7	-6,6	8,7	7,2	6,7		6,3	▲	6,5	▲	6,4		6,4	▲	6,0	▲	6,1	
Volume Perdagangan Dunia	1,0	-8,2	10,1	5,2	0,4	▼	3,5	▼	3,3	▲	2,8	▼	2,3					
Harqa Minyak (USD)		42,3	70,4	39,2	-16,0	▼	-0,7	▼	-2,3	▼	82,0	▲	81,0					

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

Di Eropa, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Eropa yang lebih baik pada 2024 didukung oleh beberapa faktor seperti meredanya tekanan inflasi serta meningkatnya pertumbuhan pendapatan. Pasar tenaga kerja yang masih kuat juga diperkirakan berdampak positif terhadap pemulihan konsumsi swasta. Di sisi lain, investasi khususnya investasi perumahan diperkirakan akan menurun pada 2024 sejalan dengan dampak pengetatan kondisi pembiayaan. Hal tersebut terindikasi dari menurunnya jumlah izin mendirikan bangunan serta memburuknya kepercayaan perusahaan konstruksi. Investasi bisnis juga diperkirakan akan tumbuh lemah pada tahun 2024 karena kondisi pembiayaan yang ketat sehingga menurunkan permintaan.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jepang pada 2024 diperkirakan akan lebih baik. Kondisi tersebut didukung oleh dukungan kebijakan moneter dan fiskal Pemerintah yang kuat sehingga diperkirakan akan mendorong permintaan domestik. Selain itu, pelaksanaan berbagai proyek Pemerintah Jepang yang tertunda sebelumnya diperkirakan akan mendorong investasi swasta. Prakiraan tersebut juga mengalami revisi ke atas didukung oleh *pent-up demand*, meningkatnya pariwisata mancanegara, perbaikan ekspor khususnya ekspor otomotif yang sebelumnya tertahan akibat permasalahan rantai pasokan, dan kebijakan moneter Pemerintah Jepang yang akomodatif.

Di Tiongkok, pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan melambat namun direvisi ke atas dari prakiraan sebelumnya. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, krisis yang semakin dalam dan terus berlanjut di pasar *real estate* berdampak pada meluasnya risiko gagal bayar dan ketidakstabilan di sektor keuangan sehingga menjadi sumber penahan perekonomian Tiongkok. Namun, berlangsungnya reformasi terkait sektor properti di Tiongkok pada 2024 termasuk restrukturisasi pengembang properti yang mengalami kebangkrutan serta dukungan fiskal yang lebih besar diperkirakan berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen dan meningkatnya permintaan swasta sehingga berdampak positif pada pemulihan ekonomi Tiongkok yang lebih cepat.

Perekonomian India pada 2024 diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi sebesar 6,5% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian yang masih tetap tumbuh tinggi diperkirakan bersumber dari masih kuatnya permintaan domestik, membaiknya kinerja sektor swasta, dan meningkatnya investasi. Di sisi lain, kinerja ekspor India diperkirakan akan tertahan sejalan dengan ketidakpastian yang masih tinggi, konflik geopolitik yang terus berlanjut serta dampak lanjutan dari tingginya suku bunga global.

Prospek Perekonomian Nasional

Sejalan dengan proyeksi ekonomi global yang lebih baik, pemulihan ekonomi nasional juga diperkirakan terus berlanjut. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) (Grafik 8.5). Prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor sejalan dengan proyeksi ekonomi global yang lebih baik,

positifnya pengaruh pelaksanaan Pemilu, tetap baiknya permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh meningkat dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang meningkat dan meningkatnya daya beli seiring dengan penurunan inflasi. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan tumbuh membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut. Berlanjutnya perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang oleh kuatnya kinerja berbagai lapangan usaha seperti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Secara spasial, perbaikan ekonomi juga diperkirakan ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, baik wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan semakin membaik pada 2024 didukung oleh tetap baiknya keyakinan konsumen terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan serta dampak positif pengaruh dari pelaksanaan pemilu. Semakin terkendalinya inflasi juga diperkirakan memberikan dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Tumbuh positifnya konsumsi rumah tangga juga tercermin pada perkembangan penjualan eceran, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, dan ekspektasi penghasilan yang tetap baik.

Dukungan fiskal untuk mendukung perekonomian masih kuat. Pada 2024, arsitektur kebijakan fiskal diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Berdasarkan hal tersebut, keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN

direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat juga didorong oleh peningkatan kinerja investasi pada 2024. Penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) serta masuknya investasi asing untuk mendorong proyek *green investment* diperkirakan akan mendorong kinerja investasi. Dari sisi nonbangunan, kegiatan investasi diperkirakan akan sedikit tertahan sejalan dengan *wait and see* investor pada periode pemilu sehingga perlu terus didorong agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja ekspor pada tahun 2024 diperkirakan membaik seiring dengan proyeksi perekonomian global yang lebih baik di tengah ekonomi Tiongkok yang diperkirakan masih akan tertahan sehingga memberikan dampak positif terutama pada ekspor barang. Ekspor jasa juga diperkirakan akan terus membaik di 2024. Adanya pelaksanaan berbagai event skala internasional diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor jasa pada 2024.

Kinerja impor pada tahun 2024 masih akan tumbuh positif dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tetap positifnya kinerja impor ditopang oleh impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja ekspor. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi nasional di 2024 akan ditopang sejumlah sektor yang diperkirakan akan tumbuh kuat, seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi sejalan dengan prakiraan kinerja konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh positif serta berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah.

Dari sisi harga, inflasi pada tahun 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024. Inflasi inti diperkirakan akan tetap rendah sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia. Risiko kenaikan inflasi *volatile food* juga akan terkendali sejalan dengan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah. Inflasi *administered prices* juga diperkirakan akan rendah dengan potensi penyesuaian harga energi *administered prices* yang lebih minimal. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, termasuk dampak tingginya harga energi global, harga pangan domestik, dan tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap imported inflation. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024.

Tabel 8.2 Proyeksi PDB Nasional

	2021	2022	2023				2023	2024*
			I	II	III	IV		
Pertumbuhan Ekonomi	3,70	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	4,7-5,5
Konsumsi Swasta	2,01	4,94	4,57	5,30	5,08	4,78	4,93	4,7-5,5
Konsumsi Pemerintah	4,24	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,81	2,95	3,6-4,4
Investasi	3,80	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	5,1-5,9
Ekspor	17,95	16,28	11,94	-2,97	-4,26	1,64	1,32	0,3-1,1
Impor	24,87	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-0,15	-1,65	-1,0-2,0

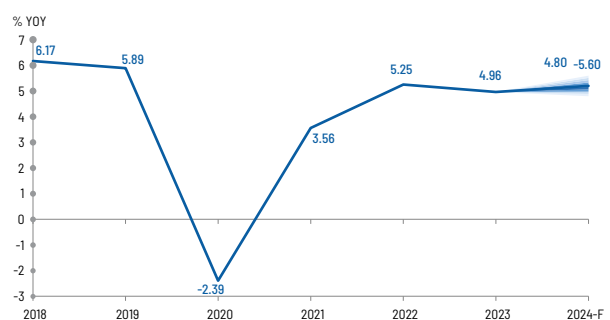
Sumber : Bank Indonesia,
*Angka Sangat Sementara

B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoy), terutama ditopang masih kuatnya permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada 2024 didorong oleh membaiknya kinerja konsumsi rumah tangga seiring dengan terjaganya daya beli dan optimisme masyarakat serta meningkatnya aktivitas MICE dan event baik skala nasional maupun internasional di Jakarta. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan akan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD serta kenaikan belanja untuk mendukung pemilu. Di sisi lain, kinerja investasi diperkirakan tertahan yang dipengaruhi sikap *wait and see* investor pada periode pemilu, sebagaimana pola historisnya.

Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh pertumbuhan yang masih tinggi pada 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu tertahannya perekonomian global, berlanjutnya tensi geopolitik, dan keberlanjutan *stance* moneter ketat AS.

Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh meningkat. Kondisi tersebut terindikasi dari beberapa indikator ekonomi seperti proyeksi penjualan mobil oleh Gaikindo pada



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 8.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2024

tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran kredit konsumsi yang masih tumbuh tinggi, serta indeks ekspektasi konsumen yang meningkat. Kondisi tersebut didukung oleh berlanjutnya pemberlakuan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% untuk mobil listrik dan perkiraan meningkatnya penghasilan masyarakat sejalan dengan adanya kenaikan UMP Jakarta sebesar 3,38% dan kenaikan gaji ASN sebesar 8%. Semakin meningkatnya penyelenggaraan berbagai kegiatan MICE dan event skala nasional dan internasional pada 2024, termasuk MICE dalam rangka mendukung aktivitas pemilu juga diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi. Berdasarkan data s.d Januari 2024, terdapat 19 konser musik yang sudah terjadwal akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa konser musik khususnya skala internasional yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta pada 2024 yaitu Bruno Mars, Jonas Brother Concert, dan The 38th Golden Disc Awards. Untuk event olahraga terdapat 9 event olahraga yang saat ini sudah terjadwal dilaksanakan di DKI Jakarta, dengan mayoritas berskala internasional, yaitu antara lain Indonesia Master 2024 (Super 500), Jakarta International Marathon, dan Indonesia International Open 2024. Sama halnya dengan konser musik dan event olahraga, kegiatan MICE di DKI Jakarta yang sudah terjadwal sampai dengan saat ini berjumlah masing-masing sebesar 299 event untuk pameran dan 1822 event untuk konferensi. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pameran dan konferensi di 2023.

Setelah tumbuh negatif pada tahun 2023, konsumsi Pemerintah pada 2024 diperkirakan tumbuh lebih baik. Kondisi tersebut sejalan dengan perbaikan postur belanja APBD dan APBN serta meningkatnya belanja antara lain belanja pegawai sejalan dengan kenaikan gaji ASN serta belanja barang dan jasa serta bantuan sosial untuk mendukung aktivitas pemilu. Kinerja konsumsi Pemerintah juga diperkirakan didukung oleh defisit APBN Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar 2,29% (dibawah 3%) terhadap PDB atau secara nominal sebesar Rp522,8 triliun. Dari sisi APBD, konsumsi Pemerintah pada 2024 juga diperkirakan akan ditopang oleh pagu belanja operasi APBD DKI Jakarta terutama pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta rencana penyerapan anggaran belanja yang lebih optimis untuk minimalisasi SILPA.

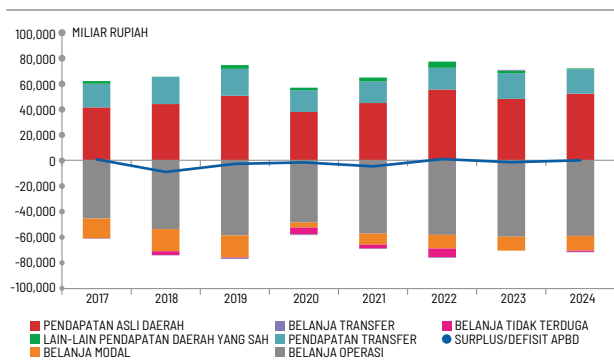
Pada 2024, pagu anggaran APBD DKI Jakarta meningkat sebesar 2,71% dari Rp 79,56 Triliun menjadi Rp 81,72 Triliun. Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,52% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 70,66 Triliun menjadi Rp 72,45 Triliun. Kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 dari sisi pendapatan bersumber dari kenaikan komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tumbuh mencapai 50,77%. Sementara itu komponen pajak dan retribusi juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,17% dan 7,53%. Kenaikan pagu pendapatan dalam RAPBD DKI Jakarta 2024 diperkirakan akan mendorong belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024.

Dari sisi belanja, pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,63% dibandingkan APBD-P 2023 dari Rp 72,14 Triliun menjadi Rp 72,60 Triliun. Berdasarkan komponennya, kenaikan pagu RAPBD DKI Jakarta 2024 terutama bersumber dari kenaikan komponen belanja tidak terduga yang naik mencapai 83,88%, sejalan dengan berlangsungnya periode pemilu 2024. Selain itu komponen belanja pegawai serta belanja barang dan jasa juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,85% dan 0,24% sejalan dengan naiknya gaji ASN di 2024 serta meningkatnya belanja barang dan jasa untuk aktivitas pemilu. Di sisi lain, belanja subsidi, hibah, dan bansos turun masing-masing sebesar 5,16%; 10,82%; dan 30,02%. Penurunan pada belanja bansos terutama disebabkan karena adanya evaluasi/perbaikan data penerima bansos untuk optimalisasi penerimaan bansos yang lebih tepat sasaran di 2024.

Sementara itu, pagu anggaran belanja Pemerintah Pusat melalui APBN di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mengalami penurunan. Pagu belanja Pemerintah Pusat melalui APBN ditetapkan sebesar Rp1.589,33 Triliun atau turun 6,58% (yoy) dibandingkan belanja Pemerintah Pusat melalui APBN-P tahun 2023 yang sebesar Rp1.701,32 Triliun. Adapun penurunan total pagu tersebut terutama bersumber dari penurunan Belanja Modal (-22,80% yoy), diikuti oleh Belanja Barang (-4,60%) dan Belanja Bantuan Sosial (-3,44%) di tengah peningkatan Belanja Pegawai yang mencapai 13,67% (yoy) (Grafik 8.8).

Adapun kinerja investasi pada tahun 2024 diperkirakan masih akan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan tahun 2023. Perlambatan kinerja investasi terutama disebabkan oleh kinerja investasi non bangunan yang tertahan di tengah kinerja investasi bangunan yang diperkirakan masih akan tetap tinggi. Dari investasi bangunan, investasi diperkirakan terutama bersumber dari berbagai proyek Pemerintah dan swasta. Masih berlanjutnya proyek strategis Pemerintah *multiyears* di DKI Jakarta seperti NCICD (pelaksanaan proyek pada 2022-2028), MRT fase II, III, dan IV, LRT Jakarta, *Transit Oriented Development* (TOD) serta berbagai proyek *green economy* dan *renewable energy* seperti infrastruktur EV, *waste management*, dan *green commercial/industrial zone* diperkirakan akan mendorong kinerja investasi pada tahun 2024. Di sisi lain, investasi non bangunan yang bersumber dari swasta diperkirakan tertahan pada 2024 sejalan dengan perilaku *wait and see* pelaku usaha pada periode pemilu 2024, sebagaimana pola historisnya.

Kinerja ekspor pada 2024 diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perlambatan ekonomi dan resesi di beberapa negara tujuan ekspor Jakarta, meluasnya ketegangan geopolitik termasuk konflik di Laut Merah, berhentinya produksi dan ekspor ke beberapa negara tertentu serta pembatasan kuota ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor. Melambatnya kinerja ekspor lebih lanjut diperkirakan akan tertahan oleh ekspor jasa yang masih tetap tumbuh tinggi terutama bersumber dari peningkatan kunjungan



Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah

Grafik 8.4 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2024

wisman di DKI Jakarta, baik untuk tujuan *leisure* maupun bisnis sejalan dengan berlangsungnya berbagai kegiatan MICE dan *event* (musik dan olahraga) internasional di 2024.

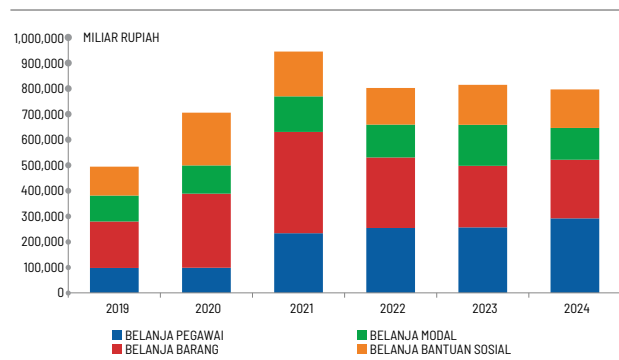
Kinerja impor DKI Jakarta pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh melambat yang terutama disebabkan oleh tertahannya kinerja investasi dan ekspor sehingga menahan impor barang modal dan bahan baku. Sementara itu, impor barang konsumsi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan permintaan domestik yang masih tetap kuat.

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 masih akan ditopang oleh kinerja lapangan usaha utama seperti LU Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Infokom.

Pada 2024, LU perdagangan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan gaji ASN pada 2024. Kondisi ini juga terindikasi dari proyeksi penjualan mobil Gaikindo pada 2024 yang juga diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta, termasuk MICE dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu 2024.

Dari sisi LU Industri Pengolahan, kinerja industri pengolahan pada 2024 diperkirakan tumbuh meningkat yang terutama didorong untuk pemenuhan permintaan domestik. Beberapa jenis industri yang diperkirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri makan dan minum, industri tekstil, dan industri kimia. Di sisi lain, kinerja industri pengolahan yang lebih baik diperkirakan akan tertahan sejalan dengan penurunan kinerja industri terutama industri otomotif sejalan dengan penurunan permintaan untuk ekspor.

LU Konstruksi pada 2024 diperkirakan akan tumbuh sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tertahannya LU konstruksi terutama disebabkan oleh penurunan pembangunan konstruksi dari sisi swasta yang dipengaruhi oleh *wait and see* pada periode pemilu. Di sisi lain, masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis



Sumber: DJPB Provinsi DKI Jakarta

Grafik 8.5 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2024

Pemerintah di DKI Jakarta diperkirakan akan mendorong kinerja LU konstruksi lebih baik. Terdapat proyek-proyek *multiyears* lainnya yang masih berjalan meliputi NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta serta kawasan TOD. Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan jaringan jalan tol JORR 2 yang ditargetkan selesai pada kuartal II tahun 2024 dan akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di wilayah Jabodetabek.

Selain LU utama tersebut, LU Infokom juga diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif dan lebih tinggi dibandingkan kinerja di tahun sebelumnya didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di berbagai kanal (bioskop, dan beberapa aplikasi *mobile streaming*) sehingga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan LU Infokom. Selain itu, meningkatnya penggunaan paket data pada periode pemilu juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan LU infokom. Pertumbuhan kinerja LU Infokom juga didorong oleh meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. LU Transportasi dan Pergudangan juga diperkirakan tumbuh meningkat, didorong oleh kinerja transportasi logistik dalam mendukung kegiatan perdagangan *online* serta meningkatnya transportasi penumpang sejalan dengan mobilitas yang semakin meningkat di tengah melambatnya kinerja bongkar muat sejalan dengan perlambatan kinerja ekspor. Adapun lapangan usaha lainnya juga diperkirakan masih akan tetap tumbuh positif pada tahun 2024 seperti LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman seiring meningkatnya konsumsi masyarakat serta pelaksanaan *event* dan MICE skala internasional, LU Jasa Perusahaan seiring dengan pelaksanaan berbagai *event* sehingga meningkatkan kinerja *event organizer*/EO, LU Jasa Keuangan seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan masih tetap kuat terutama dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit, dan LU lainnya.

Prospek Inflasi Jakarta

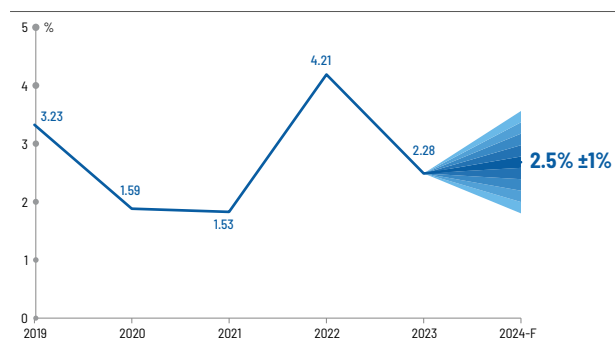
Pada 2024, inflasi Jakarta diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy) (Grafik 8.6). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya *el-nino* pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui GNPIP.

Terkendalinya laju inflasi di DKI Jakarta pada 2024 tidak terlepas dari dukungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta untuk menjaga kestabilan inflasi melalui 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain berupa pasar murah dan program pangan bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan talkshow untuk menjaga ekspektasi masyarakat serta melakukan *Capacity Building* TPID. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga pangan, Bank Indonesia bersama dengan TPIP dan TPID Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten melaksanakan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilakukan melalui Operasi Pasar, hilirisasi pangan dan diversifikasi produk olahan, penyaluran alsintan dan saprodi untuk peningkatan produksi pangan, fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur digitalisasi informasi pangan, dan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui *High Level Meeting* TPID.

Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko yang muncul pada 2024 yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi global, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, serta berlanjutnya kenaikan suku bunga bank sentral negara-negara di dunia memberikan potensi risiko menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024. Di samping itu, dari sisi domestik, juga terdapat berbagai tantangan yang dapat berdampak terhadap perekonomian Jakarta dan perlu untuk diwaspadai, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural bersumber dari daya dukung Jakarta seperti ketersediaan lahan, tingkat upah minimum, ketersediaan air yang semakin terbatas, serta masalah struktural lainnya seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, tantangan yang bersifat siklikal, utamanya bersumber dari faktor eksternal terkait meluasnya ketegangan geopolitik.

Oleh karena itu, untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah masih adanya berbagai tantangan dan risiko,



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 8.6 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2024

penguatan peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional penting untuk dilakukan antara lain melalui: (i) optimalisasi sektor ekonomi utama, termasuk mendorong hilirisasi; (ii) menggali sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru; serta (iii) pengesahan Undang-Undang Jakarta yang mendukung penguatan posisi Jakarta sebagai kota global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendorong penguatan berbagai dimensi kota global Jakarta, melalui antara lain penyusunan asesmen yang komprehensif, melakukan policy discussion yang bersifat pentahelix, serta mendorong investasi melalui penguatan kolaborasi IRU-RIRU-GIRU dan Komite Investasi Jakarta.

Sementara itu terkait inflasi, inflasi berpotensi kembali meningkat apabila harga komoditas pangan dan energi global kembali meningkat dan tidak dapat diantisipasi dengan baik. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini yaitu melalui penambahan anggaran subsidi *Public Service Obligation* (PSO) untuk Transjakarta dan angkutan laut, peningkatan anggaran pangan bersubsidi, dan penyaluran berbagai bantuan sosial perlu untuk dilanjutkan dalam rangka meredam kenaikan inflasi ke depan. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi melalui TPID dan TPIP akan terus diperkuat, melalui penguatan program GNPIP seperti perluasan Kerjasama Antardaerah, *Digital Urban Farming*, dan kampanye bijak berkonsumsi untuk memastikan inflasi akan tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan sinergi TPID dalam pengendalian inflasi juga akan dilakukan termasuk dengan daerah sekitarnya terutama Bodetabek.

Di samping itu, penguatan ekosistem digital juga perlu untuk terus didorong yang tidak hanya terkait dengan transaksi Pemerintah Daerah, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi bantuan sosial namun juga menyasar pada sektor ekonomi potensial seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pengembangan UMKM juga akan terus didorong dan diarahkan untuk menjadi pemasok sektor-sektor ekonomi yang produktif seperti industri dan pariwisata melalui pengembangan kapasitas dan pembiayaan. Di sisi lain, dalam rangka upaya stabilisasi harga, UMKM dapat dikembangkan dengan berfokus untuk mendukung kerja sama antar daerah dalam rangka menjaga pasokan bahan pangan. Inovasi juga perlu diperkuat dalam mengakselerasi perkembangan digitalisasi UMKM melalui program pengembangan UMKM digital. Lebih lanjut, inovasi kebijakan dan program juga diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi dan keuangan hijau, baik untuk mewujudkan ekonomi nasional khususnya Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 8.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2024

JENIS RISIKO	JALUR TRANSMISI	PROBABILITAS	KETERAMGAM
Pertumbuhan ekonomi			
Berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral di seluruh dunia	Menahan kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi	Low	Menahan pertumbuhan ekonomi
Perlambatan ekonomi yang lebih dalam pada negara tujuan ekspor dan impor	Menahan kinerja konsumsi RT, ekspor dan investasi	Moderat	Menahan pertumbuhan ekonomi
Konflik antar negara terus berlanjut/tensi geopolitik terus meningkat	Menahan kinerja ekspor dan impor	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Kondisi politik menjelang pemilu tidak kondusif	Menahan kinerja investasi	High	Menahan pertumbuhan ekonomi
Inflasi			
Kembali meningkatnya harga emas	Kenaikan inflasi inti	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Kembali meningkatnya harga minyak dunia sejalan dengan tensi geopolitik yang masih berlanjut	Kenaikan harga energi	Moderat	Meningkatkan tekanan inflasi
Realisasi kebijakan Pemerintah: kenaikan tarif air PAM, kenaikan tarif jalan tol	Kenaikan tarif air PAM, tarif jalan tol, tarif angkutan, tarif sewa rumah dan kontrak rumah	High	Meningkatkan tekanan inflasi
Bergesernya musim tanam dan panen pasca berlangsungnya el-nino sehingga akan mempengaruhi produksi pangan	Kenaikan harga bahan pangan strategis khususnya komoditas beras	High	Meningkatkan tekanan inflasi
Bergesernya musim tanam dan panen pasca berlangsungnya el-nino sehingga akan mempengaruhi produksi pangan	Kenaikan harga bahan pangan strategis khususnya komoditas beras	High	Meningkatkan tekanan inflasi



Tim Penyusun

PENGARAH

Arlyana Abubakar

PENANGGUNG JAWAB

Sahminan

KOORDINATOR PENYUSUN

Muhamad Shiroth

TIM PENULIS

Reska Prasetya

Dewa Ayu Komang Bintari Dewi

Sandra Firda Qonita

Andi Nahla Malika Nurilah

Binar Tyas Aini

Alhamdi Alfi Fajri

Chendy Dea Andriany

Fathya Annasya

Fadhlan Ihsanudin,

Dhia Atika Anggraini

KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta – 10410

No. Telp. 62-21-35110321





**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42
Jakarta - 10410



SCAN HERE

Google



LPP BI DKI JAKARTA



Ebook dapat diunduh melalui menu pencarian
google atau pindai QR code atau tautan berikut:

bit.ly/LPP-DKI

